



**Pemerintah
Kabupaten Sambas**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

RPJMD TAHUN 2025 2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



PLBN ARUK

KABUPATEN ENGGAYANG



SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS
dan
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
7. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
8. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.
- (2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV : Program Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (3/2025)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, memuat arah dan kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran mulai Tahun 2026-2030. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengendalian dan evaluasi” merupakan pengendalian dan evaluasi khusus pada proses dalam rangka menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 83

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4.1 Maksud	I-10
1.4.2 Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Penulisan	I-11
 BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	 II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-4
2.1.1.2.1 Potensi Tanaman Pangan dan Holtikultura.....	II-5
2.1.1.2.2 Potensi Perkebunan.....	II-6
2.1.1.2.3 Potensi Perikanan.....	II-7
2.1.1.2.4 Potensi Peternakan.....	II-9
2.1.1.2.5 Potensi Kehutanan	II-10
2.1.1.2.6 Potensi Pertambangan	II-12
2.1.1.2.7 Potensi Pariwisata	II-15
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-16
2.1.1.3.1 Daya Dukung Pangan.....	II-16
2.1.1.3.2 Daya Dukung Air.....	II-18
2.1.1.3.3 Daya Dukung Biodiversitas	II-20
2.1.1.3.4 Daya Dukung Pengendalian Bencana	II-22
2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	II-25
2.1.1.4.1 Ketahanan Energi.....	II-25
2.1.1.4.2 Ketahanan Air	II-28
2.1.1.4.3 Kemandirian Pangan	II-29
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-32
2.1.1.6 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	II-33
2.1.1.6.1 Indeks Resiko Bencana (IRB)	II-35

2.1.1.7	Demografi.....	II-36
2.1.1.7.1	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	II-37
2.1.1.7.2	Komposisi Umur Penduduk.....	II-39
2.1.1.7.3	Kepadatan dan Sebaran Penduduk	II-41
2.1.1.7.4	Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029.....	II-42
2.1.1.7.5	Jumlah dan Kepadatan Penduduk	II-43
2.1.1.7.6	Penduduk Usia Produktif.....	II-43
2.1.1.7.7	Penduduk Usia Lanjut.....	II-47
2.1.1.7.8	Proyeksi Penduduk Per Kecamatan	II-48
2.1.1.7.9	Rancangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas	II-50
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-52
2.1.2.1	Kesejahteraan Ekonomi.....	II-52
2.1.2.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	II-53
2.1.2.1.2	Tingkat Kemiskinan.....	II-57
2.1.2.1.3	PDRB Per Kapita	II-58
2.1.2.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-58
2.1.2.1.5	Indeks Gini.....	II-60
2.1.2.1.6	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-61
2.1.2.2	Kesehatan Untuk Semua.....	II-63
2.1.2.2.1	Usia Harapan Hidup.....	II-63
2.1.2.2.2	Indeks Keluarga Sehat.....	II-64
2.1.2.2.3	Prevalensi Stunting	II-66
2.1.2.3	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-69
2.1.2.3.1	Rata-Rata Lama Sekolah	II-69
2.1.2.3.2	Harapan Lama Sekolah	II-70
2.1.2.3.3	Angka Literasi/Numerasi.....	II-70
2.1.2.3.4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....	II-72
2.1.2.3.5	Indeks Literasi Digital	II-73
2.1.2.4	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-74
2.1.2.4.1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-74
2.1.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-75
2.1.2.5.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-75

2.1.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	II-77
2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-84
2.1.2.6.1 Indeks Perlindungan Anak.....	II-84
2.1.2.6.2 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga.....	II-85
2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender.....	II-87
2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender.....	II-88
2.1.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda.....	II-89
2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-92
2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-93
2.1.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-94
2.1.3.1.2 Angka Ketergantungan	II-96
2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-99
2.1.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan..	II-99
2.1.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum.....	II-100
2.1.3.2.3 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif....	II-102
2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan	II-103
2.1.3.2.5 Indeks Inovasi Daerah	II-105
2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-106
2.1.3.3.1 Indeks Ekonomi Hijau	II-107
2.1.3.3.2 Indeks Ekonomi Biru Indonesia....	II-108
2.1.3.3.3 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	II-109
2.1.3.4 Transformasi Digital	II-110
2.1.3.4.1 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi	II-110
2.1.3.4.2 Komunikasi	II-111
2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	II-117
2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto .	II-118
2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa	II-119
2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-120
2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap.....	II-120
2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-123
2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri	II-124
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-125

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-126
2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi	II-127
2.1.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-129
2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-130
2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum	II-131
2.1.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-132
2.1.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik	II-133
2.1.4.1.4 Indeks Integritas Nasional	II-134
2.1.4.1.5 Indeks Reformasi Birokrasi.....	II-135
2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-137
2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda	II-138
2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM	II-140
2.1.4.2.3 Indeks Demokrasi Indonesia.....	II-141
2.1.4.2.4 Indeks Rasa Aman.....	II-145
2.1.4.2.5 Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	II-151
2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-152
2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah	II-154
2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah .	II-155
2.1.4.4.1 Kinerja Kunci (IKK)	II-155
2.1.5 Gambaran Keuangan Daerah.....	II-162
2.1.5.1 Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir	II-164
2.1.5.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	II-164
2.1.5.1.2 Neraca Daerah.....	II-167
2.1.5.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	II-172
2.1.5.2.1 Proporsi Anggaran Daerah.....	II-173
2.1.5.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah	II-173
2.1.5.3 Kerangka Pendanaan	II-172
2.1.5.3.1 Analisis Pengeluaran Periodik Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama....	II-172
2.1.5.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan	II-174
2.1.6 Permasalahan dan Isu Strategis	II-186
2.1.6.1 Telaah Kebijakan Internasional (SDG's)	II-188
2.1.6.2 Telaah RPJMN 2025-2029	II-192

2.1.6.3	Telaah Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2025.....	II-195
2.1.6.4	Telaah Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2025.....	II-199
2.1.6.5	Telaah RPJPD Kabupaten Sambas 2025-2045	II-199
2.1.6.6	Telaah RTRW Kabupaten Sambas 2015-2035	II-199
2.1.6.7	Telaah KLHS Kabupaten Sambas 2025-2035	II-202
2.1.6.8	Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal ..	II-207
2.1.6.9	Permasalahan Daerah	II-212
	2.1.6.9.1 Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-212
	2.1.6.9.2 Urusan Pemerintah Tidak Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-219
	2.1.6.9.3 Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-242
	2.1.6.9.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	II-249
2.1.6.10	Isu Strategis	II-255

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH	III-1
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.1.1 Visi dan Misi	III-1
3.1.1.1 Visi.....	III-1
3.1.1.2 Misi	III-4
3.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	III-7
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-17
3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan ..	III-17
3.2.1.1 Arah Kebijakan Periode 2026	III-23
3.2.1.2 Arah Kebijakan Periode 2027	III-23
3.2.1.3 Arah Kebijakan Periode 2028	III-24
3.2.1.4 Arah Kebijakan Periode 2029	III-24
3.2.1.5 Arah Kebijakan Periode 2030	III-24
3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	III-25
3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas	III-53
3.2.3.1 Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Kabupaten Sambas	III-58
3.2.4 Program Unggulan Pemerintah Daerah	III-62
3.2.4.1 <i>BENTUK IMAN</i> (Pembentukan Insan Madani)...	III-62
3.2.4.2 Pelayanan DIKTAN(Pendidikan dan Kesehatan.	III-62

3.2.4.3 Pemajuan Kebudayaan	III-63
3.2.4.4 Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM	III-63
3.2.4.5 Pemerintahan Digital	III-65
3.2.4.6 Membangun Desa Menata Kota	III-65
3.2.4.7 Pembangunan Kolaboratif	III-65
3.2.4.8 Pembangunan Perbatasan	III-66
3.2.4.9 Green Growth	III-67
 BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH	 IV-1
4.1 Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah	IV-50
4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah	IV-50
4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah ..	IV-52
 BAB V PENUTUP	 V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan Daerah dilakukan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), maka pemerintah Kabupaten Sambas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan pertama dari RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 dengan visi jangka panjang **“Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dengan demikian, RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sambas merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan H. Satono, S.Sos.I.,M.H. dan H. Heroaldi Alwi, ST.,MT kepada publik sebelum pemilihan bupati.

RPJMD Kabupaten Sambas ditetapkan dengan maksud menjadi pedoman untuk seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan daerah. Di samping itu, dokumen RPJMD juga harus mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam agenda pembangunan daerah, dengan mengarusutamakan pencapaian TPB/SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator terukur, serta sumber pembiayaannya. Langkah ini sejalan dengan komitmen dalam Perpres Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen RPJMD Kabupaten Sambas diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menjalankan transformasi peradaban menuju kehidupan yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan.

Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas akan lebih terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN tahun 2025-2029. Penyusunan semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sambas yang “BERKAH BERKEMAJUAN”**.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini didasarkan pada perangkat hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 81)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 82).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

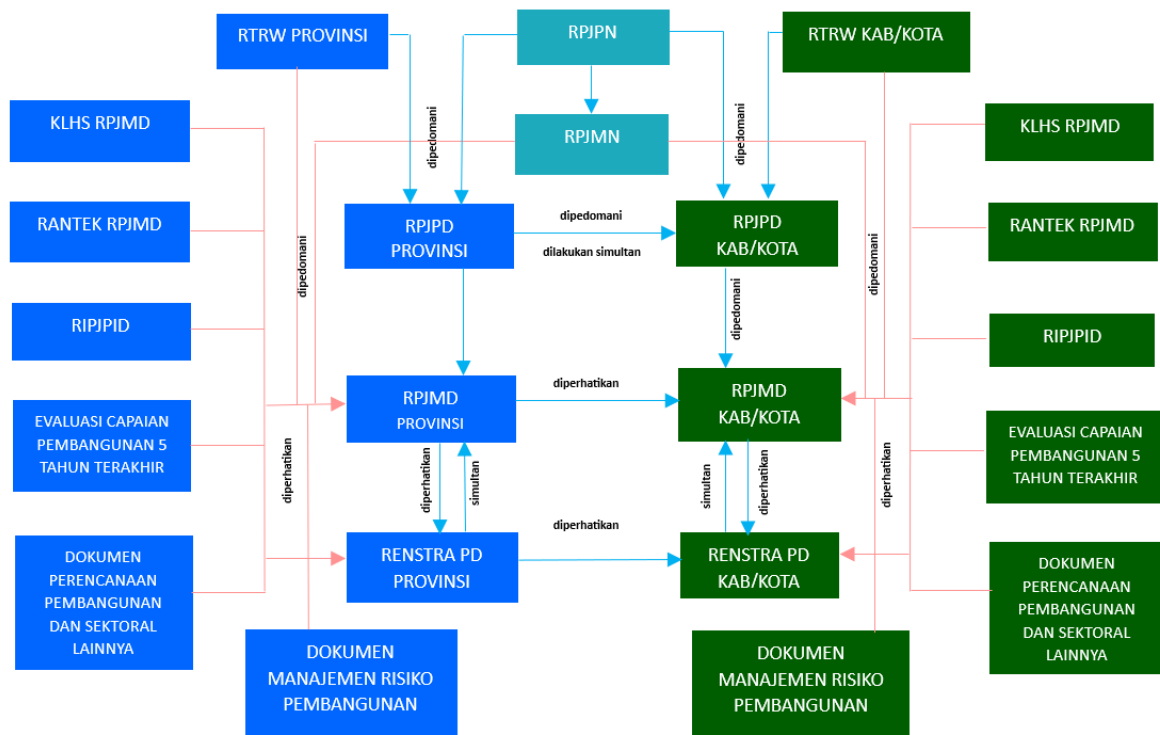
RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sambas, RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD pertama dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sambas masa bakti tahun 2025-2029, juga

berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045.

- b. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sambas, penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Sambas sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sambas.
- c. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sambas.
- d. RPJMD dan RKPD pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sambas yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD merupakan pokok bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sambas yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029 yaitu:

- Sebagai pedoman bagi seluruh jajaran aparaturnya pemerintah daerah dan DPRD, serta masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program kepala daerah selama lima tahun.
- Menyediakan dokumen RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam menentukan prioritas program lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam rencana pembangunan tahunan daerah.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, di antaranya:

- a. menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil Bupati Sambas ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
- b. menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Sambas, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber dana lainnya;
- c. mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar OPD, maupun antar Pemerintah Kabupaten Sambas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
- d. menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- e. menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

(RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang; Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan Dokumen.
- II. Gambaran Umum Daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan

dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, terkait pertama, Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah. Kemudian, Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029. Terakhir, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah yang memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

- III. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah. Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya. Kemudian, Subbab Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut.
- IV. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Subbab Program Perangkat Daerah memuat daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dan Indikator program, target, dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian pada Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyajikan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan daerah (IKD).
- V. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sambas agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas setiap tahunnya.

BAB II

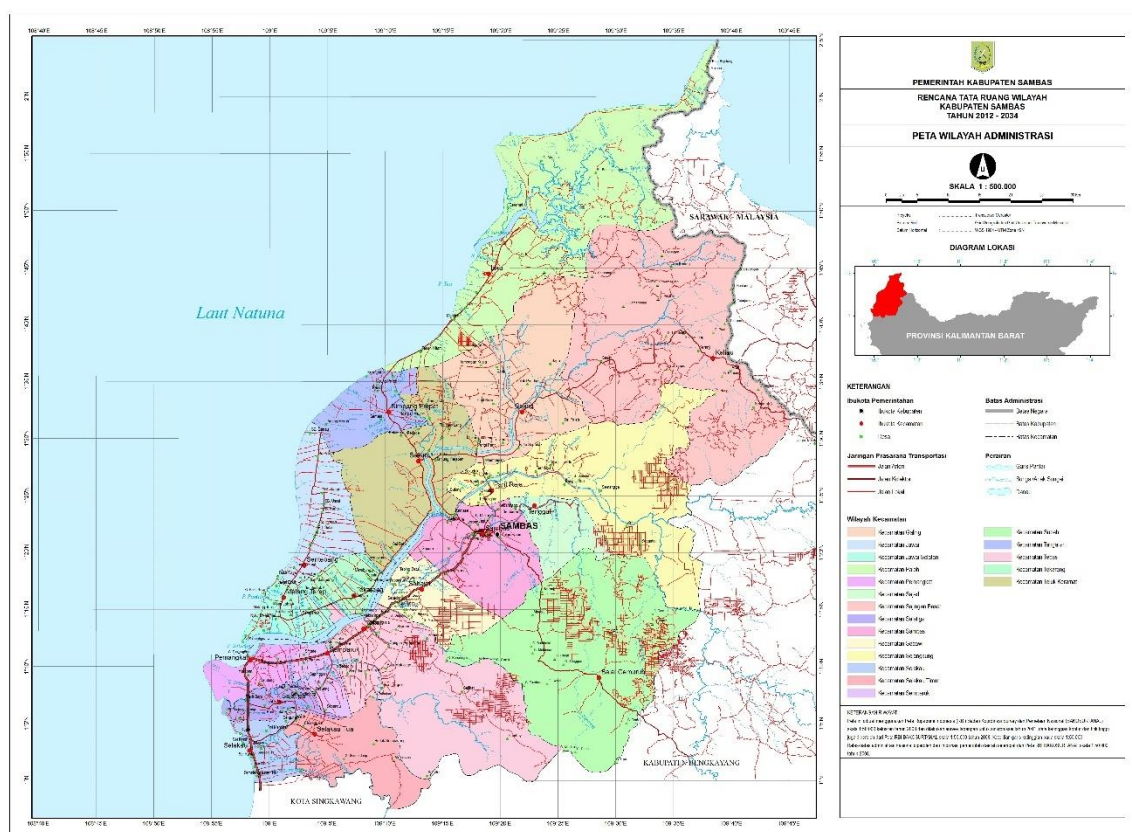
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat, secara astronomis berada di antara 2°08' LU dan 0°33' LU serta 108°39' BT dan 110°04'7 BT. Luas Kabupaten Sambas adalah 5.938,48 km². Luas wilayah Kabupaten Sambas sekitar 4,04% dari total luas Kalimantan Barat yang mencapai 147.037,037 km². Secara geografis, Kabupaten Sambas berbatasan dengan Serawak (Malaysia Timur) dan Laut Natuna di utara, Serawak (Malaysia Timur) dan Kabupaten Bengkayang di timur, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang di selatan, serta Laut Natuna di barat.



Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Sambas

Jika dibagi ke dalam luas masing-masing kecamatan, kecamatan terluas adalah Kecamatan Sajingan Besar dengan luas 1.391,20 km² atau 21,75%, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Salatiga dengan luas sebesar 82,75 km² atau 1,29% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1.
Luas Wilayah, dan Persentase, berdasarkan Kecamatan
di Kabupaten Sambas Tahun 2024

Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)	%
Selakau	Selakau	96,05	1,62
Selakau Timur	Selakau Tua	186,10	3,13
Pemangkat	Pemangkat Kota	97,05	1,63
Semparuk	Semparuk	71,97	1,21
Salatiga	Salatiga	66,82	1,13
Tebas	Tebas	636,85	10,72
Tekarang	Tekarang	68,71	1,16
Sambas	Sambas	220,03	3,71
Subah	Balai Gemuruh	752,74	12,68
Sebawi	Sebawi	100,89	1,70
Sajad	Tengguli	116,58	1,96
Jawai	Sentebang	231,25	3,89
Jawai Selatan	Matang Terap	107,70	1,81
Teluk Keramat	Sekura	403,96	6,80
Galing	Galing	420,99	7,09
Tangaran	Simpang Empat	138,19	2,33
Sejangkung	Sejangkung	528,23	8,90
Sajingan Besar	Kaliau'	1037,06	17,46
Paloh	Liku	657,31	11,07
Kabupaten Sambas		5.938,48	100

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Tabel 2.1 di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Sajingan Besar merupakan wilayah terluas di Kabupaten Sambas dengan proporsi 17,46% dari total luas kabupaten, disusul oleh Subah (12,68%), Paloh (11,07%), dan Tebas (10,72%). Sebaliknya, wilayah terkecil adalah Salatiga (1,13%) dan Semparuk (1,21%). Komposisi ini mencerminkan adanya ketimpangan distribusi wilayah antar kecamatan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan spasial dan pembangunan yang merata.

Secara strategis, posisi geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia Timur dan Laut Natuna memberikan nilai tambah sebagai kawasan perbatasan dengan potensi besar dalam perdagangan lintas negara, pertahanan wilayah, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, kedekatannya dengan pusat pertumbuhan lain seperti Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang memperkuat peluang integrasi infrastruktur dan ekonomi regional. Oleh karena itu, Kabupaten Sambas memiliki posisi yang sangat penting sebagai pintu gerbang ekonomi perbatasan Kalimantan Barat yang harus dioptimalkan secara terintegrasi.

Kabupaten Sambas memiliki peran strategis yang signifikan dalam konteks regional dan nasional, didukung oleh letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia Timur (Sarawak), serta memiliki garis pantai di Laut Natuna. Posisi ini menjadikan Sambas sebagai pintu gerbang utama bagi perdagangan lintas negara, pertahanan wilayah perbatasan, serta potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Laut Natuna. Keunggulan ini membuka peluang besar untuk mendorong integrasi ekonomi antar wilayah sekaligus memperkuat ketahanan nasional di kawasan perbatasan.

Selain itu, kedekatannya dengan Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang di selatan serta timur memberikan keuntungan dalam membangun jejaring infrastruktur dan ekonomi antar wilayah di Kalimantan Barat. Dengan demikian, Kabupaten Sambas tidak hanya berfungsi sebagai zona perbatasan, tetapi juga berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan melalui perdagangan, pariwisata, dan sektor maritim.

2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sambas terletak di bagian utara Kalimantan Barat, memiliki kekayaan sumber daya alam yang beragam dan potensial untuk dikembangkan. Dengan luas wilayah mencapai 5.938,48 km², karakter geografis Kabupaten Sambas meliputi kawasan pesisir, dataran rendah, hingga daerah berbukit yang memberikan kontribusi besar terhadap variasi sumber daya alam yang tersedia. Kondisi ini memungkinkan Kabupaten Sambas untuk mengembangkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kehutanan perkebunan, perikanan, pariwisata hingga sektor pertambangan. Posisi strategis yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Serawak, Malaysia, juga menambah nilai ekonomis sumber daya alam yang ada melalui potensi perdagangan lintas batas.

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi daerah, dengan komoditas utama seperti padi, kelapa, karet, dan lada yang tumbuh subur di Kabupaten Sambas. Selain itu, perikanan laut dan perikanan darat di kabupaten ini juga menunjukkan potensi yang besar, didukung oleh garis pantai yang panjang dan sumber daya perairan yang melimpah. Potensi kelautan tidak hanya terbatas pada sektor perikanan, tetapi juga mencakup peluang pengembangan ekowisata bahari dan industri hasil laut yang berorientasi ekspor. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor-sektor ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping sektor agraris dan kelautan, Kabupaten Sambas juga memiliki potensi sumber daya mineral seperti bauksit, pasir kuarsa, dan emas, meskipun pemanfaatannya masih terbatas. Pengelolaan sumber daya mineral ini membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan untuk menghindari degradasi lingkungan yang dapat merusak ekosistem setempat. Keanekaragaman potensi sumber daya alam di Kabupaten Sambas mencerminkan peluang besar bagi pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat serta partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Sambas berpotensi menjadi salah satu daerah terdepan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan di Kalimantan Barat.

2.1.1.2.1. Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Sambas cukup besar. Komoditas utama tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sambas meliputi padi, jagung, kedelai, dan jeruk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 2.
Luas Panen, Produksi, Produktivitas Padi, dan Produksi Jagung, Kedelai, dan Jeruk Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen padi (ha)	57.332,56	56.815,87	63.168,71	58.031,005	64.122,36
2	Produksi padi (ton)	150.222,44	154.301,00	176.541,14	177.411,00	195.232,60
3	Produktivitas padi (kw/ha)	26,2	27,2	27,9	30,57	30,44
4	Produksi Kedelai (ton)	25,00	220,83	48,26	14,60	N/A
5	Produksi Jagung (ton)	8.386,40	4.042,59	2.678,77	743,90	N/A
6	Produksi Jeruk Siam/Keprook (ton)	115.274,7	516.907	103.586,4	88.119,0	90.040,0

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Potensi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sambas menunjukkan perkembangan yang beragam. Komoditas padi menempati posisi strategis sebagai andalan sektor pertanian daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan baik pada *produktivitas* (dari 26,2 kw/ha menjadi 30,44 kw/ha), *luas panen* (dari 57.332,56 ha menjadi 64.122,36 ha), maupun *produksi* (dari 150.222,44 ton menjadi 195.232,60 ton) dalam rentang waktu lima tahun. Capaian ini menunjukkan adanya perbaikan teknologi budidaya, sarana produksi pertanian, serta efektivitas program pertanian yang dijalankan pemerintah daerah.

Sebaliknya, komoditas kedelai dan jagung mengalami penurunan tajam dalam hal produksi. Produksi kedelai menurun dari 25 ton (2020) menjadi

hanya 14,6 ton (2023), sedangkan produksi jagung menurun drastis dari 8.386,40 ton (2020) menjadi 743,90 ton (2023). Penurunan ini mengindikasikan lemahnya minat budidaya, keterbatasan lahan atau sarana produksi, serta kurangnya intervensi kebijakan khusus terhadap tanaman palawija. Sementara itu, jeruk siam/keprok sebagai komoditas hortikultura unggulan menunjukkan tren menurun, dari produksi sebesar 115.274,7 ton pada 2020 menjadi 90.040 ton pada 2024. Penurunan ini menjadi catatan penting, mengingat jeruk merupakan komoditas khas Sambas yang memiliki nilai ekonomi dan branding daerah.

Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan dan diversifikasi pertanian yang lebih seimbang, tidak hanya berfokus pada komoditas padi, tetapi juga membangun kembali daya saing tanaman palawija dan hortikultura melalui inovasi budidaya, akses pembiayaan, serta jaminan pasar agar ketahanan pangan daerah menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan.

2.1.1.2.2. Potensi Perkebunan

Potensi perkebunan di Kabupaten Sambas cukup besar. Komoditas utama perkebunan di Kabupaten Sambas meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan kopi. Luas kebun sawit terus meningkat, luas kebun sawit pada tahun 2020 seluas 94.507 Ha dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 142.795 Ha. Seiring dengan meningkatnya luas kebun sawit, tingkat produksi kelapa sawit juga meningkat, pada tahun 2020 produksi kelapa sawit sebesar 256.808,00 ton, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 378.188,00 ton. Selain kelapa sawit, komoditas karet juga merupakan komoditas penting di Kabupaten Sambas. Luas perkebunan karet di Kabupaten Sambas pada tahun 2020 seluas 54.233,00 Ha dan pada tahun 2024 meningkat luasnya menjadi 54.324,00 Ha, seiring dengan meningkatnya luas tanaman karet di Kabupaten Sambas, juga terjadi peningkatan produksinya. Tahun 2020 produksi sebesar 17.711 ton dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 18.128 ton. Luas dan produksi tanaman perkebunan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 3.
Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	Produksi (ton)	256.808,00	259.988,00	271.746,00	378.188,00	378.188
		Luas Areal tanam (ha)	94.507	95.873	129.539	142.795	142.795
2	Kelapa Dalam	Produksi (ton)	13.596,00	13.596,00	13.912,00	13.918,00	13.966
		Luas Areal tanam (ha)	22.484	22.484	22.755	22.804	22.804
3	Karet	Produksi (ton)	17.711	17.861	18.106	18.128	18.128
		Luas Areal tanam (ha)	54.233	54.226	54.338	54.324	54.324
4	Kopi	Produksi (ton)	800	800	887	889	889
		Luas Areal tanam (ha)	2.070	2.070	1.942	1.942	1.942

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, Kelapa Sawit menunjukkan pertumbuhan paling menonjol dengan peningkatan produksi dari 256.808 ton menjadi 378.188 ton, seiring dengan perluasan areal tanam dari 94.507 hektar menjadi 142.795 hektar. Lonjakan ini terutama terjadi antara 2022 dan 2023, meskipun sempat disertai penurunan produktivitas sebelum kembali membaik. Kelapa Dalam dan Karet mengalami perkembangan yang cenderung stagnan, dengan produksi dan luas tanam yang relatif tetap serta produktivitas yang tidak menunjukkan perubahan berarti. Sebaliknya, Kopi mengalami peningkatan efisiensi meskipun luas tanam menurun, di mana produktivitas naik dari 0,39 ton/ha menjadi 0,46 ton/ha, mencerminkan perbaikan dalam metode budidaya atau pengelolaan lahan. Secara umum, kelapa sawit menjadi komoditas paling berkembang, sementara kopi menunjukkan peningkatan kualitas produksi meskipun dalam skala terbatas.

2.1.1.2.3. Potensi Perikanan

Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sambas berasal dari perikanan laut, perairan umum dan budidaya. Produksi perikanan di Kabupaten Sambas cenderung fluktuatif. Total produksi perikanan pada

tahun 2020 yaitu 19.401,13 ton, setelah lima tahun yaitu pada tahun 2024 naik menjadi 53.113,49. ton Selengkapnya mengenai data produksi perikanan di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 4.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (Ton)

Komoditi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Laut	15.145,25	21.436,26	39.295,91	36.325,95	49.258,38
Jumlah Produksi Perikanan Umum	327,88	400,4	604,52	626,33	636,19
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.928,00	1.426,09	1.986,97	2.450,12	3.218,92
Total	19.401,13	23.262,75	1.887,40	39.401,45	53.113,49

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Produksi total perikanan Kabupaten Sambas menunjukkan peningkatan signifikan dalam kurun waktu lima tahun. Dari 19.401,13 ton pada tahun 2020, angka ini naik menjadi 53.113,49 ton pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 173%. Kenaikan ini menandakan bahwa sektor perikanan secara umum mengalami penguatan, baik dari sisi kapasitas produksi maupun kemungkinan dukungan kebijakan yang lebih efektif. Komponen terbesar berasal dari perikanan laut, yang berkontribusi sebesar 76%–93% dari total produksi per tahun. Produksi perikanan laut meningkat dari 15.145,25 ton (2020) menjadi 49.258,38 ton (2024). Lonjakan tajam terjadi antara tahun 2021 ke 2022 (naik sekitar 83%) dan kembali meningkat drastis dari 2023 ke 2024 (naik sekitar 35%). Peningkatan ini kemungkinan didorong oleh perbaikan infrastruktur pelabuhan perikanan, perluasan area tangkapan, serta penguatan kelembagaan nelayan.

Produksi dari perairan umum (sungai, danau, dan rawa) juga meningkat secara stabil namun dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total produksi. Dari 327,88 ton (2020) menjadi 636,19 ton (2024), atau meningkat hampir 94%. Meskipun volumenya kecil, tren ini menunjukkan adanya potensi pengelolaan sumber daya perairan darat yang cukup baik. Produksi perikanan budidaya sempat mengalami penurunan tajam dari

3.928,00 ton (2020) menjadi hanya 1.426,09 ton (2021). Namun, dalam tiga tahun terakhir, produksi menunjukkan pemulihan bertahap hingga mencapai 3.218,92 ton pada 2024. Pemulihan ini mengindikasikan adanya upaya revitalisasi sektor budidaya, meskipun belum sepenuhnya pulih ke angka tahun 2020. Kinerja ini perlu diperkuat, mengingat budidaya merupakan sektor berkelanjutan yang lebih dapat dikontrol dibandingkan perikanan tangkap.

2.1.1.2.4. Potensi Peternakan

Sub sektor peternakan merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas. Populasi sapi di Kabupaten Sambas tahun 2020 sebanyak 11.328 ekor, mengalami penurunan populasi hingga tahun 2024 berjumlah 7.306 ekor. Ayam ras petelur cenderung populasinya meningkat, pada tahun 2020 populasinya sebesar 20.952 ekor dan pada tahun 2024 naik menjadi 31.500 ekor. Selengkapnya mengenai data populasi ternak dan unggas di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 5.
Populasi Hewan Ternak dan Unggas di Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

No.	Populasi Hewan (ekor)	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi Potong	11.328	11.067	7.980	8.011	7.306
3	Kambing	23.367	22.897	21.818	20.298	20.131
4	Babi	6.676	6.530	4.317	5.954	5.374
5	Ayam Buras	448.905	447.692	447.812	448.352	454.492
6	Ayam Ras Petelur	20.952	19.675	20.000	20.000	31.500
7	Ayam Ras Pedaging	2.826.891	3.075.210	2.525.151	3.678.887	2.704.291
8	Itik	257.975	247.651	244.123	244.920	226.299

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Subsektor peternakan di Kabupaten Sambas selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang beragam. Populasi ternak ruminansia

seperti sapi dan kambing mengalami penurunan yang cukup signifikan. Populasi sapi menurun dari 11.328 ekor pada tahun 2020 menjadi 7.306 ekor pada tahun 2024, sedangkan populasi kambing juga menurun dari 23.367 ekor menjadi 20.131 ekor pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pemeliharaan dan pengembangan ternak besar, yang kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan pakan, rendahnya regenerasi peternak, serta belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan. Sementara itu, populasi babi dan itik sebagai ternak alternatif juga mengalami tren penurunan yang konsisten, yang mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk menjaga keberlanjutan budidaya ternak minor ini.

Di sisi lain, populasi unggas terutama ayam ras petelur mengalami peningkatan yang signifikan, dari 20.952 ekor pada tahun 2020 menjadi 31.500 ekor pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor agribisnis unggas mulai berkembang dan berpotensi menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan hewani. Namun, populasi ayam ras pedaging menunjukkan fluktuasi yang tajam, menandakan ketidakstabilan dalam aspek produksi atau permintaan pasar. Secara umum, perkembangan subsektor peternakan Kabupaten Sambas menuntut intervensi kebijakan yang terfokus, termasuk penyediaan pakan yang berkelanjutan, peningkatan akses pasar, pendampingan teknis kepada peternak, serta penguatan kelembagaan peternakan rakyat sebagai upaya mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2.1.1.2.5. Potensi Kehutanan

Kabupaten Sambas terletak di Provinsi Kalimantan Barat, memiliki potensi kehutanan yang sangat besar dan strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan luas wilayah hutan yang signifikan, kawasan ini menyimpan beragam jenis sumber daya hayati, termasuk kayu komersial, tanaman non-kayu seperti rotan dan damar, serta keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan di Kabupaten Sambas juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan cadangan air, serta menyerap karbon, yang menjadikannya aset penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Selain potensi ekologis, sektor kehutanan di Kabupaten Sambas juga memiliki peluang besar untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan hutan melalui skema pengelolaan hutan lestari, seperti hutan kemasyarakatan dan hutan adat, dapat menjadi sumber penghasilan alternatif yang ramah lingkungan. Dukungan terhadap industri kehutanan berbasis masyarakat, ekowisata, serta konservasi berbasis partisipasi lokal, berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi kehutanan di Kabupaten Sambas bisa menjadi pilar pembangunan daerah yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Luas total kawasan hutan di Kabupaten Sambas cenderung meningkat. Pada tahun 2020 luas kawasan hutan sebesar 128.318 ha dan pada tahun 2024 seluas 129.569 ha. Namun Kawasan Hutan Produksi cenderung menurun, tahun 2020 seluas 91.520 dan tahun 2024 turun menjadi 87.626 ha. Selengkapnya mengenai data Kawasan hutan di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 6.
Jenis dan luas Kawasan hutan di Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

Jenis Kawasan	2020	2021	2022	2023	2024
Hutan Lindung (ha)	25.616	25.616	25.418	25.616	25.760
Hutan Produksi Terbatas (ha)	11.182	11.182	11.182	11.182	11.191
Hutan Produksi (ha)	91.520	91.520	90.302	91.520	87.627
Taman Produksi Konversi (ribu ha)	6.827,00	4.908,00	N/A	4.898,75	4.992
Total	135.145	133.226	126.902	133.217	129.570

Sumber: BPS Provinsi Kalbar dan Sambas Dalam Angka Tahun 2025

Selama periode 2020–2024, luas total kawasan hutan di Kabupaten Sambas menunjukkan tren yang relatif stabil, bahkan sedikit meningkat dari 128.318 ha pada tahun 2020 menjadi 129.569 ha pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pelestarian lingkungan dan pengendalian deforestasi secara umum. Hutan lindung mengalami sedikit peningkatan dari 25.616 ha menjadi 25.760 ha, sementara hutan produksi terbatas tetap

konstan pada sekitar 11.182 ha, menandakan adanya upaya menjaga fungsi konservasi dan kawasan lindung yang penting dalam pengaturan iklim dan perlindungan biodiversitas. Namun demikian, terjadi penurunan yang mencolok pada luas hutan produksi, yaitu dari 91.520 ha (2020) menjadi 87.627 ha (2024), atau berkurang lebih dari 3.800 ha. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh konversi lahan untuk kepentingan lain seperti perkebunan atau permukiman, yang jika tidak dikendalikan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi ekonomi jangka panjang dari hasil hutan produksi. Sementara itu, data untuk Taman Produksi Konversi bersifat fluktuatif, dengan penurunan tajam pada tahun 2021 dan ketidakterdataan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan ketidakpastian dalam pengelolaan kawasan konversi atau masih lemahnya sistem pemantauan dan pelaporan data di lapangan.

2.1.1.2.6. Potensi Pertambangan

Kabupaten Sambas yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat, menyimpan kekayaan sumber daya alam mineral yang sangat potensial. Kondisi geologisnya yang khas dan strategis menjadikan daerah ini sebagai salah satu lumbung sumber daya pertambangan, baik mineral logam, non-logam, maupun energi.

Potensi mineral logam yang terdapat di Kabupaten Sambas meliputi emas, tembaga, timah, besi, titanium, dan bauksit. Sejumlah kecamatan seperti Kecamatan Selakau, Kecamatan Subah, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Sajingan Besar tercatat memiliki indikasi dan cadangan logam-logam berharga ini. Aktivitas penambangan emas, baik legal maupun ilegal (PETI) telah berlangsung di beberapa titik, dengan sisa cadangan emas aluvial yang masih cukup besar.

Tabel. 2.7
Kawasan Peruntukan pertambangan Kabupaten Sambas

No.	Jenis Kawasan Peruntukan	Kecamatan
1.	Wilayah Pencadangan Negara (batubara)	Paloh, Sajingan Besar, Galing
2.	Wilayah Pencadangan Negara (mineral logam)	Paloh
3.	Wilayah Usaha Pertambangan (batubara)	Paloh, Sajingan Besar, Galing

No.	Jenis Kawasan Peruntukan	Kecamatan
4.	Wilayah Usaha Pertambangan (mineral logam)	Paloh, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Sejangkung, Jawai, Jawai Selatan, Sambas, Subah, Sebawi, Tebas, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau, Selakau Timur
5.	Wilayah Usaha Pertambangan (mineral bukan logam dan batuan)	Sebawi, Salatiga, Selakau, Selakau Timur, Tebas, Sambas, Subah, Jawai, Jawai Selatan, Sejangkung, Galing, Tangaran, Teluk Keramat, Paloh, Sajingan Besar
6.	Wilayah Usaha Pertambangan (radioaktif)	Sajingan Besar, Sejangkung, Galing, Teluk Keramat, Sebawi, Tebas, Tekarang, Jawai, Jawai Selatan, Semparuk, Pemangkat, Salatiga, Selakau
7.	Wilayah Pertambangan Rakyat (mineral logam emas)	Subah, Sebawi, Tebas, Selakau Timur

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015

Kabupaten Sambas memiliki potensi pertambangan yang cukup besar dan tersebar di berbagai kecamatan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015, wilayah peruntukan pertambangan dibagi menjadi tujuh kategori utama berdasarkan jenis sumber daya tambang dan peruntukan lahannya. Pembagian ini bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan pertambangan agar berjalan secara legal, berkelanjutan, dan tidak merusak lingkungan.

Pertama, terdapat kawasan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang merupakan wilayah strategis untuk penyimpanan cadangan tambang nasional. WPN batubara tersebar di Kecamatan Paloh, Sajingan Besar, dan Galing, sedangkan WPN mineral logam hanya terdapat di Kecamatan Paloh. Kawasan ini ditetapkan secara eksklusif oleh negara untuk menjamin ketersediaan sumber daya tambang jangka panjang.

Kedua, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dibagi berdasarkan jenis komoditas tambang, yaitu batubara, mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan radioaktif. WUP batubara terdapat di kecamatan yang sama dengan WPN batubara, yaitu Paloh, Sajingan Besar, dan Galing. Sementara itu, WUP mineral logam memiliki cakupan wilayah yang jauh lebih luas,

meliputi 17 (tujuh belas) kecamatan, termasuk Paloh, Sambas, Sebawi, hingga Selakau Timur.

Ketiga, kawasan pertambangan yang termasuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif ditemukan di 13 (tiga belas) kecamatan, seperti Sajingan Besar, Sejangkung, dan Teluk Keramat. Meskipun eksplorasi bahan radioaktif memerlukan pengawasan yang sangat ketat karena potensi bahayanya terhadap lingkungan dan kesehatan, penetapan ini menunjukkan adanya indikasi potensi geologis yang unik di wilayah tersebut.

Keempat, terdapat juga Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat lokal yang melakukan penambangan mineral logam, terutama emas. WPR ini terdapat di Kecamatan Subah, Sebawi, Tebas, dan Selakau Timur. Penetapan WPR bertujuan untuk mendorong legalitas kegiatan tambang rakyat, mengurangi praktik penambangan tanpa izin (PETI), serta meningkatkan ekonomi masyarakat setempat melalui skema tambang berkelanjutan yang ramah lingkungan.

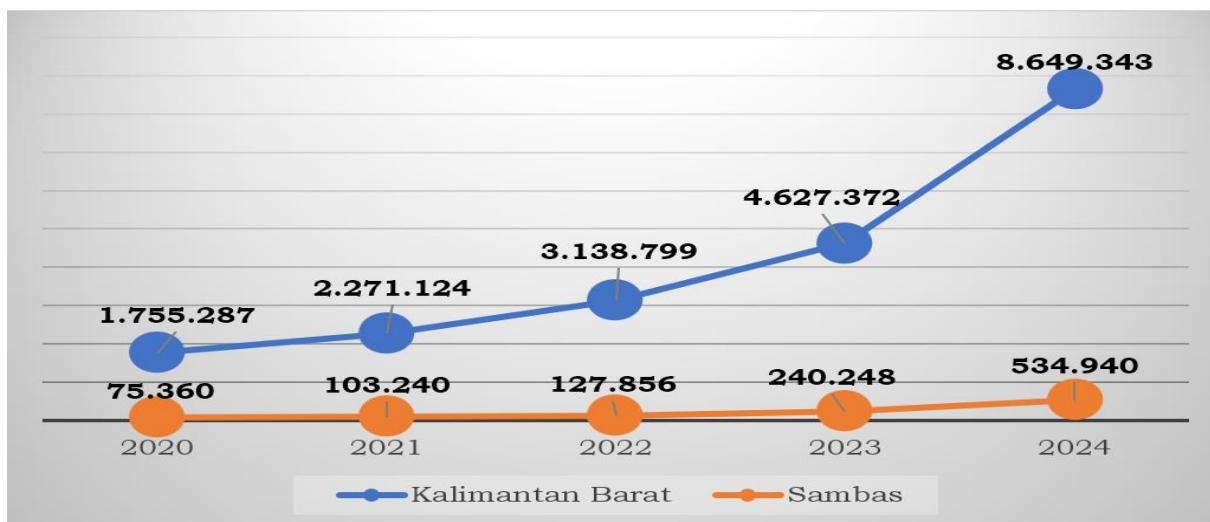
Dengan penataan kawasan pertambangan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pertambangan yang legal, tertib, dan berwawasan lingkungan. Perlu adanya pemetaan teknis yang lebih rinci, pengawasan yang ketat, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Meskipun potensi yang dimiliki sangat besar, Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada tantangan serius, khususnya terkait praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan berisiko merugikan daerah secara ekonomi. Pemerintah daerah telah mulai menata kembali sektor ini dengan penerapan regulasi dan pajak daerah mendorong penataan tambang rakyat secara lebih terencana dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang profesional, pemetaan potensi yang lebih detail, serta penguatan regulasi dan pengawasan, sektor pertambangan di Kabupaten Sambas dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.

2.1.1.2.7. Potensi Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Sambas sangat besar, dengan setidaknya 95 objek wisata yang tersebar antara atraksi alam dan budaya. Pada awal periode, yakni tahun 2020, Kalimantan Barat mencatatkan jumlah wisatawan nusantara sebesar 1.755.287 orang, sedangkan Kabupaten Sambas berada jauh di bawahnya dengan 75.360 orang. Meskipun kedua wilayah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Kalimantan Barat menunjukkan pertumbuhan dalam skala yang jauh lebih besar secara absolut. Pertumbuhan Kalimantan Barat terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan lonjakan tajam terjadi antara tahun 2023 dan 2024, dimana jumlahnya naik drastis dari 4.627.372 orang menjadi 8.649.343 orang. Kenaikan ini mencerminkan hampir dua kali lipat dalam waktu satu tahun saja. Secara keseluruhan, dalam lima tahun, Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan lebih dari 393%.

Jumlah wisatawan Kabupaten Sambas meskipun jumlah awalnya jauh lebih kecil, menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil dan signifikan dari tahun ke tahun. Dari 75.360 orang pada tahun 2020, jumlahnya meningkat menjadi 534.940 orang pada tahun 2024. Ini berarti dalam lima tahun, Sambas mengalami pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara lebih dari 610%, bahkan lebih tinggi secara persentase dibanding Kalimantan Barat. Kedua wilayah menunjukkan tren positif dan konsisten, dengan pertumbuhan yang semakin tajam terutama pada tahun 2023 ke 2024. Hal ini mengindikasikan adanya faktor-faktor pendorong yang kuat pada tahun tersebut, baik dari sisi kebijakan, perkembangan infrastruktur, ekonomi digital, ataupun peningkatan partisipasi masyarakat.



Sumber: Data diolah, tahun 2025

Gambar 2. 2. Grafik Jumlah Wisatawan Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Berdasarkan gambar grafik 2.2 di atas, Pertumbuhan tajam pada tahun 2023–2024 menjadi indikator penting adanya perbaikan dan penguatan sektor pariwisata daerah, yang kemungkinan besar didorong oleh kombinasi kebijakan strategis, pembangunan infrastruktur pariwisata, penetrasi ekonomi digital, dan peningkatan kesadaran serta partisipasi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki daya tarik wisata yang semakin kompetitif di tingkat provinsi dan nasional. Dengan pengelolaan yang profesional, penguatan promosi, serta pengembangan destinasi berbasis budaya dan alam yang berkelanjutan, sektor pariwisata di Kabupaten Sambas dapat menjadi motor penggerak ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

2.1.1.3.1. Daya Dukung Pangan

Pangan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan. Fungsi pangan yang utama bagi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan zat-zat gizi tubuh, sesuai dengan jenis kelamin, usia, bobot tubuh dan aktivitas fisik. Oleh karena itu ketersediaan pangan di suatu wilayah merupakan hal yang penting dan harus selalu terjamin ketersediaannya. Kabupaten Sambas merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Kalimantan Barat. Ekosistem Kabupaten Sambas mampu menyediakan bahan pangan dapat

dibagi menjadi lahan berpotensi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi sangat tinggi dalam menyediakan bahan pangan memiliki luasan 155.49 ha (26,04%). Lahan yang berpotensi tinggi dalam penyediaan bahan pangan memiliki luasan sebesar 161.370 ha (27,02%).

Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023, daya dukung energi pangan di Kabupaten Sambas dihitung berdasarkan kebutuhan kalori yang dibutuhkan setiap orang dibandingkan dengan ketersediaan energi yang dapat didukung oleh tanaman pangan khususnya sawah di Kabupaten Sambas. Tingkat ketersediaan energi pangan untuk Kabupaten Sambas mencapai 450.170 Juta Kkal/tahun tahun 2022, sedangkan kebutuhan energi pangan khususnya yang bersumber dari beras untuk penduduk Kabupaten Sambas rata-rata 48.888 Juta kkal tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019, AKG yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia sebesar 2.100 kkal per hari. Dengan demikian daya dukung pangan khususnya beras Kabupaten Sambas sangat besar.

Tabel 2. 8
Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan

Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Jumlah
Galing	2,903	0	21,032	20,548	3	44,485
Jawai	0	3,550	704	18,024	0	22,279
Jawai Selatan	0	0	8,944	1,602	0	10,546
Paloh	5,477	0	343	17,360	46,816	69,996
Pemangkat	0	0	9,849	0	0	9,849
Sajad	0	0	5,698	2,171	1,544	9,413
Sajingan Besar	13,551	0	1,822	53,326	26,225	94,923
Salatiga	0	0	6,420	123	0	6,543
Sambas	1,082	0	9,637	11,480	113	22,312
Sebawi	270	0	7,144	2,246	4,838	14,498
Sejangkung	0	0	16,066	33,954	6,969	56,989
Selakau	0	0	8,388	749	0	9,138
Selakau Timur	3,503	0	3,348	12,858	1,570	21,280
Semparuk	0	0	6,615	526	0	7,141
Subah	16,775	1,542	0	4,312	43,908	66,537
Tangaran	0	3,635	2,858	8,100	0	14,594
Tebas	14,320	0	14,235	9,420	29,383	67,358
Tekarang	0	0	3,536	3,562	0	7,098
Teluk Keramat	0	0	28,854	13,353	0	42,207

Kecamatan	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Sedang	Tinggi	Jumlah
Jumlah	57,879	8,727	155,494	213,715	161,370	597,185
Persentase	9.69	1.46	26.04	35.79	27.02	100.00

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023

Berdasarkan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sambas tahun 2023, tingkat ketersediaan energi pangan di wilayah ini menunjukkan kondisi yang sangat memadai. Dengan total ketersediaan energi pangan sebesar 450.170 juta kilokalori per tahun dari sektor tanaman pangan khususnya sawah dan kebutuhan kalori masyarakat sebesar 48.888 juta kilokalori per tahun, maka Kabupaten Sambas memiliki surplus energi pangan yang sangat besar, yakni hampir sembilan kali lipat dari kebutuhan aktual penduduknya.

Surplus ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sambas tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan berbasis beras bagi seluruh penduduk secara mandiri, tetapi juga berpotensi besar untuk menjadi lumbung pangan strategis di Kalimantan Barat. Kondisi ini menunjukkan ketahanan pangan yang sangat kuat dan membuka peluang untuk mengembangkan perdagangan komoditas pangan antarwilayah. Namun, kelebihan daya dukung ini tetap perlu diimbangi dengan strategi pengelolaan produksi yang berkelanjutan dan diversifikasi pangan untuk menjaga keseimbangan ekosistem serta ketahanan pangan jangka panjang.

2.1.1.3.2. Daya Dukung Air

Berdasarkan Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023, daya dukung air di Kabupaten Sambas dilakukan berdasarkan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan air di wilayah tersebut. Kebutuhan air dihitung berdasarkan kebutuhan standar layak untuk kebutuhan sehari-hari. Perhitungan ini mencakup kebutuhan air untuk rumah tangga, kebutuhan non-domestik. Analisis daya dukung air Kabupaten Sambas dihitung berdasarkan peta Daya Dukung Air yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2022 tentang Penetapan D3 Air Nasional. Secara umum bahwa di Kabupaten Sambas D3 air masih belum terlampaui dengan perbandingan belum terlampaui 533.278 Ha

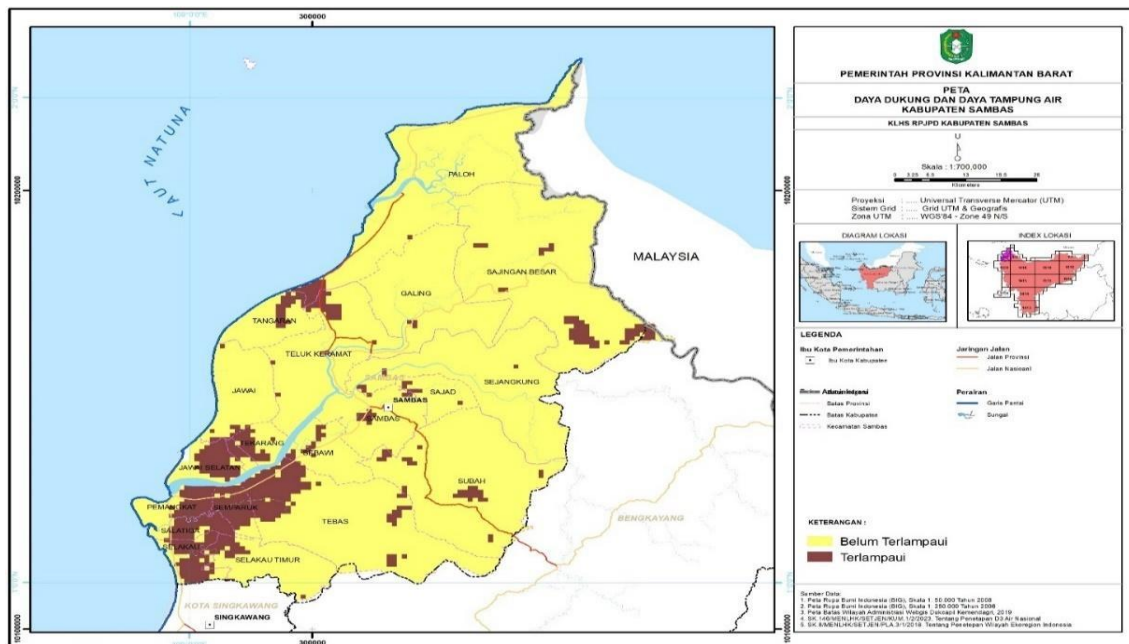
(89,30%) dan sudah terlampaui 63.907 Ha (10,70%). Sebaran secara spasial dapat dilihat pada gambar berikut.

Tabel 2. 9.
Daya Dukung Air Kabupaten Sambas Tahun 2022

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	%	Terlampaui (Ha)	%	Grand Total
Galing	43,567	99.39	267	0.61	43,834
Jawai	21,120	96.17	840	3.83	21,960
Jawai Selatan	5,313	51.08	5,088	48.92	10,401
Paloh	69,154	97.37	1,867	2.63	71,021
Pemangkat	5,218	53.60	4,518	46.40	9,736
Sajad	8,749	93.78	580	6.22	9,329
Sajingan Besar	89,435	94.31	5,391	5.69	94,826
Salatiga	1,848	28.59	4,617	71.41	6,466
Sambas	20,873	95.10	1,075	4.90	21,948
Sebawi	13,098	90.36	1,398	9.64	14,496
Sejangkung	55,526	99.04	540	0.96	56,066
Selakau	3,133	34.72	5,889	65.28	9,021
Selakau Timur	18,304	86.70	2,807	13.30	21,111
Semparuk	1,515	21.49	5,536	78.51	7,051
Subah	65,714	95.94	2,778	4.06	68,492
Tangaran	12,289	84.62	2,234	15.38	14,523
Tebas	54,855	80.16	13,575	19.84	68,430
Tekarang	4,492	64.53	2,469	35.47	6,961
Teluk Keramat	39,076	94.13	2,438	5.87	41,514
Jumlah	533,278	89.30	63,907	10.70	597,185

Sumber : Laporan KLHS Kabupaten Sambas 2023

Berdasarkan Tabel 2.9 dari laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sambas bahwa ada 3 (tiga) kecamatan yang sudah terlampaui ketersediaan air lebih dari 50% yaitu Kecamatan Salatiga, Kecamatan Selakau dan Kecamatan Semparuk. Daya dukung air ini sangat ditentukan oleh dua aktor utama yaitu Ekoregion dan Tutupan Hutan.



Sumber : KLHS Kabupaten Sambas, 2023

Gambar 2. 3. Sebaran Daya Dukung Air Kabupaten Sambas

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai IKA Kabupaten Sambas Tahun 2024 adalah 58,75. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, nilai IKA Kabupaten Sambas berada pada rentang $50 \leq x \leq 70$ dan termasuk dalam kategori sedang. Capaian IKA Kabupaten Sambas Tahun 2024 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 51,30. Trend IKA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: IKLH Kabupaten Sambas Tahun 2024

Gambar 2.4 Indeks Kualitas Air Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Kecenderungan nilai IKA dalam 5 (lima) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian nilai IKA tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 65 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 51,20. Namun pada tahun 2024, nilai IKA turun secara signifikan menjadi 58,75 tetapi memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 51,30. Penurunan nilai IKA tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya pencemar dari sumber limbah domestik dan beberapa titik pantau yang mengalami penurunan status mutunya.

2.1.1.3.3. Daya Dukung Biodiversitas

Daya dukung biodiversitas menggambarkan besarnya kemampuan keanekaragaman hayati dalam ekosistem terhadap perikehidupan. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan. Biodiversitas dapat berkembang dengan baik apabila kondisi lingkungan masih alami.

Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas (2023), secara umum di Kabupaten Sambas lahan yang dapat mendukung biodiversitas dapat dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi tinggi mendukung biodiversitas di Kabupaten Sambas memiliki luasan sebesar 102.638,84 hektar (17,19%). Lahan yang memiliki potensi sedang sebagai pendukung biodiversitas memiliki luasan sebesar 34.841,63 hektar (5,83%). Sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah memiliki luasan sebesar 437.805,63 hektar (73,31%) dan sangat rendah 21.899,07 hektar (3,67%).

Tabel 2. 10
Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Galing	555.12	30,584.14	1,369.47	11,319.19	43,827.91
Jawai	704.47	19,739.93	804.01	708.40	21,956.81
Jawai Selatan	1,547.42	8,736.39	92.36	23.02	10,399.19

Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Paloh	2,962.12	34,807.38	10,268.78	22,995.22	71,033.49
Pemangkat	1,340.63	8,130.05	110.97	152.91	9,734.57
Sajad	77.22	8,472.38	742.42	35.42	9,327.44
Sajingan Besar	624.86	54,358.45	541.35	39,347.11	94,871.77
Salatiga	331.08	5,707.32	420.44	6.21	6,465.04
Sambas	1,612.45	18,855.88	1,476.46	0.00	21,944.79
Sebawi	1,220.96	13,091.80	180.99	0.00	14,493.75
Sejangkung	947.36	44,619.19	4,896.08	5,595.58	56,058.22
Selakau	516.57	8,051.19	367.01	85.30	9,020.06
Selakau Timur	1,117.95	11,982.07	2,816.79	5,191.37	21,108.19
Semparuk	701.18	6,123.53	148.84	76.92	7,050.47
Subah	1,513.14	60,892.88	3,408.24	2,668.53	68,482.79
Tangaran	255.28	14,038.67	227.50	0.00	14,521.46
Tebas	2,077.58	50,946.39	2,367.35	13,029.69	68,421.01
Tekarang	952.05	5,982.28	25.27	0.00	6,959.60
Teluk Keramat	2,841.62	32,685.70	4,577.30	1,403.96	41,508.58
Jumlah	21,899.07	437,805.63	34,841.63	102,638.84	597,185.16
Persentase	3.67	73.31	5.83	17.19	100.00

Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023

Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas menggambarkan kemampuan alami ekosistem dalam mendukung keanekaragaman hayati masih didominasi oleh wilayah yang secara ekologis rentan dan kurang mendukung kehidupan flora-fauna secara optimal.

Tingginya proporsi lahan dengan potensi rendah dan sangat rendah menjadi perhatian penting, karena dapat mengindikasikan degradasi ekosistem akibat perubahan tata guna lahan, deforestasi, atau tekanan aktivitas manusia lainnya. Disisi lain, masih adanya area dengan potensi tinggi dan sedang memberikan peluang untuk pengembangan zona konservasi, ekowisata, dan restorasi ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tata ruang yang berbasis ekologi dan langkah konservasi terpadu untuk melindungi kawasan bernilai tinggi, sekaligus merehabilitasi kawasan yang telah mengalami penurunan fungsi ekologis guna menjaga keberlanjutan biodiversitas sebagai salah satu aset lingkungan hidup strategis di Kabupaten Sambas.

2.1.1.3.4. Daya Dukung Pengendalian Bencana

Kabupaten Sambas memiliki karakteristik geografis dan klimatologis yang menjadikannya rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir,

kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor. Untuk itu, pentingnya penguatan daya dukung pengendalian kebencanaan menjadi fokus strategis dalam pembangunan daerah. Daya dukung ini mencakup ketersediaan sarana dan prasarana tanggap darurat, sistem peringatan dini yang efektif, serta kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang mampu merespons secara cepat dan terkoordinasi terhadap potensi bencana. Selain itu, integrasi data kebencanaan dan perencanaan berbasis risiko menjadi pondasi penting dalam meminimalisir dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan.

Penguatan daya dukung pengendalian kebencanaan di Kabupaten Sambas juga perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Edukasi kebencanaan, pelatihan simulasi tanggap darurat, serta pembentukan desa tangguh bencana merupakan langkah nyata dalam membangun ketahanan masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga kebencanaan, dan masyarakat, Kabupaten Sambas dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi terhadap bencana. Pendekatan ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko bencana, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan.

Daya dukung pengendalian kebencanaan di Kabupaten Sambas sangat erat kaitannya dengan keberadaan jasa ekosistem pengatur iklim, khususnya fungsi hutan dan lahan basah dalam menyerap karbon, menstabilkan suhu, serta mengatur siklus hidrologi. Ekosistem yang sehat mampu mengurangi frekuensi dan intensitas bencana seperti banjir dan kekeringan, karena memiliki kemampuan alami untuk menyerap air hujan, menyimpan cadangan air, dan menahan erosi tanah. Oleh karena itu, pelestarian dan rehabilitasi ekosistem, terutama hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS), tidak hanya penting dalam konteks konservasi lingkungan, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam memperkuat daya dukung pengendalian bencana. Kolaborasi antara pengelolaan risiko bencana dan perlindungan jasa ekosistem menjadi kunci dalam menciptakan wilayah yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas tahun 2023, ekoregion di Kabupaten Sambas dapat memberikan manfaat berupa pengaturan iklim.

Secara umum di Kabupaten Sambas lahan yang mampu melakukan pengaturan iklim dapat dibagi menjadi lahan berpotensi tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Lahan yang berpotensi tinggi dalam pengaturan iklim di Kabupaten Sambas memiliki luasan sebesar 147.424 ha. Lahan yang memiliki potensi sedang dalam pengaturan iklim memiliki luasan sebesar 256.716 ha, lahan yang memiliki potensi rendah dalam pengaturan iklim memiliki luasan sebesar 49.693 ha, lahan yang memiliki potensi sangat rendah dalam pengaturan iklim memiliki luasan sebesar 143.352 ha.

Tabel 2. 11.
Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

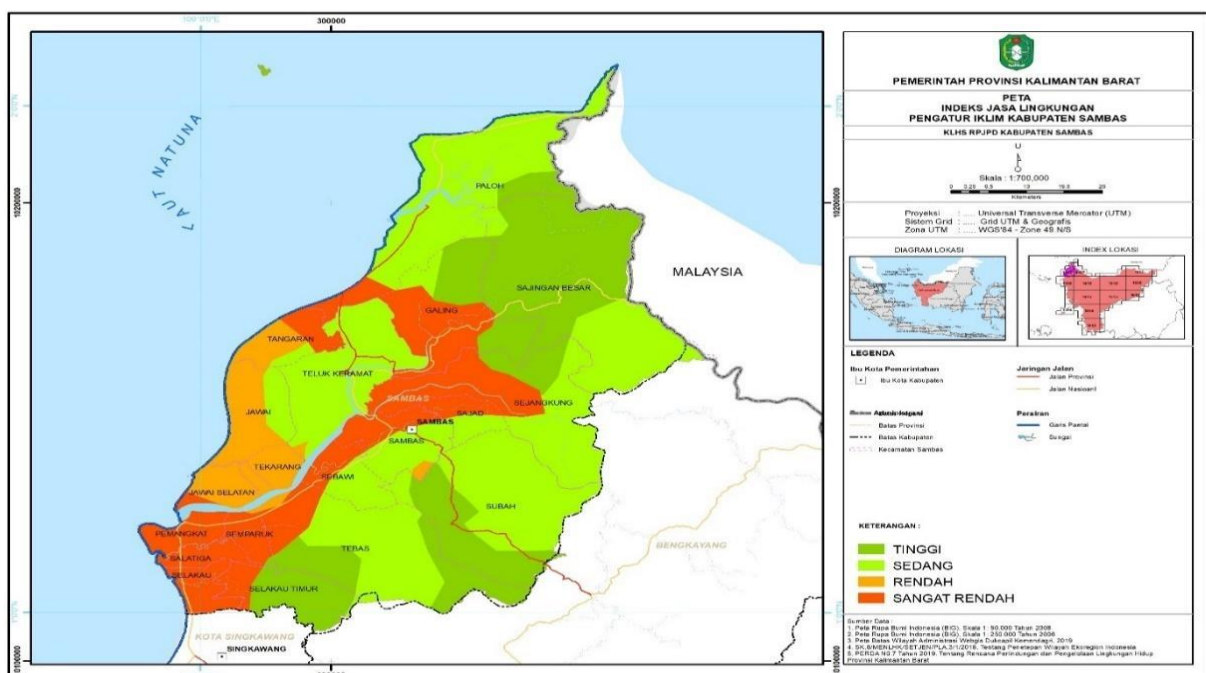
Kecamatan	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah
Galing	20,332	0	3,242	17,524	41,097
Jawai	0	14,679	5,793	0	20,472
Jawai Selatan	2,018	8,136	0	0	10,155
Paloh	4,613	0	56,252	5,630	66,495
Pemangkat	9,075	0	0	0	9,075
Sajad	4,584	0	4,162	0	8,746
Sajingan Besar	116	0	29,021	58,731	87,867
Salatiga	6,020	0	0	39	6,059
Sambas	8,176	860	11,542	0	20,577
Sebawi	5,673	67	7,851	0	13,591
Sejangkung	20,697	0	24,157	7,712	52,565
Selakau	8,409	0	0	0	8,409
Selakau Timur	4,328	0	318	15,147	19,793
Semparuk	6,103	211	0	297	6,611
Subah	0	8,830	42,126	22,090	73,046
Tangaran	5,189	6,853	1,566	0	13,609
Tebas	8,513	3,095	32,301	20,255	64,164
Tekarang	101	6,425	0	0	6,526
Teluk Keramat	29,406	536	38,386	0	68,329
Jumlah	143,352	49,693	256,716	147,424	597,185
Persentase	24.01	8.32	42.99	24.69	100.00

Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023

Berdasarkan laporan KLHS Kabupaten Sambas tahun 2023, kemampuan lahan dalam memberikan fungsi pengaturan iklim di wilayah ini menunjukkan distribusi yang cukup berimbang. Proporsi yang cukup besar pada kategori sedang dan tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar ekoregion di Kabupaten Sambas masih memiliki kapasitas ekosistem yang layak untuk menyerap karbon, menstabilkan suhu, dan mengatur siklus hidrologi. Hal ini menjadi modal penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ekologis. Namun demikian, keberadaan lahan dengan potensi sangat rendah yang mencakup lebih dari

seperlima wilayah (24,01%) juga menandakan adanya tekanan terhadap fungsi ekosistem, yang kemungkinan besar berasal dari konversi lahan, degradasi hutan, atau penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan.

Dengan demikian, penguatan kebijakan perlindungan kawasan dengan potensi tinggi dan sedang, serta pemulihan lahan pada wilayah berpotensi rendah dan sangat rendah, menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya lenting iklim daerah. Integrasi pendekatan berbasis ekosistem dalam tata ruang dan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menjadikan Kabupaten Sambas sebagai wilayah yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim jangka panjang.



Sumber: KLHS Kabupaten Sambas, 2023

Gambar 2. 5. Jasa Ekosistem Pengatur Iklim

2.1.1.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

2.1.1.4.1. Ketahanan Energi

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN), ketahanan energi didefinisikan sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Ketahanan energi meliputi 3 aspek, yaitu ketersediaan sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, dan kemajuan pengembangan energi baru terbarukan. Sektor energi mempunyai peranan penting bagi peningkatan ekonomi dan ketahanan nasional dan daerah, sehingga pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan penguasaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kabupaten Sambas yang termasuk di dalam Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, dalam upaya mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi memerlukan dukungan ketersediaan sumber energi dan infrastruktur penyediaannya yang memadai.

Dalam pelaksanaan pengelolaan energi untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dibutuhkan suatu perencanaan energi yang disusun dalam dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Penyusunan RUED ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan peraturan Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035, adapun sistem jaringan energi terdiri atas:

a. Pembangkit Tenaga Listrik, meliputi:

- 1) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), di Perkotaan Sambas;
- 2) PLTD di Perkotaan Sentebang;
- 3) PLTD di Perkotaan Temajuk; dan
- 4) Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan di daerah yang memiliki potensi.

Untuk pemenuhan kebutuhan energi listrik masa mendatang dan berkelanjutan, direncanakan dilakukan upaya:

- 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
- 2) Pengembangan Energi Surya;
- 3) Pengembangan Energi Angin;
- 4) Pengembangan Energi Biodiesel;
- 5) Pengembangan Energi Biomassa;
- 6) Pengembangan Energi Biogas;

- 7) Pengembangan Energi Tenaga Hybrid;
 - 8) Pengembangan Energi Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan
 - 9) Pembangkit tenaga listrik yang bersumber pada Energi Baru dan Terbarukan dikembangkan terutama pada kawasan yang potensial dan/atau belum terjangkau dengan jaringan distribusi listrik.
- b. Jaringan Prasarana Energi, terdiri atas:
- 1) Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri dari depo bahan bakar minyak dan gas, pengolahan gas di Tanjung Api, serta pembangunan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Natuna-Tanjung Api - Pontianak - Palangkaraya;
 - 2) Gardu induk di Kecamatan Sambas;
 - 3) Jaringan transmisi tegangan tinggi berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Perkotaan Sambas - Tebas - Pemangkat - Selakau (batas Kota Singkawang); dan
 - 4) Pembangunan jaringan distribusi Jaringan Tegangan Menengah (JTM), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Trafo yang menghubungkan seluruh wilayah kecamatan dan pusat permukiman penduduk di seluruh wilayah daerah.

Oleh karena itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, urusan energi Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu kepada dokumen Rencana Umum Energi Daerah Provinsi. Gambaran data terkait jumlah pelanggan listrik, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 12.
Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2020-2024

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
UP3 Pontianak	531.123	558.881	583.387	616.147	335.348
Mempawah	74.848	79.061	77.128	88.014	...
Landak	44.852	49.482	69.448	56.830	...
Kubu Raya	210.924	222.378	172.554	93.619	100.501
Kota Pontianak	200.499	207.960	264.257	377.684	234.847
UP3 Mempawah	...	...	...	...	314.964
Mempawah	...	...	...	...	253.954
Landak	...	...	...	...	61.010

Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
UP3 Singkawang	279.923	299.202	313.049	334.937	353.653
Sambas	153.651	181.877	174.845	183.559	193.447
Bengkayang	56.948	44.164	62.565	70.641	75.488
Kota Singkawang	69.324	73.161	75.639	80.737	84.718
UP3 Sanggau	319.880	343.342	371.528	397.285	431.078
Sanggau	96.282	102.053	111.972	120.771	131.166
Sintang	86.957	93.597	101.669	109.975	120.345
Kapuas Hulu	52.374	56.557	61.416	62.358	68.086
Sekadau	41.440	44.501	47.550	52.398	55.915
Melawi	42.827	46.634	48.921	51.783	55.566
UP3 Ketapang	139.090	150.481	160.034	171.665	182.425
Ketapang	111.279	120.157	132.060	137.791	147.045
Kayong Utara	27.811	30.324	27.974	33.874	35.380
Kalimantan Barat	1.270.016	1.351.906	1.427.998	1.520.034	1.617.468

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

2.1.1.4.2. Ketahanan Air

Ketahanan air adalah keterpenuhan kebutuhan air yang layak dan berkelanjutan untuk kehidupan dan pembangunan serta terkelolanya risiko yang berkaitan dengan air. Perhitungan Indeks Ketahanan Air sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Ketahanan air sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dimana kondisi air yang aman dan bermanfaat serta sebagai penguat negara sehingga bisa menjadi produktif dan meminimalisir daya rusak. Dalam Peraturan Presiden tersebut disampaikan bahwa Indeks Ketahanan Air perlu disusun untuk menunjang strategi peningkatan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Indeks Ketahanan Air diperlukan untuk mengukur secepat mungkin parameter keamanan air yang diperlukan sebagai komponen untuk menjawab pertanyaan kunci yang harus diambil oleh para pembuat kebijakan yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan investasi dalam mendukung terselenggaranya pembangunan nasional dan regional. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah, terdapat indikator ketahanan air Indonesia berdasarkan 5 pilar atau segmen pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya

air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air.

Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Kabupaten Sambas berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata, baik ditinjau dari letak geografis setiap pulau maupun dari segi distribusi curah hujan bulanan. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta pergeseran musim yang setiap tahun semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menimbulkan situasi krisis sumber daya air dan peningkatan daya rusak air, baik yang terjadi saat ini maupun pada waktu yang akan datang. Data jumlah pelanggan dan air yang disalurkan, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 13.
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kab/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)	Nilai (Rp)
Sambas	14.431	2.949.596	17.904.425.000
Bengkayang	11.274	2.357.988	6.975.769.205
Landak	7.768	1.659.550	6.147.827.830
Mempawah	6.043	110.403	474.982.900
Sanggau	14.030	4.257.079	20.611.531.050
Ketapang	15.363	3.501.448	15.591.793.450
Sintang	13.030	2.167.369	19.800.895.567
Kapuas Hulu	16.302	4.147.619	17.939.856.800
Sekadau	9.603	2.461.990	10.384.576.400
Melawi	10.278	2.079.233	15.950.762.850
Kayong Utara	...	...	...
Kubu Raya	32.613	4.949.166	30.478.909.600
Kota Pontianak	156.344	40.401.793	216.867.279.400
Kota Singkawang	25.318	5.416.859	43.018.131
Kalimantan Barat	318.367	72.203.014	358.560.097.133

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

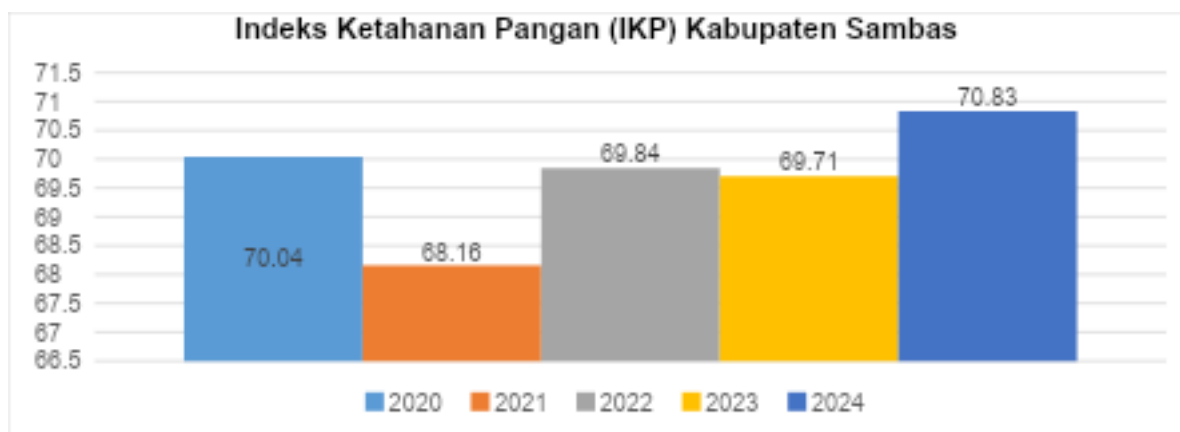
2.1.1.4.3. Kemandirian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan manusia dan jumlah pangan yang tersedia bagi masyarakat harus selalu terjamin. Selain itu, pangan merupakan salah satu aspek kunci terkait daya dukung lingkungan berdasarkan jasa ekosistem. Dalam perkembangan peradaban masyarakat, untuk mencapai kualitas hidup yang maju dan mandiri, dalam suasana damai dan sejahtera secara internal dan eksternal, penyediaan pangan yang cukup, bermutu dan berkeadilan semakin dituntut. Ketahanan pangan

adalah ketersediaan, keterjangkauan dan keberlanjutan kebutuhan pangan, baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga masyarakat dapat berkembang secara sehat, sejahtera, dan berdaya guna.

Definisi ketahanan pangan yang diambil dari FAO (1996) diadopsi dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 menyatakan bahwa ada empat unsur yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan, yaitu (LIPI, 2004) 1) Ketersediaan pangan, 2) Kestabilan pangan tanpa berfluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun, 3) Aksesibilitas/keterjangkauan pangan, dan 4) Mutu/keamanan pangan. Dengan keempat komponen tersebut, ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat diukur dengan menghitung indeks ketahanan pangan. Ukuran ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dihitung setiap periode dengan menggabungkan keempat komponen ketahanan sehingga diperoleh indeks ketahanan pangan.

Data indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Sambas secara lengkap disajikan pada grafik berikut:



Sumber : *Buku Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2025*

Gambar 2. 6. Grafik Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Nilai IKP di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2020 IKP sebesar 70,04 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,83. Secara keseluruhan Kabupaten Sambas menunjukkan perbaikan dan penguatan ketahanan pangan hingga mencapai level yang lebih tinggi pada tahun 2024 melalui program prioritas hilirisasi pertanian, perkebunan dan perikanan dengan program peningkatan sarana dan

prasarana pertanian. Kecenderungan ini mencerminkan respons positif pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan pangan serta meningkatnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan. Ke depan, kesinambungan kebijakan pangan yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan IKP secara stabil, terutama di tengah dinamika iklim, ekonomi, dan demografi yang terus berkembang.

Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Salah satu ukuran yang digunakan adalah prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yaitu persentase penduduk yang asupan energinya berada di bawah kebutuhan minimum. Di Kabupaten Sambas, isu ini menjadi perhatian karena mencerminkan tantangan dalam akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan yang layak oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai daerah dengan potensi pertanian yang besar dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia, Kabupaten Sambas memiliki peluang strategis dalam penguatan ketahanan pangan. Namun demikian, data tahun 2024 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat di Sambas yang belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi pangan secara optimal. Hal ini menandakan bahwa potensi yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menjamin pemerataan akses pangan, terutama bagi kelompok rumah tangga rentan di wilayah pedesaan dan terpencil. Persentase prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Sambas masih berada di atas Provinsi Kalimantan Barat, hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sambas yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi pangan minimal lebih rendah dari Provinsi Kalimantan Barat. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.14
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)
Di Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2024

No	Provinsi/Kabupaten	Nilai (%)
1	Kalimantan Barat	13,56
2	Sambas	12,78

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

2.1.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sambas dilihat dalam berbagai indikator yang disajikan mulai tahun 2020 sampai 2024. Kualitas lingkungan hidup yang diamati adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) cenderung membaik. Tahun 2020 IKLH sebesar 68,99 dan pada tahun 2024 turun menjadi 67,56 atau mengalami penurunan sebesar 1,43. Kecenderungan nilai IKA dalam 5 tahun terakhir bersifat fluktuatif. Capaian nilai IKA tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 65 dan telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 51,20. Namun pada tahun 2024, nilai IKA turun secara signifikan menjadi 58,75 tetapi memenuhi target yang telah ditentukan sebesar 51,30. Selanjutnya, Indeks Kualitas Udara (IKU) cenderung membaik mulai tahun 2020 (90,42) sampai 2023 (93,75), namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 89,29. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) cenderung bersifat fluktuatif dan masih berada pada kategori kurang. Pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2024, nilai IKL mengalami peningkatan kembali dibanding tahun sebelumnya menjadi 42,49. Selengkapnya indikator kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 15.
Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKA	51,18	62,22	55,00	65,00	58,75
IKU	94,58	92,11	92,58	93,75	89,29
IKL	52,25	40,24	41,19	40,66	42,49
IKLH	68,99	69,51	67,20	71,31	67,56

Sumber: Dinas PERKIM LH, IKLH Kab. Sambas, 2024

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang beragam. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga kualitas lingkungan secara holistik, meskipun beberapa indikator lainnya mengalami perbaikan sebagian. Secara keseluruhan, kondisi lingkungan hidup Kabupaten Sambas masih menghadapi tantangan serius terutama dalam aspek pengelolaan

kualitas air dan lahan. Meski demikian, terdapat progres positif yang perlu dijaga, seperti upaya perbaikan kualitas udara dan pemenuhan target minimum IKA. Hal ini menegaskan pentingnya intervensi lintas sektor, penguatan regulasi lingkungan, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

2.1.1.6. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Sambas, sebagai salah satu wilayah di Kalimantan Barat dengan karakteristik geografis yang beragam, menghadapi tantangan besar terkait kerentanan terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Letak geografis yang berbatasan dengan Laut Natuna di utara dan barat membuat kawasan ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir rob, abrasi pantai, serta perubahan pola curah hujan. Selain itu, kondisi topografi dan sistem drainase yang belum optimal menambah risiko bencana banjir, terutama di daerah dataran rendah dan kawasan pesisir. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas resiliensi daerah menjadi isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Sambas ke depan.

Perubahan iklim global yang memicu peningkatan suhu, perubahan pola musim, dan naiknya permukaan laut, semakin memperbesar risiko terhadap ekosistem pesisir dan pertanian di Kabupaten Sambas. Komoditas unggulan seperti padi, kelapa, dan karet sangat tergantung pada kestabilan iklim, sehingga fluktuasi cuaca ekstrem dapat mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat lokal. Risiko ini menuntut penguatan adaptasi sektor pertanian, termasuk penerapan teknologi adaptif seperti penggunaan varietas tanaman tahan cekaman serta pengelolaan air berbasis komunitas.

Upaya mitigasi bencana di Kabupaten Sambas telah mulai diarahkan pada penguatan tata ruang berbasis risiko bencana. Penataan wilayah dengan mempertimbangkan zona rawan banjir, abrasi, dan longsor menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem seperti rehabilitasi hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi strategi alami untuk menahan abrasi

dan menstabilkan garis pantai, sekaligus memperkuat ketahanan komunitas pesisir terhadap perubahan iklim.

Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah juga menjadi elemen kunci dalam membangun resiliensi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam penyusunan rencana kontinjensi, penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana, serta sosialisasi kepada masyarakat tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana. Penguatan sistem peringatan dini dan pengembangan basis data risiko bencana berbasis komunitas juga menjadi langkah strategis untuk mempercepat respon darurat dan meminimalkan kerugian.

Pemberdayaan masyarakat lokal menjadi bagian integral dalam membangun resiliensi. Program-program berbasis masyarakat, seperti pelatihan mitigasi berbasis komunitas, peningkatan kapasitas kelompok tani dan nelayan, serta penguatan jaringan sosial, sangat penting untuk memperkuat kemampuan adaptasi masyarakat. Pendekatan ini mengedepankan partisipasi aktif warga dalam perencanaan dan pengelolaan risiko bencana, sehingga tercipta ketahanan kolektif yang berkelanjutan.

Di sisi lain, sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk membangun resiliensi yang komprehensif di Kabupaten Sambas. Kolaborasi ini meliputi pengembangan riset adaptasi perubahan iklim, inovasi teknologi ramah lingkungan, serta investasi dalam infrastruktur tahan bencana. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerentanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru melalui pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada mitigasi risiko iklim.

Keseluruhan, peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Sambas memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek struktural dan nonstruktural. Dengan memperkuat kapasitas adaptasi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, Kabupaten Sambas dapat lebih siap menghadapi tantangan perubahan iklim di masa depan. Resiliensi ini menjadi pondasi penting untuk memastikan pembangunan daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

2.1.1.6.1. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Kabupaten Sambas merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik geografis beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, hingga daerah perbukitan. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Sambas memiliki potensi risiko terhadap berbagai jenis bencana, seperti banjir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta tanah longsor. Banjir menjadi salah satu bencana yang paling sering terjadi, terutama di musim hujan, disebabkan oleh tingginya curah hujan, sistem drainase yang kurang memadai, serta alih fungsi lahan yang mengurangi daya serap tanah.

Indeks Risiko Bencana (IRB) di Kabupaten Sambas menunjukkan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana dengan kategori sedang. Faktor-faktor yang meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Sambas juga berkaitan dengan isu lingkungan, seperti deforestasi, pembukaan lahan tanpa kontrol, dan degradasi lahan gambut. Karhutla, meskipun tidak terjadi setiap tahun, tetap menjadi ancaman musiman yang dapat menimbulkan dampak luas seperti gangguan kesehatan akibat asap, kerusakan ekosistem, dan kerugian ekonomi. Dalam konteks ini, mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama, termasuk melalui edukasi masyarakat, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pemetaan wilayah rawan secara berkala. Selanjutnya ditampilkan data tentang Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024.

Tabel 2. 16
Data Indeks Risiko Bencana Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

N o	Kab/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kelas Risiko 2024
1	Kab. Sambas	172.20	172.20	154.41	154.41	134.55	Sedang
2	Kalimantan Barat	138.49	138.69	136.72	138.92	131.66	Sedang

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI Tahun 2024

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dari tahun 2020 hingga 2024, Kabupaten Sambas menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai IRB tercatat sebesar 172,20,

namun mulai menurun menjadi 154,41 pada tahun 2022 dan 2023, hingga akhirnya mencapai angka 134,55 pada tahun 2024. Penurunan sekitar 38 poin dalam lima tahun ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kapasitas pengelolaan risiko bencana, baik dari sisi kebijakan, kesiapsiagaan masyarakat, maupun sistem penanggulangan yang lebih responsif.

Di tingkat provinsi, Kalimantan Barat juga mengalami penurunan IRB meskipun dengan tren yang lebih stabil. Nilai indeks provinsi turun dari 138,49 di tahun 2020 menjadi 131,66 pada tahun 2024. Meskipun lebih rendah dari Kabupaten Sambas, tren penurunan yang dicapai provinsi tidak sebesar kabupaten, yang menandakan bahwa beberapa daerah lain di Kalimantan Barat mungkin memiliki risiko yang lebih rendah atau stabil selama periode tersebut.

Meskipun nilai IRB Kabupaten Sambas telah mengalami penurunan, kelas risiko pada tahun 2024 masih berada pada kategori “Sedang”. Hal yang sama juga berlaku untuk Kalimantan Barat secara keseluruhan. Kategori ini menunjukkan bahwa potensi bahaya dan dampak bencana masih cukup tinggi jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko tetap menjadi prioritas utama, khususnya di daerah yang rawan banjir, abrasi pantai, dan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mempertahankan bahkan mempercepat tren penurunan ini, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sistem peringatan dini, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana. Kolaborasi lintas sektor, penyusunan rencana kontinjensi berbasis data, dan integrasi kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi kunci untuk menurunkan indeks risiko hingga ke kategori rendah di masa mendatang.

2.1.1.7. Demografi

Berdasarkan sisi demografi, Kabupaten Sambas memiliki populasi yang cukup besar dengan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun. Komposisi penduduknya terdiri dari berbagai kelompok suku seperti Suku Melayu, Suku Dayak, Suku Tionghoa, dan suku lainnya yang hidup

berdampingan dan membentuk struktur sosial yang beragam serta kaya akan budaya.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Sambas bermukim di wilayah pedesaan, dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Hal ini mencerminkan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sumber daya alam dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas. Tingkat pendidikan dan akses terhadap fasilitas kesehatan terus mengalami peningkatan, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan pelayanan publik, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Struktur usia penduduk yang relatif muda juga memberikan peluang besar bagi pengembangan sumber daya manusia yang produktif di masa depan.

Karakteristik demografi Kabupaten Sambas menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data kependudukan, seperti jumlah penduduk usia kerja, tingkat migrasi, serta distribusi penduduk antar kecamatan, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan memperhatikan dinamika demografi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing daerah di tingkat regional dan nasional.

2.1.1.7.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk Kabupaten Sambas pada tahun 2020 bertambah 133.790 jiwa dari 496.120 jiwa (2010) menjadi 629.910 jiwa (2020) serta berdasarkan data BPS terbaru tahun 2025 jumlah ini meningkat menjadi sebanyak 654.912. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) pada tahun 2025 sebesar 1,10% dan sebesar 1,05% tahun 2024.

Penduduk Kabupaten Sambas tersebar di 19 (sembilan belas) kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Tebas (82.430 jiwa atau 12.72%). Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Selakau Timur (12.750 jiwa atau 1.97%). lihat Tabel 2.17.

Tabel 2. 17
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (2020)	Jumlah Penduduk (2021)	Jumlah Penduduk (2022)	Jumlah Penduduk (2023)	Jumlah Penduduk (2024)	LPP per tahun 2020-2024 (%)
1.	Selakau	37.811	38.200	38.800	38.790	39.152	1.00
2.	Selakau Timur	12.515	12.600	12.800	12.750	12.837	0.76
3.	Pemangkat	53.248	53.600	54.100	53.820	54.083	0.49
4.	Semparuk	30.176	30.600	31.000	31.050	31.365	1.09
5.	Salatiga	18.315	18.500	18.800	18.750	18.912	0.93
6.	Tebas	80.268	81.200	82.500	82.430	83.227	1.03
7.	Tekarang	17.541	17.800	18.200	18.250	18.503	1.47
8.	Sambas	57.295	58.000	59.000	59.000	59.627	1.12
9.	Subah	23.762	24.200	24.800	24.920	25.333	1.73
10.	Sebawi	13.641	20.500	20.900	20.970	21.227	1.31
11.	Sajad	20.248	13.900	14.200	14.360	14.614	1.86
12.	Jawai	47.307	48.200	49.200	49.540	50.325	1.69
13.	Jawai Selatan	22.167	22.400	22.800	22.730	22.938	0.98
14.	Teluk Keramat	74.182	75.100	76.200	76.220	76.977	1.05
15.	Galing	24.864	25.200	25.600	25.550	25.808	1.06
16.	Tangaran	25.838	26.100	26.500	26.420	26.635	0.88
17.	Sejangkung	27.538	27.800	28.200	28.100	28.308	0.81
18.	Sajingan Besar	13.286	13.500	13.800	13.910	14.137	1.69
19.	Paloh	29.903	30.200	30.700	30.640	30.909	0.95
Kabupaten Sambas		629.905	637.800	647.800	648.180	654.912	1.10

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2021-2025

Berdasarkan data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk (LPP) per tahun di Kabupaten Sambas, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk cenderung bervariasi antar kecamatan. Kecamatan dengan LPP tertinggi adalah Kecamatan Sajad (1,86%), Kecamatan Subah (1,73%), Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Jawai (masing-masing 1,69%), menunjukkan adanya peningkatan populasi yang relatif cepat di wilayah-wilayah ini, meskipun jumlah penduduknya tidak sebesar kecamatan lain seperti Kecamatan Tebas (83.227 jiwa) atau Kecamatan Teluk Keramat (76.977 jiwa). Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan Sejangkung memiliki LPP yang lebih rendah (masing-masing 0,49% dan 0,81%), mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Ketimpangan

ini mencerminkan adanya perbedaan daya tarik migrasi, kondisi sosial ekonomi, serta potensi wilayah yang dapat mempengaruhi dinamika kependudukan. Hal ini penting diperhatikan dalam perencanaan pembangunan wilayah agar alokasi sumber daya dan layanan publik dapat dilakukan secara adil dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan proyeksi pertumbuhan masing-masing kecamatan. Ketimpangan laju pertumbuhan ini menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan wilayah, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang berbasis kewilayahan. Alokasi sumber daya, investasi infrastruktur, dan pelayanan publik perlu disesuaikan secara proporsional dengan dinamika pertumbuhan masing-masing kecamatan, agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan penduduk dapat terwujud secara berkelanjutan.

2.1.1.7.2. Komposisi Umur Penduduk

Jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sambas berada pada kelompok umur 0-4 tahun (56.904 jiwa atau 8.68%) dan terendah pada kelompok umur 75 tahun lebih sebanyak 11.475 jiwa atau 1.75%. Jumlah penduduk laki-laki melebihi penduduk perempuan. Penduduk Laki-laki dan penduduk perempuan terbanyak juga berada pada kelompok umur 0-4 tahun. Ini membuktikan tingginya angka kelahiran tertinggi di Kabupaten Sambas (TFR = 2,50 dan tertinggi di Kalimantan Barat). Pada tahap usia awal hingga usia 59 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan (*sex ratio* > 100). Sebaliknya, setelah memasuki usia 60 tahun lebih, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari penduduk laki-laki (*sex ratio* < 100). Lebih banyaknya perempuan di usia tua erat kaitannya dengan usia harapan hidup perempuan yang lebih tinggi dari usia harapan hidup laki-laki.

Tabel 2. 18
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan Jiwa)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan Jiwa)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan Jiwa)
0-4	29.034	27.870	56.904
5-9	28.721	27.054	55.775
10-14	28.703	27.481	56.184
15-19	28.891	27.025	55.916
20-24	26.817	25.787	52.604
25-29	25.276	24.133	49.409
30-34	24.754	22.805	47.559
35-39	25.873	23.075	48.948
40-44	25.764	23.506	49.270
45-49	23.120	21.940	45.060
50-54	20.100	18.996	39.096
55-59	15.311	14.669	29.980
60-64	11.733	12.413	24.146
65-69	8.930	10.289	19.219
70-74	6.187	7.180	13.367
75+	4.708	6.767	11.475
Jumlah/Total	333.922	320.990	654.912

Sumber : BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025

Berdasarkan struktur umur penduduk Kabupaten Sambas, terlihat bahwa komposisi penduduk masih didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif. Kelompok umur 0–14 tahun menyumbang lebih dari 25% dari total populasi, menunjukkan tingginya angka ketergantungan anak dan potensi kebutuhan layanan pendidikan serta kesehatan anak yang besar. Sementara itu, kelompok usia produktif (15–64 tahun) mencakup sebagian besar penduduk, yakni sekitar 66–67%, yang menjadi modal utama untuk pembangunan ekonomi daerah jika dikelola dengan baik melalui peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan kerja. Kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) relatif kecil, sekitar 5%, namun menunjukkan adanya tren penuaan penduduk yang tetap perlu diantisipasi dengan layanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai. Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas masih berada dalam fase bonus demografi, yang bila dimanfaatkan secara optimal, dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara berkelanjutan.

2.1.1.7.3. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Dari aspek kepadatan penduduk. Kabupaten Sambas tergolong pada daerah berpenduduk jarang (110 jiwa/km²). Persebaran penduduk di Kabupaten Sambas belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Pemangkat (557 jiwa/km²). Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Sajingan Besar (14 jiwa/km²). Dari 19 (sembilan belas) kecamatan, terdapat 5 (lima) kecamatan yang kepadatan penduduknya di bawah rata-rata, yaitu Kecamatan Selakau Timur, Paloh, Galing, Sejangkung, Sajingan Besar dan Kecamatan Subah. Terdapat tiga kecamatan yang kepadatan penduduknya 300 jiwa lebih, yaitu Kecamatan Selakau, Kecamatan Semparuk dan Kecamatan Pemangkat.

Tabel 2. 19
Sex Ratio, Kepadatan Penduduk dan Distribusi Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Kecamatan Tahun 2024

NO.	Kecamatan	Sex Ratio	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km ²)	Distribusi Penduduk (%)
1.	Selakau	102,48	408	6
2.	Selakau Timur	102,67	69	1,96
3.	Pemangkat	100,78	557	8,3
4.	Semparuk	103,97	436	4,8
5.	Salatiga	102,22	283	2,9
6.	Tebas	103,07	131	12,7
7.	Tekarang	105,58	269	2,8
8.	Sambas	101,36	271	9,1
9.	Subah	105,24	34	3,9
10.	Sebawi	104,44	210	3,2
11.	Sajad	97,57	125	2,23
12.	Jawai	107,77	218	7,7
13.	Jawai Selatan	107,83	213	3,5
14.	Teluk Keramat	106,69	191	11,75
15.	Galing	101,23	61	3,94
16.	Tangaran	107,50	193	4,07
17.	Sejangkung	103,61	54	4,32
18.	Sajingan Besar	107,23	14	2,16
19.	Paloh	105,39	47	4,72
Kabupaten Sambas		104,03	110	100

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025.

Analisis terhadap data kependudukan Kabupaten Sambas menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan dalam hal *sex ratio*, kepadatan penduduk, dan distribusi populasi. Rata-rata *sex ratio* (jumlah laki-laki per 100 perempuan) di Kabupaten Sambas adalah 104, menunjukkan sedikit dominasi penduduk laki-laki secara umum. Namun, beberapa kecamatan seperti Kecamatan Jawai dan Kecamatan Jawai Selatan mencatat *sex ratio* tertinggi (107,8), sedangkan Kecamatan Sajad menjadi satu-satunya kecamatan dengan dominasi penduduk perempuan (*sex ratio* 97,6), yang bisa jadi mencerminkan perbedaan pola migrasi atau struktur usia. Dari sisi kepadatan, Kecamatan Pemangkat (557 jiwa/km²) dan Kecamatan Selakau (408 jiwa/km²) menjadi kecamatan terpadat, menandakan konsentrasi aktivitas ekonomi dan permukiman di wilayah pesisir dan perkotaan. Sebaliknya, Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh memiliki kepadatan sangat rendah, masing-masing 14 dan 47 jiwa/km², mengindikasikan wilayah yang lebih terpencil dan berorientasi rural. Distribusi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tebas (12,71%), Kecamatan Sambas (9,1%), menunjukkan pentingnya peran ketiga wilayah ini dalam perencanaan infrastruktur, layanan publik, dan pembangunan ekonomi. Ketimpangan ini menekankan perlunya kebijakan pembangunan yang berbasis kewilayahan, agar potensi wilayah dapat dimaksimalkan dan kesenjangan antar kecamatan dapat dikurangi.

2.1.1.7.4. Proyeksi Demografi Penduduk Tahun 2025-2029

Proyeksi penduduk memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Publikasi Proyeksi Penduduk Kabupaten Sambas 2020-2045 hasil sensus penduduk 2020 ini menyajikan proyeksi penduduk pada periode 2020 hingga 2045. Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun proyeksi penduduk Indonesia setiap kali hasil Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) telah tersedia.

Proyeksi penduduk yang disajikan dalam publikasi ini menerapkan metode komponen kohort dengan pendekatan deterministik yang menghasilkan estimasi titik, serta dihitung dengan aplikasi *Rural Urban Projection* (RUP). Metode ini menggunakan beberapa asumsi untuk memproyeksikan penduduk di masa depan, seperti asumsi kelahiran dengan menggunakan indikator *Total Fertility Rate* (TFR), asumsi kematian dengan menggunakan indikator *Infant Mortality Rate* (IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, serta migrasi dengan menggunakan indikator *Age-Specific Net Migration Rate* (ASNMR). TFR, IMR, dan penduduk dasar yang disusun berdasarkan umur dan jenis kelamin bersumber dari penduduk hasil SP 2020.

2.1.1.7.5. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, jumlah penduduk Kabupaten Sambas tahun 2029 sebanyak 686.020 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 347.960 jiwa dan perempuan sebanyak 338.050 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Sambas bertambah sebanyak 24.560 jiwa dibanding tahun 2025 (661.470 jiwa). Laju Pertambahan Penduduk 1,06% per tahun. Angka *Sex Ratio* cenderung tidak berubah yakni di kisaran 103 dimana jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Jika luas wilayah Kabupaten Sambas tidak mengalami perubahan (tetap 6.395,7 km²), maka kepadatan penduduk akan meningkat dari 103,42 jiwa per km² tahun 2025, menjadi 107,26 jiwa per km² tahun 2029.

Tabel 2. 20
Proyeksi Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Umur dan Jenis Kelamin
(Ribu Jiwa) Tahun 2025-2029

Laki-Laki						Perempuan				
Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
0-4	29,06	28,88	28,72	28,6	28,51	27,87	27,69	27,55	27,44	27,35
5-9	28,68	28,81	28,86	28,86	28,85	27,06	27,25	27,43	27,6	27,73
10-14	28,58	28,52	28,54	28,61	28,66	27,46	27,39	27,27	27,13	27,01
15-19	29,04	29,05	28,94	28,76	28,58	27,15	27,26	27,34	27,39	27,41
20-24	27,07	27,39	27,74	28,07	28,33	26,02	26,23	26,43	26,61	26,77
25-29	25,37	25,47	25,58	25,72	25,91	24,41	24,66	24,9	25,13	25,35
30-34	24,51	24,39	24,37	24,42	24,51	22,87	23,01	23,23	23,5	23,79
35-39	25,53	25,17	24,79	24,41	24,09	22,87	22,71	22,59	22,52	22,52

Laki-Laki						Perempuan				
Umur	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
40–44	25,9	25,89	25,73	25,47	25,16	23,52	23,41	23,22	22,97	22,73
45–49	23,47	23,88	24,3	24,7	24,99	22,24	22,53	22,8	23	23,12
50–54	20,76	21,28	21,66	21,98	22,28	19,73	20,32	20,79	21,17	21,5
55–59	16	16,76	17,58	18,39	19,14	15,24	15,96	16,79	17,66	18,48
60–64	12,16	12,62	13,1	13,62	14,2	12,67	12,95	13,25	13,59	14,04
65–69	9,16	9,43	9,73	10,06	10,42	10,58	10,84	11,08	11,3	11,53
70–74	6,56	6,84	7,04	7,2	7,37	7,64	8,04	8,41	8,74	9,04
75+	5,06	5,48	5,96	6,46	6,96	7,23	7,76	8,36	9	9,68
Total	336,91	339,86	342,64	345,33	347,96	324,56	328,01	331,44	334,75	338,05

Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Kalbar 2020–2035

Laki-laki + Perempuan					
Umur	2025	2026	2027	2028	2029
0–4	56,93	56,57	56,27	56,04	55,86
5–9	55,74	56,05	56,29	56,46	56,58
10–14	56,04	55,91	55,81	55,74	55,67
15–19	56,19	56,31	56,28	56,15	55,99
20–24	53,09	53,62	54,17	54,68	55,1
25–29	49,78	50,13	50,48	50,85	51,26
30–34	47,38	47,4	47,6	47,92	48,3
35–39	48,4	47,88	47,38	46,93	46,61
40–44	49,42	49,3	48,95	48,44	47,89
45–49	45,71	46,41	47,1	47,7	48,11
50–54	40,49	41,6	42,45	43,15	43,78
55–59	31,24	32,72	34,37	36,05	37,62
60–64	24,83	25,57	26,35	27,21	28,24
65–69	19,74	20,27	20,81	21,36	21,95
70–74	14,2	14,88	15,45	15,94	16,41
75+	12,29	13,24	14,32	15,46	16,64
Total	661,47	667,87	674,08	680,08	686,01

Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota Provinsi Kalbar 2020–2035

Analisis terhadap data proyeksi penduduk Kabupaten Sambas berdasarkan kelompok umur tahun 2025–2029 menunjukkan adanya pergeseran struktur demografi ke arah penuaan penduduk. Kelompok usia anak (0–4 tahun) mengalami penurunan dari 56.930 jiwa pada 2025 menjadi 55.860 jiwa pada 2029, yang mencerminkan tren penurunan angka kelahiran. Sementara itu, kelompok usia produktif muda (20–39 tahun) cenderung stagnan atau meningkat perlahan, namun proporsinya mulai tergeser oleh peningkatan signifikan pada kelompok usia menengah dan

lansia. Peningkatan tajam terjadi pada kelompok usia 55 tahun ke atas, terutama 60–64 dan 75+, yang masing-masing tumbuh sekitar 14% dan 35% selama lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa beban ketergantungan lansia akan meningkat, sehingga pemerintah daerah perlu mempersiapkan sistem layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan adaptasi infrastruktur publik yang ramah lansia. Secara keseluruhan, meskipun jumlah penduduk masih bertambah, dinamika usia menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas akan menghadapi tantangan demografi berupa penurunan populasi usia muda dan meningkatnya kebutuhan populasi lansia.

2.1.1.7.6. Penduduk Usia Produktif

Penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kabupaten Sambas diproyeksi bertambah setiap tahunnya dari 446.530 jiwa pada tahun 2025, menjadi 462.900 jiwa tahun 2029 atau bertambah sebanyak 16.370 jiwa dalam tempo 5 tahun. Secara kuantitatif, jumlah penduduk usia produktif relatif tersedia cukup untuk berperan dalam pembangunan daerah. Secara kualitatif, penduduk usia produktif masih harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi perubahan pasar kerja yang memasuki era ekonomi digital dan perubahan struktur pembangunan (transformasi pembangunan) dari berbasis pertanian menuju basis industri dan digital.

Sesuai prediksi dan analisis berbagai kalangan, Indonesia tengah berada pada periode yang dinamakan sebagai Bonus Demografi, termasuk Kabupaten Sambas. Menariknya, hasil SP 2020 menunjukkan komposisi penduduk Kabupaten Sambas yang sebagian besar berasal dari Generasi Z/Gen Z (24,31%), yaitu generasi yang lahir pada antara tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Milenial yang digadang-gadang menjadi motor pergerakan masyarakat saat ini, jumlahnya berada sedikit di bawah Gen Z, yaitu sebanyak 21,31% dari total penduduk Kabupaten Sambas. Ini artinya, keberadaan Gen Z memegang peranan penting dan memberikan pengaruh pada perkembangan Kabupaten Sambas.

Tabel 2. 21.
Distribusi Penduduk Kabupaten Sambas Berdasarkan Generasi
Tahun 2025 dan 2029

Kelompok Generasi	2025		2029	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Post Gen Z (Kelahiran 2013)	112.670	17,03	112.440	16,39
Generasi Z (Kelahiran 1997-2012)	165.320	24,99	166.760	24,31
Generasi Milenial (Kelahiran 1981-1996)	145.560	22,01	146.170	21,31
Generasi X (Kelahiran 1965-1980)	166.860	25,23	177.400	25,86
Baby Boomer (1946-1964)	58.770	8,88	66.600	9,71
Post Boomer (kelahiran sebelum 1946)	12.290	1,86	16.640	2,43
Total	661.470	100,00	686.010	100,00

Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035

Analisis terhadap data generasi penduduk Kabupaten Sambas tahun 2025 dan proyeksi tahun 2029 menunjukkan bahwa struktur penduduk masih didominasi oleh Generasi X dan Generasi Z. Pada tahun 2025, Generasi X (kelahiran 1965–1980) merupakan kelompok terbesar dengan 25,23%, dan diperkirakan meningkat menjadi 25,86% pada tahun 2029. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar penduduk berada di usia menjelang atau memasuki masa pensiun, yang berimplikasi pada kebutuhan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Di sisi lain, Generasi Z (kelahiran 1997–2012) tetap konsisten sebagai kelompok usia produktif utama, sekitar 24–25%, menunjukkan adanya potensi tenaga kerja muda yang besar yang dapat mendorong produktivitas daerah. Sementara itu, proporsi Generasi Milenial cenderung menurun secara persentase, dan kelompok Baby Boomer serta Post Boomer menunjukkan peningkatan, mencerminkan tren penuaan penduduk secara bertahap. Dengan demikian, perencanaan pembangunan di Kabupaten Sambas perlu menyeimbangkan antara penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kapasitas generasi muda, dengan peningkatan layanan perlindungan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Di banyak analisis, para ahli menyatakan bahwa Gen Z memiliki sifat dan karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini dilabeli sebagai generasi yang minim batasan (*boundary-less generation*). Satu hal yang menonjol, Gen Z mampu memanfaatkan perubahan teknologi dalam berbagai sendi kehidupan mereka. Teknologi mereka gunakan sama alaminya layaknya mereka bernafas.

2.1.1.7.7. Penduduk Usia Lanjut

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, disebut penduduk lanjut usia. Seiring dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang ditandai dengan pemerataan persebaran ketersediaan sarana dan prasarana hingga ke pedesaan dan peningkatan pendapatan per kapita, jumlah penduduk usia lanjut (60+ tahun) bertambah setiap tahunnya. Jumlah penduduk usia lanjut tahun 2025 sebanyak 71.060 jiwa (10,74%) dan bertambah terus setiap tahunnya hingga mencapai 83.240 jiwa (12,13%) tahun 2029. Meskipun secara alamiah kekuatan/daya tahan fisik usia lanjut cenderung menurun dan menjadi beban ekonomi keluarga dan negara, namun pembangunan di era bonus demografi harus mampu memberdayakan/membekali keterampilan dan memanfaatkannya dalam proses pembangunan untuk menghasilkan penduduk usia lanjut yang berkualitas dan produktif. Tidak menjadi “miskin di masa tua”.

Tabel 2. 22.
Proyeksi Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Sambas, Tahun 2025-2029

Umur	2025	2026	2027	2028	2029
60+ tahun	71,060	73,960	76,930	79,970	83,240
%	10,74	11,07	11,41	11,76	12,13

Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020-2035

Data proyeksi penduduk lanjut usia (60 tahun ke atas) di Kabupaten Sambas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2025 hingga 2029, baik secara absolut maupun persentase terhadap total penduduk. Jumlah lansia diperkirakan meningkat dari 71.060 jiwa pada tahun 2025 menjadi 83.240 jiwa pada tahun 2029, atau naik sekitar 17%. Persentasenya terhadap total populasi juga bertambah dari 10,74% menjadi 12,13%, yang mengindikasikan terjadinya proses penuaan penduduk secara

bertahap. Tren ini memiliki implikasi penting terhadap kebijakan sosial dan pelayanan publik, terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan lansia, jaminan sosial, serta program kesejahteraan yang inklusif. Pemerintah daerah perlu mengantisipasi peningkatan beban demografis ini dengan strategi yang berfokus pada pembangunan sistem layanan lansia yang berkelanjutan dan berbasis komunitas.

2.1.1.7.8. Proyeksi Penduduk Per Kecamatan

Sejalan dengan dinamika penduduk yang mengalami perubahan yang disertai dengan dinamika pembangunan daerah, maka jumlah penduduk akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan penduduk terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Sambas (19 kecamatan). Berdasar pada pola distribusi penduduk di 19 kecamatan tahun 2024, maka proyeksi jumlah penduduk per kecamatan hingga tahun 2025-2029.

Tabel 2. 23.
Proyeksi Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Tahun 2025-2029

No.	Kecamatan	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Selakau	39.688	40.072	40.445	40.805	41.161
2.	Selakau Timur	13.031	13.157	13.279	13.398	13.514
3.	Pemangkat	55.960	56.502	57.027	57.535	58.036
4.	Semparuk	31.684	31.991	32.288	32.576	32.860
5.	Salatiga	19.116	19.301	19.481	19.654	19.826
6.	Tebas	84.139	84.953	85.743	86.506	87.260
7.	Tekarang	18.653	18.834	19.009	19.178	19.345
8.	Sambas	60.194	60.776	61.341	61.887	62.427
9.	Subah	25.400	25.646	25.885	26.115	26.343
10.	Sebawi	21.365	21.572	21.773	21.967	22.158
11.	Sajad	14.685	14.827	14.965	15.098	15.229
12.	Jawai	50.536	51.025	51.500	51.958	52.411
13.	Jawai Selatan	23.548	23.776	23.997	24.211	24.422
14.	Teluk Keramat	77.789	78.542	79.272	79.977	80.675
15.	Galing	26.062	26.314	26.559	26.795	27.029
16.	Tangaran	26.988	27.249	27.502	27.747	27.989
17.	Sejangkung	28.642	28.919	29.188	29.447	29.704
18.	Sajingan Besar	14.222	14.359	14.493	14.622	14.749
19.	Paloh	31.288	31.590	31.884	32.168	32.448
Kabupaten Sambas		662.990	669.405	675.631	681.644	687.586

Sumber : BPS Kalbar, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalbar 2020–2035

Data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas dari tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan tren peningkatan populasi yang merata di seluruh kecamatan. Kenaikan ini bersifat gradual, mencerminkan pertumbuhan penduduk yang stabil dan terkendali. Kecamatan Tebas tetap menjadi wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 87.260 jiwa pada tahun 2029, diikuti oleh Kecamatan Kecamatan Sambas, dan Kecamatan Pemangkat. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk terendah adalah Kecamatan Sajad dan Kecamatan Sajingan Besar, yang masing-masing berada di bawah 16.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi secara absolut terlihat di kecamatan-kecamatan besar, seperti Kecamatan Tebas (penambahan ± 3.121 jiwa dalam 5 tahun), yang menandakan perlunya perhatian khusus dalam penyediaan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, populasi Kabupaten Sambas diperkirakan meningkat sekitar 24.540 jiwa dalam periode lima tahun, sehingga perencanaan pembangunan daerah ke depan harus mempertimbangkan peningkatan kebutuhan dasar masyarakat secara proporsional dan berbasis sebaran geografis.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Sambas periode 2025–2029 menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan merata di seluruh kecamatan. Kecamatan Tebas tetap menjadi pusat populasi tertinggi, dengan pertambahan sekitar 3.121 jiwa, menandakan tingginya kebutuhan infrastruktur dasar dan layanan publik di wilayah ini. Sebaliknya, Kecamatan Sajad dan Sajingan Besar masih memiliki jumlah penduduk relatif rendah, di bawah 16.000 jiwa, yang dapat menjadi fokus pengembangan wilayah tertinggal.

Dengan total peningkatan penduduk sebesar ± 24.540 jiwa dalam lima tahun, perencanaan pembangunan daerah perlu mengedepankan pendekatan spasial, agar alokasi sumber daya publik dapat disesuaikan secara adil dan tepat sasaran. Keseimbangan pembangunan antar wilayah akan menjadi kunci dalam mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas secara berkelanjutan

2.1.1.7.9. Rancangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas

Luas Kabupaten Sambas adalah 5.938,48 km², yaitu sekitar 4,36% dari luas Kalimantan Barat yang mencapai 147.037,037 km² yang terletak di bagian utara Provinsi Kalimantan Barat. Serta berdasarkan faktor rentang kendali pelayanan publik, Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang perlu dimekarkan. Alasannya:

- 1) Wilayah Kabupaten Sambas sangat luas sehingga pelayanan publik menjadi tidak optimal.
- 2) Wilayah Kabupaten Sambas berbatasan langsung dengan negara Sarawak, Malaysia. Sebagai wilayah strategis, Kabupaten Sambas harus dijadikan *etalase* atau beranda depan berhadapan dengan negara lain.
- 3) Pemekaran dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mengoptimalkan peran pemerintah agar kerawanan sekaligus ancaman bagi kedaulatan dan semangat nasionalisme masyarakat di perbatasan negara dapat diatasi. (Kemitraan Partnership kerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura. (2012). Desain Penataan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2025. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan).

Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) diatur Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Kabupaten Sambas berpotensi untuk dimekarkan sebagai 3 (tiga) kabupaten. Berbarengan dengan keinginan masyarakat Kabupaten Sambas sejak tahun 2007 untuk membentuk DOB dengan melakukan pemekaran Kabupaten Sambas Utara dan Kabupaten Sambas Pesisir. (Tim Peneliti IPDN Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dengan Lembaga Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2012).

Tabel 2. 24
Rancangan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)
Kabupaten Sambas

No.	Nama Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Sambas Pesisir	5	33
2.	Sambas Utara	6	70
3.	Sambas Induk	8	92

Sumber : Lapora Penelitian Lembaga Penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2012

Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir merupakan salah satu upaya pemekaran wilayah yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah. Calon DOB ini mencakup lima kecamatan yang terletak di wilayah pesisir Kabupaten Sambas. Adapun kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pemangkat dengan 8 (delapan) desa, Kecamatan Semparuk dengan 5 (lima) desa, Kecamatan Salatiga dengan 5 (lima) desa, Kecamatan Selakau Timur dengan 4 (empat) desa, dan Kecamatan Selakau yang memiliki 11 (sebelas) desa. Wilayah ini memiliki karakteristik geografis pesisir dan potensi perikanan serta kelautan yang cukup tinggi.

Sementara itu, Calon DOB Kabupaten Sambas Utara mencakup wilayah yang lebih luas dengan jumlah kecamatan yang lebih banyak. Terdapat enam kecamatan yang direncanakan masuk ke dalam Kabupaten Sambas Utara, yaitu Kecamatan Jawai terdiri dari 13 (tiga belas) desa, Kecamatan Jawai Selatan terdiri dari 9 (sembilan) desa, Kecamatan Tekarang terdiri dari 7 (tujuh) desa, Kecamatan Teluk Keramat terdiri dari 25 desa, Kecamatan Tangaran terdiri dari 8 (delapan) desa, dan Kecamatan Paloh terdiri dari 8 (delapan) desa. Wilayah ini umumnya memiliki potensi di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata alam, dengan jumlah desa yang cukup banyak, terutama di Teluk Keramat, yang memiliki desa terbanyak di antara kecamatan lainnya.

Kabupaten Sambas induk, sebagai wilayah yang tetap setelah pemekaran, mencakup delapan kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah. Kecamatan-kecamatan ini adalah Kecamatan Sambas terdiri dari 18 (delapan belas) desa, Kecamatan Subah terdiri dari 13 (tiga belas) desa, Kecamatan Tebas terdiri dari 23 (dua puluh tiga) desa, Kecamatan Sebawi terdiri dari 7

(tujuh) desa, Kecamatan Sajad terdiri dari 4 (empat) desa, Kecamatan Sejangkung terdiri dari 12 (dua belas) desa, Kecamatan Galing terdiri dari 10 (sepuluh) desa, dan Kecamatan Sajingan Besar terdiri dari 5 (lima) desa. Meskipun akan mengalami pemekaran wilayah, Kabupaten Sambas induk masih memiliki struktur pemerintahan yang kuat dan wilayah administratif yang luas, sehingga tetap dapat menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik.

Pemekaran wilayah ini didorong oleh berbagai pertimbangan, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi lokal, dan efektivitas pelayanan pemerintahan. Dengan membentuk dua DOB baru, diharapkan distribusi pembangunan akan menjadi lebih merata dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap calon DOB memiliki karakteristik wilayah yang berbeda, sehingga strategi pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal masing-masing.

Secara keseluruhan, rencana pembentukan Calon DOB Sambas Pesisir dan Sambas Utara diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat pelayanan publik di wilayah Kabupaten Sambas. Pembagian wilayah ini juga mencerminkan upaya desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang lebih dekat dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

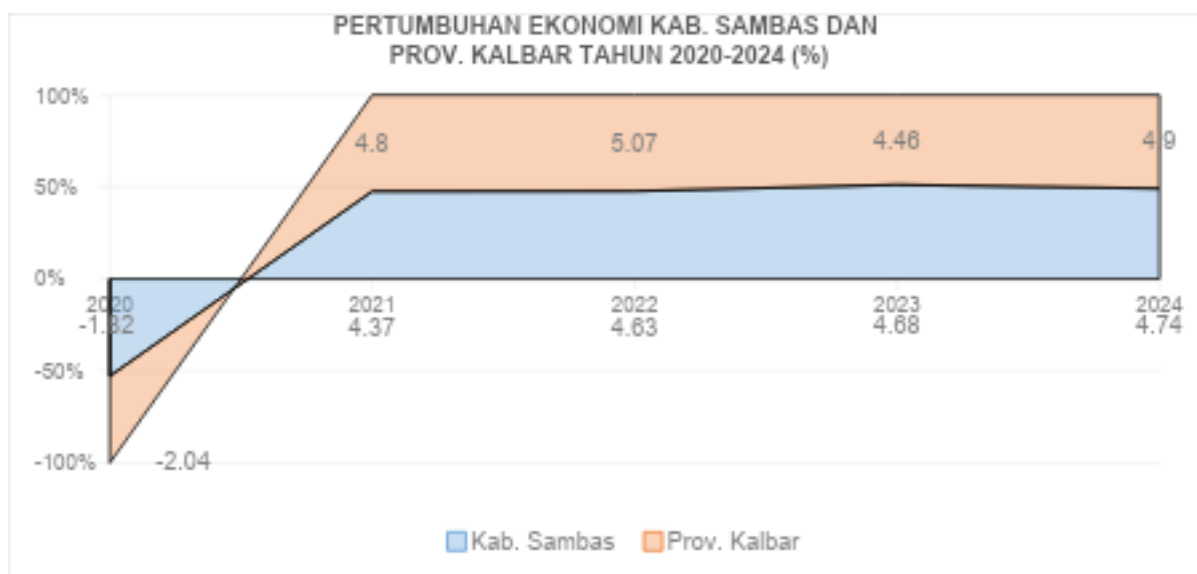
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan indikator makro ekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Gini, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Berikut diuraikan beberapa aspek yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Sambas.

2.1.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Terkait analisis makro ekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2020-2024, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif.

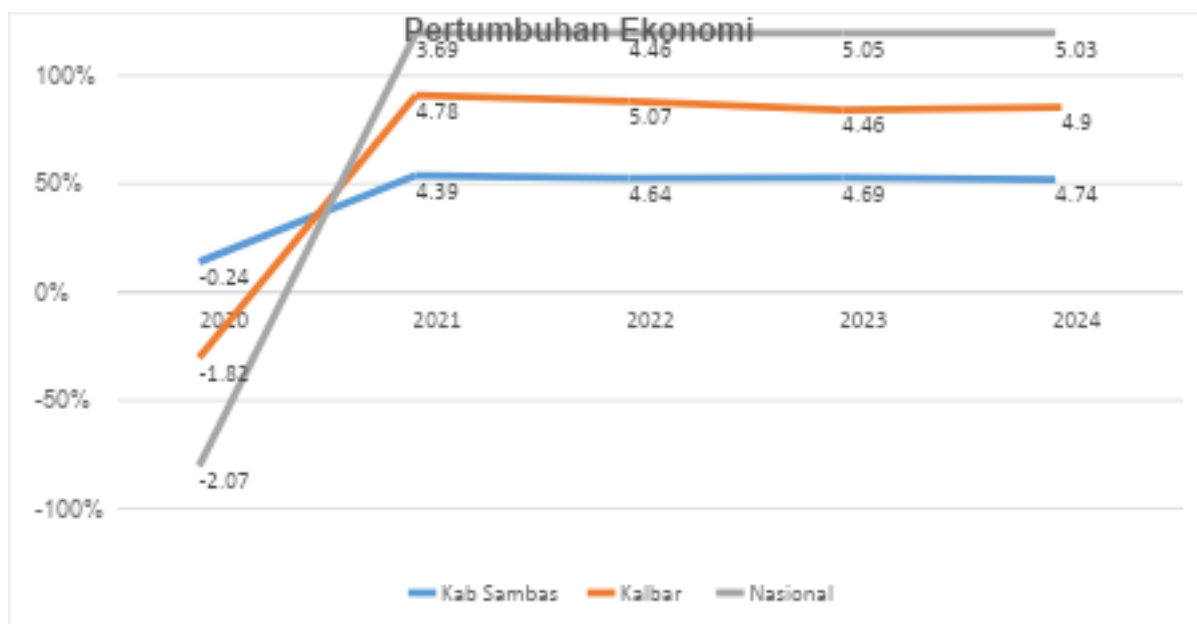


Sumber : BPS Kab. Sambas (Kab. Sambas Dalam Angka), Tahun 2020-2024 (diolah)

Gambar 2. 7. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020, di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sambas tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -2,04%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 4,39%. Pada tahun 2023, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,68%, meningkat sedikit dibandingkan tahun 2022 yang capaiannya sebesar 4,63%. Sedangkan pada tahun 2024 capaiannya sebesar 4,74%.

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Kab. Sambas (Kab. Sambas Dalam Angka), Tahun 2020-2024 (diolah) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2020-2024 (data diolah)

Gambar 2. 8. Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2020-2024

Perekonomian Kabupaten Sambas menunjukkan pemulihan yang stabil dan positif pasca pandemi COVID-19. Setelah mengalami kontraksi sebesar -2,04% pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi pulih dan mengalami tren kenaikan berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2024, mencapai 4,74% pada tahun 2024. Angka ini menandakan bahwa Kabupaten Sambas mampu keluar dari tekanan pandemi dengan cepat, meskipun pada awalnya kontraksi yang dialami lebih dalam dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dalam periode 2020–2024 memperlihatkan tren yang positif dan konsisten, dengan laju pertumbuhan tahunan yang relatif stabil (sekitar 4,6%–4,7%) sejak tahun 2022. Meskipun demikian, pertumbuhan tersebut masih berada pada tingkat sedang, belum menunjukkan akselerasi signifikan menuju pertumbuhan tinggi (>5%). Secara komparatif, Kabupaten Sambas mengalami pemulihan yang cukup baik dibandingkan tingkat provinsi dan nasional, namun tetap perlu didorong dengan diversifikasi ekonomi daerah, penguatan sektor

unggulan seperti pertanian, kelautan, dan pariwisata, serta peningkatan iklim investasi. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi dan penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang dan menjadikan Sambas lebih kompetitif dalam skala regional dan nasional.

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas 2020-2024 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional, namun harus diakui bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir relatif cukup stabil.

Tabel 2. 25.
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sambas
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 (satuan %)

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,00	4,29	3,15	1,74	3,40
B	Pertambangan & Penggalian	-2,96	5,77	2,10	5,84	5,71
C	Industri Pengolahan	-3,03	4,91	4,14	0,98	4,03
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,65	1,64	4,07	14,99	5,60
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	4,98	7,09	7,44	7,19	6,29
F	Konstruksi	-6,05	7,16	2,38	6,60	5,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,98	2,99	9,47	7,09	4,95
H	Transportasi & Pergudangan	-10,94	-1,12	15,54	5,68	5,85
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-19,18	7,41	8,40	6,03	6,30
J	Informasi dan Komunikasi	8,12	6,49	5,05	8,81	7,08
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-0,30	3,88	0,19	5,74	5,19
L	Real Estat	0,88	3,38	0,17	11,55	7,57
M, N	Jasa Perusahaan	-6,24	0,26	10,33	10,77	6,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,62	-0,82	-0,79	5,06	4,92
P	Jasa Pendidikan	-5,37	2,55	5,07	6,63	5,74

Lapangan Usaha		Tahun				2024**
		2020	2021	2022	2023	
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19,57	24,91	6,83	16,06	7,18
R,S,T, U	Jasa Lainnya	-16,55	2,48	11,91	11,15	5,74
Pertumbuhan PDRB		-2,04	4,39	4,64	4,69	4,74

Sumber: BPS Kab. Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka, Tahun 2020-2025)

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi di sektor sektor Penyediaan akomodasi dan Makan minum, Jasa lainnya, dan Perdagangan besar dan eceran, Konstruksi, Jasa lainnya, Jasa pendidikan, Transportasi dan pergudangan, Jasa perusahaan, serta Jasa keuangan dan asuransi. Sebaliknya pandemi Covid-19 seperti itu turut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di sektor Pengadaan Air dan pengolahan sampah, dan sektor Administrasi pemerintahan, yang masing-masing tumbuh 4,98% dan 1,65%. Sementara sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif, tapi pertumbuhannya cenderung lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2024, terdapat tujuh sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2022, yaitu sektor Pertanian, kehutanan, dan perikanan; Industri pengolahan, Pengadaan Air dan pengolahan sampah, Perdagangan besar dan eceran, sektor Transportasi dan pergudangan, Penyediaan akomodasi dan Makan minum, dan sektor Jasa lainnya. Sedangkan sebagian besar sektor jasa (sektor tertier) mengalami peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan. Upaya pemulihan sektor-sektor ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas tahun 2025-2029.

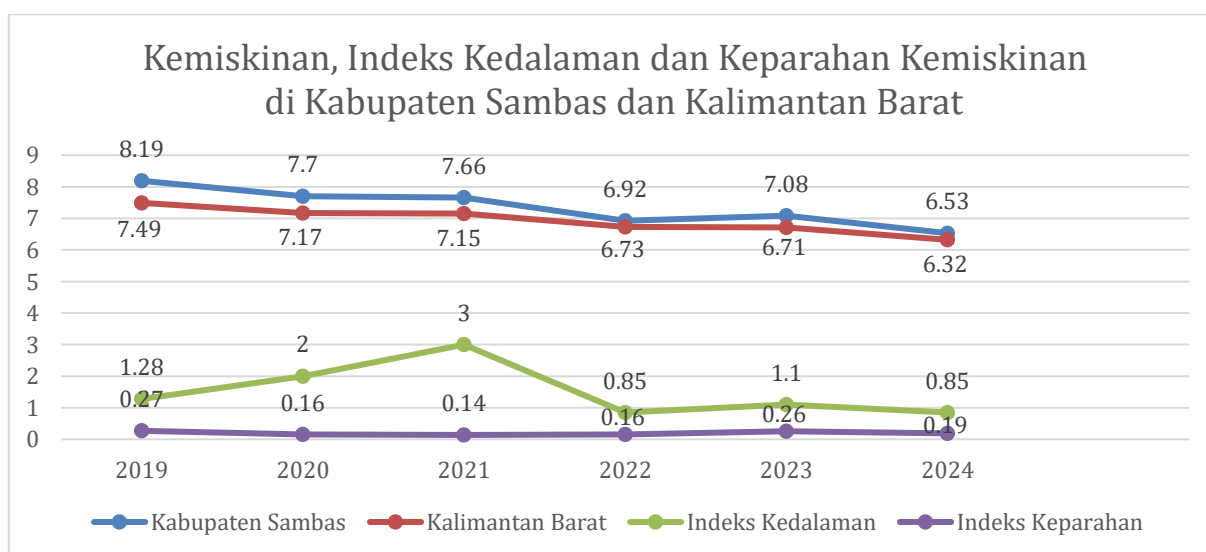
Selama lima tahun terakhir (2020-2024) struktur perekonomian Kabupaten Sambas didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor;
- Industri Pengolahan;

- d. Konstruksi; dan
- e. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

2.1.2.1.2. Tingkat Kemiskinan

Tujuan pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tercermin dari peningkatan PDRB per kapita, penurunan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2024, proses pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Sambas berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 43.840 jiwa (8,19%) pada tahun 2019 menjadi 35.870 jiwa (6,53%) tahun 2024, sedikit di atas kemiskinan provinsi (6,32%). Indeks kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga menurun yang menandakan pengeluaran penduduk miskin berada di sekitar garis kemiskinan. Meskipun menurun, koefisien Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2024 (0,85%) tergolong tinggi, artinya masih banyak penduduk miskinnya jauh di bawah garis kemiskinan, lihat Gambar 2.9.



Sumber: BPS Kabupaten Sambas Tahun 2025 (Data diolah)

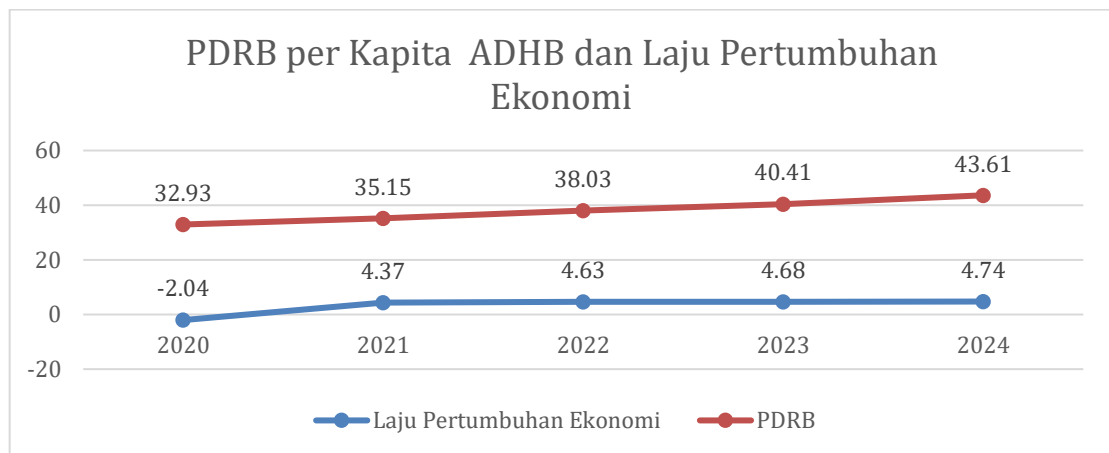
Gambar 2. 9. Kemiskinan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sambas

Berdasarkan gambar di atas, kehidupan penduduk miskin dekat berada di bawah garis kemiskinan. Para penduduk miskin ini adalah para tenaga kerja yang tidak bekerja, penduduk yang bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan, buruh kasar, pekerja sektor informal, tenaga honorer.

Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, kerentanan dan ketimpangan pengeluaran di kalangan miskin masih menjadi tantangan yang harus diatasi melalui program pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan inklusif.

2.1.2.1.3. PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan. Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan PDRB per Kapita. Tinggi rendahnya PDRB per Kapita sangat tergantung pada keberhasilan daerah untuk mendorong perkembangan PDRB (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE) dan mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk/LPP). Sepanjang LPE lebih besar dari LPP, maka PDRB per Kapita cenderung akan meningkat.



Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025 (Data diolah)

Gambar 2. 10. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

Selama periode 2020-2024, PDRB per Kapita Kabupaten Sambas menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. PDRB per Kapita Kabupaten Sambas pada tahun 2020 sebesar Rp 32,93 juta dan meningkat menjadi Rp 43,61 juta pada tahun 2024 atau meningkat rata-rata sebesar 3,05% per tahun.

2.1.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas belum berhasil mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT bertambah dari 3,71% tahun 2020 menjadi 4,99% tahun 2024. Peningkatan TPT di Kabupaten

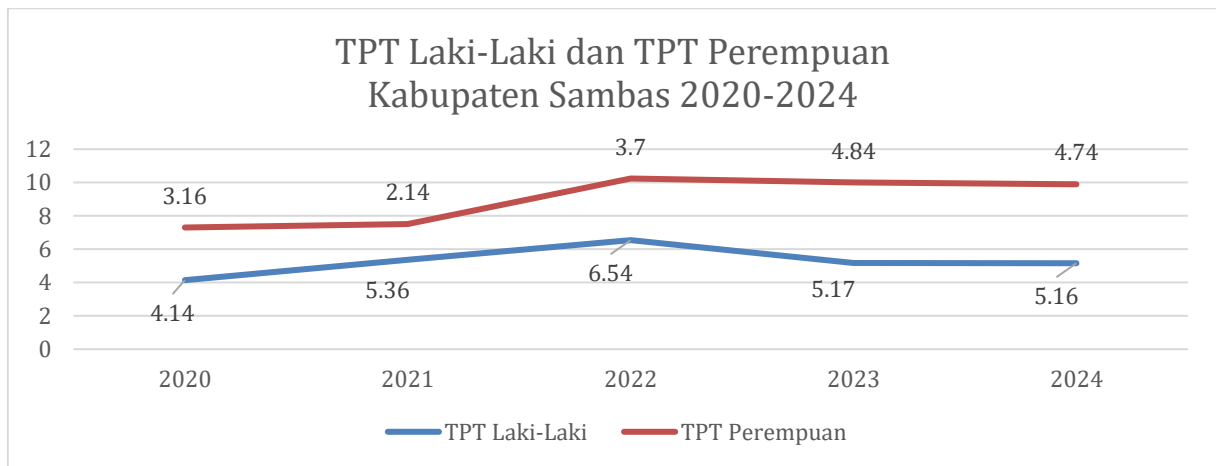
Sambas dalam lima tahun terakhir perlu dicermati. Pengangguran yang semakin banyak di tengah era bonus demografi akan berdampak buruk bagi pembangunan di masa datang. Saat dimana usia produktif lebih banyak dari usia non produktif, ternyata kecenderungan pengangguran terbuka meningkat pertanda pembangunan ekonomi yang sedang berlangsung dikategorikan belum berkualitas. Ekonomi bertumbuh namun kurang menambah kesempatan kerja.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2025

Gambar 2. 11. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran kaum laki-laki di Kabupaten Sambas lebih tinggi dibanding kaum perempuan. TPT Laki-laki meningkat dari 4,14% (2020) menjadi 5,16% (2024) dan TPT Perempuan juga meningkat dari 3,16% (2020) menjadi 4,74% (2024) pada periode yang sama, lihat Gambar 2.11. Keadaan demikian ini adalah wajar mengingat kaum laki-laki merupakan pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Tingginya pertambahan TPT perempuan mengindikasikan bahwa potret pasar kerja di Kabupaten Sambas tampaknya lebih berpihak pada lapangan kerja yang lebih membutuhkan kaum laki-laki.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2025

Gambar 2. 12. TPT Laki-Laki dan TPT Perempuan di Kabupaten Sambas

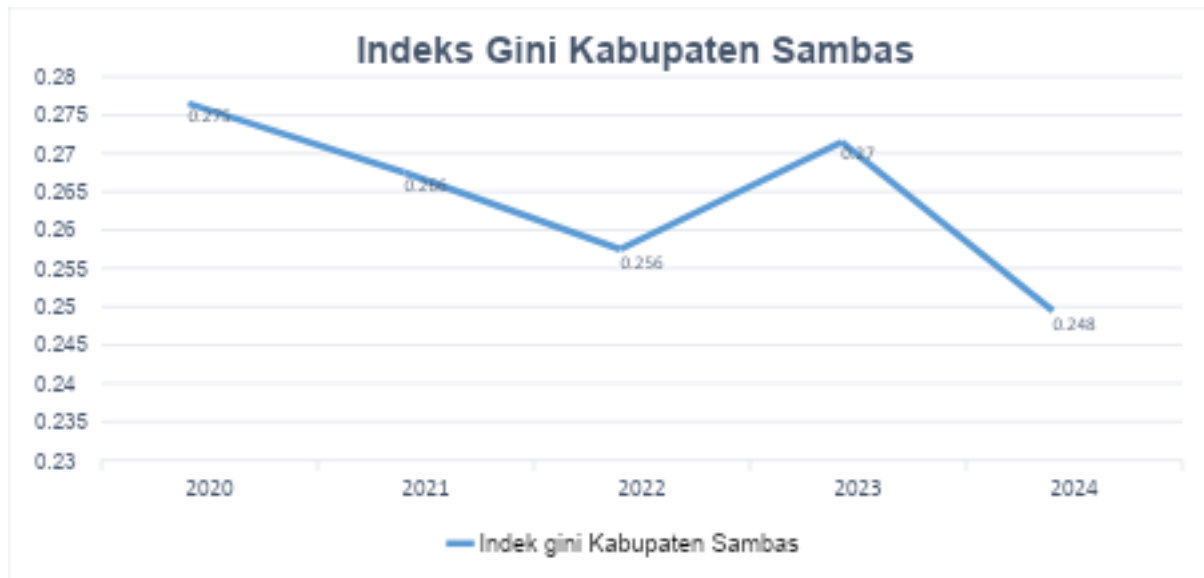
Selama periode 2020–2024, TPT laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan puncaknya pada tahun 2022. Tren TPT perempuan menunjukkan fluktuasi lebih tajam, terutama peningkatan cepat setelah 2021. Meskipun terjadi penurunan pada 2024, tingkat pengangguran secara keseluruhan masih perlu perhatian, khususnya dalam mendorong penciptaan lapangan kerja yang merata dan responsif terhadap gender di Kabupaten Sambas

2.1.2.1.5. Indeks Gini

Indeks Gini (*gini ratio*) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks yang memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Secara umum, ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Sambas yang ditunjukkan dengan Indeks Gini selama periode 2020-2024, menunjukkan bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2020, Indeks Gini sebesar 0,275 ; kemudian berturut-turut mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2022 menjadi 0,266 dan 0,256. Pada tahun 2023, kembali

Indeks Gini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2022, yakni menjadi 0,27. Secara keseluruhan, nilai Indeks Gini yang tetap berada di bawah 0,3 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Sambas relatif merata, meskipun upaya pengurangan kesenjangan sosial ekonomi tetap perlu dilanjutkan secara berkelanjutan. Secara rinci perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Sambas, 2025 (Data diolah)

Gambar 2. 13. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

2.1.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan sumber daya manusia terus membaik, namun perlu upaya transformatif untuk mewujudkan manusia unggul. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah. Di Kabupaten Sambas, Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi selama periode 2020-2024 bergerak sangat lambat. Hingga tahun 2024, IPM Sambas sebesar 71,20 masih lebih tinggi dari rata-rata IPM provinsi (71,19), atau berada pada ranking 3 dari 14 Kabupaten/Kota. Laju Pertumbuhannya tergolong moderat, yakni 1,07% per tahun. Berdasarkan Hasil LF SP 2020, peningkatan UHH tahun 2020-2024 berdampak pada peningkatan IPM Kabupaten Sambas menjadi 71,20 (2024), dan posisinya

bergeser dari ranking 10 menjadi ranking 6, lihat Tabel 2.21. Meskipun capaian IPM semakin meningkat, namun pembangunan manusia di Kabupaten Sambas sudah tergolong kategori tinggi ($IPM > 70$).

Penyebab utama pertambahan indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Sambas adalah dimensi kesehatan. Indikator Usia Harapan Hidup meningkat dari 68,83 tahun (2020) menjadi 74,02 tahun 2024. Dari dimensi pendidikan, Kabupaten Sambas masih tertinggal dibanding daerah lainnya. Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan dari 6,71 tahun (2020) menjadi 6,76 tahun (2024) jauh lebih rendah dari RLS propinsi (7,78 tahun) dan berada di ranking 13 dari 14 kabupaten/kota. Demikian juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS meningkat sedikit dari 12,61 tahun (2020) menjadi 12,76 tahun (2024), lebih tinggi dari HLS Provinsi (12,68 tahun), berada di ranking 5 dari 14 Kabupaten.

Dimensi ekonomi, perkembangannya cukup menggembirakan dalam mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 sebesar Rp.9.858.000,- meningkat sebesar 17,04% menjadi Rp.11.538.000,- tahun 2024. Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan peningkatan IPM Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 disebabkan dimensi pendidikan dan menurunnya kinerja perekonomian tahun 2019, 2020 dan 2021 sebagai akibat pandemic covid-19 dan Pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/ kapita/ tahun dari Rp.9,858 juta tahun 2020 menjadi 9,828 juta tahun 2021. Secara keseluruhan, peningkatan IPM Kabupaten Sambas cukup signifikan, namun masih memerlukan strategi transformatif terutama di sektor pendidikan agar pembangunan manusia dapat berkelanjutan dan merata.

Tabel 2. 26.
Perkembangan IPM Kabupaten Sambas dan Indikatornya Tahun 2020 – 2024

Indikator IPM	Tahun					Ranking
	2020	2021	2022	2023	2024	
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,3	73,43	73,7	74,02	74,32	6
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	6,71	6,72	6,74	6,75	6,76	13
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,61	12,63	12,70	12,72	12,76	5
Pengeluaran/kapita/thn (Rp.)	9.858	9.828	10.462	11.057	11,538	3
IPM Kabupaten Sambas	67,03	67,10	67,95	70,60	71,2	3
IPM Provinsi Kalimantan Barat	67,66	67,90	68,63	70,47	71,19	

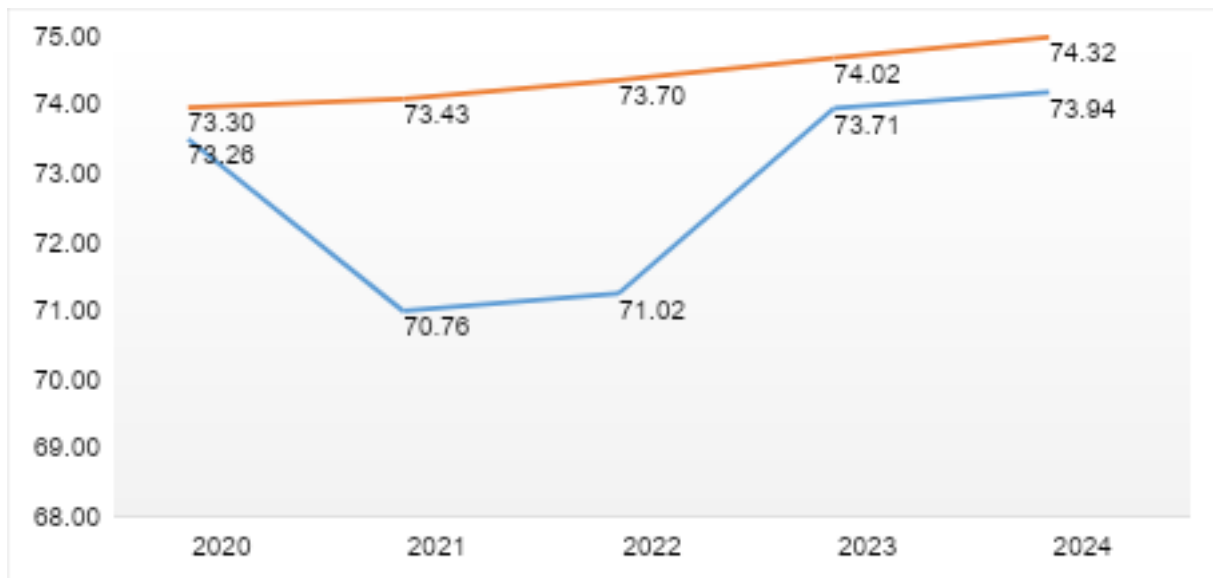
Sumber: BPS, Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka, 2025.

2.1.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua merupakan komitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan seluruh masyarakat di Kabupaten Sambas secara adil dan merata. Pemerintah daerah berupaya untuk memastikan bahwa setiap penduduk, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun indikator pada kesehatan untuk semua seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

2.1.2.2.1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-x. Ukuran yang umum digunakan adalah Angka Harapan Hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan UHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir. Angka harapan hidup Kabupaten Sambas tahun 2024 adalah 74,32 tahun, lebih tinggi dari angka harapan hidup Kalimantan Barat yaitu 73,94 tahun. Rata-rata angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Sambas adalah 73,75 tahun.



Sumber: BPS Kalimantan Barat dalam Angka, 2025.

Gambar 2. 14. Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten Sambas menunjukkan kinerja kesehatan masyarakat yang relatif lebih baik dan stabil dibandingkan rata-rata provinsi. Peningkatan UHH ini merupakan indikator positif dalam pembangunan manusia dan memperlihatkan efektivitas kebijakan di bidang kesehatan dan sosial di daerah. Kinerja ini perlu dijaga dan ditingkatkan melalui intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.2.2.2. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program nasional yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga. Program ini menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM). Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program PIS-PK, maka Kementerian Kesehatan mengembangkan sebuah indikator yaitu Indeks Keluarga Sehat (IKS). IKS menggunakan 12 (dua belas) indikator untuk mengukur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Adapun Kategori Keluarga berdasarkan rentang IKS yakni:

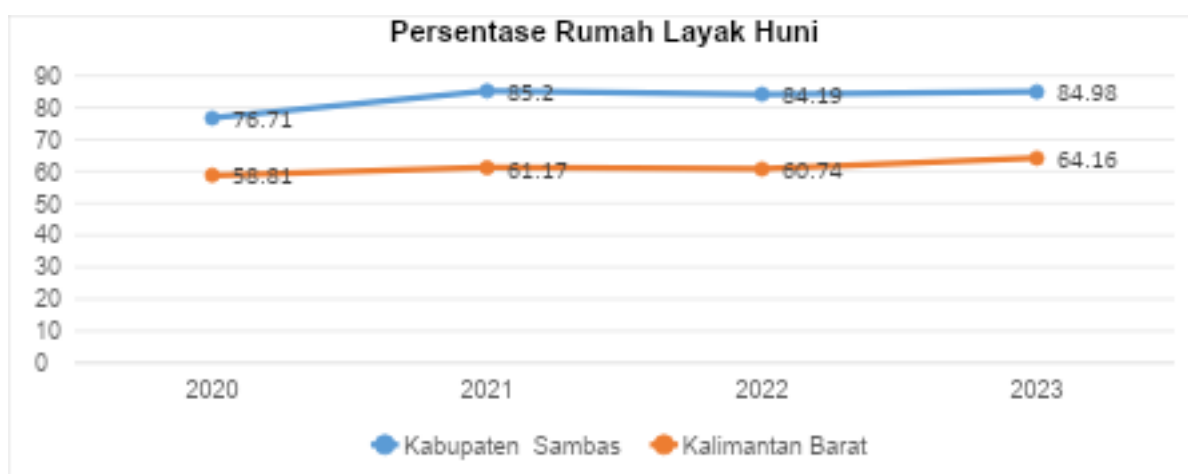
- Keluarga Sehat: $IKS > 0,8$ (80%);
- Keluarga Pra Sehat: $0,5 < IKS \leq 0,8$ (50% - 80%); dan
- Keluarga Tidak Sehat: $IKS < 0,5$ (50%).

Dilihat berdasarkan capaian IKS di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir dapat dilihat tabel berikut:

Tabel. 2. 27
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
0,071	0,075	0,084	0,083	0,103

Selain itu, indeks Keluarga Sehat dapat diukur dari kondisi rumah, akses terhadap Air Minum Layak dan Akses terhadap sanitasi Layak serta prevalensi Stunting. Dalam empat tahun terakhir, berdasarkan data Susenas 2020, 2021, 2022 dan 2023, persentase rumah layak huni di Kabupaten Sambas meningkat setiap tahunnya melebihi capaian provinsi. Pada tahun 2020, persentase rumah layak huni relatif tinggi, yaitu 76,71%. Kemudian, pada tahun 2023 meningkat semakin tinggi menjadi 84,98% tahun 2023, lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (64,16%).

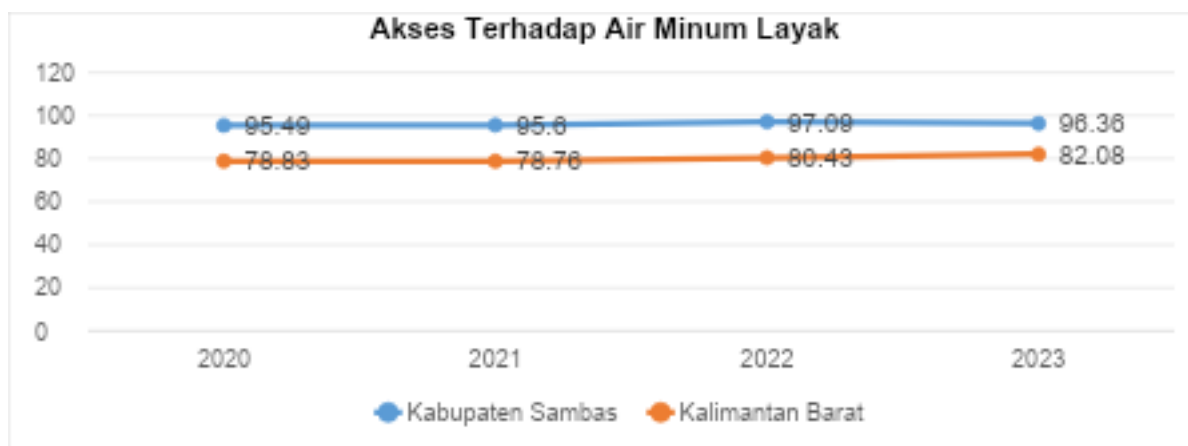


Sumber : SIPERINDU BKKBN, 2023

Gambar 2.15. Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2023

Air minum layak merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup. Air minum relatif banyak, namun air minum yang layak hidup ketersediaannya

terbatas. Akses terhadap air minum layak di Kabupaten Sambas relatif baik dan stabil pada pencapaian melebihi 90%, tepatnya 95,49% di tahun 2020 meningkat menjadi 96,36% tahun 2023. Capaian air minum layak di Kabupaten Sambas tergolong baik dan melebihi capaian rata-rata provinsi Kalimantan Barat, yakni 82,08% tahun 2023.



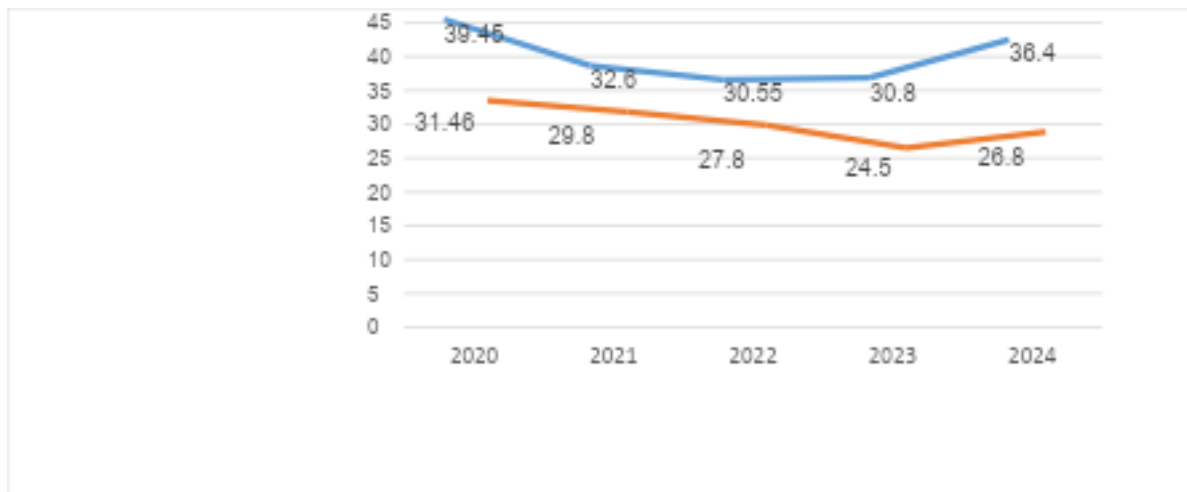
Sumber: SIPERINDU BKKBN, 2023

Gambar 2. 16. Akses Terhadap Air Minum Layak Akses Terhadap Air Minum Layak Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas

Berdasarkan gambar di atas, ini mencerminkan bahwa Kabupaten Sambas telah memiliki sistem penyediaan air minum yang relatif lebih merata dan dapat diakses oleh sebagian besar masyarakatnya. Keberhasilan ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya untuk menjangkau wilayah-wilayah yang mungkin masih memiliki tantangan geografis dan infrastruktur dasar yang terbatas. Peningkatan kualitas dan cakupan layanan air minum di masa depan juga dapat difokuskan pada pendekatan berbasis masyarakat serta pemanfaatan teknologi tepat guna agar keberlanjutan pelayanan tetap terjaga.

2.1.2.2.3. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting di Kabupaten Sambas tidak stabil atau turun naik. Turun dari 39,45% (2020) menjadi 32,6% (2021), kemudian turun menjadi 30,5% tahun 2022 dan lagi menjadi 36,4% (2024). Capaian prevalensi tahun 2024 ini lebih tinggi dari rata-rata prevalensi provinsi (26,8%) tahun 2024.



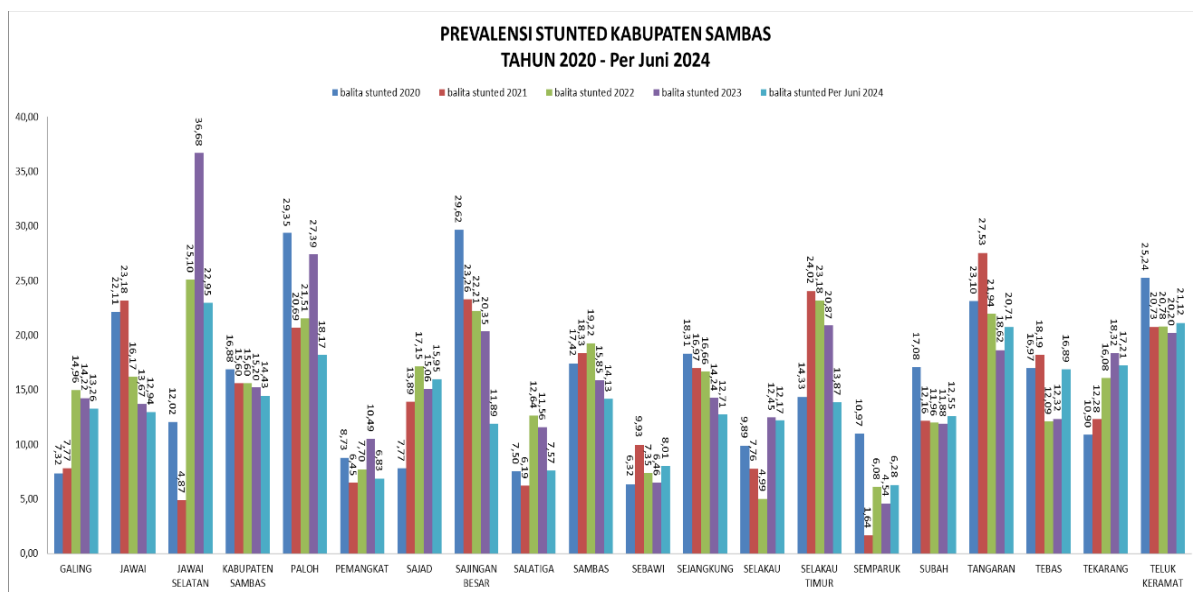
Sumber: SIPERINDU BKKBN, 2025

**Gambar 2.17. Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024
Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas**

Prevalensi stunting balita di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga Juni 2024 menunjukkan tren penurunan secara umum di sebagian besar kecamatan, mencerminkan adanya peningkatan efektivitas intervensi kesehatan dan gizi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Penurunan signifikan tercatat di Kecamatan Subah yang berhasil menekan angka stunting dari 17,9% pada tahun 2020 menjadi hanya 4,9% pada pertengahan 2024, diikuti oleh Kecamatan Sambas dan Kecamatan Sajingan Besar yang juga menunjukkan capaian positif.

Kecamatan dengan prevalensi tertinggi per Juni 2024 adalah Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Kecamatan Paloh, sehingga ketiganya perlu menjadi prioritas dalam perumusan kebijakan percepatan penurunan stunting. Sebaliknya, keberhasilan Kecamatan Subah dan Kecamatan Semparuk yang berhasil menurunkan prevalensi di bawah 5% dapat dijadikan contoh praktik baik untuk direplikasi di wilayah lain. Secara keseluruhan, meskipun telah tercapai kemajuan, kesenjangan antar wilayah masih nyata dan memerlukan pendekatan lintas sektor serta penguatan koordinasi antar instansi untuk memastikan penanganan stunting yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Sambas.

Data terkait prevalensi stunting di Kabupaten Sambas tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sambas, 2024

Gambar 2. 18. Grafik Prevalensi Stunting di Kabupaten Sambas Tahun 2020-Per Juni 2024

Berdasarkan grafik prevalensi stunting balita di Kabupaten Sambas tahun 2020 hingga Juni 2024, terlihat adanya tren penurunan secara bertahap di sebagian besar kecamatan, meskipun masih terdapat wilayah dengan angka yang fluktuatif atau cenderung tinggi. Beberapa kecamatan menunjukkan capaian positif dalam penurunan stunting, seperti Pemangkat yang konsisten menurunkan angka dari 17,6% (2020) menjadi 8,78% (2024), serta Sajingan Besar dari 20,92% menjadi 14,31%. Namun, di sisi lain, Kabupaten Sambas secara agregat masih memiliki kecamatan dengan tingkat prevalensi tinggi, seperti Jawai Selatan (29,54%) dan Teluk Keramat (25,24%) pada Juni 2024. Perbedaan capaian antar kecamatan ini menunjukkan adanya ketimpangan intervensi gizi dan layanan kesehatan, serta perbedaan dalam efektivitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Kecamatan dengan penurunan signifikan kemungkinan telah mengadopsi pendekatan yang lebih terintegrasi, seperti penguatan posyandu, edukasi gizi, dan dukungan lintas sektor. Kesimpulannya, meskipun Kabupaten Sambas mengalami perbaikan dalam menekan angka stunting, namun upaya yang lebih intensif, terarah, dan berbasis data lokal masih diperlukan, khususnya di kecamatan-

kecamatan dengan angka stunting yang masih tinggi, guna mencapai target nasional eliminasi stunting secara menyeluruh.

2.1.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan Berkualitas yang Merata adalah sebuah konsep ideal dan tujuan strategis dalam pembangunan pendidikan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Adapun indikator yang perlu diperhatikan dalam pendidikan berkualitas yang merata terdiri dari rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka literasi/numerasi, indeks literasi masyarakat, indeks literasi digital, dan indikator lainnya sesuai dengan konteks daerah.

2.1.2.3.1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sambas setiap tahun mengalami peningkatan dari 6,71 tahun pada tahun 2020, tahun 2021 (6,72 tahun), tahun 2022 (6,73 tahun) dan tahun 2024 (6,76 tahun) walaupun masih tergolong rendah dari RLS provinsi yaitu 7,37 tahun pada tahun 2020, tahun 2021 (7,45 tahun), tahun 2022 (7,59 tahun), tahun 2023 (7,71 tahun) dan tahun 2024 (7,78 tahun) atau meningkat sebesar 0,41 dari tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas mengalami kesenjangan akses atau kualitas pendidikan dibandingkan dengan rerata provinsi.

Tabel 2. 28.
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat

Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	6,71	6,72	6,74	6,75	6,76
Kalimantan Barat	7,37	7,45	7,59	7,71	7,78

Sumber: BPS Kalimantan Barat dalam Angka, 2025

Berdasarkan tabel di atas, meskipun Kabupaten Sambas mencatat peningkatan RLS setiap tahun, tingkat pertumbuhannya masih rendah dan tertinggal dari rata-rata provinsi. Rendahnya RLS mengindikasikan bahwa banyak penduduk Kabupaten Sambas belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP, yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia secara umum. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi pendidikan yang lebih agresif dan menyeluruh, seperti peningkatan akses pendidikan menengah, program pemberantasan putus sekolah, dan penguatan kualitas sekolah di

daerah terpencil, agar RLS dapat meningkat lebih signifikan dan sejajar dengan target pembangunan manusia secara berkelanjutan.

2.1.2.3.2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan perkiraan jumlah tahun yang diharapkan dapat ditempuh oleh seorang anak berusia 7 (tujuh) tahun pada masa mendatang dalam pendidikan formal, dengan asumsi pola angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur saat ini akan terus berlanjut. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sambas capaian HLS meningkat sedikit dari 12,61 tahun pada tahun 2020 menjadi 12,76 tahun pada tahun 2024, lebih tinggi dari HLS Provinsi 12,60 tahun pada tahun 2020 dan 12,68 tahun pada tahun 2024. Kenaikan tersebut mencerminkan perbaikan akses dan partisipasi pendidikan, serta optimisme terhadap keberlangsungan pendidikan formal anak-anak di daerah ini. Kabupaten Sambas memiliki potensi kuat dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, namun peningkatannya masih tergolong lambat. Perlu akselerasi kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan pencegahan putus sekolah agar HLS terus meningkat secara berkelanjutan.

Tabel 2. 29
Perbandingan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat

Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	12,61	12,63	12,70	12,72	12,76
Kalimantan Barat	12,60	12,65	12,66	12,67	12,68

Sumber: BPS, Kab. Sambas (Kabupaten Sambas dalam Angka 2025)

2.1.2.3.3. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Kabupaten Sambas, upaya peningkatan kedua aspek ini terus dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Literasi dan numerasi merupakan dua kompetensi dasar yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Kabupaten Sambas, upaya peningkatan kedua aspek ini terus dilakukan melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.

2.1.2.3.3.1. Angka Literasi (SD/SMP)

Angka literasi SD/SMP mengacu pada persentase siswa di tingkat sekolah dasar (SD) atau sekolah menengah pertama (SMP) yang mampu membaca dan menulis sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan mereka. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas sistem pendidikan dasar dan menengah dalam mengajarkan keterampilan literasi dasar kepada siswa. Komponen utama dari angka literasi SD/SMP meliputi kemampuan membaca dan menulis untuk menilai sejauh mana siswa dapat membaca dan menulis teks sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, standar pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi keterampilan literasi berdasarkan kurikulum nasional atau regional, serta kelompok usia yang mencakup rentang usia yang relevan dengan tingkat SD atau SMP.

Dengan demikian, angka literasi (SD/SMP) berfungsi sebagai alat penting dalam mengukur dan meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, dengan tujuan memastikan bahwa semua siswa memperoleh keterampilan literasi yang diperlukan untuk kesuksesan di masa depan. Adapun ketercapaian angka literasi (SD/SMP) Kabupaten Sambas sebagai berikut:

Tabel 2. 30
Capaian Angka Literasi SD/SMP Kabupaten Sambas
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1	Literasi SD	56,53	60,92
2	Literasi SMP	60,85	69,95

2.1.2.3.3.2. Angka Numerasi (SD/SMP)

Angka numerasi merujuk pada persentase populasi yang memiliki kemampuan dasar dalam memahami dan menerapkan konsep serta operasi matematika yang relevan dengan situasi sehari-hari. Numerasi mencakup berbagai keterampilan, termasuk kemampuan untuk melakukan perhitungan dasar, memahami angka serta hubungan antar angka, dan menerapkan pengetahuan matematika dalam konteks nyata. Sebagai salah satu indikator kunci dalam pendidikan matematika, angka numerasi sangat penting untuk menilai dan meningkatkan kualitas pengajaran matematika.

Dengan mengukur angka numerasi, kita dapat memastikan bahwa individu memiliki keterampilan matematis yang memadai, yang esensial bagi siswa untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam dunia kerja. Evaluasi terhadap angka numerasi membantu dalam merancang strategi pendidikan yang lebih efektif dan memastikan bahwa kurikulum matematika dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dengan lebih baik. Adapun ketercapaian angka numerasi (SD/SMP) Kabupaten Sambas sebagai berikut:

Tabel 2. 31
Capaian Angka Numerasi SD/SMP Kabupaten Sambas
Tahun 2023-2024

No	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1	Numerasi SD	43,22	38,39
2	Numerasi SMP	48,21	61

2.1.2.3.4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di tingkat kabupaten adalah alat ukur yang menilai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana untuk belajar sepanjang hayat. Indeks ini mengukur efektivitas program dan kebijakan pemerintah dalam memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran yang mendukung literasi di seluruh komunitas. Pembangunan literasi masyarakat tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas perpustakaan yang memadai, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan perpustakaan, pelatihan bagi staf, serta penyelenggaraan program-program literasi yang inovatif. Dengan demikian, indeks ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kabupaten berinvestasi dalam pengembangan literasi, mempromosikan budaya membaca, dan memperluas akses masyarakat terhadap sumber informasi dan pengetahuan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan literasi mereka dan berpartisipasi dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional berikut adalah IPLM Kabupaten Sambas:

Tabel 2. 32
Capaian IPLM Kabupaten Sambas

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	IPLM	n/a	n/a	78	71.42	74,25

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, Laporan Akhir IPLM tahun 2022-2024

2.1.2.3.5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai seberapa efektif dan efisien individu dalam menggunakan teknologi digital. Indeks ini mencakup berbagai aspek keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan perangkat digital dan internet, serta kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital. Penilaian indeks literasi digital dilakukan melalui empat indikator utama: kecakapan digital, etika digital, keamanan digital, dan budaya digital. Kecakapan digital melibatkan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat dan aplikasi digital, serta pemahaman tentang cara memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan tugas sehari-hari. Etika digital mencakup pemahaman tentang norma dan tata krama dalam berinteraksi di dunia digital, termasuk tanggung jawab dalam berkomunikasi dan berperilaku secara online. Keamanan digital berkaitan dengan kemampuan individu untuk melindungi data pribadi dan menjaga privasi saat menggunakan internet serta mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Budaya digital mencerminkan kesadaran tentang pengaruh teknologi pada masyarakat dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk berkontribusi pada perkembangan sosial dan budaya yang positif. Dengan mengukur empat aspek ini, Indeks Literasi Digital memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan individu untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital, serta membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan di bidang literasi digital.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.1.2.4.1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk manfaat uang atau pelayanan kesehatan yang diberikan saat terjadi risiko sosial seperti sakit, kecelakaan kerja, hari tua, kehilangan pekerjaan, dan kematian. Tujuannya program ini adalah untuk:

- a. melindungi tenaga kerja dan keluarganya dari kehilangan pendapatan;
- b. menjamin keberlanjutan hidup yang layak; dan
- c. meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Sambas hingga akhir Desember 2024 sebanyak 9.564 orang. Dengan rincian Perusahaan Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebanyak 223 perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar adalah 7.007 orang. Sedangkan Perangkat Desa dan Non ASN Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar sebanyak 123 Perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebanyak 2.557 orang.

Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sambas sehingga alokasi dana untuk kebutuhan tersebut belum dapat ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas sangat terbantu dengan adanya bantuan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk penambahan cakupan jaminan kesehatan ini, namun bantuan tersebut tidak berkelanjutan sehingga menjadi beban tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam melanjutkan dan mengalokasikan pembiayaannya dalam APBD. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan Jamkesda diantaranya terus melakukan sosialisasi tentang manfaat jaminan kesehatan dan memperluas cakupan jaminan kesehatan melalui APBD dan APBN.

2.1.2.5. Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju

2.1.2.5.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Dimensi toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesetaraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan kemampuan dalam menyelesaikan sebuah konflik dalam sebuah komunitas masyarakat.

Sampai saat ini indeks kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Sambas sangat baik, hal ini terlihat dari hasil kajian Balitbang agama Kementerian Agama pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pada dimensi toleransi skornya 77,4 (kategori tinggi), dimensi kesetaraan skornya 82 (kategori sangat tinggi), dan dimensi kerjasama antar umat beragama skornya 78,83 (kategori tinggi).

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sambas pada tahun 2024 jumlah prasarana peribadatan di Kabupaten Sambas berjumlah 1.703 buah tempat ibadah. Dengan rincian prasarana peribadatan untuk Umat Islam terdiri dari 828 Masjid dan 493 Mushola, prasarana peribadatan untuk Umat Katolik yakni 76 Gereja, prasarana peribadatan untuk umat protestan sebanyak 101 Gereja, prasarana peribadatan untuk Umat Budha terdiri dari 203 Vihara, prasarana peribadatan untuk Umat Hindu terdiri dari 2 Pura.

Tabel 2. 33.
Jumlah Rumah Ibadah Menurut Jenis Agama
di Kabupaten Sambas Tahun 2024

Kecamatan	Islam		Katolik	Protestan	Budha	Hindu
	Masjid	Mushola	Gereja	Gereja	Vihara	Pura
1. Selakau	51	5	1	2	28	-
2. Selakau Timur	17	2	1	-	-	-
3. Pemangkat	65	26	1	4	71	-
4. Semparuk	37	16	1	1	4	-
5. Salatiga	29	8	-	-	2	-

Kecamatan	Islam		Katolik	Protestan	Budha	Hindu
	Masjid	Mushola	Gereja	Gereja	Vihara	Pura
6. Tebas	101	44	9	20	31	-
7. Tekarang	24	24	-	-	2	-
8. Sambas	93	38	1	9	12	-
9. Subah	20	11	33	36	2	2
10. Sebawi	24	35	-	2	9	-
11. Sajad	12	25	-	-	-	-
12. Jawai	63	62	-	-	23	-
13. Jawai Selatan	22	7	1	4	11	-
14. Teluk Keramat	91	80	1	2	4	-
15. Galing	53	33	1	-	-	-
16. Tangaran	38	30	-	-	-	-
17. Sejangkung	39	27	1	1	-	-
18. Sajingan Besar	5	-	24	17	-	-
19. Paloh	44	20	1	3	4	-
2024	828	493	76	101	203	2
2023	806	481	86	95	211	2
2022	788	458	76	95	211	2
2021	766	446	75	95	193	2
2020	731	425	75	95	136	2

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025.

Dengan penambahan jumlah rumah ibadah yang signifikan di Kabupaten Sambas hingga tahun 2024, menunjukkan bahwa sasaran pokok masyarakat yang religius, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya di Kabupaten Sambas, bisa dikatakan sudah terwujud.

Jika dilihat data BPS bahwa tahun 2024 tentang pemeluk agama, mayoritas penduduk Kabupaten Sambas beragama Islam, yaitu sebanyak 579.114 jiwa kemudian disusul oleh agama Budha sebanyak 37.701 jiwa, Kristen katolik sebanyak 18.920 jiwa, protestan sebanyak 12.325 jiwa, hindu sebanyak 176 jiwa serta lainnya sebanyak 3.010 jiwa. Penyebaran agama non-Islam terlihat terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, seperti pemeluk Katolik dan Protestan yang signifikan di Kecamatan Sajingan Besar dan Subah, serta komunitas Buddha yang besar di Kecamatan Pemangkat dan Selakau.

Kabupaten Sambas merupakan daerah dengan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun tetap memiliki keberagaman agama yang tersebar di berbagai kecamatan. Keberagaman ini menunjukkan pentingnya penguatan nilai toleransi, harmoni sosial, serta pelayanan publik yang inklusif antar umat beragama sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial dan budaya di daerah.

Tabel 2. 34
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sambas Tahun 2024

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1. Selakau	34.457	198	114	-	3.797	263
2. Selakau Timur	13.508	100	23	-	6	-
3. Pemangkat	39.899	716	882	6	9.328	1.895
4. Semparuk	28.559	84	74	5	1.599	262
5. Salatiga	17.730	97	15	1	1.636	103
6. Tebas	69.902	2.487	2.576	5	7.394	141
7. Tekarang	18.044	26	6	-	361	15
8. Sambas	54.183	844	1.498	7	4.227	121
9. Subah	16.352	4.137	4.237	141	81	1
10. Sebawi	19.712	105	52	-	1.466	74
11. Sajad	14.335	2	3	-	10	-
12. Jawai	47.183	176	52	1	1.290	10
13. Jawai Selatan	17.686	166	54	6	3.957	80
14. Teluk Keramat	75.257	346	287	3	1.083	35
15. Galing	26.137	9	73	-	4	-
16. Tangaran	26.668	6	2	1	2	-
17. Sejangkung	27.889	63	65	-	129	1
18. Sajingan Besar	1.870	2.323	8.680	-	36	-
19. Paloh	29.743	440	227	-	1.295	9
2024	579.114	12.325	18.920	176	37.701	3.010
2023	573.448	12.105	18.687	175	38.174	3.009
2022	567.092	11.867	18.505	173	39.870	3.071
2021	563.778	11.791	18.507	188	42.430	3.045

Sumber: BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

2.1.2.5.2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks pembangunan kebudayaan (IPK) adalah instrumen untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. Adapun Indeks Pembangunan Kebudayaan memiliki 8 (delapan) dimensi, yaitu:

- Dimensi Ekonomi Budaya (1 indikator) Bidang kebudayaan;
- Dimensi Pendidikan (6 Indikator) pada Bidang Pendidikan;
- Dimensi Ketahanan Sosial Budaya (8 Indikator) Bidang kesbangpol;
- Dimensi Warisan Budaya (6 Indikator) Bidang kebudayaan;
- Dimensi Ekspresi Budaya (4 Indikator) Bidang kebudayaan;
- Dimensi Budaya Literasi (3 Indikator) Bidang arsip dan perpustakaan;
- Dimensi Gender (3 Indikator) Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- Dimensi Tata Kelola Budaya.

Kabupaten Sambas merupakan salah satu garda terdepan di Indonesia karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Kabupaten Sambas memiliki tiga suku yang mendominasi, yaitu Suku Melayu, Tionghoa dan Suku Dayak. Karakter masyarakat etnik Kabupaten Sambas memiliki ciri khas dengan kerja keras, jiwa kekeluargaan dan gotong royong, bangga pada identitas kesukumannya, serta menjunjung tinggi kebersamaan.

Keberagaman budaya di Kabupaten Sambas dapat dilihat melalui bentuk gotong royong, adat istiadat, makanan, permainan, dan lain-lain. Serta bentuk ekspresinya antara lain dapat dilihat dengan adanya kegiatan adatnya yang dilakukan oleh komunitas etnis yang ada di Kabupaten Sambas. Di samping itu, seni budaya di Kabupaten Sambas dapat dibagi ke dalam beberapa penjelasan, yaitu objek pemajuan kebudayaan, makanan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Objek pemajuan kebudayaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kegiatan utama, yaitu tradisi lisan, adat istiadat, dan ritus.

Penyelenggaraan urusan kebudayaan pada aspek pelayanan publik berkaitan dengan pelestarian, pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan khasanah seni dan budaya daerah sebagai potensi ekonomi mendukung sektor pariwisata daerah. Kabupaten Sambas mempunyai potensi wisata berbasis budaya dan alam yang unggul dan prospektif untuk dikembangkan guna memenuhi lonjakan minat masyarakat dalam melakukan perjalanan yang semakin meningkat. Namun sangat disayangkan pengelolaan paket wisata alam dan sejarah sampai saat ini masih terbatas. Untuk itu diperlukan kreativitas dan sinergitas lintas stakeholder guna membangun sektor pariwisata daerah menjadi sektor andalan perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Seluruh potensi budaya tersebut sesungguhnya menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Sambas yang layak untuk terus dilestarikan dan diwariskan ke generasi muda serta menjadi sarana pengungkit perekonomian masyarakat. Untuk itu semua diperlukan kebijakan dan terobosan guna mengangkat khazanah budaya daerah menjadi milik Indonesia dan dunia.

Kabupaten Sambas, yang terletak di wilayah perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya. Keberagaman etnis, bahasa, tradisi, serta peninggalan sejarah yang dimiliki menjadikan Sambas sebagai salah satu pusat kebudayaan penting di Kalimantan. Warisan budaya tersebut tidak hanya berupa benda seperti bangunan bersejarah, kerajinan tangan, dan naskah kuno, tetapi juga warisan tak benda seperti tradisi lisan, adat istiadat, seni pertunjukan, hingga kuliner khas yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam menghadapi arus modernisasi dan globalisasi, pengelolaan warisan budaya menjadi hal yang mendesak agar kekayaan budaya Sambas tetap terjaga dan berkelanjutan. Upaya pelestarian tidak hanya ditujukan untuk menjaga identitas masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi menjadi aset strategis dalam pengembangan pariwisata daerah. Melalui pengelolaan yang baik, warisan budaya dapat menjadi sumber pendidikan, inspirasi, dan ekonomi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat Sambas.

Tabel 2. 35
Warisan Budaya Tak benda Kabupaten Sambas

No.	Nama Warisan Budaya Takbenda	Lokasi	Penetapan
1	Songket Sambas	Sambas, Sajad	2013
2	Bubur Paddas	Kab. Sambas	2015
3	Saprahan Sambas	Kab. Sambas	2019
4	Ratip Saman Sambas	Teluk Keramat	2019
5	Tandak Sambas	Kab. Sambas	2019
6	Zikir Nazam	Kab. Sambas	2020
7	Bahasa Melayu Sambas	Kab. Sambas	2020
8	Tari otar-Otar	Galing	2021
9	Jappin Lambut	Tebas	2021
10	Antar Ajong	Paloh, Tangaran	2021

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, 2025

Pada ranah takbenda, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendata dan mempromosikan sedikitnya 10 WBTb yang telah ditetapkan secara nasional, antara lain Tenun Sambas, Bubur Pedas, Tari Tandak Sambas, Saprahan, Ratib Saman Sambas, Bahasa Melayu Sambas, Zikir Nazam Sambas, Jepin Lembang, Otter-otter, dan Antar Ajong. Pengakuan ini diperkuat oleh kabar penetapan sebelumnya misalnya

Sertifikat WBTb untuk Saprahan, Ratib Saman, dan Tandak Sambas serta rujukan nasional yang menyebut Tenun Sambas telah diakui sebagai warisan budaya takbenda dan berkembang hingga panggung internasional. Hal ini menjadi dasar legitimasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan WBTb di Sambas.

Secara kelembagaan, pengelolaan cagar budaya dan WBTb di Sambas didorong melalui kebijakan daerah yang berpijak pada tata kelola perlindungan pengembangan pemanfaatan. Praktiknya tampak pada penyelenggaraan Festival WBTb oleh Disdikbud untuk edukasi publik dan promosi; juga pada pengarusutamaan muatan lokal “Sambas Berbudaya” yang diintegrasikan dalam pembelajaran oleh pendidik Pendidikan Agama Islam, dengan dukungan langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pendekatan ini memadukan pelestarian berbasis komunitas dengan dukungan pemerintah, sehingga nilai budaya diturunkan lintas generasi melalui sekolah, pertunjukan, dan ruang publik.

Pemanfaatan ekonomi-budaya menjadi bagian dari strategi pelestarian. Contohnya, Tenun Sambas yang berakar kuat dalam identitas Melayu Sambas terus dikembangkan perajin (banyak diinisiasi perempuan) hingga menarik pasar dan perhatian di luar negeri; penguatan nilai tambah budaya juga terlihat pada peluncuran destinasi “Batu Ramin Jadi” sebagai wisata cagar budaya oleh Bupati Sambas pada Mei 2024. Inisiatif ini menunjukkan model pengelolaan yang menghubungkan perlindungan benda/situs dengan penghidupan warga serta pariwisata budaya, sehingga pelestarian berjalan seiring peningkatan kesejahteraan.

Kesimpulannya, pengelolaan warisan budaya Kabupaten Sambas telah memiliki pijakan data dan praktik yang nyata: daftar WBTb yang diakui nasional. Tantangan ke depan meliputi pendataan lebih rinci (inventaris berkelanjutan), penguatan dokumentasi Bahasa Melayu Sambas (kamus, fonologi, dan bahan ajar), serta peningkatan kapasitas komunitas dan perajin agar nilai budaya tetap hidup dan adaptif. Dengan memperkuat kolaborasi pemda–komunitas–pendidikan dan memastikan setiap objek/ekspresi memiliki rencana perlindungan–pengembangan–pemanfaatan yang terukur,

Sambas berpeluang menjadi model pelestarian budaya berbasis identitas lokal yang berdaya saing.

Bahasa daerah utama di Sambas adalah Bahasa Melayu Sambas varietas Melayu yang digunakan luas oleh masyarakat di wilayah tersebut. Sumber rujukan linguistik menegaskan kedudukannya sebagai bahasa Melayu yang dipakai di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat bagian barat laut. Fakta ini menjadi pijakan untuk program perlindungan berbasis identitas bahasa lokal.

Dari sisi kebijakan, Perda Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang pelestarian kebudayaan yang memuat ketentuan bahwa bahasa daerah yang digunakan sebagian besar masyarakat adalah Bahasa Melayu Sambas memberi legitimasi hukum bagi pelestarian melalui pendidikan, pelayanan publik, dan ruang sosial-budaya. Pada ranah program, Badan Bahasa melalui Balai Bahasa Kalimantan Barat mulai menjalankan Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) di Kalbar pada 2024, melibatkan pemerintah provinsi sampai kabupaten/kota. Rangkaian koordinasi dan publikasi resmi menegaskan fokus penguatan perlindungan bahasa dan sastra daerah lewat pelatihan, festival, hingga pengajaran materi bahasa di sekolah dan komunitas. Walau contoh kegiatan spesifik 2024 menyorot Bahasa Melayu (di Pontianak–Kubu Raya) dan Bahasa Dayak Hibun (Sanggau), pola kemitraan ini memberi peluang replikasi dan dukungan teknis bagi Bahasa Melayu Sambas di wilayah kabupaten.

Ketersediaan bahan ajar dan sumber rujukan menjadi modal pelestarian. Tersedia bahan ajar “Mengenal Kabupaten Sambas” (muatan lokal), kamus mini dan leksikon bidang budaya Melayu Sambas, serta kajian akademik yang mendorong integrasi lagu daerah Melayu Sambas dalam pembelajaran untuk mentransfer nilai budaya dan kosa kata kepada peserta didik. Dengan dukungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan seperti sosialisasi materi ajar muatan lokal, bisa menjadi kurikulum tematik literasi bahasa daerah, dokumentasi kosakata, dan produk pembelajaran kontekstual.

Pelestarian Bahasa Melayu Sambas di Kabupaten Sambas telah memiliki dasar yang jelas yaitu sebagai:

- a. identitas bahasa yang kuat di komunitas penuturnya;
- b. dukungan perencanaan dan langkah operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Mulok/FGD);
- c. ekosistem program RBD Badan Bahasa tingkat provinsi; dan
- d. ketersediaan bahan ajar, kamus, dan praktik pembelajaran berbasis budaya.

Ke depan, prioritas yang disarankan adalah:

- a. inventarisasi kosakata/varian dialektal secara berkelanjutan; penguatan Mulok Bahasa Melayu Sambas lintas jenjang;
- b. pelatihan guru dan komunitas penutur;
- c. produksi media digital (audio video) untuk intergenerasi; dan
- d. serta sinergi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balai Bahasa komunitas.

Melalui kebijakan program sumber belajar yang konsisten, Bahasa Melayu Sambas berpeluang terpelihara sebagai bahasa hidup di ruang keluarga, sekolah, dan ruang publik Sambas.

Pondasi kebijakan daerah sudah jelas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Kebudayaan yang mengamanatkan perlindungan pengembangan pemanfaatan unsur budaya (kesenian, cagar budaya, bahasa, adat, tradisi lisan, permainan rakyat, dan lain-lain) beserta mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasinya. Arah kebijakan ini juga tercermin pada dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah yang memuat sasaran “meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.” Dengan kerangka ini, program strategis budaya memiliki legitimasi hukum sekaligus garis besar operasional di level OPD.

Strategi kunci lain adalah pendidikan berbasis budaya lokal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas mendorong *muatan lokal* (Mulok) “Sambas Berbudaye” melalui sosialisasi materi ajar dan pelibatan guru, agar sejarah dan nilai budaya ditransfer antar generasi di sekolah.

Bahan ajar pendukung seperti buku “Mengenal Kabupaten Sambas” dapat menjadi paket literasi budaya yang sistematis dari kelas ke kelas. Pendekatan ini memperkuat internalisasi nilai (adat, bahasa, etika sosial) sekaligus membangun kebanggaan identitas sejak dini.

Di tingkat komunitas, pemerintah daerah mengakselerasi ekosistem peristiwa budaya yang menghidupkan nilai-nilai lokal di ruang publik. Contohnya Festival Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang mulai digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Desember 2021, Festival Budaya Antar Ajong (ritus maritim) yang menyedot ribuan warga di Pantai Trabitan pada 2023 serta Karnaval Tenun Sambas 2023 untuk merawat kriya lokal. Rangkaian agenda ini menumbuhkan partisipasi warga, regenerasi pelaku seni, dan menempatkan nilai budaya sebagai praktik hidup bukan sekadar arsip.

Program strategis juga diarahkan pada pariwisata berbasis budaya. Pada 13 Mei 2024, Bupati Sambas meluncurkan kawasan wisata cagar budaya Batu Ramin Jadi sebagai contoh pemanfaatan situs bersejarah yang edukatif sekaligus menyejahterakan. Kebijakan ini didasari dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 51 Tahun 2020 tentang Desa Wisata yang memberi pedoman penetapan/pengelolaan desa wisata, organisasi pengelola, promosi, pembinaan, hingga pembiayaan mendorong desa-desa membangun atraksi dan layanan berbasis seni-budaya setempat secara berkelanjutan.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa penguatan nilai budaya lokal Sambas berjalan di atas 4 (empat) sumbu yaitu:

- a. regulasi kuat berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2019 yang memberi payung pelestarian;
- b. pendidikan budaya melalui muatan lokal dan bahan ajar;
- c. aktivasi komunitas lewat festival dan karnaval budaya; dan
- d. pariwisata budaya seperti Batu Ramin Jadi sebagai Desa Wisata.

Beberapa hal yang menjadi prioritas selanjutnya yaitu menjaga konsistensi implementasi regulasi dengan indikator terukur, memperluas muatan lokal ke seluruh jenjang dan satuan pendidikan, mengakurasi kalender event budaya tahunan lintas kecamatan serta menguatkan kapasitas desa wisata melalui kurasi atraksi, pemandu budaya, dan

pemasaran digital. Dengan sinergi kebijakan sekolah komunitas desa wisata, nilai budaya Sambas akan tetap hidup, relevan dan berdaya saing.

2.1.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia.

IPA, IPHA dan IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 (empat) klaster pemenuhan hak anak dan 1 (satu) klaster perlindungan khusus anak, yaitu:

- a. Klaster I terdiri dari hak sipil dan kebebasan;
- b. Klaster II terdiri dari lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Klaster III terdiri dari kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Klaster IV terdiri dari pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan
- e. Klaster V terdiri dari perlindungan khusus.

Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, jumlah pengaduan kasus perempuan seperti kekerasan seksual, trafficking dan KDRT terus mengalami peningkatan dimana satu diantaranya korbannya adalah anak-anak. Berikut ditampilkan data Kasus Kekerasan terhadap anak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 36
Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak
Tahun 2020 – 2024

JENIS KASUS	2020	2021	2022	2023	2024
ABH	16	5	11	1	
EXPLOITASI		2			1
FISIK	1	3	7		5
KENAKALAN ANAK		1			1
PENELANTARAN	1	2		3	2
PSIKIS	1		4		
SEKSUAL	40	31	43	52	46
TRAFFICKING				1	
Grand Total	59	44	65	57	55

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Sambas, 2025

Data kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sambas periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan jumlah kasus relatif tinggi, yaitu 59 kasus pada 2020, turun menjadi 44 kasus pada 2021, meningkat tajam menjadi 65 kasus pada 2022, dan kemudian menurun kembali menjadi 55 kasus pada 2024. Kasus yang paling dominan adalah kekerasan seksual yang secara konsisten menyumbang lebih dari 70% total kasus setiap tahun, diikuti kekerasan fisik, penelantaran, psikis, eksploitasi, dan sedikit kasus trafficking. Kondisi ini mengindikasikan adanya kerentanan serius dalam perlindungan anak, terutama terkait rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sistem pengawasan keluarga serta lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Sambas perlu merumuskan kebijakan prioritas berupa program pencegahan kekerasan anak melalui edukasi dan kampanye kesadaran publik, penguatan layanan perlindungan anak dan pendampingan korban, peningkatan koordinasi lintas sektor khususnya di wilayah perbatasan, serta pengembangan sistem data dan pelaporan terpadu untuk memastikan pengendalian dan penurunan kasus yang berkelanjutan.

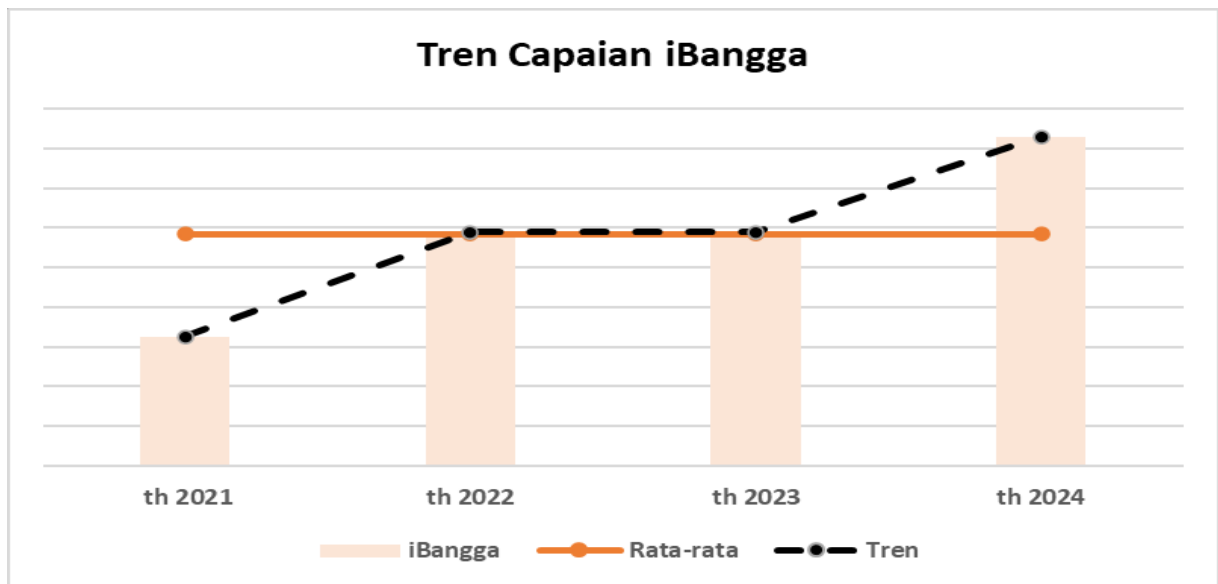
2.1.2.6.2. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di mana pemerintah dan pemerintah daerah

berkewajiban menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan kualitas anak, remaja, maupun lansia; pemberdayaan keluarga rentan; peningkatan kualitas lingkungan keluarga; serta peningkatan akses dan peluang ekonomi keluarga.

Untuk mengukur pembangunan keluarga, BKKBN telah mengembangkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang terdiri atas 3 (tiga) dimensi, 11 (sebelas) indikator, serta 17 (tujuh belas) variabel. iBangga mencerminkan capaian pembangunan keluarga dalam skala 0 s.d. 100 dengan kategori rentan (di bawah 40), berkembang (40 s.d. 70), serta tangguh (di atas 70). Capaian indeks pembangunan keluarga di Kabupaten Sambas semakin membaik. Indeks Pembangunan Keluarga semakin meningkat dari 55,85 tahun 2022 menjadi 56,85 tahun 2023 masih tergolong pada kategori berkembang. Sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 59,91.

Tren capaian iBangga menunjukkan peningkatan yang sama sebesar 5% pada tahun 2022 dan tahun 2024, serta berada di atas rata-rata pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan kualitas kehidupan keluarga berdasarkan berbagai faktor penting yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembangunan di Kabupaten Sambas. Garis trend yang menanjak mengindikasikan adanya kemajuan berkelanjutan dalam pelaksanaan program *iBangga* selama periode tersebut. Tren capaian *iBangga* Kabupaten Sambas menunjukkan perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencerminkan efektivitas strategi dan program pembangunan yang dilaksanakan. Peningkatan ini dapat dijadikan indikator positif terhadap kinerja pembangunan daerah yang inklusif dan berbasis keluarga. Pemerintah daerah perlu mempertahankan dan memperkuat intervensi yang telah terbukti berhasil guna menjaga keberlanjutan capaian yang telah dicapai.

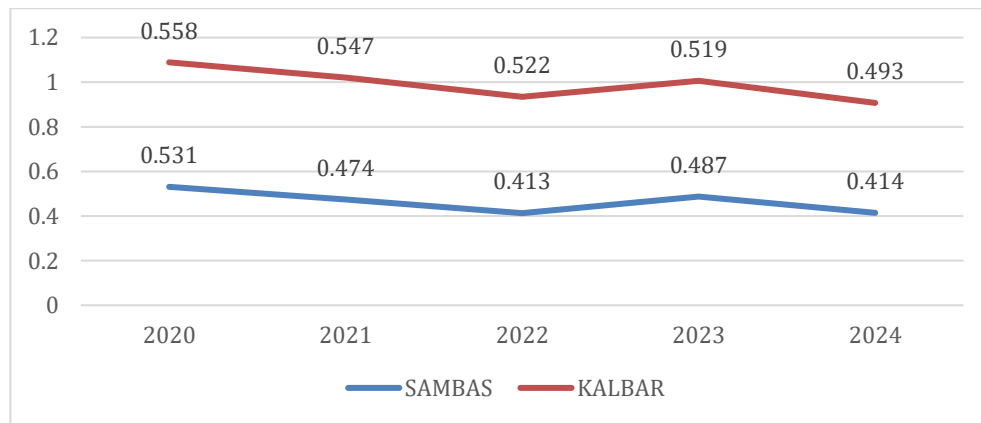


Sumber: LKPD Dinas PPPAPKB Kabupaten Sambas, 2024.

Gambar 2. 19. Tren Capaian iBangga Kabupaten Sambas

2.1.2.6.3. Indeks Ketimpangan Gender

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tingkat kabupaten/kota selama kurun waktu 2020-2024 mengindikasikan perkembangan ketimpangan gender yang semakin baik. Di Kabupaten Sambas angka IKG semakin menurun dari 0,531 (2020) menjadi 0,414 (2024). Penurunan ini pertanda meningkatnya kesetaraan laki-laki dalam pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Sambas. Dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas selalu mencatat IKG yang lebih rendah setiap tahunnya, menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Sambas relatif lebih kecil daripada rata-rata provinsi. Tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Sambas secara umum menunjukkan tren penurunan selama lima tahun terakhir, yang mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Meskipun sempat terjadi fluktuasi pada tahun 2023, capaian tahun 2024 tetap menunjukkan perbaikan dibandingkan awal periode. Kabupaten Sambas juga konsisten memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat, menandakan efektivitas program-program lokal dalam mendorong kesetaraan gender.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat

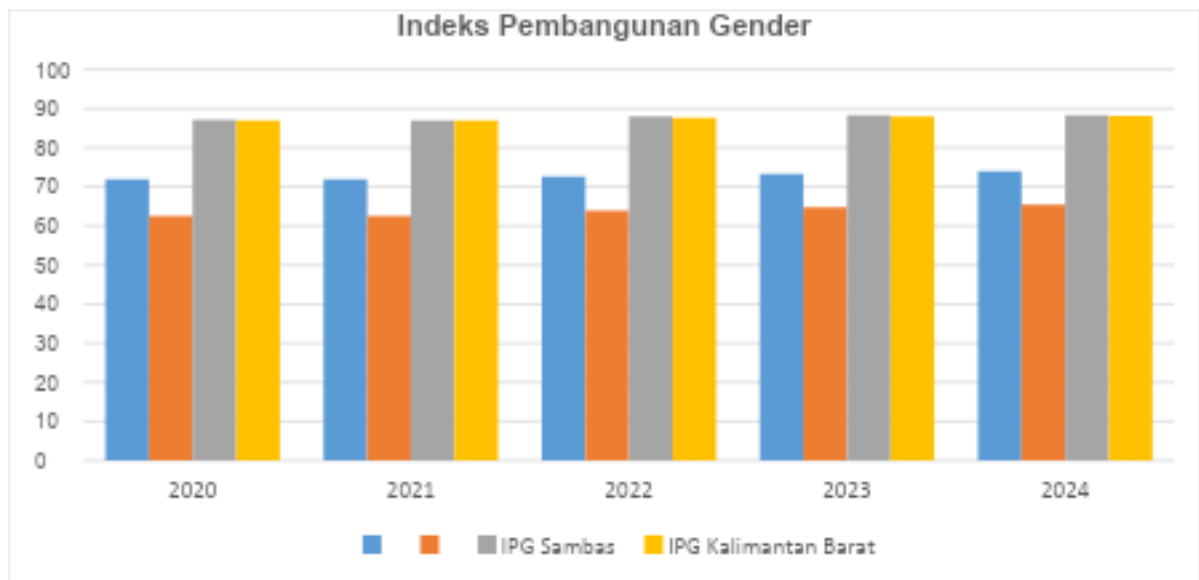
Gambar 2. 20. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Sambas dan Provinsi Kalimantan Barat

2.1.2.6.4. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan perbandingan IPM perempuan terhadap IPM Laki-laki. Semakin tinggi capaian IPG pertanda pembangunan sosial ekonomi dan kesehatan yang dilaksanakan semakin meningkatkan derajat hidup kaum perempuan. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki dalam aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPM Laki-laki dan IPM Perempuan sama-sama meningkat selama periode 2020-2024. IPM laki-laki meningkat dari 71,85 pada tahun 2020 menjadi 74 pada tahun 2024, demikian juga IPM Perempuan meningkat dari 62,56 pada tahun 2020 menjadi 65,41 pada tahun 2024. Perbedaan IPM laki-laki dengan IPM Perempuan semakin kecil. Ini pertanda semakin kecil perbedaan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan sosial, ekonomi dan kesehatan.

Capaian IPG di Kabupaten Sambas dalam lima tahun terakhir meningkat dari 87,07 pada tahun 2020 menjadi 88,39 pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan kesetaraan dalam pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Nilai ini juga cenderung sejalan dengan IPG Kalimantan Barat yang meningkat dari 86,87 menjadi 88,2 di periode yang sama. Artinya, kesenjangan gender dalam pencapaian pembangunan manusia semakin mengecil, walaupun IPM perempuan masih perlu didorong lebih kuat. Peningkatan nilai IPM laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sambas menunjukkan kemajuan dalam pembangunan manusia yang lebih inklusif.

Meskipun masih terdapat kesenjangan antara IPM laki-laki dan perempuan, peningkatan nilai IPG yang konsisten hingga mencapai 88,39 pada tahun 2024 menandakan upaya Pemerintah Kabupaten Sambas dalam mengurangi disparitas gender mulai menunjukkan hasil positif. Namun demikian, akselerasi kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perempuan masih sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan dalam pembangunan.



Sumber: BPS, *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka*, 2025.

Gambar 2. 21. IPM Laki-Laki, IPM Perempuan dan IPG Kab.Sambas

2.1.2.6.5. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan.

Adapun tolok ukur Indeks Pembangunan Pemuda ada 5 (lima) domain dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda. Kelima belas indikator yang dibagi dalam 5 (lima) domain yaitu :

1. Domain Pendidikan ada 3 (tiga) indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan ada 4 (empat) indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil/
3. Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja ada 2 (dua) indikator, persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain Kepemimpinan dan Partisipasi ada 3 (tiga) indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat.
5. Domain Gender dan Diskriminasi terbagi dalam 3 (tiga) indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang tersedia hingga saat ini hanya mencakup tingkat provinsi, sehingga analisis secara spesifik di tingkat kabupaten atau kota, termasuk evaluasi pembangunan kepemudaan di wilayah-wilayah tertentu, belum dapat dilakukan secara terperinci. Meskipun demikian, IPP provinsi tetap memberikan gambaran umum mengenai kondisi dan kemajuan pembangunan pemuda dalam aspek pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan kesempatan ekonomi. Di Kalimantan Barat, nilai IPP dapat menjadi dasar awal untuk merumuskan kebijakan kepemudaan yang lebih terfokus, sekaligus mendorong perlunya pengumpulan data serupa di tingkat kabupaten/kota agar intervensi pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan merata di seluruh wilayah.

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas menetapkan tiga fokus pembangunan pemuda yang meliputi penguatan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan, peningkatan partisipasi aktif pemuda terutama melalui kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi dan pencegahan perilaku berisiko pemuda termasuk pencegahan perilaku negatif (perundungan, intoleransi, HIV, NAPZA, seks bebas, dan sebagainya). Adapun

organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sambas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 36
Organisasi Kepemudaan yang ada di Kabupaten Sambas 2024

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN	SEKRETARIAT / ALAMAT
1	PPI PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KAB. SAMBAS	SAMBAS
2	KNPI KAB. SAMBAS (KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA)	KEC.SAMBAS DAN KEC. PEMANGKAT
3	PRAMUKA KAB. SAMBAS	SAMBAS
4	IRMAS KAB. SAMBAS (IKATAN REMAJA MASJID)	KAB. SAMBAS
5	ORANG MUDA KATOLIK	KAB. SAMBAS
6	HMI KAB. SAMBAS (HIMPUNAN MAHASISWA INDONESIA)	SAMBAS
7	IKATAN KELUARGA MAHASISWA KAB. SAMBAS	SAMBAS
8	PEMUDA PANCASILA	SAMBAS
9	BEM UNISSAS, BEM POLTESA, DAN BEM STIKES	SAMBAS

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sambas, 2025

Data menunjukkan keberadaan dan sebaran berbagai organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Sambas. Terdapat setidaknya sembilan organisasi kepemudaan yang mencakup spektrum luas kegiatan, mulai dari kepemimpinan nasional (KNPI), kegiatan kepramukaan (Pramuka), kegiatan religius (IRMAS dan Orang Muda Katolik), organisasi mahasiswa (HMI, BEM), hingga organisasi berbasis ideologi seperti Pemuda Pancasila. Sebagian besar organisasi ini berpusat di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sambas dan Pemangkat, yang menjadi pusat aktivitas pendidikan dan pemerintahan, menandakan tingginya dinamika pemuda di daerah tersebut. Selain itu, kehadiran organisasi intra-kampus seperti BEM UNISSAS, POLTESA, dan STIKES menunjukkan partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah. Keberadaan organisasi kepemudaan yang beragam di Kabupaten Sambas mencerminkan potensi besar dalam pengembangan SDM muda yang inklusif, lintas sektor, dan ideologis. Pemerintah daerah perlu mengoptimalkan peran strategis organisasi-organisasi ini sebagai mitra dalam pembangunan sosial, politik, dan budaya lokal, melalui fasilitasi program kepemudaan, pelatihan kepemimpinan, dan ruang partisipatif. Penguatan sinergi antar organisasi serta dukungan infrastruktur

kelembagaan dapat mempercepat lahirnya generasi muda yang produktif dan berdaya saing di Kabupaten Sambas.

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Aspek ini menjadi penting ditengah persaingan antar wilayah yang semakin ketat, baik dalam skala nasional maupun global. Daya saing tidak hanya dilihat dari kekayaan sumber daya alam, tetapi juga dari kualitas kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif.

Di Kabupaten Sambas, penguatan daya saing daerah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan jangka menengah dan panjang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, perdagangan lintas batas, serta pariwisata berbasis budaya dan alam. Namun, untuk dapat bersaing secara lebih luas, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, konektivitas infrastruktur, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan wirausaha lokal dan masuknya investasi. Peningkatan daya saing juga memerlukan sinergi antar sektor dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Peningkatan daya saing daerah bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan memperkuat aspek daya saing seperti kemudahan berusaha, efisiensi pelayanan publik, dan kesiapan digitalisasi, Kabupaten Sambas berpeluang untuk mengakselerasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan berbasis data, inovasi, dan keunggulan lokal harus terus didorong agar daya saing daerah benar-benar menjadi fondasi kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

2.1.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemajuan dan kemandirian suatu daerah. SDM yang unggul mencerminkan kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan etos kerja masyarakat yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan global. Di era digital dan persaingan terbuka saat ini, kemampuan daerah untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi menjadi faktor penentu dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kesejahteraan jangka panjang.

Di Kabupaten Sambas, penguatan daya saing SDM dilakukan melalui berbagai upaya peningkatan akses dan mutu pendidikan, pelatihan vokasional, serta peningkatan layanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah terus mendorong pengembangan SDM dengan memperluas kesempatan belajar, peningkatan literasi digital, serta dukungan terhadap pelatihan kerja dan kewirausahaan. Selain itu, perhatian terhadap gizi, kesehatan ibu dan anak, serta penurunan angka stunting juga menjadi strategi penting dalam membangun generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Sambas merupakan tonggak penting dalam pembangunan sumber daya manusia di wilayah perbatasan ini. Sebagai salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Sambas menunjukkan keseriusan dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui hadirnya sejumlah institusi yang representatif, baik negeri maupun swasta.

Salah satu lembaga yang menjadi kebanggaan daerah adalah Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (UNISSAS). Bertransformasi dari institusi keagamaan menjadi universitas pada tahun 2024, UNISSAS mencerminkan semangat masyarakat Sambas untuk memajukan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam sekaligus merespons kebutuhan zaman. Kampus ini menjadi pusat pengembangan ilmu keislaman, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sosial yang terus tumbuh dan memperluas jangkauan pengabdianya ke pelosok desa.

Di sisi lain, Politeknik Negeri Sambas (POLTESA) hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan potensi daerah. Dengan program-program diploma di bidang pertanian, teknologi informasi, teknik, dan pariwisata, POLTESA mempersiapkan lulusan yang siap kerja dan berkontribusi langsung pada pembangunan ekonomi lokal. Kehadirannya memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan dunia industri di kawasan Sambas.

Tabel 2. 37
Jumlah Perguruan Tinggi dan Mahasiswa di Kabupaten Sambas

No	Nama Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa
1.	Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas	1.481
2.	Politeknik Negeri Sambas	2.281
3.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sambas	117
4.	Akademi Dakwah Indonesia Sambas	12
Total Mahasiswa		3.891

Sumber: *Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, 2025*

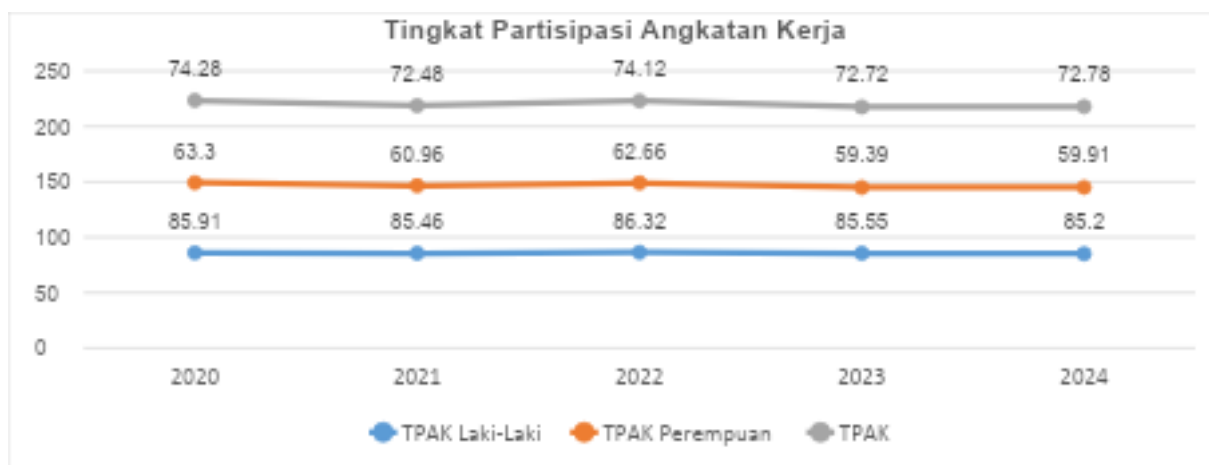
STIKES Sambas menunjukkan komitmen dalam memajukan sektor kesehatan. Sebagai sekolah tinggi swasta yang fokus pada pendidikan keperawatan, farmasi, dan kebidanan, STIKES mencetak tenaga kesehatan profesional yang sangat dibutuhkan, terutama di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan.

Namun demikian, tantangan kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah, keterbatasan akses pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja, dan kurangnya konektivitas antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Untuk itu, diperlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif, inklusif, dan berbasis potensi lokal. Dengan daya saing SDM yang kuat, Kabupaten Sambas dapat memperkuat posisi ekonominya dan menjawab tantangan pembangunan di era transformasi digital dan ekonomi berbasis pengetahuan.

2.1.3.1.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan kapasitas pembangunan. Jumlah angkatan kerja yang bekerja terus bertambah, akan tetapi jumlah angkatan kerja yang

menganggur relatif banyak. Penduduk usia 15 - 24 tahun cenderung memilih sekolah daripada masuk pasar kerja. Adapun TPAK Kabupaten Sambas sejak tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat 2025

Gambar 2. 22. TPAK Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Diagram tersebut menunjukkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, yang dirinci berdasarkan jenis kelamin. Secara umum, TPAK total berada 73,27% dengan puncaknya pada tahun 2020 (74,28%) dan mengalami sedikit penurunan pada 2024 (72,78%). TPAK laki-laki secara konsisten tinggi dan stabil, menurun dari 85,91% pada 2020 menjadi 85,20% pada 2024. Sebaliknya, TPAK perempuan lebih fluktuatif dan lebih rendah secara signifikan dibanding laki-laki, meningkat ke angka tertinggi 63,3% pada 2020, namun kemudian menurun menjadi 59,91% pada 2024.

Perbedaan yang cukup besar antara TPAK laki-laki dan perempuan mengindikasikan adanya kesenjangan partisipasi gender dalam dunia kerja di Kabupaten Sambas. Rendahnya partisipasi perempuan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan yang layak, beban kerja domestik, rendahnya keterampilan kerja, serta norma sosial yang masih membatasi peran perempuan di sektor ekonomi formal. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja perlu menjadi prioritas, melalui penyediaan pelatihan kerja, penguatan

UMKM berbasis perempuan, serta penciptaan lingkungan kerja yang ramah gender.

2.1.3.1.2. Angka Ketergantungan

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur mengalami pergeseran dari penduduk muda tahun 2020 menjadi penduduk tua tahun 2045. Pergeseran ini ditandai dengan berkurangnya proporsi penduduk kelompok umur 0-4 tahun dari 25,51% tahun 2025 menjadi 24,51% tahun 2029. Di sisi lain, proporsi penduduk kelompok tua (65+tahun) bertambah dari 6,99% tahun 2025 menjadi 8,02% tahun 2029. Proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) juga menunjukkan kecenderungan menurun, namun tidak secepat proporsi penurunan penduduk usia muda. Dengan komposisi pergeseran proporsi jumlah penduduk tersebut, Angka Ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Sambas berada di bawah 50, tepatnya 48,14 tahun 2025. Angka ketergantungan kurang dari 50 menandakan bahwa sejak tahun 2020 Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi hingga tahun 2035 dengan Angka Ketergantungan sebesar 49,37. Era bonus demografi yang relatif panjang ini merupakan kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas pembangunan ekonomi dengan pemanfaatan dan pemberdayaan SDM berkualitas yang jumlahnya relatif banyak.

Dalam kurun waktu 2020-2024 proporsi penduduk usia non produktif (0-14) tahun berkurang sedikit (-0,29%) dan usia 65 tahun ke atas bertambah cukup besar (22,48%). Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,10%. Perbandingan penduduk usia non produktif dengan usia produktif yang disebut *Dependency Ratio* (DR) atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 48,36 point tahun 2020 menjadi 48,17 point tahun 2024. Penurunan ini merupakan dampak dari keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah.

Angka DR kurang dari 50 menandakan Kabupaten Sambas telah masuk dalam era bonus demografi dan ini merupakan kesempatan emas (*gold opportunity*) bagi Pemerintah Kabupaten Sambas untuk meningkatkan

kualitas SDM guna percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96); Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (kelahiran 2013). Potensi Generasi Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar 67,49% dari 654.912 jiwa penduduk Kabupaten Sambas harus ditingkatkan kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Tabel 2. 38
Struktur Penduduk dan *Dependency Ratio* Kabupaten Sambas
Tahun 2020 dan 2024

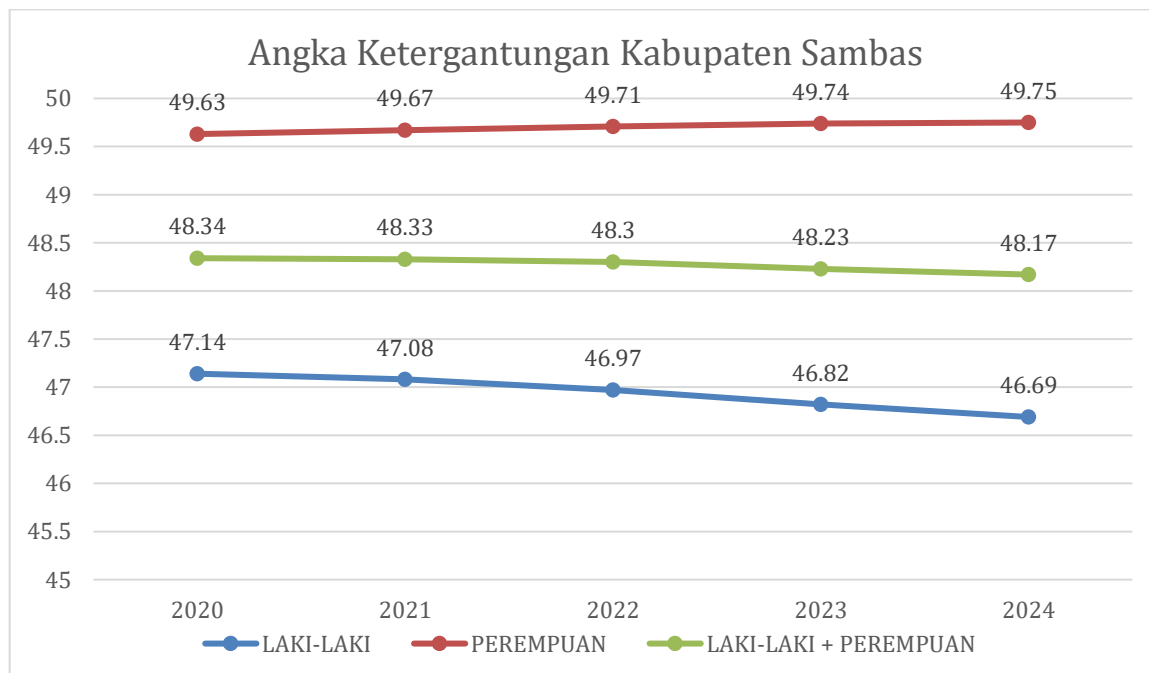
Umur (tahun)	2020		2024		Perubahan		<i>Dependency Ratio</i> (DR)	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	2020	2024
0 – 14	169.356	26.89	168.863	25,78	-493	-0,29	Bonus Demografi	
15 – 64	424.575	67.40	441.988	67,49	17.413	4,10		
65+	35.974	5.71	44.061	6,73	8.087	22,48		
Total	629.905	100.00	654.912	100,00	25.007	3,97		

Sumber : BPS, *Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2025*.

Dengan angka DR di bawah 50, Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi, di mana 67,49% penduduknya berada pada usia produktif. Ini menjadi peluang strategis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat. Era bonus demografi yang sedang dialami Kabupaten Sambas merupakan kesempatan emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dominasi generasi Milenial, Z, dan Post Z dalam struktur penduduk menjadi potensi utama yang harus diberdayakan melalui kebijakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan digitalisasi. Optimalisasi potensi generasi produktif ini akan menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, inovatif, dan kompetitif di era transformasi digital

Angka DR menggambarkan beban penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif. Angka Ketergantungan Perempuan Kabupaten Sambas lebih tinggi dari Total Angka Ketergantungan Laki-laki dan Perempuan, serta Angka Ketergantungan Laki-laki Kabupaten Sambas. Pada tahun 2024 Total Angka ketergantungan Kabupaten Sambas

sebesar 48,17%. Dengan Angka Ketergantungan untuk perempuan sebesar 49,75% dan Angka ketergantungan untuk laki-laki sebesar 46,69%. Kabupaten Sambas mengalami bonus demografi sejak tahun 2020.



Sumber: BPS Provinsi Kalbar, Angka Ketergantungan Menurut Kabupaten/ Kota, 2020-2024.

Gambar 2. 23. Grafik Angka Ketergantungan Kabupaten Sambas

Berdasarkan grafik angka ketergantungan Kabupaten Sambas tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan perempuan (P) secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki (L) dan menunjukkan tren yang cenderung stabil dengan sedikit peningkatan, dari 49,63 pada tahun 2020 menjadi 49,75 pada tahun 2024. Sebaliknya, angka ketergantungan laki-laki mengalami sedikit penurunan dari 47,14 menjadi 46,69 dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, angka ketergantungan gabungan (L+P) juga mengalami sedikit penurunan dari 48,34 menjadi 48,17. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum beban penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-produktif di Kabupaten Sambas relatif tinggi namun sedikit membaik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan program pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam meningkatkan partisipasi ekonomi dan kemandirian kelompok usia non-produktif serta pemberdayaan perempuan agar angka ketergantungan dapat ditekan lebih lanjut di masa mendatang.

2.1.3.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan tiga pilar penting dalam memperkuat daya saing daerah di era globalisasi. Di Kabupaten Sambas, ketiganya memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks transformasi dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Penerapan Iptek dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, industri rumah tangga hingga pelayanan publik, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.

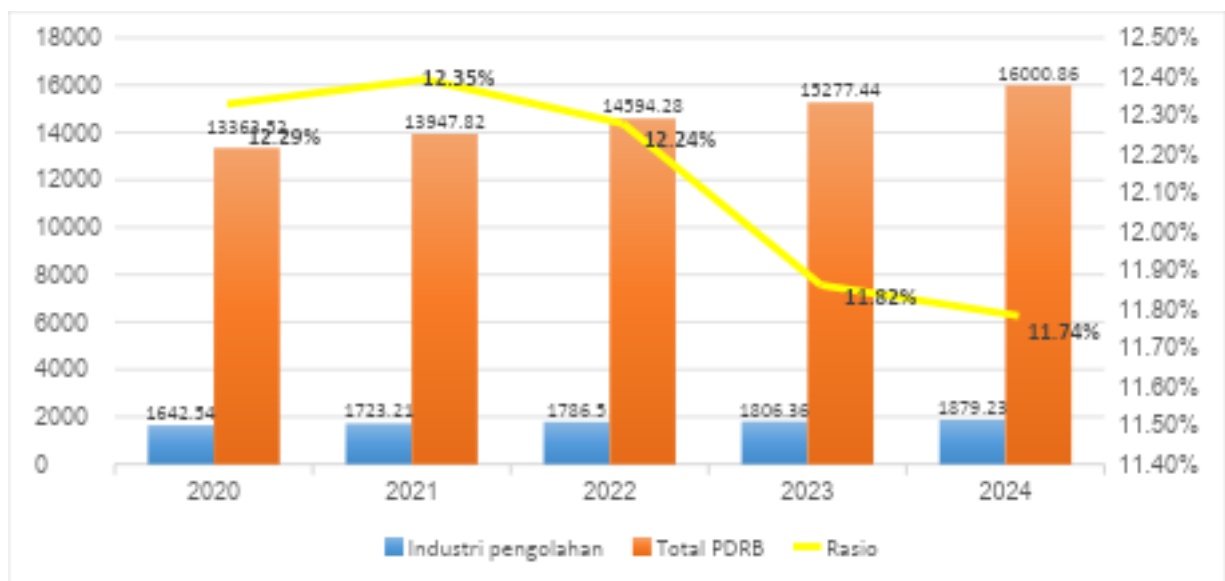
Inovasi lokal di Kabupaten Sambas mulai menunjukkan kemajuan, ditandai dengan tumbuhnya inisiatif masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk berbasis kearifan lokal, seperti olahan hasil pertanian, kerajinan, dan pariwisata berbasis komunitas. Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk pelatihan teknologi tepat guna, fasilitasi hak kekayaan intelektual, serta kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset turut mendorong ekosistem inovasi yang lebih aktif. Hal ini menciptakan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing dan menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.

Produktivitas ekonomi di Kabupaten Sambas juga mulai menunjukkan tren positif seiring peningkatan keterampilan tenaga kerja dan adopsi teknologi dalam proses produksi. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya akses terhadap riset dan inovasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta kurangnya kolaborasi antar pelaku ekonomi dan lembaga litbang masih perlu diatasi. Untuk itu, pembangunan Iptek dan inovasi harus diarahkan secara sistematis dan inklusif agar mampu mendorong produktivitas serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan merata.

2.1.3.2.1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat memiliki tren fluktuatif dalam kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada

tahun 2020, rasio PDRB untuk industri pengolahan tercatat sebesar 12,29% dari total PDRB Kabupaten Sambas. Rasio ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 12,35%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan dalam aktivitas sektor industri pengolahan. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan menjadi 11,74% hingga tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam kontribusi sektor industri pengolahan.

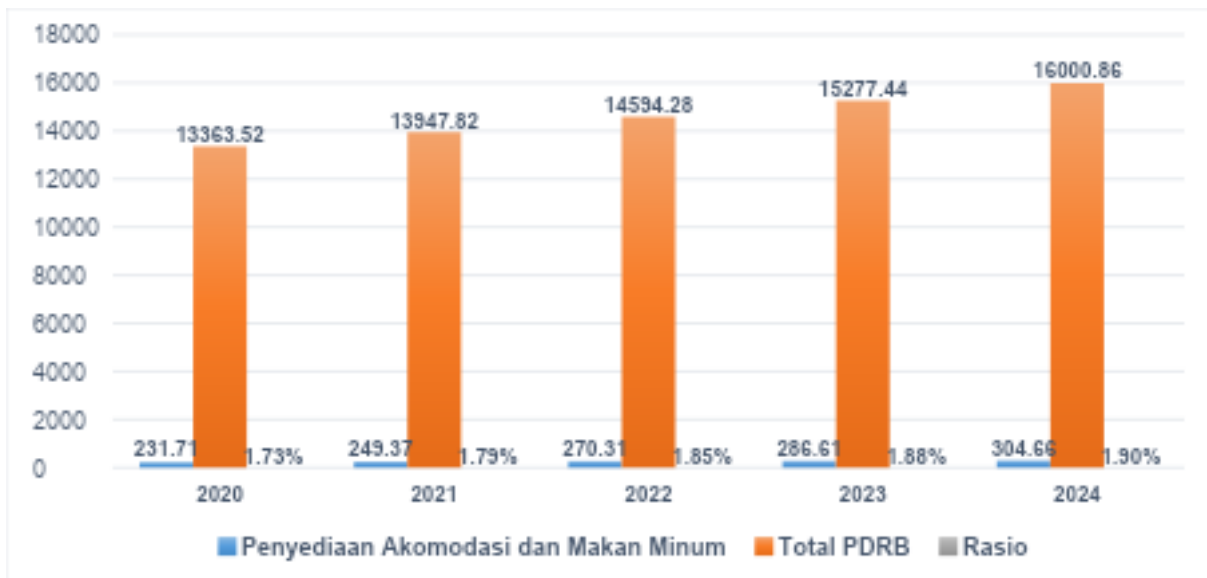


Sumber: BPS Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

Gambar 2. 24. Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Sambas

2.1.3.2.2. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya pertumbuhan kontribusi sektor ini terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2020 rasio PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berada di angka 1,73% dari total PDRB Kabupaten Sambas. Hingga pada tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana di mana rasio naik menjadi 1,90%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Sambas dalam Angka, 2025

Gambar 2. 25. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Grafik tersebut menampilkan kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap Total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga 2024, beserta rasio kontribusinya. Secara umum, terlihat bahwa nilai PDRB mengalami peningkatan dari Rp13.363,52 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp16.000,86 miliar pada tahun 2024. Selaras dengan itu, nilai sektor akomodasi dan makan minum juga meningkat dari Rp231,71 miliar menjadi Rp 304,66 miliar dalam periode yang sama.

Rasio kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari 1,73% pada tahun 2020 menjadi 1,90% pada tahun 2024. Walaupun kontribusinya masih tergolong kecil, tren ini mengindikasikan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mulai memainkan peran yang lebih signifikan dalam struktur ekonomi daerah. Hal ini bisa jadi dipengaruhi oleh pertumbuhan sektor pariwisata, peningkatan mobilitas masyarakat, serta berkembangnya usaha mikro dan kecil di bidang kuliner dan perhotelan. Oleh karena itu, sektor ini memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan sebagai salah satu penggerak ekonomi lokal yang inklusif dan padat karya.

2.1.3.2.3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang terus berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Sambas. Meski demikian, penyusunan dan pengelolaan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk sektor ini secara teknis merupakan kewenangan provinsi. Pemerintah provinsi berperan dalam menghimpun, mengolah, dan merilis data PDRB sektoral, termasuk sektor ekonomi kreatif, melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta perangkat daerah kabupaten/kota.

Di Kabupaten Sambas, potensi ekonomi kreatif sangat besar, terutama di subsektor kerajinan, kuliner, dan seni pertunjukan. Sayangnya, belum terdapat data PDRB ekonomi kreatif yang secara khusus dipilah dan dianalisis di tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah sulit diukur secara tepat oleh pemerintah kabupaten. Karena itu, peran provinsi menjadi sangat penting untuk mendorong ketersediaan data yang lebih rinci dan representatif mengenai kontribusi ekonomi kreatif di kabupaten salah satunya Kabupaten Sambas.

Dengan dukungan provinsi, termasuk dalam hal penyediaan data sektoral dan kebijakan fiskal berbasis bukti, Kabupaten Sambas dapat lebih efektif merumuskan strategi pengembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi antar tingkatan pemerintahan ini penting agar perencanaan pembangunan ekonomi kreatif tidak hanya berbasis potensi, tetapi juga berbasis data yang akurat. Hal ini akan memperkuat posisi ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026, sektor ekonomi kreatif memang belum secara eksplisit dicantumkan sebagai sektor mandiri dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hal ini menunjukkan bahwa peran ekonomi kreatif masih dianggap sebagai bagian dari sektor-sektor lain yang telah mapan dan belum dipetakan secara khusus sebagai motor pertumbuhan ekonomi tersendiri. Meskipun demikian, perhatian

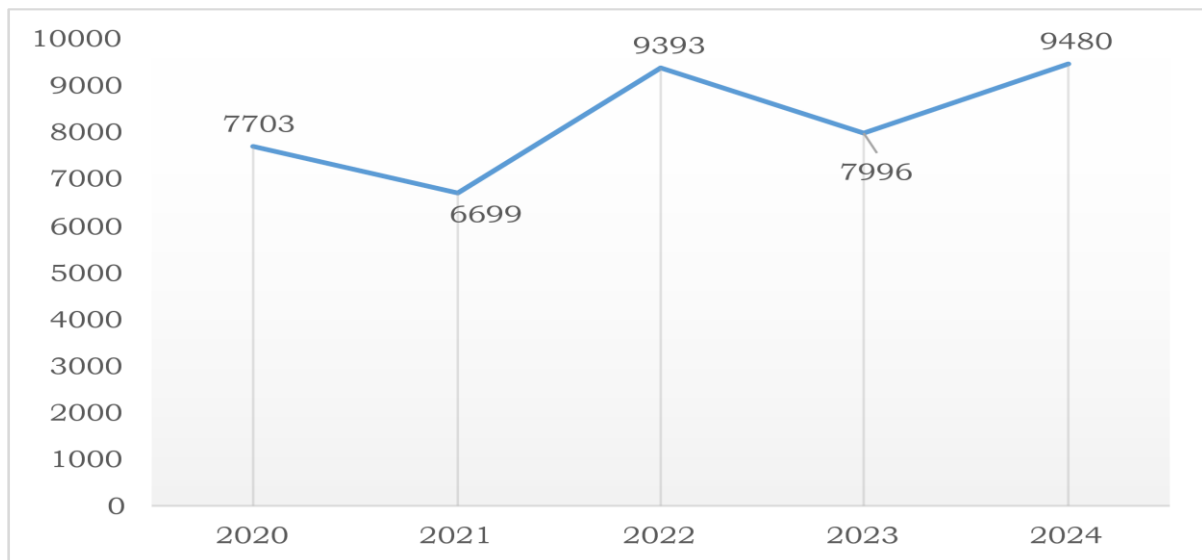
terhadap pengembangan potensi ekonomi lokal yang berbasis kreativitas dan budaya mulai menjadi fokus kebijakan pembangunan daerah.

Meski tidak terpisah sebagai sektor tersendiri, keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Sambas dapat ditelusuri melalui beberapa subsektor yang relevan dalam struktur PDRB, seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Banyak pelaku usaha lokal yang memproduksi barang olahan khas daerah, membuka gerai makanan tradisional, serta menjalankan usaha berbasis pariwisata dan kerajinan tangan. Aktivitas-aktivitas ini memiliki unsur kreativitas, inovasi, serta nilai budaya yang kuat, yang merupakan ciri utama dari ekonomi kreatif.

Oleh karena itu, meskipun belum terdefinisi secara formal dalam dokumen perencanaan pembangunan, sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendiversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sambas. Dukungan kebijakan yang lebih terarah, seperti pembentukan klaster industri kreatif, pelatihan digital marketing, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual, akan mendorong sektor ini tumbuh lebih optimal. Dengan demikian, ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat identitas budaya lokal.

2.1.3.2.4. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan di sebuah kabupaten merujuk pada perbandingan antara jumlah wirausaha atau usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di kabupaten tersebut dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja di wilayah yang sama. Rasio ini merupakan indikator penting untuk menilai dinamika ekonomi dan potensi pertumbuhan ekonomi di kabupaten tersebut.



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional, BPS tahun 2024.

Gambar 2. 26. Jumlah Wirausaha Kabupaten Sambas 2020-2024

Jumlah wirausaha di Kabupaten Sambas menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 7.703 wirausaha, namun terjadi penurunan sebesar 13% di tahun berikutnya menjadi 6.699 unit, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi lokal. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi lonjakan tajam hingga 9.393 unit, menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang kuat, didorong oleh adaptasi masyarakat terhadap digitalisasi usaha serta relaksasi kebijakan ekonomi. Namun tren ini tidak sepenuhnya stabil, karena pada 2023 jumlah wirausaha kembali menurun menjadi 7.996 unit, diduga akibat ketatnya persaingan pasar, kurangnya keberlanjutan usaha baru, serta faktor regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Tahun 2024 mencatatkan peningkatan kembali hingga 9.480 wirausaha, mencerminkan bahwa ekosistem kewirausahaan di Kabupaten Sambas mulai menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Peningkatan ini memberi indikasi bahwa dengan dukungan kebijakan yang tepat, seperti program pendampingan usaha, fasilitasi digitalisasi UMKM, serta penyederhanaan regulasi usaha, jumlah wirausaha berpotensi untuk tumbuh secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan strategi yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kuantitas wirausaha, tetapi juga pada peningkatan kualitas, daya saing, dan keberlangsungan

usaha, agar dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.3.2.5. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator penting dalam mengukur kapasitas dan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong transformasi kebijakan, peningkatan layanan publik, serta efisiensi tata kelola pemerintahan berbasis inovasi. Berdasarkan grafik yang disajikan, capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024.

Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar 56,51 poin, mencerminkan komitmen awal Pemerintah Kabupaten Sambas dalam menginisiasi kebijakan dan program berbasis inovasi. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan ke angka 47,80 poin, yang dapat diinterpretasikan sebagai dampak dari berbagai tantangan struktural, termasuk disrupsi pasca pandemi, keterbatasan sumber daya, atau lemahnya koordinasi lintas sektor dalam penerapan inovasi.

Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan indeks kembali meningkat ke 55,87 poin, menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil melakukan konsolidasi kebijakan, revitalisasi program inovatif, serta penguatan kapasitas aparatur dalam menciptakan dan mengelola inovasi daerah. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2024, dengan capaian indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu sebesar 62,37 poin. Angka ini mencerminkan peningkatan efektivitas implementasi inovasi di berbagai sektor, serta menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas berada pada jalur yang tepat dalam mendorong tata kelola berbasis inovasi menuju *good governance*.

Tabel 2. 39
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

No	Pemda	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Provinsi Kalbar	23 (Kurang Inovatif)	52,74 (Inovatif)	53,09 (Inovatif)	43,73 (Inovatif)	52,93 (Inovatif)
2	Kab. Sambas	1.524 (Sangat Inovatif)	56,51 (Inovatif)	47,80 (Inovatif)	55,87 (Inovatif)	62,37 (Sangat Inovatif)

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, tahun 2020 s.d 2024

Data di atas menunjukkan perkembangan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sambas selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, Kabupaten Sambas memperoleh skor sangat tinggi sebesar 1.524 dengan kategori Sangat Inovatif, jauh melampaui Provinsi Kalimantan Barat yang hanya berada pada skor 23 dengan kategori Kurang Inovatif. Namun, pada tahun 2021 skor Kabupaten Sambas turun menjadi 56,51, meski masih dalam kategori Inovatif. Penurunan ini diikuti oleh fluktuasi skor di tahun-tahun berikutnya, yaitu 47,80 (2022), 55,87 (2023), dan kembali meningkat menjadi 62,37 di tahun 2024, yang menempatkan Kabupaten Sambas kembali dalam kategori Sangat Inovatif. Sebaliknya, Provinsi Kalimantan Barat secara konsisten berada dalam kategori Inovatif sejak tahun 2021 hingga 2024, dengan skor berkisar antara 43,73 hingga 53,09, namun belum mencapai kategori Sangat Inovatif sebagaimana yang dicapai Kabupaten Sambas pada tahun 2020 dan 2024. Kabupaten Sambas menunjukkan kinerja inovasi daerah yang sangat baik dan konsisten dalam lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dan 2024 yang masuk kategori Sangat Inovatif. Meskipun sempat mengalami penurunan skor pada tahun-tahun pertengahan, tren peningkatan di tahun 2023 dan 2024 menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam pengelolaan inovasi daerah. Hal ini mencerminkan kemampuan adaptasi dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan sistem inovasi berbasis kolaborasi lintas sektor untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja inovasi daerah.

2.1.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Ekonomi hijau di Kabupaten Sambas mulai diimplementasikan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan antara lain:

- a. Hari Bebas Kendaraan Bermotor/ *Car Free Day* (CFD), Pemerintah Kabupaten Sambas mengadakan kegiatan CFD dengan tema "*Bebas Kendaraan Menuju Green Growth*", yang bertujuan mengurangi

penggunaan kendaraan bermotor untuk menurunkan polusi udara dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda dan berjalan kaki; dan

- b. Program *One Village One Product* (OVOP). Program ini mendorong setiap desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal yang berkelanjutan, seperti kerajinan tangan dan produk pertanian organik, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan memajukan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.3.3.1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau berfungsi sebagai alat ukur yang konkret, representatif, dan akurat untuk menilai pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau. Ini merupakan salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi ini diharapkan menjadi pendorong utama dalam pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, sekaligus mendukung visi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045. Prinsip utama dari Ekonomi Hijau adalah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sambil meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas serta daya dukung lingkungan. Fokus utamanya adalah pada peningkatan investasi hijau, pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Indeks Ekonomi Hijau adalah manifestasi nyata dari upaya Indonesia untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi yang akurat. Indeks Ekonomi Hijau bertujuan untuk menjaga pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan mempercepat pelaksanaan program Pembangunan Rendah Karbon serta Berketahanan Iklim yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, yang menjadi dasar dalam transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia berkomitmen pada sinergi keberlanjutan dalam pembangunan dan menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), target *Net-Zero Emissions* pada 2060

atau lebih cepat, serta visi "*Living Harmony with Nature*" pada 2050. Indeks Ekonomi Hijau terdiri dari 15 (lima belas) indikator yang mencakup 3 (tiga) pilar keberlanjutan yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial.

2.1.3.3.2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru Indonesia (*Indonesia Blue Economy Index/IBEI*) merupakan instrumen evaluatif yang dikembangkan oleh Kementerian PPN/Bappenas untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi biru secara nasional dan regional. Indeks ini terdiri dari 3 (tiga) pilar utama yaitu ekonomi (33%), lingkungan (37%), dan sosial (31%) yang mencerminkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Setiap pilar terdiri dari beberapa sub pilar yang mencakup berbagai aspek, seperti perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan, perdagangan dan logistik, pariwisata bahari, teknologi, tata kelola, konservasi laut, energi terbarukan, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Pembobotan indikator dilakukan melalui analisis komponen utama (PCA) untuk memastikan representasi yang objektif dan proporsional. Dalam konteks Kabupaten Sambas, meskipun data spesifik IBEI belum tersedia, potensi ekonomi biru sangat signifikan mengingat wilayah ini memiliki panjang pantai sekitar 198,76 km dan luas wilayah laut mencapai 1.467,84 km². Potensi tersebut mencakup sektor perikanan tangkap dan budidaya, pariwisata bahari, serta konservasi pesisir.

Untuk mengoptimalkan potensi ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Sambas mengadopsi kerangka IBEI sebagai alat evaluasi dan perencanaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan fokus pada pengembangan indikator yang sesuai dengan karakteristik lokal.

Implementasi IBEI di tingkat daerah dapat membantu dalam:

- a. identifikasi prioritas pembangunan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi biru yang memiliki potensi unggulan dan memerlukan intervensi kebijakan;

- b. perencanaan berbasis data untuk menyusun program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada data dan indikator yang terukur; dan
- c. monitoring dan evaluasi untuk melakukan pemantauan terhadap capaian pembangunan ekonomi biru secara periodik untuk memastikan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kabupaten Sambas dapat membentuk tim kerja lintas sektor untuk mengkaji dan menyesuaikan indikator IBEI dengan kondisi lokal, serta menyusun rencana aksi yang terintegrasi dalam RPJMD. Kolaborasi dengan lembaga penelitian, akademisi, dan masyarakat lokal juga penting untuk memastikan keberhasilan implementasi ekonomi biru yang berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi dan penerapan IBEI, dapat merujuk pada dokumen resmi yang disediakan oleh Bappenas.

2.1.3.3.3. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer mengacu pada proporsi pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan seperti tenaga surya, air, angin, biomassa, dan bioenergy dalam keseluruhan pasokan energi nasional. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), menargetkan porsi EBT sebesar 23% dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025. Peningkatan porsi EBT ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, menurunkan emisi karbon, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi daerah.

Kabupaten Sambas sebagai wilayah pesisir dengan karakteristik rural memiliki potensi besar untuk mengembangkan EBT, terutama pada sektor tenaga surya (solar panel) di wilayah terpencil dan perbatasan, biomassa dari limbah pertanian dan perkebunan (seperti kelapa sawit dan padi), dan tenaga mikrohidro di wilayah pedalaman dengan aliran sungai berpotensi. Namun, kontribusi EBT di Kabupaten Sambas saat ini masih sangat terbatas. Ketergantungan pada energi berbasis diesel, terutama di daerah terpencil masih tinggi dan infrastruktur jaringan listrik PLN belum merata.

2.1.3.4. Transformasi Digital

Transformasi digital merupakan proses integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pendidikan, ekonomi, dan interaksi sosial. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi, sekaligus memperluas akses terhadap layanan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam konteks Kabupaten Sambas, transformasi digital menjadi pondasi penting dalam pembangunan daerah, terutama mengingat posisi geografis perbatasan, sebaran wilayah rural, dan kebutuhan penguatan kapasitas digital di masyarakat. Digitalisasi sangat relevan dalam memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan ekonomi kreatif, dan layanan kesehatan berbasis digital.

2.1.3.4.1. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan indikator yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Indeks ini terdiri dari 3 (tiga) sub indeks utama yaitu:

- a. akses dan infrastruktur, penggunaan serta keahlian yang mencerminkan ketersediaan infrastruktur TIK;
- b. tingkat pemanfaatan teknologi oleh masyarakat; dan
- c. kemampuan sumber daya manusia dalam bidang TIK.

Secara nasional, IP-TIK Indonesia pada tahun 2022 mencapai skor 5,85 pada skala 0–10, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,76. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan TIK di Indonesia, meskipun masih terdapat kesenjangan antar wilayah yang perlu diatasi. Untuk Kabupaten Sambas, data spesifik mengenai IP-TIK belum tersedia dalam publikasi BPS terbaru. Namun, berdasarkan informasi dari BPS Kabupaten Sambas, terdapat upaya untuk meningkatkan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi di daerah tersebut. Misalnya, Pemerintah Kabupaten Sambas bersama BAKTI Kominfo telah menggelar

pelatihan empat pilar literasi digital untuk masyarakat, yang mencakup etika digital, budaya digital, keamanan digital, dan keterampilan digital.

2.1.3.4.2. Komunikasi

Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi saat ini berperan penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam penyampaian dan perolehan informasi yang diperlukan. Aktivitas masyarakat, pemerintah, swasta, dan kelembagaan lainnya sangat erat kaitannya dengan kebutuhan akses informasi yang cepat dan akurat, karena dalam banyak hal sarana informasi sangat berpengaruh pada fungsi efisiensi pada suatu organisasi. Kondisi wilayah yang sangat luas dan tersebar tentunya berimplikasi pada potensi kinerja yang kurang efisien, dengan sarana komunikasi dan informasi yang baik hal tersebut tidak lagi menjadi permasalahan. Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) maka Pemerintah Kabupaten Sambas dituntut melakukan transformasi manajemen dan proses terjadi lingkungan pemerintah secara efektif, efisien dan akuntabel.

Base Transceiver Station (BTS) merupakan antena atau pemancar yang menerima dan meneruskan sinyal dari operator telepon seluler ke pelanggan atau sebaliknya. Dengan hadirnya BTS di suatu daerah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, keamanan, maupun pelayanan publik. Luas jangkauan dari sinyal menara BTS sangat dipengaruhi oleh lingkungan, antara lain topografi dan gedung tinggi. Bangunan tinggi dapat menghalangi distribusi sinyal yang diterima dan sinyal yang dipancarkan sehingga mengganggu kualitas pelayanan. Jumlah tower komunikasi di Kabupaten Sambas sampai tahun 2024 berjumlah 247 BTS Swasta dan Pemilik Bakti Kominfo berjumlah 15 BTS, dengan total berjumlah 262 BTS yang tersebar di 19 kecamatan.

Adapun sebaran BTS di Kabupaten Sambas dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.40
Jumlah BTS yang Terpasang Menurut Kecamatan
di Kabupaten Sambas Tahun 2024

No	PEMILIK SWASTA	Jumlah Tower
1	GALING	14
2	JAWAI	16
3	JAWAI SELATAN	6
4	PALOH	16
5	PEMANGKAT	20
6	SAJAD	4
7	SAJINGAN BESAR	6
8	SALATIGA	6
9	SAMBAS	33
10	SEBAWI	6
11	SEJANGKUNG	8
12	SELAKAU	12
13	SELAKAU TIMUR	3
14	SEMPARUK	8
15	SUBAH	18
16	TANGARAN	9
17	TEBAS	25
18	TEKARANG	5
19	TELUK KERAMAT	32
	JUMLAH	247
	PEMILIK BAKTI KOMINFO	
1	GALING	1
2	PALOH	6
3	SAJINGAN BESAR	4
4	SEJANGKUNG	3
5	SUBAH	1
	JUMLAH	15
	JUMLAH TOTAL	262

Sumber: Diskominfo Kabupaten Sambas, Tahun 2024

Jumlah menara BTS dan perusahaan telekomunikasi Kabupaten Sambas tahun 2024 yang paling banyak yaitu PT. Dayamitra Telekomunikasi sebanyak 89 BTS dan PT. PROTELINDO sebanyak 84 BTS. Untuk lebih

jelasan dapat dilihat pada tabel Jumlah menara BTS dan perusahaan telekomunikasi Tahun 2024 berikut ini.

Tabel 2.41
Jumlah Menara BTS dan Perusahaan Telekomunikasi
Tahun 2024

No	PEMILIK SWASTA	Jumlah Tower
1	PT. TELKOMSEL	8
2	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	89
3	PT. PROTELINDO	84
4	PT. XL AXIATA Tbk (EXCL)	1
5	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)	8
6	PT. TOWER BERSAMA (TBIG)	19
7	PT. SOLUSI MENARA INDONESIA (TBIG)	3
8	PT. TELENET INTERNUSA (TBIG)	1
9	PT. GIHON	11
10	PT. CENTRATAMA MENARA INDONESIA	12
11	PT. ERA BANGUN TOWERINDO (INTI)	4
12	PT. EPID MENARA ASSET CO	7
	JUMLAH	247
	PEMILIK BAKTI KOMINFO	
13	BAKTI KEMKOMINFO	15
	JUMLAH	15
	JUMLAH TOTAL	262

Sumber: Diskominfo Kabupaten Sambas, Tahun 2024

Semua kecamatan di Kabupaten Sambas dapat melakukan komunikasi melalui jaringan seluler bahkan jaringan internet. Perkembangan warnet yang terus bertambah di pusat kota dan beberapa kecamatan lainnya serta jaringan 3G yang dapat mengakses internet terus mengalami perluasan di Kabupaten Sambas sangat mempermudah hubungan komunikasi dan proses pertukaran informasi baik secara personal maupun kelembagaan. Kondisi ini tentunya sangat mendukung kegiatan perekonomian dan pelaku bisnis di Kabupaten Sambas, yang selanjutnya perekonomian regional akan berjalan dengan lancar.

Kondisi sarana dan prasarana informasi dan komunikasi di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan pada tahun 2023 masih terdapat 300 desa yang tidak terlayani internet, 831 desa yang masih dilayani dengan sinyal telepon seluler dengan sinyal lemah dan 80 desa masih tidak ada layanan jaringan seluler. Berdasarkan tabel dibawah ini Kabupaten Sambas pada

tahun 2023 terdapat 169 desa atau 86,67% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 26 desa atau 13,33% memiliki sinyal telepon seluler lemah dan sudah tidak ada lagi desa yang tidak memiliki sinyal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 42
Rekapitulasi Jangkauan Telekomunikasi Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kec	Desa	Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa		Warga Desa Yang Memiliki Akses Internet		Sinyal Telepon Seluler/Handphone di Desa		
				Ya	Tidak	Ya	Tidak	Sinyal Kuat	Sinyal Lemah	Tidak Ada Sinyal
1	Kab. Sambas	19	195	189	6	187	8	169	26	-
2	Kab. Sanggau	15	163	137	26	146	17	79	83	4
3	Kab. Ketapang	20	253	214	39	219	34	160	84	9
4	Kab. Sintang	14	390	246	144	291	99	197	169	23
5	Kab. Kapuas Hulu	23	278	243	35	235	43	133	138	7
6	Kab. Bengkayang	17	122	74	48	91	31	56	58	8
7	Kab. Landak	13	156	92	64	122	34	55	92	9
8	Kab. Sekadau	7	94	86	8	90	4	45	48	-
9	Kab. Melawi	11	169	122	47	146	23	74	81	14
10	Kab. Kayong Utara	6	43	30	13	43	-	34	9	-
11	Kab. Kubu Raya	9	123	111	12	120	3	83	38	2
12	Kab. Mempawah	9	60	49	11	56	4	52	5	3
JUMLAH TOTAL		163	2.046	1.593	453	1.746	300	1.138	831	80

Sumber : Satu Data Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar)
Tahun 2024

Sebagian besar Satuan Kerja yang terdapat di Pemerintah Kabupaten Sambas telah memanfaatkan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi tersebut. Selain berimplikasi pada peningkatan sumber daya aparatur daerah, kondisi ini juga bermanfaat dalam kinerja pelayanan dan publikasi serta perencanaan di Kabupaten Sambas karena mudah dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan. Peluang dan iklim investasi akan sangat terdukung dengan pemanfaatan sarana komunikasi yang baik dan lancar karena akan memudahkan dalam pengambilan keputusan dan fungsi manajemen baik bagi pihak investor maupun kelembagaan pemerintahan.

Sedangkan untuk melihat gambaran kondisi informasi dan komunikasi di Kabupaten Sambas, yaitu jangkauan telekomunikasi dan karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet selama 5 (lima) tahun terakhir pada periode tahun 2021 – 2023 akan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 43
Jangkauan Telekomunikasi Kabupaten Sambas Tahun 2021-2023

Telekomunikasi	2021	2022	2023
Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	159	185	189
Tidak Terdapat Fasilitas Internet di Kantor Kepala Desa	34	8	6
Warga Desa Memiliki Akses Internet	157	170	187
Warga Desa Tidak Memiliki Akses Internet	36	23	8
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Kuat	150	161	169
Jumlah Desa Dengan Sinyal Telepon Seluler/Handphone Lemah	42	32	26
Jumlah Desa Tidak Ada Sinyal Telepon Seluler/Handphone	1	0	0

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024

Data telekomunikasi di Kabupaten Sambas dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur digital di tingkat desa. Jumlah kantor desa yang memiliki fasilitas internet meningkat dari 159 pada 2021 menjadi 189 pada 2023. Sebaliknya, jumlah kantor desa yang belum memiliki fasilitas internet menurun tajam dari 34 menjadi hanya 6. Ini menunjukkan upaya serius dalam pemerataan akses teknologi informasi, yang penting dalam mendukung pelayanan publik, tata kelola desa, dan konektivitas masyarakat dengan berbagai layanan digital.

Selain itu, akses internet bagi warga desa juga mengalami peningkatan konsisten. Pada 2021, sebanyak 157 desa memiliki warga yang dapat mengakses internet, dan jumlah ini meningkat menjadi 187 desa pada 2023. Jumlah desa yang warganya tidak memiliki akses internet juga menurun secara drastis dari 36 menjadi hanya 8. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah merambah hingga ke masyarakat tingkat bawah, yang dapat berdampak positif terhadap pendidikan, perekonomian digital, serta akses informasi dan komunikasi masyarakat desa.

Dari sisi infrastruktur jaringan seluler, terjadi lonjakan besar pada jumlah desa dengan sinyal telepon seluler yang kuat, dari hanya 150 desa pada 2021 menjadi 169 desa pada 2023. Pada saat yang sama, desa dengan sinyal lemah menurun dari 42 menjadi 26 desa, dan desa tanpa sinyal sama sekali sudah tidak ada lagi sejak 2022. Peningkatan kualitas jaringan ini menjadi pondasi penting bagi pengembangan desa digital dan menunjang

transformasi digital di berbagai sektor, seperti pertanian cerdas, layanan kesehatan berbasis telekomunikasi, dan pengembangan UMKM digital di pedesaan.

Terjadinya peningkatan persentase rumah tangga pengguna telepon atau handphone di Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun terakhir menggambarkan bahwa adanya upaya atau usaha dari pemerintah Kabupaten Sambas untuk melayani kebutuhan akan layanan komunikasi serta jaringan infrastruktur internet pada masyarakat Kabupaten Sambas. Hal ini juga diperkuat pada penjelasan sebelumnya bahwa sampai dengan tahun 2023 jumlah desa dengan sinyal telepon seluler/handphone kuat berjumlah 169 desa atau 86,67% memiliki sinyal telepon seluler kuat, 26 desa atau 13,33% memiliki sinyal telepon seluler lemah dan sudah tidak ada lagi desa yang tidak memiliki sinyal operator seluler.

Selanjutnya persentase pengguna fasilitas komunikasi pada tahun 2018 yaitu 73,1% dan menurun pada tahun 2019 menjadi 71,96% namun meningkat pada tahun 2021 mencapai 74,21%. Peningkatan terus terjadi hingga pada tahun 2024 mencapai 83,96%. Sementara untuk pengguna yang mengakses internet mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018 sejumlah 28,47% dan meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 71,73%. Selengkapnya mengenai data karakteristik pengguna fasilitas komunikasi dan atau internet di Kabupaten Sambas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 44
Karakteristik Pengguna Fasilitas Komunikasi dan atau Internet
Tahun 2018-2024

Karakteristik	Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel atau Komputer (PC/Desktop, Laptop/Notebook, Tablet)							Mengakses Internet (Termasuk Facebook, Twitter, BBM, Whatsapp)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jenis Kelamin KRT														
Laki-laki	77,23	74,70	74,80	81,15	85,68	84,02	84,62	30,84	35,85	43,81	52,42	62,99	66,21	72,29
Perempuan	69,15	69,35	70,82	72,43	84,18	77,22	79,46	26,21	32,81	41,85	53,37	54,50	64,27	67,82
Kuintil Pengeluaran														
40% Terbawah	65,54	60,71	66,70	77,13	81,91	78,31	77,69	20,50	20,71	36,31	45,40	56,84	60,79	67,30
40% Tengah	74,24	76,69	75,06	78,99	86,27	82,92	84,99	29,31	38,35	43,77	52,27	63,21	64,99	71,38
20% Teratas	84,93	84,08	86,52	86,39	91,10	91,40	93,80	41,66	52,08	56,46	66,74	71,52	77,18	0,77
Pendidikan Tertinggi ART														
SD ke bawah	63,49	60,89	64,01	75,56	84,09	75,77	76,76	16,63	19,90	29,54	45,58	58,96	53,69	61,40
SMP ke atas	97,86	93,75	93,63	88,21	88,60	95,67	97,99	58,99	62,63	73,05	66,48	69,18	87,79	91,85
Kab. Sambas	73,1	71,96	74,21	79,79	85,55	82,89	83,96	28,47	34,29	43,52	52,57	62,28	65,89	71,73

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas Tahun 2018 – 2024

2.1.3.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat memiliki posisi strategis sebagai daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadikannya pintu gerbang penting dalam integrasi ekonomi domestik dan global. Salah satu pengungkit utamanya adalah keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, perdagangan lintas negara, dan peningkatan arus barang dan jasa. Pemerintah Daerah memainkan peran kunci dengan mengintegrasikan aspek geoekonomi yang memanfaatkan letak geografis Sambas, memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga meningkatkan daya saing regional.

Di tingkat domestik, ketahanan ekonomi Kabupaten Sambas terlihat kuat terutama di sektor pertanian dan perkebunan yang menopang perekonomian lokal bahkan saat pandemi *Covid-19*. Studi menunjukkan bahwa selama pandemi, meskipun ada guncangan sosial dan ekonomi, Sambas mampu bertahan berkat ikatan sosial budaya yang kuat dan basis ekonomi yang bergantung pada alam seperti pertanian dan perkebunan. Ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor domestik agar mampu menopang integrasi dengan pasar global, khususnya di saat krisis.

Ke depan, integrasi ekonomi Sambas akan semakin bergantung pada sinergi antara kebijakan lokal, pengembangan infrastruktur lintas batas, dan pemberdayaan komunitas lokal agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Pemerintah disarankan untuk terus memaksimalkan potensi PLBN Aruk melalui pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan di tingkat elite tetapi juga sampai ke lapisan masyarakat bawah. Dengan begitu, Kabupaten Sambas dapat menjadi contoh sukses integrasi ekonomi domestik dan global di wilayah perbatasan Indonesia.

2.1.3.5.1. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di Kabupaten Sambas disajikan dalam PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data pada tabel berikut menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Nilai pertumbuhan PMTB berkontraksi sebesar 2,30% pada tahun 2020 dan meningkat sampai 3,78% pada tahun 2021. Namun selanjutnya angka pertumbuhan ini mengalami perlambatan sebesar 1,79%. Pada tahun 2023, pertumbuhan PMTB meningkat signifikan hingga 6,81% namun akhirnya turun kembali hingga 5,47% pada tahun 2024.

Tabel 2. 45
Perkembangan PMBT Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023^{*)}	2024^{**)}
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	5.186,62	5.550,74	5.932,81	6.766,14	7.246,63
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3.368,40	3.495,65	3558,38	3800,54	4.008,42
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	25,09	24,90	24,33	25,83	25,37
Total PMTB	-2,30	3,78	1,79	6,81	5,47

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sambas Menurut Pengeluaran 2020-2024, 2025

Data yang ditampilkan menggambarkan perkembangan *Pembentukan Modal Tetap Bruto* (PMTB) Kabupaten Sambas dari tahun 2020 hingga proyeksi 2024. Secara nominal berdasarkan harga berlaku (ADHB), nilai PMTB terus meningkat dari Rp5.186,62 miliar pada 2020 menjadi Rp7.246,63 miliar pada 2024, menunjukkan adanya pertumbuhan investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur dan peralatan produksi. Sementara

itu, jika dilihat dari nilai riil (ADHK 2010), PMTB juga menunjukkan tren kenaikan dari Rp3.368,40 miliar menjadi Rp4.008,42 miliar, meskipun terdapat perlambatan di tahun 2021 ke 2022 (hanya naik sekitar 1,79%). Pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun 2023 (6,81%) menunjukkan pemulihan investasi pasca pandemi.

Proporsi PMTB terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sambas relatif stabil, berkisar antara 24% hingga 26%, menandakan bahwa investasi tetap memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Meskipun sempat menurun pada 2021 dan 2022, kontribusi ini kembali meningkat pada 2023. Namun, jika dilihat dari laju pertumbuhan tahunan PMTB riil (ADHK), fluktuasi cukup terasa, dengan pertumbuhan negatif pada 2020 (-2,30%) kemungkinan besar akibat dampak awal pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nilai PMTB terus meningkat secara nominal, efektivitas pertumbuhannya terhadap output riil perlu terus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.1.3.5.2. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, komponen net ekspor menggambarkan selisih antara ekspor barang dan jasa terhadap impor barang dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula kegiatan ekspor impor (pembelian) oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Dari sisi ADHB, nilai net ekspor Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2020, nilai net ekspor mencapai 1.589,65 miliar rupiah, dan mencapai 3.681,11 miliar pada tahun 2024. Sementara dari sisi ADHK, nilai net ekspor selama lima tahun terakhir tidak berbeda dengan ADHB yaitu menunjukkan nilai yang selalu positif antar waktunya. Nilai positif ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekspor barang dan jasa di Kabupaten Sambas lebih dominan dibandingkan dengan aktivitas impor barang dan jasa.

2.1.3.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Sambas memiliki kawasan perkotaan seperti Kecamatan Sambas, Kecamatan Tebas, dan Kecamatan Pemangkat berperan penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang lebih baik, seperti pasar, jalan raya, dan layanan publik, membuat wilayah perkotaan menjadi pusat perputaran uang dan penyerapan tenaga kerja, sekaligus menjadi lokasi strategis untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, kawasan perdesaan di Kabupaten Sambas, terutama yang mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan, juga memegang peranan besar dalam perekonomian daerah. Perdesaan menghasilkan komoditas unggulan seperti jeruk siam, padi, kelapa sawit, dan lada yang bukan hanya dipasarkan secara lokal, tetapi juga didorong untuk ekspor ke Malaysia melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk. Keberhasilan perdesaan dalam menopang produksi komoditas inilah yang menjadikannya tulang punggung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor primer.

Integrasi antara perkotaan dan perdesaan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Kabupaten Sambas. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur, jalan penghubung, dan pasar desa, sehingga hasil produksi dari perdesaan dapat dipasarkan ke wilayah perkotaan dengan lebih efisien. Dengan sinergi yang baik, Kabupaten Sambas dapat menciptakan pola pembangunan yang seimbang dan inklusif, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota, tetapi juga merata hingga ke desa.

2.1.3.6.1. Indeks Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pembangunan yang sedang gencar dilakukan oleh pemerintah. Peran infrastruktur bagi masyarakat sangat penting karena berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sambas berupaya membangun dan meningkatkan infrastruktur dalam kondisi baik dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota atau kabupaten berdasarkan infrastruktur dasar seperti jalan serta persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase panjang jalan dengan kondisi baik, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon atau handphone. Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah daerah maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota atau kabupaten tersebut semakin baik.

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada masing-masing penyusun indikator Indeks infrastruktur, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian realisasi indeks infrastruktur di Kabupaten Sambas Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 46 Persentase Realisasi Capaian Indeks Infrastruktur Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Sambas Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian Indikator	Realisasi (%)					Hasil Persentase Per Indikator (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Panjang Jalan Dengan Kondisi Yang Baik	66,62	69,43	75,26	68,70	71,24	13,32	13,89	15,05	13,74	14,25
2	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Bersih	48,71	51,64	55,33	59,51	Na	9,74	10,33	11,07	11,90	Na
3	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Sanitasi	90,45	81,48	81,83	82,73	90,45	18,09	16,30	16,37	16,55	18,09
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Listrik	99,63	99,83	99,75	100,00	99,82	19,93	19,97	19,95	20,00	19,96
5	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses/Pengguna Telepon/HP	71,96	74,21	79,79	85,55	82,89	14,39	14,84	15,96	17,11	16,58
Nilai Indeks Infrastruktur Kab. Sambas							75,47	75,32	78,39	79,30	

Sumber: Dokumen dan Publikasi

1. BPS Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2020 - 2024
2. BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sambas Tahun 2019 – 2023
3. BPS Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 – 2023
4. Dokumen RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2022 – 2025
5. Buku Data Sektoral Kabupaten Sambas Tahun 2020 – 2023
6. Publikasi BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2024
7. Data Diolah, Tahun 2024

Secara keseluruhan capaian indeks infrastruktur Kabupaten Sambas mengalami peningkatan namun di tahun terakhir yaitu tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2019 sebesar 75,47%, tahun 2020 meningkat sebesar 75,32%, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 78,39%. Selanjutnya di tahun 2022 meningkat sebesar 79,30% dan di tahun 2023 belum bisa dihitung dikarenakan data persentase rumah tangga yang memiliki air bersih belum didapatkan. Terjadinya peningkatan pada indeks infrastruktur di Kabupaten Sambas pada tahun 2023 ini mengindikasikan bahwa adanya usaha peningkatan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Sambas untuk memperbaiki beberapa kondisi infrastruktur dasar di daerah.

2.1.3.6.2. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Akses terhadap hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Hunian yang layak mencakup aspek keamanan konstruksi, akses terhadap air bersih, sanitasi yang memadai, ventilasi yang cukup, dan kepemilikan yang jelas. Di berbagai daerah termasuk Kabupaten Sambas, masih terdapat sejumlah rumah tangga yang tinggal di hunian tidak layak, terutama di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah rawan bencana. Kesenjangan ekonomi, keterbatasan lahan, dan rendahnya literasi perencanaan tata ruang menjadi tantangan utama dalam pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak.

Pemerintah Kabupaten Sambas, melalui program-program seperti *Bedah Rumah*, pembangunan rumah susun, serta bantuan rumah swadaya dari Kementerian PUPR, terus berupaya mengurangi angka rumah tidak layak huni. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi bagian dari solusi. Peran serta masyarakat dalam pembangunan rumah berbasis gotong royong dan teknologi konstruksi sederhana juga mendorong percepatan pencapaian target hunian layak. Di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, akses terhadap hunian layak huni telah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Sambas, pada tahun 2023, cakupan ketersediaan rumah layak huni mencapai 80,81%, sedikit melebihi target 80,34%.

Keberhasilan menyediakan hunian layak tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada pendekatan terpadu yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hunian yang layak akan mendorong kualitas hidup yang lebih baik, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program hunian layak di Kabupaten Sambas perlu dijaga melalui perencanaan jangka panjang, monitoring ketat, serta pelibatan semua pemangku kepentingan secara aktif.

2.1.3.6.3. Persentase Desa Mandiri

Pada tahun 2024 Kabupaten Sambas mencatatkan diri sebagai kabupaten dengan peringkat tertinggi dalam pembangunan desa di Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan nilai rata-rata IDM sebesar 0,8757, Sambas menempati peringkat ke-12 secara nasional dan meraih status "Mandiri", yaitu level tertinggi dalam klasifikasi IDM. Ini menjadi bukti konkret kemajuan pembangunan yang merata di wilayah pedesaan Sambas. Keunggulan Kabupaten Sambas bahkan melampaui kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Barat yang juga meraih status "Mandiri", seperti Mempawah (peringkat 13 nasional, IDM: 0,8703), Kayong Utara (peringkat 36, IDM: 0,8400), Kubu Raya (peringkat 47, IDM: 0,8282), dan Sekadau (peringkat 59, IDM: 0,8179).

Dominasi Kabupaten Sambas dalam pembangunan desa terlihat dari tingginya capaian dalam aspek ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan publik, ekonomi lokal, serta ketahanan sosial dan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sambas secara aktif menjalankan berbagai program seperti: Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas permukiman, Relokasi warga dari kawasan rawan abrasi, Pembangunan perumahan subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, serta edukasi konsep rumah sehat yang melibatkan partisipasi masyarakat desa, khususnya kaum perempuan melalui PKK. Dibandingkan kabupaten lainnya di Kalbar yang masih berstatus Maju seperti Sanggau, Bengkayang, Ketapang, Kapuas Hulu, Melawi, Landak, dan Sintang Sambas menunjukkan posisi yang kokoh dalam mendorong transformasi desa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Dengan pencapaian ini, Kabupaten Sambas tidak hanya menjadi teladan pembangunan desa di Kalbar, tetapi juga menjadi bagian dari kabupaten terdepan di tingkat nasional dalam membangun desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 47
Peringkat Status Desa Membangun Tingkat Kabupaten
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024

Rank Nasional	Nama Kabupaten	Nilai Rata-rata IDM Kab. 2024	Status IDM Kab. 2024
12	Sambas	0.8757	Mandiri
13	Mempawah	0.8703	Mandiri
36	Kayong Utara	0.8400	Mandiri
47	Kubu Raya	0.8282	Mandiri
59	Sekadau	0.8179	Mandiri
70	Sanggau	0.8103	Maju
107	Bengkayang	0.7895	Maju
126	Ketapang	0.7809	Maju
133	Kapuas Hulu	0.7774	Maju
170	Melawi	0.7565	Maju
175	Landak	0.7540	Maju
177	Sintang	0.7514	Maju

Sumber: BPS Kalimantan Barat 2025

2.1.3.7. Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Sambas pada tahun 2024 menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Kebijakan pemerintah daerah yang fokus pada pemberdayaan sektor unggulan dan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat terus mendukung pencapaian tersebut.

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Sambas. Kabupaten ini memiliki potensi ekonomi yang besar dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan lintas batas, dan pariwisata. Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah daerah perlu memastikan pengendalian inflasi, pengelolaan fiskal yang sehat, serta menjaga nilai tukar dan daya beli masyarakat tetap stabil. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Sambas menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga komoditas utama (seperti lada dan kelapa

sawit), tekanan inflasi musiman, dan ketergantungan pada perdagangan lintas negara. Namun, upaya penguatan ekonomi lokal terus dilakukan, antara lain melalui diversifikasi usaha masyarakat, peningkatan infrastruktur ekonomi, dan pengembangan UMKM. Dukungan fiskal dari pemerintah pusat serta koordinasi dengan Bank Indonesia dan instansi keuangan lainnya juga penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas harga.

Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Sambas sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola risiko eksternal, meningkatkan produktivitas sektor unggulan, serta memperluas basis ekonomi melalui inovasi dan digitalisasi. Dengan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor, Kabupaten Sambas berpeluang memperkuat ketahanan ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.1.3.7.1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang menggambarkan kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total output ekonomi suatu wilayah. Rasio ini mencerminkan kapasitas fiskal daerah, yaitu sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui instrumen pajak. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula peran pajak daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan rasio pajak daerah Kabupaten Sambas terhadap PDRB menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang tumbuh mulai diiringi dengan kemampuan pemda dalam menarik pajak secara lebih optimal. Hal ini dapat terjadi karena perbaikan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi layanan pajak, serta penguatan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi. Sektor-sektor ekonomi unggulan seperti perdagangan, jasa, dan pariwisata juga berperan dalam memperluas basis pajak, yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

Tabel 2. 48
Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB	20.669.990.000.000	22.293.000.000.000	24.386.480.000.000	26.189.880.000.000	28.560.990.000.000
Realisasi Pendapatan Daerah	1.669.647.856.825,95	1.850.514.381.733,21	1.706.793.890.995,35	1.867.559.559.104,08	2.102.272.191.827,69
Rasio Pendapatan Daerah terhadap PDRB (* PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha)	8,08%	8,30%	7,00%	7,13%	7,36%

Sumber : *Bakeuda kab. Sambas, 2025*

Data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan realisasi pendapatan daerah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut. PDRB mengalami peningkatan yang konsisten dari Rp 20,67 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 28,56 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil meskipun terdapat fluktuasi dalam realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pendapatan daerah dibanding tahun sebelumnya, namun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 sebelum kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024.

Namun demikian, rasio pendapatan daerah terhadap PDRB menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan daerah terhadap total output ekonomi masih tergolong rendah dan cenderung stagnan. Rasio ini mengalami penurunan dari 8,30% pada tahun 2021 menjadi 7,00% pada 2022, meskipun kembali naik secara bertahap ke angka 7,36% di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, serta memperkuat sinergi dengan sektor swasta untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

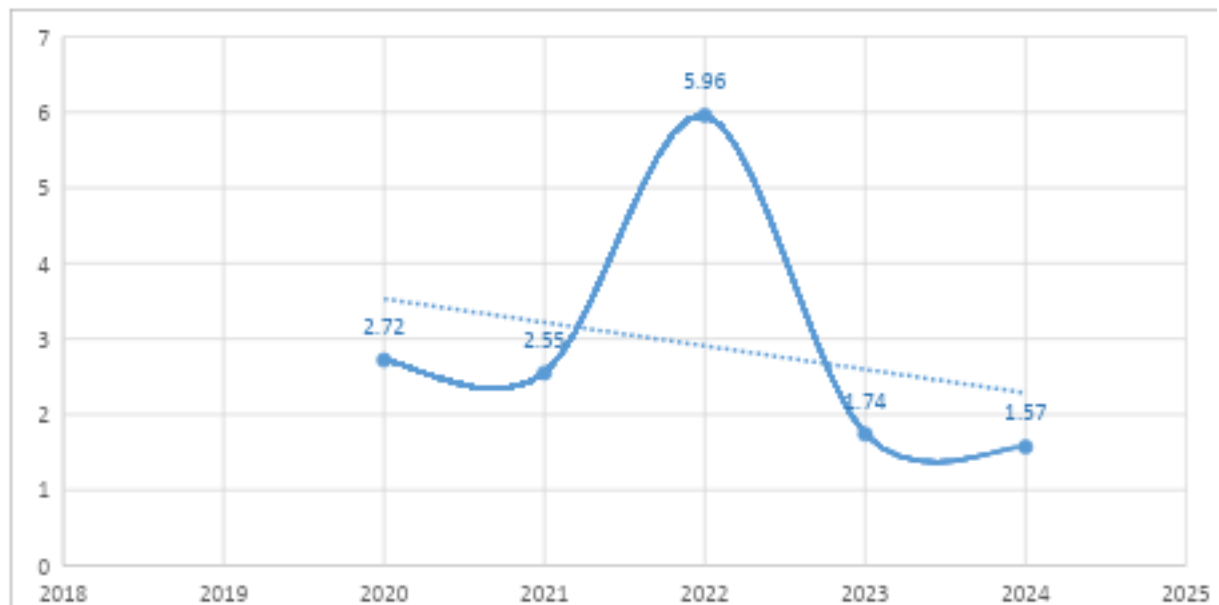
2.1.3.7.2. Tingkat Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan

penawaran (*supply*) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.

Suatu daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat.

Kabupaten Sambas bukan termasuk dalam daftar kota inflasi yang secara langsung dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga angka inflasi resmi untuk wilayah ini tidak tersedia secara spesifik. Oleh karena itu, untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, angka inflasi Kabupaten Sambas mengacu pada data dari kota terdekat yang berstatus sebagai kota inflasi, yaitu Kota Singkawang. Kota ini menjadi *sister city* acuan karena memiliki karakteristik geografis dan pola konsumsi masyarakat yang relatif mirip, sehingga dapat merepresentasikan tren harga dan kondisi ekonomi yang relevan bagi Kabupaten Sambas.



Sumber: BPS Kota Singkawang, 2025

Gambar 2. 27 Grafik Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024 (%)

Grafik menunjukkan perkembangan angka inflasi tahunan yang digunakan oleh Kabupaten Sambas dengan mengacu pada data Kota Singkawang sebagai *sister city*. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 2,72% dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,55% pada 2021. Namun, pada 2022 terjadi lonjakan inflasi yang signifikan hingga mencapai 5,96%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, kenaikan harga energi, dan gangguan distribusi barang. Setelah lonjakan tersebut, inflasi kembali turun drastis menjadi 1,74% pada tahun 2023 dan sedikit menurun lagi menjadi 1,57% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, garis trend dalam grafik menunjukkan kecenderungan menurunnya inflasi dalam jangka menengah. Penurunan ini mencerminkan kondisi harga yang relatif stabil, namun juga perlu diwaspadai karena inflasi yang terlalu rendah bisa menandakan lemahnya daya beli masyarakat atau lesunya aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian inflasi yang seimbang tetap menjadi fokus penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya dapat dilihat dari bagaimana penyelenggaraan pelayanan umum dilaksanakan di sebuah negara. Sebuah pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan umum akan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil. Pemerintah Indonesia menetapkan standar pelayanan di berbagai unit atau instansi pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap instansi akan dievaluasi seberapa baik mereka dalam mematuhi standar yang telah ditetapkan. Adapun pengevaluasian tersebut meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil dari evaluasi tersebut akan menjadi acuan atau bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan dan tindakan agar langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah berjalan efektif.

2.1.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif merupakan pondasi utama bagi terciptanya pemerintahan daerah yang responsif, efektif, dan terpercaya. Dalam konteks otonomi daerah, seperti yang dijalankan di Kabupaten Sambas, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan pembangunan daerah sesuai dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan partisipasi. Integritas dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu atau elite semata.

Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang, regulasi yang adaptif menjadi keharusan, bukan pilihan. Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan menghadapi tantangan khas seperti mobilitas lintas negara, keragaman budaya, serta perubahan kebijakan nasional dan global. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam merancang regulasi yang fleksibel namun tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sangat menentukan keberhasilan tata kelola publik. Adaptivitas ini tidak berarti melemahkan prinsip hukum, melainkan memperkuat relevansi dan efektivitas peraturan di tengah kompleksitas masyarakat modern.

Tata kelola yang berintegritas juga menuntut sistem birokrasi yang akuntabel, transparan, dan antikorupsi. Praktik tata kelola yang baik (*good governance*) diukur dari sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsinya secara jujur, profesional, dan terbuka terhadap pengawasan publik. Kabupaten Sambas telah mulai menerapkan prinsip-prinsip ini melalui inovasi pelayanan digital, perbaikan sistem pengawasan internal, serta pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Namun, agar tata kelola benar-benar berintegritas, perlu konsistensi dalam penegakan hukum, pembenahan budaya kerja birokrasi, dan pemberdayaan pengaduan masyarakat secara efektif.

Keberhasilan membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif akan menentukan arah pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya menciptakan pemerintahan yang bersih

dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan antara masyarakat dan negara. Kepercayaan inilah yang menjadi modal sosial penting dalam mewujudkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta demokrasi yang substansial di tingkat lokal. Kabupaten Sambas, dengan segala keunikannya sebagai daerah perbatasan, memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana integritas dan adaptivitas bisa berjalan beriringan dalam tata kelola publik yang modern dan berdaya guna.

2.1.4.1.1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan reformasi hukum di suatu wilayah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum, akses terhadap keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan transparansi lembaga hukum dijalankan dengan baik. Reformasi hukum menjadi krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan indeks ini tidak hanya menunjukkan kemajuan teknis di sektor hukum, tetapi juga mencerminkan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Sambas, reformasi hukum mencakup berbagai aspek seperti pembentukan regulasi daerah yang berkualitas, pelayanan publik berbasis hukum, dan pembenahan institusi penegak hukum serta pengawasan internal. Salah satu indikator kemajuan adalah hadirnya Peraturan Daerah yang harmonis dengan peraturan pusat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Selain itu, penguatan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP), pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu, serta penyuluhan hukum yang merata turut memperkuat ekosistem hukum di daerah.

Kabupaten Sambas berhasil meraih peringkat ketiga terbaik dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) se-Kalimantan Barat. Prestasi ini diumumkan pada Februari 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Tim Nasional IRH. Penilaian ini

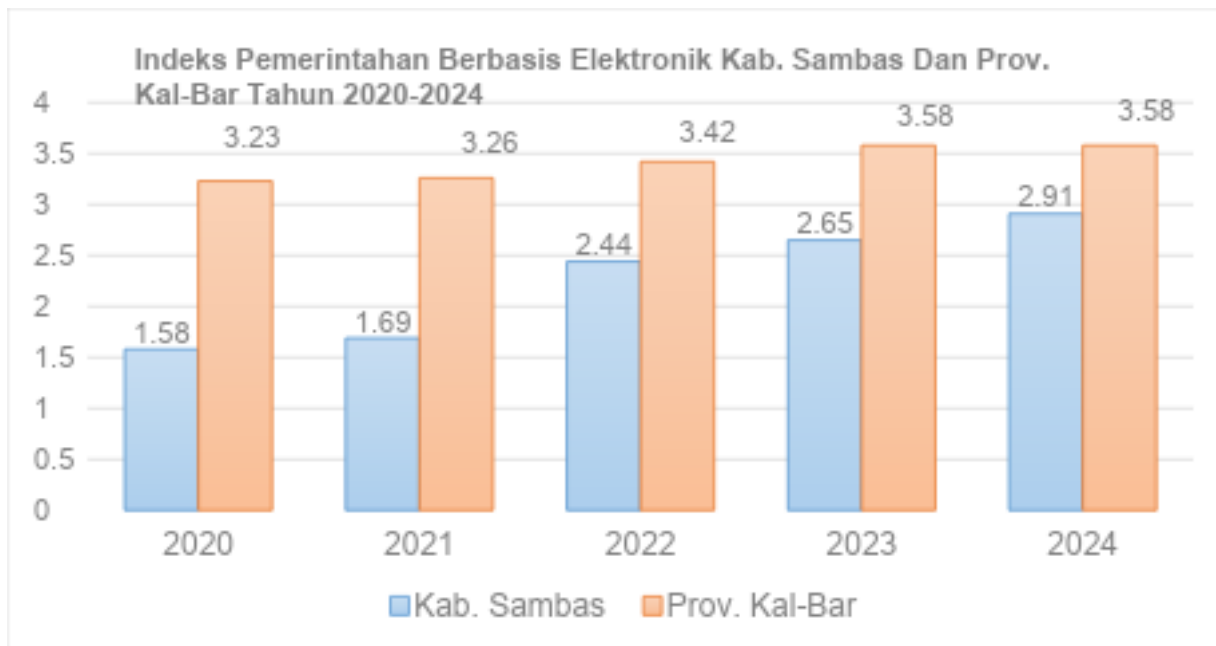
merupakan bagian dari evaluasi reformasi birokrasi di tingkat daerah, khususnya terkait dengan kualitas regulasi dan tata kelola pemerintahan.

Namun, tantangan tetap ada mulai dari kapasitas sumber daya manusia hukum yang belum merata, hingga resistensi terhadap perubahan dalam birokrasi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Reformasi Hukum perlu dilakukan secara bertahap melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan demikian, reformasi hukum dapat berjalan tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan mendasar dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang inklusif di daerah.

2.1.4.1.2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Sambas dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, indeks SPBE Kabupaten Sambas berada pada angka 1,58, jauh di bawah rata-rata provinsi yang telah mencapai 3,23. Kesenjangan ini mulai mengecil seiring dengan peningkatan bertahap dari Kabupaten Sambas, yakni 1,69 pada tahun 2021, kemudian melonjak menjadi 2,44 pada 2022, 2,65 pada 2023, dan mencapai 2,91 pada tahun 2024. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan yang relatif stabil, dari 3,23 pada 2020 menjadi 3,58 pada 2023 dan tetap berada di angka yang sama pada tahun 2024.

Kenaikan indeks SPBE Kabupaten Sambas menunjukkan adanya progres signifikan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang mencerminkan upaya digitalisasi layanan publik dan tata kelola pemerintahan. Meskipun masih berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Barat, tren positif ini menggambarkan adanya komitmen dan perbaikan berkelanjutan dari pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital di sektor pelayanan publik. Dengan mempertahankan tren pertumbuhan tersebut, Kabupaten Sambas berpotensi untuk mendekati atau bahkan menyamai rata-rata provinsi di masa mendatang. Berikut grafik capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020-2024;



Sumber: Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2020-2024

Gambar 2.28. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab. Sambas Dan Prov. Kalbar Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil evaluasi SPBE terhadap instansi Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020 dan 2021 mendapat predikat dan nilai yang kurang memuaskan. Selama 2 tahun tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas memperoleh predikat “Kurang” dengan nilai pada tahun 2020 sebesar 1,58 dan nilai 1,69 pada tahun 2021. Nilai yang memuaskan diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sambas pada Evaluasi SPBE tahun 2022 dengan nilai 2,44 sehingga predikat yang diperoleh meningkat menjadi “Cukup”. Peningkatan kembali diperoleh karena pada tahun 2023 Indeks SPBE Kabupaten Sambas mendapat nilai 2,65 dengan predikat “Baik”. Sedangkan pada tahun 2024 mendapat predikat “Baik” dengan nilai 2,91.

2.1.4.1.3. Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan hak masyarakat. Kualitas dari pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga untuk memastikan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, pemerintah Indonesia menggunakan “Indeks Pelayanan Publik” sebagai alat ukur.

Pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap unit pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah dan berpedoman pada beberapa aspek yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik ini didasari oleh 6 aspek, yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, dan inovasi pelayanan. Berikut capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020-2024;

Tabel 2. 49
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

INDEKS PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN SAMBAS				
Tahun Realisasi				
2020	2021	2022	2023	2024
B (3,75)	A- (4,04)	B (3,53)	C (2,79)	A- (4,26)

Sumber: Satu Data KEMENPAN-RB Tahun 2020-2024

Pelaksanaan evaluasi terhadap unit pelayanan publik pada tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mendapat predikat B (Baik). Predikat yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sambas meningkat di tahun berikutnya, yang mana pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sambas berhasil meraih predikat A- (Sangat Baik). Predikat A- (Sangat Baik) tidak berhasil dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh KEMENPAN-RB pada tahun 2022 menyatakan predikat yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Sambas turun menjadi B (Baik). Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi C (Cukup), pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan meningkat menjadi A- (Sangat Baik).

2.1.4.1.4. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas publik, serta komitmen terhadap pemberantasan korupsi di tingkat daerah. Di Kabupaten Sambas, keberadaan indeks ini menjadi cermin sejauh mana nilai-nilai integritas seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan hukum di institusionalisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai

daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain, integritas bukan hanya soal etika birokrasi, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan.

Penilaian terhadap Indeks Integritas di Kabupaten Sambas menunjukkan adanya tantangan struktural yang memerlukan perhatian serius. Beberapa indikator seperti transparansi pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi risiko penyimpangan, terutama akibat rendahnya kualitas pengawasan internal dan kapasitas SDM. Hal ini tercermin dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta hasil evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti perlunya penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kepatuhan terhadap laporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara).

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen yang meningkat dalam membangun budaya integritas. Langkah-langkah seperti digitalisasi layanan publik, pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas telah mulai diterapkan. Dalam jangka panjang, komitmen ini perlu diperkuat melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem tata kelola yang bersih dan efisien.

Dengan menguatkan Indeks Integritas Nasional, Kabupaten Sambas tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintahan daerah, tetapi juga membangun daya saing regional yang berbasis pada kepercayaan dan kepastian hukum. Hal ini sangat penting dalam konteks otonomi daerah dan dinamika pembangunan kawasan perbatasan. Integritas yang kokoh akan melahirkan kebijakan yang adil, pelayanan yang berkualitas, serta mencegah kebocoran anggaran yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, indeks integritas harus dijadikan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar kewajiban administratif.

2.1.4.1.5. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator penting dalam menilai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah. Berdasarkan data dari Kementerian PAN RB tahun 2025, Kabupaten Sambas secara konsisten memperoleh predikat BB (Baik Sekali) selama lima tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2020 hingga 2024. Predikat BB mencerminkan bahwa kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Sambas telah berada pada level yang sangat baik, mencakup berbagai aspek perbaikan tata kelola pemerintahan.

Capaian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas telah berhasil menjalankan prinsip-prinsip reformasi birokrasi seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, tata kelola yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan kualitas SDM aparatur. Konsistensi dalam capaian BB selama lima tahun juga menandakan adanya keberlanjutan kebijakan dan komitmen pimpinan daerah dalam mengawal agenda reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Lebih lanjut, predikat BB menempatkan Kabupaten Sambas dalam posisi strategis di tingkat nasional sebagai salah satu daerah yang mampu menjadi contoh praktik baik (best practice) pelaksanaan reformasi birokrasi. Ini juga membuka peluang yang lebih luas dalam memperoleh dukungan pemerintah pusat, baik dalam bentuk pendanaan, program pembangunan, maupun pembinaan kelembagaan.

Namun demikian, meskipun pencapaian BB tergolong tinggi, Kabupaten Sambas tetap memiliki ruang untuk meningkatkan kualitas reformasi birokrasi ke level lebih lanjut, yaitu predikat A (Memuaskan). Upaya peningkatan ini dapat difokuskan pada inovasi pelayanan publik, pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi pemerintahan, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas.

Tabel 2. 50
Indeks Reformasi Birokrasi menurut Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Sambas	BB	BB	BB	BB	BB

Sumber : Kementerian PAN RB, 2021-2025

Hasil capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sambas yang secara konsisten meraih predikat BB selama tahun 2020–2024 menunjukkan keberhasilan dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Meski sudah berada pada tingkat “Baik Sekali,” Kabupaten Sambas perlu terus melakukan inovasi dan evaluasi untuk mencapai tingkat tertinggi reformasi birokrasi di masa mendatang.

2.1.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Kabupaten Sambas, sebagai wilayah perbatasan yang strategis, memiliki posisi penting dalam membangun pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, aman, dan demokratis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan Sambas tidak hanya sebagai garda terdepan dalam aspek geografis, tetapi juga dalam konteks ideologis dan institusional. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan hukum, keamanan, dan demokrasi di daerah ini menjadi cerminan dari keseriusan negara dalam menghadirkan negara hukum yang inklusif dan responsif hingga ke wilayah terluar.

Hukum berkeadilan di Kabupaten Sambas bukan sekadar produk regulasi, tetapi menyangkut bagaimana hukum hadir dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan hukum harus menjangkau kelompok rentan, menghormati nilai-nilai lokal, dan mampu menyelesaikan konflik secara damai. Penegakan hukum yang adil juga menuntut adanya integritas aparat penegak hukum, transparansi prosedural, serta keberpihakan terhadap nilai-nilai HAM dan keberagaman budaya yang khas di wilayah perbatasan.

Di sisi lain, keamanan nasional yang tangguh di daerah seperti Sambas membutuhkan pendekatan yang lebih dari sekadar kekuatan militer atau kepolisian. Ketangguhan tersebut mencakup keamanan manusia, mulai dari ketersediaan layanan dasar, ketertiban sosial, hingga perlindungan terhadap ancaman transnasional seperti perdagangan manusia dan penyelundupan. Dalam konteks ini, keamanan harus dipahami sebagai instrumen untuk

menciptakan ruang hidup yang aman dan bermartabat bagi masyarakat, bukan sebagai alat represi.

Demokrasi substansial menjadi pilar ketiga yang memperkuat keberlanjutan pemerintahan dan partisipasi rakyat di Kabupaten Sambas. Demokrasi tidak cukup hanya diukur dari pelaksanaan pemilu secara periodik, tetapi dari sejauh mana warga diberi ruang untuk berpartisipasi, mengakses informasi publik, dan mengontrol kebijakan secara aktif. Dengan memperkuat praktik demokrasi yang substansial, Kabupaten Sambas dapat menjadi model daerah perbatasan yang tidak hanya kuat secara teritorial, tetapi juga tangguh secara institusional dan inklusif secara sosial.

2.1.4.2.1. Persentase Penegakan Perda

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Sambas merupakan elemen vital dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Perda berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur kehidupan masyarakat lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan sebagai pelaksana utama penegakan Perda. Tingkat pencapaian penegakan Perda secara kuantitatif menunjukkan tren yang baik, dengan capaian pelaksanaan Perda mencapai 73,13 % pada tahun 2024, setidaknya dalam indikator pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Perda tertentu. Untuk lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 51
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kambas

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Trantibumlinmas serta Penegakan Perda/Perkada	1. Persentase Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Trantibumlinmas serta Penegakan Perda	100%	73,13%
		2. Persentase SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Satlinmas yang Terlatih	100%	10.51%

		3. Persentase Pelanggaran PERDA/PERKADA yang Diselesaikan	100%	100%
		4. Rasio Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Bersertifikasi	100%	200%

Sumber: Lakip Satpol PP Tahun 2024

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas berdasarkan indikator Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat tercapai sebesar 100 %, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja yang ditargetkan, terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian realisasi sebesar 100%, 1 (satu) indikator yang realisasinya mencapai 200%, serta terdapat 2 (dua) indikator yang capaian realisasi dibawah 100% yaitu hanya mencapai 73,13% dan 9.51%. Formulasi perhitungan kinerja yang digunakan adalah Jumlah kegiatan deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli Rutin, pengamanan, dan pengawalan, penegakan Perda/Pergub, serta rasio Penyidik PNS yang bersertifikasi dilaksanakan dengan baik akan tetapi pada peningkatan SDM dan petugas Satlinmas masih jauh dari target yang ditentukan karena data satlinmas yang bertambah tetapi belum mendapat pelatihan / peningkatan SDM.

Meskipun capaian 73,13% tersebut terkesan optimal, indikator ini perlu ditelaah lebih kritis dalam hal kualitas dan cakupan penegakan. Dalam praktiknya, sebagian besar penegakan masih terfokus pada pelanggaran yang bersifat administratif atau kasat mata, seperti ketertiban umum, reklame ilegal, dan penataan pedagang kaki lima. Penegakan terhadap Perda yang lebih kompleks, misalnya terkait lingkungan hidup, pengelolaan aset daerah, dan zonasi tata ruang masih menghadapi hambatan baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan regulatif. Selain itu, belum semua OPD memiliki regulasi turunan atau SOP teknis yang memperjelas mekanisme pengawasan dan penindakan, yang berpotensi menyebabkan ketidakterpaduan dalam pelaksanaan di lapangan.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan data dan pelaporan yang belum sepenuhnya terintegrasi antarinstansi. Hal ini menyebabkan sulitnya mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas dan dampak penegakan Perda terhadap kepatuhan hukum masyarakat. Meskipun Satpol PP memiliki target kinerja tahunan, indikator keberhasilan belum menyentuh aspek substansi seperti tingkat kepatuhan masyarakat, efektivitas sanksi, atau dampak jangka panjang dari tindakan penegakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di beberapa kalangan masyarakat perbatasan juga menjadi tantangan tersendiri, yang harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan persuasif, bukan hanya represif.

Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa persentase penegakan Perda di Kabupaten Sambas secara administratif cukup tinggi, namun secara substansial masih perlu penguatan. Kualitas pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, dan sosialisasi hukum kepada masyarakat harus menjadi fokus utama ke depan. Pemerintah daerah perlu berinvestasi pada peningkatan kapasitas Satpol PP, pembaruan regulasi, serta penyusunan sistem pelaporan yang lebih transparan dan terintegrasi. Dengan demikian, penegakan Perda tidak hanya sekedar memenuhi target administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai alat pembentuk budaya hukum dan penjamin ketertiban sosial yang berkelanjutan.

2.1.4.2.2. Persentase Capaian Aksi HAM

Capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) di Kabupaten Sambas mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Aksi HAM merupakan agenda nasional yang diturunkan ke tingkat daerah melalui Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), dengan indikator utama seperti perlindungan kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas), akses terhadap layanan publik, serta pemenuhan hak sipil dan politik. Kabupaten Sambas telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam pelaporan dan pelaksanaan aksi HAM, yang tercermin dari meningkatnya capaian persentase pelaksanaan aksi dari tahun ke tahun. Ini menjadi bukti adanya kesadaran institusional terhadap

pentingnya integrasi prinsip HAM dalam kebijakan dan pelayanan publik daerah.

Kabupaten Sambas menunjukkan komitmen kuat dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kabupaten ini meraih penghargaan sebagai salah satu peraih nilai tertinggi capaian RANHAM di Kalimantan Barat, bersama dengan Kabupaten Sanggau, Singkawang, dan Sintang. Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil-hasilnya secara berjenjang dan transparan.

Sebagai contoh, pada Maret 2024 Komnas HAM Perwakilan Kalimantan Barat melakukan monitoring terhadap kesepakatan perdamaian sengketa lahan di Kabupaten Sambas. Proses mediasi ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelesaikan permasalahan HAM melalui pendekatan dialog dan hukum yang konstruktif Komnas HAM.

Dengan penghargaan ini, Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang konsisten dalam mengimplementasikan RANHAM, mencerminkan dedikasi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat lokal.

Kabupaten Sambas memiliki peluang besar untuk memperkuat integrasi prinsip HAM dalam tata kelola pemerintahan daerah. Upaya peningkatan capaian Aksi HAM tidak hanya penting dari sisi administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah perlu menjadikan capaian HAM sebagai indikator kinerja pembangunan daerah, bukan sekadar kewajiban formal. Dengan memperkuat sinergi antara OPD, melibatkan masyarakat sipil, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pelaporan yang transparan, Kabupaten Sambas dapat menjadi model daerah perbatasan yang progresif dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara substantif dan berkelanjutan

2.1.4.2.3. Indeks Demokrasi Indonesia

Sebagai bagian dari politik, partisipasi pemilih dalam proses pesta demokrasi Pemilu menjadi tulang punggung yang sangat penting. Tingkat

partisipasi ini mencerminkan seberapa aktif dan terlibatnya masyarakat mengambil bagian sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dalam menentukan arah politik dan pemimpin mereka. Pada proses Pemilihan Umum (Pemilu), keterlibatan masyarakat sebagai pemilih berperan sebagai indikator kepercayaan dan komitmen mereka terhadap proses demokrasi yang sedang berlangsung.

Pada pesta demokrasi Pemilihan Umum Tahun 2024, Sambas merupakan salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat dengan tingkat partisipasi pemilih yang rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini karena berdasarkan perhitungan tiap-tiap KPU kabupaten/kota yang dihimpun oleh KPU provinsi menunjukkan bahwa Sambas menempati 3 (tiga) terbawah di atas Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dengan rata-rata tingkat partisipasi hanya sebesar 74,45%. Berdasarkan data KPU Provinsi Kalimantan Barat, jumlah pemilih yang terdaftar saat Pemilu 2024 adalah sebanyak 459.939 orang. Kemudian setelah dilakukan pemungutan suara, DPT yang menggunakan hak pilih mereka berjumlah 342.986 pemilih.

Jika kemudian dibandingkan dengan rekapitulasi pada Pemilihan Umum tahun 2019 lalu, memang rata-rata tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas mengalami peningkatan, namun dengan angka yang tidak signifikan. Pada Pemilihan Umum tahun 2019 lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas di angka 71,15%, mengalami peningkatan 3,30% menjadi 74,45% di tahun 2024. Artinya dengan persentase DPT tidak menggunakan hak pilih sebesar 25,55% yang masih terbilang tinggi hendaknya dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah Kabupaten Sambas agar pada Pemilu serentak berikutnya berhasil menaikkan tingkat partisipasi masyarakatnya.

Tabel 2. 52
Rekapitulasi Partisipasi Pemilih Pemilihan Umum 2024
Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih			Partisipasi Pemilih (%)			
		DPT	DPK	Jumlah	Pilpre s	DPR RI	DPD	DPRD
1	Melawi	153.799	879	155.678	95,60	95,5	95,42	95,6
2	Landak	286.610	1.790	288.400	90,78	90,68	90,69	90,61
3	Sekadau	156.957	1.351	158.308	88,39	88,3	88,33	88,28
4	Sintang	318.891	4.597	323.488	86,06	87,91	87,97	87,89
5	Kapuas Hulu	193.984	1.956	195.940	86,03	85,81	85,89	85,81

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih			Partisipasi Pemilih (%)			
		DPT	DPK	Jumlah	Pilpre s	DPR RI	DPD	DPRD
6	Kubu Raya	446.808	5.548	452.356	85,14	84,92	84,98	84,74
7	Kayong Utara	91.329	1.115	92.444	82,97	82,59	82,64	82,34
8	Sanggau	359.344	2.325	361.669	82,04	81,65	81,89	81,61
9	Kota Pontianak	483.919	4.850	488.769	81,07	80,66	80,77	80,43
10	Mempawah	216.327	2.825	219.152	78,49	78,19	78,23	78,09
11	Ketapang	414.830	5.211	420.041	77,69	77,35	77,37	77,24
12	Sambas	458.286	1.653	459.939	74,57	74,44	74,45	74,33
13	Kota Singkawang	169.951	1.614	171.565	73,83	73,51	73,61	73,04
14	Bengkayang	206.526	1.910	208.436	72,45	72,33	72,35	72,26
	TOTAL	3.958.561	37.624	3.996.185	82,02	81,78	81,84	81,66

Sumber: KPU Provinsi Kalimantan Barat 2024

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum, partisipasi pemilih Kabupaten Sambas pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Pemilu 2014. Tingkat partisipasi masyarakat Sambas saat kontestasi Pemilu serentak tahun 2019 mencapai 71,10%. Dalam rentang waktu lima tahun, terjadi kenaikan angka partisipasi masyarakat sebesar 4,93% dari Pemilu 2014 yang hanya 66,17%. Jika dibandingkan dengan dengan Pemilu 2004, sebenarnya tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum 2019 mengalami penurunan sebesar 7,2% dengan rata-rata partisipasi masyarakat pada saat itu sebesar 78,30%. Walaupun demikian, dengan tingkat partisipasi pemilih khususnya tahun 2019 yang sudah mencapai 70% membuat Pemerintah Kabupaten Sambas dapat dikatakan cukup baik dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada demi meningkatkan Indeks Partisipasi Pemilu.

Tabel 2. 53
Persentase Partisipasi Pemilih Kabupaten Sambas Pada Pemilu 2019 dan 2024

No	Pemilihan	Persentase	
		2019	2024
1	PPWP	71,23%	74,57%
2	DPD	71,15%	74,44%
3	DPR RI	71,13%	74,45%
4	DPRD Prov	71,03%	74,33%
Total		71,14%	74,45%

Sumber: JDIH KPU Kalimantan Barat 2024 (data diolah)

Partisipasi Pemilih juga tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam memilih Bupati/Walikota yang akan menjadi calon pemimpin mereka. Terutama pada saat pelaksanaan Pilkada Bupati Sambas pada tahun 2020, partisipasi masyarakat bisa dikatakan sudah melampaui 2/3 dari

keseluruhan jumlah Daftar Pemilih Tetap dengan tingkat partisipasi sebesar 66,85%. Jumlah DPT yang tercatat saat itu adalah sebanyak 429.196 pemilih dan yang menggunakan hak suara mereka berjumlah 286.918 pemilih. Jumlah ini menunjukkan masih terdapat 142.278 masyarakat Sambas yang sebenarnya berhak memilih namun mereka tidak betul-betul memanfaatkan hak tersebut. Tingkat partisipasi ini sebetulnya sudah lebih baik jika dibandingkan saat Pilkada Kabupaten Sambas tahun 2015. Saat itu, jumlah pengguna hak pilih yang tercatat oleh KPU sebanyak 243.636 suara dari total DPT yang berjumlah 411.310 sehingga tingkat partisipasi pemilih yang dihasilkan hanya sebesar 59,50%. Dengan kenaikan sebesar 7,35% pada tahun 2020 sebagai sebuah capaian baik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Sambas berhasil menaikkan tingkat partisipasi pemilih dibandingkan tahun-tahun pemilihan sebelumnya pada Pilkada yang akan datang.

Tabel 2. 54
Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Sambas (2015-2024)

No	Indikator	Tahun		
		2015	2020	2024
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	411.310	429.196	458.752
2	Jumlah Pengguna Hak Pilih	243.636	286.918	296.522
3	Tidak Menggunakan Hak Pilih	167.674	142.278	162.230
Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih		59,50%	66,85%	64,64%

Sumber: e-PPID Sambas 2025

Jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas menunjukkan tren peningkatan secara absolut dalam tiga periode pemilu terakhir. Pada tahun 2015, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 243.636 orang. Jumlah ini meningkat menjadi 286.918 orang pada tahun 2020, dan mencapai 296.522 orang pada pemilu tahun 2024. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan partisipasi sebanyak 52.886 orang dalam kurun waktu sembilan tahun. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Namun, peningkatan tersebut tidak serta merta menunjukkan keberhasilan mutlak dalam mendorong partisipasi politik, karena belum sejalan dengan pertumbuhan jumlah pemilih tetap.

Ketika dianalisis lebih dalam, laju pertumbuhan pengguna hak pilih ternyata tidak sebanding dengan pertambahan jumlah pemilih terdaftar (Daftar Pemilih Tetap/DPT). Dari 2015 ke 2020, jumlah DPT bertambah sekitar 17.886 orang, sedangkan pengguna hak pilih naik 43.282 orang. Namun pada periode 2020–2024, DPT bertambah 29.556 orang, sementara jumlah pemilih aktif hanya naik 9.604 orang. Ini menunjukkan bahwa meskipun lebih banyak warga terdaftar sebagai pemilih, peningkatan partisipasi riil tidak setara. Dengan kata lain, terdapat jarak antara legalitas hak pilih dan realisasi penggunaannya, yang bisa mengindikasikan munculnya kejenuhan atau apatisme politik di kalangan masyarakat.

Tingkat partisipasi pemilih pun memperlihatkan fluktuasi yang patut dicermati. Pada tahun 2015, tingkat partisipasi sebesar 59,50% meningkat menjadi 66,85% di tahun 2020, namun kembali menurun ke angka 64,64% pada tahun 2024. Penurunan sebesar 2,21% ini menjadi sinyal penting bahwa semangat keterlibatan politik warga tidak mengalami penguatan yang konsisten, meskipun jumlah pemilih terus bertambah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan berdampak pada legitimasi hasil pemilu dan efektivitas pemerintahan yang terbentuk, karena hanya didukung oleh sebagian kecil warga yang benar-benar berpartisipasi.

2.1.4.2.4. Indeks Rasa Aman

Salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintahan suatu wilayah adalah rasa aman. Menjadi sangat mustahil jika memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan mengesampingkan masalah keamanan. Dinamika internasional telah mendorong bagi perluasan pemaknaan keamanan bukan hanya terfokus kepada keamanan negara namun mencakup keamanan manusia. Keamanan manusia mencakup beberapa gagasan besar dengan aspek yang sangat luas dan dimaknai secara berbeda baik secara konseptual maupun perhitungan. Adapun indikator untuk mengukur indeks rasa aman tersebut mencakup 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. Jumlah Penurunan Pelanggaran Perkada;
- b. Jumlah masyarakat yang terlayani dalam penegakan Perkada;

- c. Jumlah masyarakat terdampak akibat pelayanan perkada; dan
- d. Jumlah masyarakat yang dilakukan penyuluhan Perkada.

Hak atas rasa aman adalah salah satu hak asasi yang dijamin dan dilindungi negara. Pasal 28G ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka hak rasa aman berkaitan dengan perlindungan individu, integritas fisik, integritas psikis, dan juga harta benda.

Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan individu maupun masyarakat secara luas. Hal ini menjadi salah satu amanat yang menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendefinisian “Rasa Aman“ disebutkan dalam Undang- Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 30 ayat (1) yang menyatakan “Rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam kegiatan pembangunan, tujuan dari pengukuran keamanan pada suatu daerah adalah sebagai dasar perencanaan, proyeksi, atau implementasi program pembangunan. Selain itu, pengukuran ini juga merupakan acuan untuk membangun sistem pencegahan dini (*early warning system*) terhadap berbagai macam komponen, sebagai sistem pendukung dalam pengambilan keputusan dan sebagai barometer bagi pemerintah untuk menciptakan keberlanjutan pelayanan.

Tabel 2. 55
Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan
di Kab Sambas Tahun 2021-2023

No	Uraian	Periode		
		2021	2022	2023
1	Ungkap Kasus	75	65	43
2	Tersangka	93 orang (Lk 81 Pr 12)	83 orang (Lk 80 Pr 3)	49 orang (Lk 45 Pr 4)
Barang Bukti Narkoba				
1	Shabu	1735,8 gram	2.412,43 gram	336.76 gram
2	Ganja	5,71 gram	0,70 gram	-
3	Extasi	6 butir	9 butir	-
4	RP	Rp. 16.436.000	Rp. 10.184.000	Rp. 11.615.000
5	RM	-	RM1.500	-
6	LSD	-	10 lembar	-

Sumber: Renstra Kabupaten Sambas 2024

Melihat tabel di atas sampai di tahun 2023 ada peningkatan kasus narkotika di Kabupaten Sambas, sehingga kasus narkoba ini masih menjadi ancaman bagi masyarakat Kabupaten Sambas karena mengganggu kenyamanan dan ketentraman masyarakat Kabupaten Sambas. Dengan kondisi ini diharapkan pemerintah daerah, masyarakat harus menguatkan lagi kerja sama dengan penegak hukum khususnya polres Sambas dalam menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Tegaknya supremasi hukum juga sangat bergantung pada angka kriminalitas. Angka tersebut di Kab. Sambas dapat dilihat dari dua indikator, yakni jumlah tindak pidana (kasus kriminal) yang dilaporkan dan persentase penyelesaian tindak pidana. Pada tahun 2020 tercatat 350 kasus yang dilaporkan, dengan 367 kasus yang diselesaikan. Dari total 350 kasus tersebut, kasus terbanyak yang dilaporkan adalah narkotika dengan 54 kasus atau 15,43% dari total kasus yang dilaporkan. Kasus kedua terbanyak adalah percabulan dan miras dengan 45 dan 43 kasus di tahun 2020. Kasus selanjutnya yang dilaporkan terbanyak berturut-turut adalah 30 kasus pencurian biasa, 27 kasus pencurian berat, 24 kasus aniaya, 19 kasus curanmor roda dua, 19 kasus perjudian, dan 14 kasus penggelapan. Jenis kejahatan lainnya yang dilaporkan tidak mencapai 10 kasus. Dengan demikian, secara keseluruhan persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan sejumlah 104,86%. (Sumber: Kepolisian Resor Sambas dalam Kabupaten Sambas Dalam Angka 2021).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, supremasi hukum di Kabupaten Sambas sudah terwujud. Hal ini dapat dilihat dari capaian penyelesaian kasus dibandingkan dengan kasus yang dilaporkan hingga tahun 2020, yakni mulai dari kasus narkoba, pencabulan, miras, pencurian biasa, pencurian berat, penganiayaan, curanmor, perjudian dan penggelapan, dapat mencapai 104,86%.

Salah satu permasalahan hukum yang mengemuka di Kabupaten Sambas adalah kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pemetaan situasi tindak pidana perdagangan orang menjadi penting seiring dengan agenda untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDGs) dan seruan untuk *Global Compact of Migration* (GCM), yang menyerukan diakhirinya semua bentuk kerja paksa, perdagangan orang, perbudakan modern, dan pekerja anak pada tahun 2025. Sementara di bawah GCM, target untuk mencegah, memerangi, dan memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Konteks Migrasi Internasional. Undang-Undang Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menetapkan definisi dan standar untuk mencegah, memerangi, dan memberantas TPPO. Salah satu kerawanan yang tinggi TPPO adalah daerah-daerah yang memiliki perbatasan darat dan laut dengan negara lain.

Sebagai daerah yang memiliki perbatasan antar negara, Kabupaten Sambas dianggap sebagai salah satu sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk Provinsi Kalimantan Barat, dan lokasinya yang berbatasan dengan Malaysia telah menjadikan Sambas rentan terhadap perdagangan orang lintas batas. Hal ini dapat tercermin melalui data dari BP3TKI Pontianak yang menyatakan bahwa dalam tahun 2018 terdapat 289 PMI dari Sambas yang mengalami isu-isu terkait pekerjaan seperti konflik di tempat bekerja, melarikan diri dari tempat kerja, sengketa upah, tindak kriminal, dan banyak lagi. Kasus-kasus terkait pekerjaan dan melarikan diri berada di peringkat teratas: dengan jumlah 97 kasus untuk isu terkait pekerjaan dan 70 kasus melarikan diri dari pekerjaan (Laporan IOM, 2020). Menurut laporan KOMNAS HAM Kalimantan Barat pada tahun 2023, yang tertinggi kasus TPPO yaitu Kabupaten Sambas kemudian baru diikuti oleh kabupaten kota

lainnya. Secara geografis Kabupaten Sambas yang berbatasan dengan wilayah Negara tetangga Malaysia, sehingga menjadi wilayah transit dan banyak warganya yang bekerja di Malaysia.

Aspek pelayanan umum untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat berkaitan dengan upaya menjaga situasi dan kondisi masyarakat yang semakin aman dan harmonis serta terhindar dari ancaman bencana. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan untuk menciptakan kesadaran masyarakat untuk mentaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan peraturan yang dilaksanakan meliputi operasi yang bersifat pembinaan (non Yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum). Penegakan Perda dan Perbup untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib dan sadar hukum di masyarakat sehingga mendukung akselerasi pelaksanaan pembangunan.

Periode tahun 2017 hingga 2021, jumlah kasus ketertiban, ketentraman, keindahan di Kabupaten Sambas terus mengalami penurunan, pada tahun 2020 terdapat 1 kasus menurun sebanyak 1 kasus jika dibandingkan tahun 2019. Kasus unjuk rasa juga menurun sebanyak 1 kasus pada tahun 2020 bila dibandingkan tahun 2019. Secara terperinci dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 56
Jumlah Kasus Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan di Kab.Sambas
Tahun 2017- 2021

Uraian	Tahun					Satuan
	2017	2018	2019	2020	2021	
Jumlah Kasus Unjuk Rasa	4	3	2	1	-	Kasus
Bidang Politik	0	0	0	0	-	Kasus
Bidang Ekonomi	0	0	0	0	-	Kasus
Bidang Agama	0	0	0	0	-	Kasus
Lainnya	4	3	2	1	-	Kasus

Sumber: Kesabangpol Kabupaten Sambas, 2022

Sarana keamanan dan ketertiban umum yang tersedia di Kabupaten Sambas adalah pos siskamling sebanyak 349 unit, kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak unit, kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak

5 unit. Sedangkan jumlah aparat keamanan dan ketertiban pada tahun 2018 sebanyak 3.453 orang, menurun sebanyak 154 orang dibandingkan tahun 2017. Aparat keamanan dan ketertiban terdiri dari aparat pamong praja, aparat linmas, petugas patroli satpol PP dan petugas perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 57
Jumlah Aparat, Sarana Keamanan dan Kendaraan Operasional Kab.Sambas
Tahun 2017-2023

URAIAN	TAHUN							SATUAN
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1. Jumlah Aparat Keamanan dan Ketertiban Umum	3.607	3.453	3.320	4.587	3.424	2.825	4.272	Orang
a. Jumlah Aparat Pamong Praja	51	42	55	48	48	111	120	Orang
b. Jumlah Aparat Linmas	50	41	54	54	54	0	2.043	Orang
c. Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	7	10	10	10	10	10	66	Orang
d. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	3.337	3.337	3.058	3.312	3.312	2.074	2.043	orang
2. Jumlah Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum	349	349	393	393	393	393	590	Unit
a. Jumlah Pos Keamanan	0	0	0	0	0	0	295	Unit
b. Jumlah Pos Kamling	349	349	393	393	393	393	295	Unit
3. Jumlah Kendaraan Operasional	15	15	19	19	19	20	20	Unit
a. Jumlah Kendaraan Operasional 2	10	10	14	14	14	15	15	Unit
b. Jumlah Kendaraan Operasional 4	5	5	5	5	5	5	5	Unit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas, 2023

Kondisi keamanan juga dapat dilihat dari jumlah tindak pidana kasus kriminal yang dilaporkan dan jumlah atau persentase penyelesaian atas tindak pidana tersebut. Menurut data dari Kepolisian Resort (Polres) Sambas (2021) bahwa pada tahun 2020 tercatat sebanyak 350 kasus yang dilaporkan dengan 367 kasus yang diselesaikan. Secara keseluruhan persentase penyelesaian kasus yang dilaporkan sejumlah 104,86%.

Dengan demikian, masyarakat yang aman, damai dan bersatu sudah terwujud. Hal ini dapat dilihat dari rasio petugas Linmas, Siskamling, jumlah kasus ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta persentase

jumlah kasus kriminal yang dapat diselesaikan oleh pihak keamanan terus mengalami peningkatan. Begitupun konflik horizontal di kalangan masyarakat, juga tidak pernah terjadi lagi.

2.1.4.2.5. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas sosial dan efektivitas tata kelola keamanan di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Sambas. Sebagai wilayah perbatasan yang berhadapan langsung dengan Malaysia, Sambas menghadapi tantangan unik dalam menjaga ketentraman sosial, mulai dari potensi konflik horizontal, kejahatan lintas batas, hingga dinamika sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga Trantib di kawasan ini mencerminkan kapasitas institusi lokal, aparat keamanan, dan masyarakat sipil dalam membangun ekosistem sosial yang harmonis dan tahan terhadap gangguan.

Secara struktural, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum di Sambas menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam menjaga stabilitas, namun tantangan tetap ada dalam bentuk kejahatan lintas batas dan ketimpangan sosial. Indikator-indikator seperti angka kriminalitas, intensitas konflik komunal, dan efektivitas penyelesaian sengketa menjadi tolok ukur penting. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, misalnya, telah meningkatkan mobilitas penduduk dan perdagangan, namun juga meningkatkan potensi peredaran barang ilegal dan tindak kejahatan lainnya. Ini menuntut koordinasi yang kuat antarinstansi serta pendekatan kolaboratif dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban tanpa mengekang dinamika sosial yang sehat.

Selain aspek keamanan, ketentraman di Sambas juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-budaya dan ekonomi. Ketimpangan akses terhadap pelayanan dasar, pengangguran, serta marginalisasi kelompok tertentu dapat menjadi akar gangguan ketertiban jika tidak dikelola secara preventif. Dalam konteks ini, pembangunan inklusif dan penguatan peran lembaga adat serta tokoh masyarakat memiliki kontribusi penting dalam menjaga harmoni sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma

keamanan manusia (human security) yang menekankan bahwa ketenteraman bukan hanya ketiadaan konflik, tetapi juga adanya jaminan terhadap kesejahteraan dasar warga.

Peningkatan Indeks Trantib di Kabupaten Sambas harus ditempuh melalui pendekatan holistik yang menyatukan aspek keamanan, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang responsif. Strategi ini menuntut sinergi antara institusi formal seperti pemerintah daerah dan kepolisian dengan aktor-aktor non-negara seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan komunitas lokal. Sambas memiliki potensi besar menjadi contoh kawasan perbatasan yang tidak hanya aman, tetapi juga damai dan inklusif menjadikan stabilitas sosial sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Capaian penegakan supremasi hukum juga dapat dilihat dari upaya deteksi dini pencegahan dan penanggulangan peredaran serta penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya. Jumlah kasus narkoba pada tahun 2016 berjumlah 42 kasus, pada tahun 2017 berjumlah 38 kasus, pada tahun 2018 berjumlah 30 kasus, pada tahun 2019 berjumlah 23 kasus dan pada tahun 2020 53 kasus. Jumlah kasus kriminal yang paling banyak pada tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah kasus narkoba, yaitu kategori ungkap kasus dan tersangka.

2.1.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan di kawasan perbatasan seperti Kabupaten Sambas menjadi aspek krusial dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional. Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Malaysia, merupakan titik strategis yang rentan terhadap berbagai dinamika geopolitik dan keamanan lintas negara. Dalam konteks ini, diplomasi kawasan memainkan peran sentral dalam membangun hubungan bilateral yang harmonis, namun tetap menegaskan kepentingan nasional. Ketangguhan diplomasi tidak hanya ditunjukkan melalui hubungan formal antar negara, tetapi juga melalui diplomasi masyarakat, seperti kerja sama sosial budaya dan ekonomi lintas batas yang memperkuat ikatan tanpa mengorbankan kedaulatan.

Di sisi lain, pertahanan berdaya gentar merupakan elemen penguat dari ketangguhan kawasan, khususnya dalam konteks deterrence terhadap ancaman eksternal maupun kejahatan transnasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan telah menekankan pentingnya membangun postur pertahanan yang tangguh di wilayah perbatasan. Di Sambas, hal ini tercermin dalam penguatan infrastruktur pertahanan, peningkatan kapasitas TNI, serta pemberdayaan masyarakat perbatasan sebagai komponen cadangan. Kombinasi antara hard power (militer) dan soft power (kewaspadaan sipil) ini membentuk daya gentar yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

Ketangguhan diplomasi dan pertahanan di Sambas juga tidak dapat dilepaskan dari pendekatan geostrategis dan geoekonomi. Kabupaten ini memiliki potensi besar dalam pengembangan kawasan ekonomi perbatasan yang berdaya saing. Oleh karena itu, integrasi antara agenda keamanan dan pembangunan menjadi kunci. Diplomasi ekonomi yang dikombinasikan dengan stabilitas keamanan dapat membuka peluang besar bagi investasi dan perdagangan lintas batas yang legal dan terkontrol. Dalam kerangka ini, ketangguhan kawasan tidak hanya diukur dari aspek militernya, tetapi juga dari sejauh mana kawasan tersebut mampu berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, Kabupaten Sambas menjadi model penting bagi praktik diplomasi dan pertahanan yang resilien di wilayah perbatasan. Ketangguhan kawasan diukur dari kemampuan untuk mempertahankan integritas wilayah sekaligus menjalin hubungan konstruktif dengan negara tetangga. Melalui sinergi antara aktor negara dan non-negara, serta pendekatan multidimensi yang menggabungkan keamanan, diplomasi, dan pembangunan, Sambas memperlihatkan bagaimana wilayah perbatasan dapat menjadi garda terdepan dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan regional. Strategi ini relevan dalam konteks Indo-Pasifik, dimana dinamika keamanan dan ekonomi semakin kompleks dan saling berkait.

2.1.4.3.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan tingkat daya saing ekonomi suatu daerah atau wilayah tertentu. Tujuan dari pengukuran IDSD adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat diartikan sebagai refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Pentingnya IDSD sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional.

IDSD mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi seperti infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, kebijakan ekonomi, inovasi, akses pasar, dan lain-lain. Melalui penggunaan indeks ini, pemerintah, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan memahami faktor faktor yang mempengaruhi daya saing ekonomi suatu daerah. Hal ini membantu dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing daerah tersebut, seperti investasi dalam infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan pro-bisnis, dan stimulasi inovasi. Indeks Daya Saing Daerah juga berguna dalam membandingkan kinerja ekonomi antara berbagai daerah atau wilayah, serta mengidentifikasi potensi kerja sama dan kolaborasi untuk meningkatkan daya saing secara bersama-sama.

Tabel 2. 58
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024

IDSD	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sambas	2,44 (Sedang)	N/A	2,64 (Sedang)	3,03 (Sedang)	3,55 (Tinggi)
Kalbar	1,40 (Sedang)	N/A	2,94 (Sedang)	3,20 (Tinggi)	3,42 (Tinggi)

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa skor IDSD Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, IDSD di kategori sedang dengan angka 2,44. Kemudian tahun 2022 skornya naik menjadi 2,64 juga pada kategori sedang, sedangkan tahun 2023 masih tetap

berada kategori dalam sedang meskipun skornya meningkat menjadi 3,03. Dan pada tahun 2024 skor meningkat menjadi 3,42.

2.1.4.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Secara keseluruhan tahun 2024 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang strategis.

2.1.4.4.1. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Penetapan indikator kinerja Kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi IKK. Adapun capaian IKK kabupaten Sambas sejak tahun 2021-2024 ditampilkan dalam tabel 2.59 sebagai berikut:

Tabel 2.59
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas

NO	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
a	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	30%	60,44%	97,52%	54,45%	DISDIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	81%	80,63%	95,77%	96,48%	DISDIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	0,17%	60,78%	82,94%	92,98%	DISDIKBUD
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		17,87%	0,31%	81,36%	DISDIKBUD
b	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,73	0,07	0,68	0,70	DINKES
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi	50%	75%	100%	100%	DINKES
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	81,93%	78,87%	82,10%	67,84%	DINKES
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	84.77%	81,79%	85,67%	66,79%	DINKES

NO	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	88,8%	86,52%	89,47%	70,73%	DINKES
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,67%	81,44%	91,38%	84,68%	DINKES
		Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	109,94	105,43%	109,71%	99,81%	DINKES
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	56,51	57,19%	74,19%	68,87%	DINKES
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,55	81,03%	78,95%	92,28%	DINKES
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,58	38,37%	50,43%	48,95%	DINKES
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,98	98,09%	115,37%	104,20	DINKES
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	95,02	96,59%	100,57%	99,07%	DINKES
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	61,72	86,51%	98,87%	97,98%	DINKES
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		82,67%	82,38%	84,57%	DINKES
c	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	DPUPR
		Rasio luas Kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman Pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	DPUPR
		Rasio luas daerah irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang dilayani oleh jaringan irigasi	-	62,12	64,16%	73,85%	DPUPR
		Persentase jumlah Rumah tangga yang Mendapatkan akses Terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/Kota	55,33%	59,50%	28,35%	67,02%	PERKIM LH

NO	Ururan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	81,93%	82,72%	83,44%	82,24%	PERKIM LH
		Rasio kepatuhan Kab/Kota	100%	100%	0%	100%	DPUPR
		Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota	75,26%	68,70%	41,89%	70,42%	DPUPR
		Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat Kompetensi	62,12%	20,66%	20,66%	21,23%	DPUPR
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	0%	100%	DPUPR
d	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	PERKIM LH
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota	0	100%	0%	0%	PERKIM LH
		Persentase kawasan Permukiman kumuh Dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	0	100%	100%	100%	PERKIM LH
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	19,76%	100%	23,9%	22,20%	PERKIM LH
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/Kota	0	100%	0%	0%	PERKIM LH
e	Ketenteraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan		100%	93,33%	95,12%	SATPOL PP
		Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	11,36%	100%	100%	100%	SATPOL PP
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	540	100%	0%	100%	BPPD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	450	100%	0%	100%	BPPD
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	100%	0%	100%	BPPD
		Persentase penyelamatan Evakuasi kebakaran	36,67%	100%	0%	40,91%	BPPD
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	30%	42,31%	0%	20,75%	BPPD
f	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	217%	2,35%	100%	100%	DINSOS PMD

NO	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	DINSOS PMD
2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR							
a	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	DISNAKERTRANS
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,31%	0,51%	0,06%	0%	DISNAKERTRANS
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	7.325.063.951	50004,56	8.633.388.472,9851	4.605.783.347,70	DISNAKERTRANS
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	3,82%	42,37%	33,03%	36,70%	DISNAKERTRANS
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	59,35%	91,15%	89,36%	90,99%	DISNAKERTRANS
b	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	65%	47,74%	59,01%	0%	DP3APKB
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,02%	100%	100%	100%	DP3APKB
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,773%	5,61%	2,29%	2,20%	DP3APKB
c	Pangan	Persentase ketersediaan (Tersedianya beras/jagung kebutuhan)	0	10,44%	15,65	17,93%	DISTAN KP
d	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukkan tanahnya Diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		85,64%	82,91%	82,91%	DPMPSTP
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	82,59%	100%	100%	100%	BPN
		Tersedianya lokasi Pembangunan dalam Rangka penanaman modal.	0	57,16%	64,66%	68,06%	DPMPSTP
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap Direistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	0%	0%	BPN
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	0	0	0%	BPN
		Penanganan sengketa Tanah garapan yang Dilakukan melalui mediasi	69,51	0	0	0%	PERKIM LH
e	Lingkungan Hidup	Indeks Lingkungan (IKLH) kab/Kota	69,51	67,20	71,31	67,56	PERKIM LH

NO	Ururan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	35%	46,34%	36,31%	41,47%	PERKIM LH
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%%	100%	100%	0%	PERKIM LH
f	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,05%	100%	97,76%	97,62%	DISDUKCAPIL
		Persentase anak usia 1-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50,12%	53,96%	58,77%	64,81%	DISDUKCAPIL
		Kepemilikan akta kelahiran	98,93%	93,68%	95,25%	96,42%	DISDUKCAPIL
		Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	16,67%	43,18%	50,00%	75%	DISDUKCAPIL
g	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Persentase pengentasan tertinggal	100%	0%	0%	100%	DINSOS PMD
		Persentase peningkatan status desa mandiri	1,23%	100%	20,00%	100%	DINSOS PMD
h	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	458,51	2916	2,5	2,43	DP3APKB
		Persentase pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,88%	65,70%	68,56%	69,52%	DP3APKB
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,26%	34,43%	15,02%	9,70%	DP3APKB
i	Perhubungan	Rasio konektivitas Kab/ Kota	52	52%	52%	52,00	DISHUB
		V/C Ratio di Kabupaten/Kota	0,45	0,48%	52	0,34	DISHUB
j	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	100%	0	54,54	DISKOMINFO
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	100%	100%	71,43%	DISKOMINFO
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kab/Kota	63%	100%	100%	2,62%	DISKOMINFO
k	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	23,86	24,13%	36,18%	50,77%	DISKUMINDAG
		Meningkatnya Mikro yang wirausaha	13,28%	21,73%	33,52%	49,76%	DISKUMINDAG
l	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kab/Kota	6,28	22,34%	0%	3,39%	DMPTSP
m	Kepemudaan Dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi Mandiri	0	0,01%	0%	0,01%	DISPARPORA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0	0,076%	0%	0,04%	DISPARPORA
		Peningkatan prestasi olahraga	2	2	0%	11	DISPARPORA

NO	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
n	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	DISKOMINFO
		Persentase OPD yang Menggunakan data Statistic dalam Melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	DISKOMINFO
o	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	8,9%	8,99%	9,61%	10,70%	DISKOMINFO
p	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	69,57%	66,67%	66,67%	66,67%	DISDIKBUD
q	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	49,12	123,31%	55,41	75,32	DINAS ARPUSDA
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	29,03	236,31%	29,03	74,25	DINAS ARPUSDA
r	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	10,38	105,13%	45,22	49,57	DINAS ARPUSDA
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	125,13%	36,67	29,42	DINAS ARPUSDA
3. URUSAN PILIHAN							
a	Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Total Produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota (sumber data: one data KKP)	10.070,04 ton	176,62%	162,93%	217,95%	DPPKH
b	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-99,3%	15.515,62 %	0%	17,28%	DISPARPORA
		Persentase peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	63,31%	16,23%	0%	5,92%	DISPARPORA
		Tingkat hunian akomodasi	5518,3%	17,57%	0%	24,27%	DISPARPORA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,57%	2,57%	0%	2,78%	DISPARPORA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2,94%	3,58%	0%	0,12%	DISPARPORA
c	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	2,722 Ton/ha	26,13 Kuintal/ Ha	2,9 Ton/ Ha	3,09 Ton/ha	DISTAN KP
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-0,16%	-15,43%	71,82%	-53,35%	DPPKH
d	Kehutanan		BUP	BUP	BUP	BUP	
e	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan Pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di	BUP	BUP	BUP	BUP	

NO	Urusan Pemerintahan	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA				KET
			2021	2022	2023	2024	
f	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/ SIUP Toko Swalayan	42,62%	66,95%	74,27%	80,60%	DISKUMINDAG
		Persentase realisasi pupuk	1,32%	9,93%	73,44%		DISKUMINDAG
		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah berlaku	50,35%	267,21%	27,28	29,03%	DISKUMINDAG
g	Perindustrian	Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di Kab/ Kota	10,27%	20,15%	18,79%	14,30%	DISKUMINDAG
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri Dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	100%	100%	100%	DISKUMINDAG
		Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	3,86%	6,07%	1,26%	11,61%	DISKUMINDAG
		Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	0	0	DISKUMINDAG
		Persentase jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang lokasinya di Daerah Kab/Kota	0	0	0	0	DISKUMINDAG
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	100%	100%	100%	DISKUMINDAG
h	Transmigrasi	Satuan Permukiman yang Dibina	-	114,29%	106,67%	100%	DISNAKERTRANS

Sumber : LPPD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2024

Capaian IKK Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021–2024 tersebut menunjukkan terdapat kemajuan di beberapa sektor strategis di Kabupaten Sambas. Diantaranya peningkatan partisipasi pendidikan dasar dan menengah, yaitu tingkat partisipasi Pendidikan usia 5-6 tahun meningkat dari tahun 2021 yaitu 30% menjadi 97,52% pada tahun 2023, namun menurun drastis menjadi 54,45 % pada tahun 2024. Fluktuasi tajam ini menunjukkan kurangnya stabilitas pada program Pendidikan Anak Usia Dini. Sedangkan partisipasi Pendidikan usia 7-15 tahun menunjukkan tren peningkatan yang stabil, dengan capaian hamper 93% untuk SMP.

Untuk pelayanan kesehatan dasar, cakupan pelayanan bayi baru lahir dan balita relatif baik, dari tahun 2021-2023 dengan rata-rata 88,26%. Namun terjadi penurunan signifikan pada pelayanan ibu hamil dan persalinan pada tahun 2024. Skrining lansia meningkat dari tahun 2021 sebesar 72,55% menjadi 92,28% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan akses layanan kesehatan untuk kelompok usia lanjut yang baik.

Berdasarkan capaian IKK Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2021–2024, diketahui bahwa tingkat kemantapan jalan rendah dan akses air minum pada beberapa tahun, serta minimnya tenaga kerja bersertifikat. Di sektor unggulan, pariwisata dan industri kecil masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa indikator telah mendukung pencapaian sasaran RPJMD, seperti peningkatan kualitas SDM, layanan dasar, dan lingkungan hidup, namun dibutuhkan upaya konsisten dan terintegrasi untuk menjaga stabilitas capaian serta memperkuat sektor-sektor ekonomi produktif secara berkelanjutan.

2.1.5. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan faktor strategis dan berperan penting dalam menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang efektif dan efisien serta transparan, partisipatif dan akuntabel, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang merupakan satu diantara aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- k. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset Pemerintah Daerah, kondisi kewajiban Pemerintah Daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menuntut Pemerintah Daerah untuk menciptakan sistem

Pengelolaan Keuangan Daerah yang efisien, efektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.1.5.1. Kinerja Keuangan Lima Tahun Terakhir

Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dicermati pada kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah. Adapun kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah dapat menggambarkan perkembangan aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah, serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas dalam kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

2.1.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

APBD Kabupaten Sambas adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Sambas dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Sambas dari sisi pendapatan daerah terus mengalami peningkatan yang fluktuatif yakni pada tahun 2020 dari Rp. 1.669,65 milyar meningkat menjadi Rp. 1.850,51 miliar pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.706, 79 milyar. Selanjutnya pada tahun 2023 juga meningkat menjadi Rp. 1.867, 56 miliar dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar 2.102,27 miliar. Sebaliknya, jika dilihat dari sisi belanja daerah juga menggambarkan kondisi belanja yang mengalami peningkatan. Bahkan jumlahnya lebih besar dari pendapatan daerah, seperti pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.692,19 Milyar. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai 2024 juga terus mengalami peningkatan. (Tabel 2.46). Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas harus dapat menggali sumber pembiayaan guna menutupi kekurangan pendapatan (defisit) baik dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun melalui sumber pembiayaan lainnya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020–2024 rata-rata 5,93% per tahun (Tabel 2.46). Dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 15,29% per tahun. Peningkatan PAD yang cukup tinggi dikontribusi oleh pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah yakni rata-rata 16,94% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan pendapatan transfer periode 2020-2024 rata-rata 6,69 % per tahun dengan komponen penerimaan transfer pusat mengalami pertumbuhan positif yakni 6,50 % per tahun, sedangkan untuk transfer antar daerah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 10,32 % per tahun. Sumber pendapatan daerah selanjutnya adalah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah, dimana pada periode 2020-2024 rata-rata sebesar -66,99 % per tahun dengan kontribusi terbesar yang bersumber dari pendapatan hibah yang terus mengalami penurunan dibanding tahun 2020.

Tabel 2. 60
Realisasi APBD Kabupaten Sambas Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	PENDAPATAN	1.669.647.856.825,95	1.850.514.381.733,21	1.706.793.890.995,35	1.867.559.599.104,08	2.102.272.191.827,69
	A. Pendapatan Asli Daerah	129.676.504.956,48	148.139.103.732,57	167.639.410.303,57	230.889.069.497,90	229.120.841.939,69
	B. Pendapatan Transfer	1.445.026.636.211,00	1.575.722.281.915,86	1.508.018.076.940,77	1.603.758.906.677,75	1.872.025.231.888,00
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	94.944.715.658,47	126.652.996.084,78	31.136.403.751,01	32.911.622.928,43	1.126.118.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.669.647.856.825,95	1.850.514.381.733,21	1.706.793.890.995,35	1.867.559.599.104,08	2.102.272.191.827,69
2	BELANJA	1.692.191.085.750,19	1.854.895.554.871,16	1.816.573.584.716,82	1.888.255.229.041,90	1.978.071.807.106,53
	A. Belanja Operasi	1.157.969.692.671,66	1.280.237.716.697,67	1.325.642.600.074,97	1.392.837.941.885,90	1.390.981.011.773,28
	B. Belanja Modal	237.715.454.547,89	285.088.808.225,49	222.618.161.024,85	214.419.208.693,00	286.839.372.979,25
	C. Belanja Tak Terduga	3.735.431.544,00	140.518.302,00	672.956.554,00	236.763.635,00	150.475.000,00
	D. Belanja Transfer	292.770.506.986,64	289.428.511.646,00	267.639.867.063,00	280.761.314.828,00	300.100.947.354,00
	JUMLAH BELANJA	1.692.191.085.750,19	1.854.895.554.871,16	1.816.573.584.716,82	1.888.255.229.041,90	1.978.071.807.106,53
	SURPLUS/DEFISIT	(22.543.228.924,24)	(4.381.173.137,95)	(109.779.693.721,47)	(20.695.629.937,82)	124.200.384.721,16
3	PEMBIAYAAN	213.503.217.764,60	268.959.988.840,36	432.930.277.147,46	459.290.583.425,99	346.914.953.488,17
	A. Penerimaan Pembiayaan	127.753.217.764,60	172.459.988.840,36	279.930.277.147,46	249.150.583.425,99	114.914.953.488,17
	B. Pengeluaran Pembiayaan	85.750.000.000,00	96.500.000.000,00	153.000.000.000,00	210.140.000.000,00	232.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	213.503.217.764,60	268.959.988.840,36	432.930.277.147,46	459.290.583.425,99	346.914.953.488,17
	PEMBIAYAAN NETTO	42.003.217.764,60	75.959.988.840,36	126.930.277.147,46	39.010.583.425,99	(117.085.046.511,83)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	19.459.988.840,36	71.578.815.702,41	17.150.583.425,99	18.314.953.488,17	7.115.338.209,33

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas Tahun 2020-2024 (diolah)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024, ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 61
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas
Tahun 2020-2024

TAHUN	TARGET		REALISASI		Rasio Efektivitas (%)
	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	PAD (Rp)	Pertumbuhan (%)	
2020	131,008,857,870,66	-19,20	129,676,504,956,48	-12,88	98,98
2021	142,402,655,694,00	8,70	148,139,103,732,57	14,24	104,03
2022	209,294,288,331,00	46,97	167,639,410,303,57	13,16	80,10
2023	270,580,517,704,00	29,28	230,889,069,497,90	37,73	85,33
2024	312,334,477,478,00	15,43	229,120,841,939,69	-0,77	73,36

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sambas selama periode 2020-2024 berdasarkan tabel di atas, menunjukkan pencapaian yang berubah-ubah, Kinerja Rasio Efektivitas perlu untuk terus menerus ditingkatkan, karena hampir setiap tahun mengalami fluktuasi rasio efektivitas dimana pada tahun 2020 sudah efektif dan sangat efektif pada tahun 2021, Kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena rasio efektivitas menjadi cukup efektif (80,10%), karena pada tahun tersebut masih dalam masa pemulihan perekonomian pasca Covid-19.

Selanjutnya pada tahun 2023 juga masih dalam kondisi yang cukup efektif, namun dari persentase sudah mulai mengalami kenaikan yakni menjadi sebesar 85,33%, Tetapi pada tahun 2024 kembali lagi mengalami penurunan menjadi 73,36%, Untuk itu perlu langkah sistematis untuk meningkatkan kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, dengan lebih memaksimalkan pemungutan pada sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensinya relatif cukup besar.

2.1.5.1.2. Neraca Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang

digunakan untuk menggambarkan kondisi keuangan dan aset daerah secara menyeluruh, Penyusunan neraca daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan fiskal daerah dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan selama periode lima tahun, Dengan adanya neraca daerah, pemerintah daerah dapat melakukan perencanaan yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan, Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian objek, Laporan terkait neraca daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien.

Aset daerah merupakan seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik dalam bentuk kas, investasi, piutang, persediaan, aset tetap, maupun aset lainnya yang berkontribusi dalam pelayanan publik, Aset daerah mencakup infrastruktur, tanah, bangunan, kendaraan dinas, serta aset tidak berwujud seperti hak paten dan lisensi, Pemanfaatan aset daerah yang optimal sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 2020-2024, pertumbuhan aset Pemerintah Kabupaten Sambas mencapai 6,01% per tahun, yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Sambas mengalami peningkatan yang relatif stabil, Pertumbuhan Aset dalam trend yang positif ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Sambas periode 2020-2024 berada pada kondisi sehat,

Aset daerah tersebut berupa aset lancar (uang kas, piutang, dan penyisihan), investasi jangka panjang, aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya), dan aset lainnya yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Sambas.

Aset lancar dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,39% per tahun, investasi jangka panjang khususnya investasi permanen mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,39 % per tahun, sedangkan aset tetap tumbuh rata-rata 6,70% per tahun, komponen aset lainnya mengalami penurunan sebesar rata -2,95% per tahun. Secara keseluruhan, perkembangan kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 2020-2024 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 62
Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1	ASET	2.687.467.881.181,42	2.967.001.349.964,39	3.113.449.353.329,80	3.207.953.079.138,24	3.393.414.883.531,03
	A. Aset Lancar	84.547.881.421,14	151.754.762.549,02	87.709.591.871,28	110.066.552.350,36	100.416.295.826,56
	B. Investasi Jangka Panjang	39.920.527.558,27	46.942.505.256,54	50.128.469.984,80	58.437.346.418,30	51.174.099.213,31
	C. Aset Tetap	2.365.443.242.682,01	2.583.076.907.624,30	2.724.346.010.580,80	2.848.928.179.090,90	3.065.890.998.981,51
	D. Aset Lainnya	197.556.229.520,00	185.227.174.534,53	251.265.280.892,92	190.521.001.278,68	175.933.489.509,65
	JUMLAH ASET	2.687.467.881.181,42	2.967.001.349.964,39	3.113.449.353.329,80	3.207.953.079.138,24	3.393.414.883.531,03
2	KEWAJIBAN	132.707.294.916,12	196.618.593.144,05	341.731.225.444,00	339.873.791.992,59	354.705.604.564,01
	A. Kewajiban Jangka Pendek	132.707.294.916,12	196.618.593.144,05	341.731.225.444,00	339.873.791.992,59	354.705.604.564,01
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	132.707.294.916,12	196.618.593.144,05	341.731.225.444,00	339.873.791.992,59	354.705.604.564,01
3	EKUITAS	2.554.760.586.265,60	2.770.382.756.820,34	2.771.718.127.885,80	2.868.079.287.145,65	3.038.709.278.967,02
	A. Ekuitas	2.554.760.586.265,60	2.770.382.756.820,34	2.771.718.127.885,80	2.868.079.287.145,65	3.038.709.278.967,02
	JUMLAH EKUITAS	2.554.760.586.265,60	2.770.382.756.820,34	2.771.718.127.885,80	2.868.079.287.145,65	3.038.709.278.967,02
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,05	0,07	0,12	0,12	0,12

Sumber: Neraca Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Dalam hal kewajiban daerah, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang, memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Kabupaten Sambas. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sambas dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) selalu dapat diselesaikan, Pada 2020, kewajiban jangka pendek Rp 132.707.294.916,12, dan terus terjadi peningkatan sampai tahun 2024, dengan jumlah kewajiban jangka pendek Rp354.705.604.564,01. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode 2020-2024 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban daerah yang menggambarkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai hasil dari akumulasi surplus atau defisit dari periode-periode sebelumnya, ekuitas dana dalam RPJMD mencerminkan kapasitas keuangan pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan tanpa bergantung pada sumber eksternal. Oleh karena itu, ekuitas dana yang kuat menjadi indikator penting dalam keberlanjutan pembangunan daerah. Untuk menilai kondisi ekuitas dana dalam neraca daerah digunakan indikator dimana satu diantara adalah dengan melihat rasio ekuitas terhadap aset total yang mengukur seberapa besar ekuitas dibandingkan dengan total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber daya keuangan yang lebih kuat dan ketergantungan yang lebih rendah terhadap utang.

Rasio ekuitas dana terhadap aset total pada Pemerintah Kabupaten Sambas tahun 2020 sebesar 95,06%. Hal ini berarti 95,06% dari total aset Pemerintah Kabupaten Sambas berasal dari ekuitas dan sisanya berasal dari kewajiban atau utang dan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas memiliki sumber daya keuangan yang kuat dan

ketergantungan yang rendah terhadap utang. Selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 93,37%, pada tahun 2022 sebesar 89,02% dan tahun 2023 sebesar 89,41% serta tahun 2024 sebesar 89,55%.

2.1.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah,

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer, yang meliputi transfer pemerintah pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui (1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah (2) peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM pengelola pendapatan daerah (3) peningkatan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah yaitu:

- a. memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, kepentingan

- umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- c. meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil/Pemungut;
 - d. meningkatkan kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
 - e. meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah;
 - f. meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - g. meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah; dan
 - h. meningkatkan kinerja pelayanan melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.

2.1.5.2.1. Proporsi Anggaran Daerah

2.1.5.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Sambas bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar 9,77% per tahun, proporsi terbesar pendapatan daerah berasal dari pendapatan transfer yakni rata-rata 86,99% per tahun, sedangkan proporsi lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata sebesar 3,23% per tahun.

Tabel 2. 63
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata (%)
1. PAD	129,676,504,956,48	148,139,103,732,57	167,639,410,303,57	230,889,069,497,90	229,120,841,939,69	
Proporsi	7,77%	8,01%	9,82%	12,36%	10,90%	9,77
2. Pendapatan Transfer	1,445,026,636,211,00	1,575,722,281,915,86	1,508,018,076,940,77	1,603,758,906,677,75	1,872,025,231,888,00	
Proporsi	86,55%	85,15%	88,35%	85,87%	89,05%	86,99
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	94,944,715,658,47	126,652,996,084,78	31,136,403,751,01	32,911,622,928,43	1,126,118,000,00	
	5,69%	6,84%	1,82%	1,76%	0,05%	3,23
Total Pendapatan Daerah	1,669,647,856,825,95	1,850,514,381,733,21	1,706,793,890,995,35	1,867,559,599,104,08	2,102,272,191,827,69	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas selama kurun waktu 2020-2024 ditopang oleh penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat dan penerimaan dari transfer Antar Daerah.

2.1.5.2.1.2. Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, proporsi belanja pegawai dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 32,24% per tahun, proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 38,57%, hal ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

Tabel 2. 64
Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
2020	685,694,134,094,87	1,777,941,085,750,19	38,57%
2021	619,026,166,802,00	1,951,395,554,871,16	31,72%
2022	605,019,645,985,00	1,969,573,584,716,82	30,72%
2023	652,364,519,647,00	2,098,395,229,041,90	31,09%
2024	642,865,726,454,12	2,210,071,807,106,53	29,09%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi belanja barang dan jasa dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) adalah sebesar 27,66%, belanja barang dan jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah, proporsi belanja barang dan jasa cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023 serta 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar 22,15 %, dan tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 31,42 %,

Tabel 2. 65
Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Sambas
Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Belanja Barang dan Jasa (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
2020	393,811,874,382,27	1,777,941,085,750,19	22,15%
2021	568,421,836,964,67	1,951,395,554,871,16	29,13%
2022	618,859,246,853,97	1,969,573,584,716,82	31,42%
2023	612,392,125,214,08	2,098,395,229,041,90	29,18%
2024	583,619,065,645,48	2,210,071,807,106,53	26,41%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Selama periode tahun 2020-2024, rata-rata proporsi belanja modal dibandingkan dengan total pengeluaran daerah Kabupaten Sambas (belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan) adalah sebesar 12,50%,

Tabel 2. 66
Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024

Tahun	Jumlah Belanja Modal (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
2020	237,715,454,547,89	1,777,941,085,750,19	13,37%
2021	285,088,808,225,49	1,951,395,554,871,16	14,61%
2022	222,618,161,024,85	1,969,573,584,716,82	11,30%
2023	214,419,208,693,00	2,098,395,229,041,90	10,22%
2024	286,839,372,979,25	2,210,071,807,106,53	12,98%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Proporsi belanja modal terus mengalami perubahan, dimana pada tahun 2021 sebesar 14,61%, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya kemudian turun menjadi 11,30% pada tahun 2022 dan 10,22 % di tahun 2023, Selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 12,98%.

Rata-rata proporsi belanja modal sebesar 12,50% tersebut relatif rendah. Kondisi ini layak menjadi isu strategis, karena alokasi belanja modal yang rendah dapat menghambat peningkatan infrastruktur, daya saing daerah, dan pencapaian visi Kabupaten Sambas.

2.1.5.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, dan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi penerimaan daerah), pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut yaitu (1) SILPA (2) pencairan dana cadangan (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan (4) penerimaan pinjaman daerah (5) penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (6) penerimaan piutang daerah. Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa (a) pembentukan dana cadangan (2) penyertaan modal pemerintah daerah (3) pembayaran pokok utang (4) pemberian pinjaman daerah.

Perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Sambas pada kurun waktu 2020-2024 disajikan berikut ini:

Tabel 2. 67
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024

PEMBIAYAAN		2020	2021		2022		2023		2024		Rata2
		Rp,M	Rp,M	%	Rp,M	%	Rp,M	%	Rp,M	%	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN											
a,	Penggunaan Sisa Lebih Perhit, Anggaran (SILPA)	32,75	19,46	-40,58	279,93	1338,49	17,15	-93,873	18,31	6,76	302,70
b,	Pinjaman Daerah	95,00	153,00	61,05	0,00	-100,00	232,00	100,00	96,60	-58,36	0,67
c,	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH PENERIMAAN		127,75	172,46	20,472	279,93	1238,5	249,15	6,127	114,91	-51,60	303,37
PENGELUARAN PEMBIAYAAN											
a,	Penyertaan Modal Daerah	1,00	1,50	0,00	0,00	-100,00	2,00	200,00	0,00	-100,00	0
b,	Pembayaran Pokok Hutang	84,75	95	12,09	153	61,05	208,14	36,04	232	11,46	30,16
JUMLAH PENGELUARAN		85,75	96,50	12,09	153,00	-38,95	210,14	236,04	232	-88,54	30,16

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi penerimaan pembiayaan daerah rata-rata 303,37% per tahun dengan kontribusi terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sebaliknya, pengeluaran pembiayaan daerah rata-rata 30,16% per tahun dengan kontribusi terbesar berasal dari pembayaran pokok hutang.

Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sambas periode 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 68
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1,669,647,856,825,95	1,850,514,381,733,21	1,706,793,890,995,35	1,867,559,599,104,08	2,102,272,191,827,69
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1,692,191,085,750,19	1,854,895,554,871,16	1,816,573,584,716,82	1,888,255,229,041,90	1,978,071,807,106,53
	<i>Surplus (Defisit)</i>	-22,543,228,924,24	-4,381,173,137,95	-109,779,693,721,47	-20,695,629,937,82	124,200,384,721,16
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	127,753,217,764,60	172,459,988,840,36	279,930,277,147,46	249,150,583,425,99	114,914,953,488,17
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	85,750,000,000,00	96,500,000,000,00	153,000,000,000,00	210,140,000,000,00	232,000,000,000,00
	<i>Pembiayaan Netto</i>	42,003,217,764,60	75,959,988,840,36	126,930,277,147,46	39,010,583,425,99	-117,085,046,511,83
5	Sisa Lebih Pemb, Anggaran (SILPA)	19,459,988,840,36	71,578,815,702,41	17,150,583,425,99	18,314,953,488,17	7,115,338,209,33

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Pada tabel 2.56 tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Sambas pada tahun 2020 mencapai Rp 19,46 Miliar, dan menurun pada tahun 2024 menjadi Rp 7,11 Miliar.

2.1.5.3. Kerangka Pendanaan

2.1.5.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran, Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik, Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan, Berikut disajikan perkembangan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Sambas selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 69
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas, Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
A, BELANJA OPERASI	1,157,969,692,671,66	1,280,237,716,697,67	1,325,642,600,074,97	1,392,837,941,885,90	1,390,981,011,773,28	5,03
1, Belanja Pegawai	685,694,134,094,87	619,026,166,802,00	605,019,645,985,00	652,364,519,647,00	642,865,726,454,12	-1,56
2, Belanja Barang dan Jasa	393,811,874,382,27	568,421,836,964,67	618,859,246,853,97	612,392,125,214,08	583,619,065,645,48	12,05
3, Belanja Bunga	1,923,456,981,52	1,589,583,336,00	2,769,538,979,00	9,335,634,501,82	10,573,881,395,68	112,43
4, Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5, Belanja Hibah	75,948,692,213,00	89,816,219,595,00	98,319,768,257,00	117,374,462,523,00	152,778,335,378,00	25,29
6, Belanja Bantuan Sosial	591,535,000,00	1,383,910,000,00	674,400,000,00	1,371,200,000,00	1,144,002,900,00	23,35
7, Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
B, PENGELUARAN PEMBIAYAAN	85,750,000,000,00	96,500,000,000,00	153,000,000,000,00	210,140,000,000,00	232,000,000,000,00	42,64
1, Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2, Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000,00	1,500,000,000,00	0,00	2,000,000,000,00	0,00	0
3, Pembayaran Pokok Hutang	84,750,000,000,00	95,000,000,000,00	153,000,000,000,00	208,140,000,000,00	232,000,000,000,00	43,44
4, Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00		0
TOTAL (A+B)	1,243,719,692,671,66	1,376,737,716,697,67	1,478,642,600,074,97	1,602,977,941,885,90	1,622,981,011,773,28	7,62

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas, Tahun 2020-2024 (diolah)

Berdasarkan perhitungan tabel 2.58. diketahui bahwa pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi tumbuh rata-rata sebesar 5,03% per tahun, sedangkan pengeluaran pembiayaan tumbuh rata-rata sebesar 42,64% per tahun, Dengan demikian, diperoleh pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama tumbuh rata-rata sebesar 7,62% per tahun.

2.1.5.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, Adapun tahap awal perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan melakukan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Sambas untuk kurun waktu 2025-2030, sebagai berikut:

Tabel 2. 70
Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2025-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	2.102.272.191.827,6 9	2.280.689.806.350,0 5	2.365.323.934.641,1 3	2.454.271.103.436,9 7	2.547.828.076.216,5 6	2.646.316.359.256,4 0
	A. Pendapatan Asli Daerah	229.120.841.939,69	352.849.491.480,48	377.326.666.742,32	404.006.670.825,31	433.103.197.523,47	464.851.090.966,53
	B. Pendapatan Transfer	1.872.025.231.888,0 0	1.926.712.314.869,5 7	1.986.869.267.898,8 1	2.049.136.432.611,6 6	2.113.596.878.693,0 9	2.180.337.268.289,8 7
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.126.118.000,00	1.128.000.000,00	1.128.000.000,00	1.128.000.000,00	1.128.000.000,00	1.128.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.102.272.191.827,6 9	2.280.689.806.350,0 5	2.365.323.934.641,1 3	2.454.271.103.436,9 7	2.547.828.076.216,5 6	2.646.316.359.256,4 0
2	BELANJA	1.978.071.807.106,5 3	2.205.189.806.350,0 5	2.334.823.934.641,1 3	2.451.771.103.436,9 8	2.548.328.076.216,5 6	2.645.816.359.256,4 1
	A. Belanja Operasi	1.390.981.011.773,2 8	1.457.406.824.374,7 6	1.451.284.775.317,4 8	1.484.407.012.883,9 0	1.514.869.740.718,3 0	1.553.145.838.572,4 3
	B. Belanja Modal	286.839.372.979,25	393.273.535.776,85	518.802.759.900,60	591.986.806.734,52	647.000.075.482,89	694.662.800.222,61
	C. Belanja Tak Terduga	150.475.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00
	D. Belanja Transfer	300.100.947.354,00	347.009.446.198,44	357.236.399.423,05	367.877.283.818,56	378.958.260.015,37	390.507.720.461,37
	JUMLAH BELANJA	1.978.071.807.106,5 3	2.205.189.806.350,0 5	2.334.823.934.641,1 3	2.451.771.103.436,9 8	2.548.328.076.216,5 6	2.645.816.359.256,4 1
	SURPLUS/DEFISIT	124.200.384.721,16	75.500.000.000,00	30.500.000.000,00	2.500.000.000,00	(500.000.000,00)	500.000.000,00
3	PEMBIAYAAN	346.914.953.488,17	285.500.000.000,00	154.500.000.000,00	102.500.000.000,00	85.500.000.000,00	75.500.000.000,00
	A. Penerimaan	114.914.953.488,17	105.000.000.000,00	62.000.000.000,00	50.000.000.000,00	43.000.000.000,00	37.500.000.000,00
	B. Pengeluaran	232.000.000.000,00	180.500.000.000,00	92.500.000.000,00	52.500.000.000,00	42.500.000.000,00	38.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	346.914.953.488,17	285.500.000.000,00	154.500.000.000,00	102.500.000.000,00	85.500.000.000,00	75.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(117.085.046.511,83)	(75.500.000.000,00)	(30.500.000.000,00)	(2.500.000.000,00)	500.000.000,00	(500.000.000,00)

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, pada tabel 2.67 menyajikan tentang proyeksi pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Sambas selama tahun 2025-2030, Proyeksi pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah,

Tabel 2. 71
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas,
Tahun 2025 – 2030

Tahun	Proyeksi Pendapatan Daerah(Rp)	Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
2025	2,200,136,500,331.00	197,905,000,000.00	2,398,041,500,331.00
2026	2,280,689,806,350.05	105,000,000,000.00	2,385,689,806,350.05
2027	2,365,323,934,641.13	62,000,000,000.00	2,427,323,934,641.13
2028	2,454,271,103,436.97	50,000,000,000.00	2,504,271,103,436.97
2029	2,547,828,076,216.57	43,000,000,000.00	2,590,828,076,216.57
2030	2,646,316,359,256.41	37,500,000,000.00	2,683,816,359,256.41

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah), 2025

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di Kabupaten Sambas tahun 2025-2030, adalah sebagai berikut,

Tabel 2. 72
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sambas, Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A. Belanja Operasi	1,587,179,108,274.40	1,457,406,824,374.76	1,451,284,775,317.48	1,484,407,012,883.90	1,514,869,740,718.30	1,553,145,838,572.43
1 Belanja Pegawai	662,593,811,543.00	679,158,656,831.58	696,137,623,252.36	713,541,063,833.67	731,379,590,429.52	749,664,080,190.25
2 Belanja Barang dan Jasa	820,590,464,463.00	695,045,289,422.61	675,649,091,991.53	691,994,532,912.29	701,456,413,343.96	717,783,834,590.10
3 Belanja Bunga	1,500,000,000.00	11,156,250,000.00	5,625,000,000.00	3,125,000,000.00	2,500,000,000.00	2,187,500,000.00
4 Belanja Hibah	101,508,832,268.40	71,035,978,120.58	72,811,877,573.59	74,632,174,512.93	78,363,783,238.58	82,281,972,400.51
5 Belanja Bantuan Sosial	986,000,000.00	1,010,650,000.00	1,061,182,500.00	1,114,241,625.00	1,169,953,706.25	1,228,451,391.56
B. Pengeluaran Pembiayaan	98,600,000,000.00	180,500,000,000.00	92,500,000,000.00	52,500,000,000.00	42,500,000,000.00	38,000,000,000.00
1 Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	3,000,000,000.00
2 Pembayaran Pokok Hutang	96,600,000,000.00	178,500,000,000.00	90,000,000,000.00	50,000,000,000.00	40,000,000,000.00	35,000,000,000.00
TOTAL (A+B)	1,685,779,108,274.40	1,637,906,824,374.76	1,543,784,775,317.48	1,536,907,012,883.90	1,557,369,740,718.30	1,591,145,838,572.43

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah, Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.

Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2025-2030 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 73
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Tahun 2025-2030

URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1. Pendapatan	2,200,136,500,331.0 0	2,280,689,806,350.0 5	2,365,323,934,641.1 3	2,454,271,103,436.9 7	2,547,828,076,216.5 7	2,646,316,359,256.41
2. Pencairan Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. SILPA tahun sebelumnya	19,405,000,000.00	15,000,000,000.00	12,000,000,000.00	10,000,000,000.00	8,000,000,000.00	7,500,000,000.00
Total Penerimaan (1+2+3)	2,219,541,500,331.0 0	2,295,689,806,350.0 5	2,377,323,934,641.1 3	2,464,271,103,436.9 7	2,555,828,076,216.5 7	2,653,816,359,256.41
Dikurangi :						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib mengikat serta Prioritas Utama	1,685,779,108,274.4 0	1,637,906,824,374.7 6	1,543,784,775,317.4 8	1,536,907,012,883.9 0	1,557,369,740,718.3 0	1,591,145,838,572.43
Kapasitas Riil Kemampuan Keu. Daerah	533,762,392,056.60	657,782,981,975.29	833,539,159,323.65	927,364,090,553.07	998,458,335,498.26	1,062,670,520,683.9 8

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sambas periode 2025-2030 yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengefektifkan dan mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui pendataan basis pajak dan potensi pajak secara berkelanjutan;
 - 2) digitalisasi layanan pajak dan retribusi berbasis VA, QRIS dan digital ticketing untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan kepatuhan;
 - 3) revitalisasi aset daerah untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan;
 - 4) meningkatkan peran BUMD;
 - 5) membangun BUMD di bidang pangan, pariwisata dan hasil laut;
 - 6) pengembangan wisata budaya, ekowisata dan perbatasan dan mendorong investasi agroindustri;
 - 7) menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8) menetapkan parameter yang objektif untuk mengukur prestasi peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah;
 - 9) penyajian secara terinci mengenai target dan realisasi masing-masing jenis Pajak Daerah, terutama pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Sambas;
 - 10) melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan;

- 11) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pendapatan melalui pelatihan/bimbingan teknis;
- 12) mengefektifkan pemungutan pajak, seperti: Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang tidak dapat diukur secara faktual baik besaran pendapatan maupun penggunaannya, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- 13) melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang terindikasi ganda;
- 14) melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan pembayaran di pelayanan PBB-P2 Kabupaten Sambas dan Bank Kalbar;
- 15) melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda kepada wajib pajak yang lalai;
- 16) meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak;
- 17) merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi;
- 18) membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain- lain;
- 19) peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya;
- 20) meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah;
- 21) meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD;
- 22) melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito; dan
- 23) mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD) secara profesional.

b. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan kementerian terkait dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru dan peningkatan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK);
- 2) menyesuaikan proposal DAK dengan prioritas nasional: Pembangunan infrastruktur desa, irigasi, ketahanan pangan, pendidikan, perbatasan yang dilengkapi dengan data pendukung yang baik;
- 3) ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Penghasilan;
- 4) peningkatan koordinasi dengan kementerian terkait untuk peningkatan pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai dengan data terbaru; dan
- 5) koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumber daya alam lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pemerintah/kementerian terkait.

Selanjutnya berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Belanja daerah tahun 2025-2030 diarahkan untuk mendukung dan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah tahun anggaran 2025-2030 dilakukan melalui pengaturan pola belanja yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu:

- a. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sambas;
- c. Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
- d. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
- e. Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- f. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- g. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- h. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten Sambas yang terdiri dari urusan wajib (pelayanan dasar dan non pelayanan dasar), urusan pilihan, dan urusan penunjang dan disesuaikan dengan prioritas nasional;
- i. Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset;
- j. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi baik lembaga

- pendidikan negeri maupun swasta, serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
- k. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan;
 - l. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan sesuai prioritas kebijakan nasional;
 - m. Digitalisasi birokrasi dan pengembangan *e-government*/Pemerintahan Digital untuk efisiensi layanan publik;
 - n. Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan sumber daya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
 - o. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - p. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - q. Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Adapun kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

- a. Penggunaan sisa lebih perhitungan tahun lalu sebagai sumber penerimaan pada APBD;
- b. Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek-proyek besar lainnya;
- c. Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk menambah dana cadangan;
- d. Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan BUMN, BUMD dan swasta dalam pembiayaan pembangunan serta kerjasama lintas daerah dan lintas negara (kerjasama ekonomi perbatasan, dana hibah internasional untuk pembangunan perbatasan dan lingkungan);
- e. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta melakukan skema *public private partnership* (PPP) atau skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur strategis; dan
- f. Mengoptimalkan pembiayaan Pembangunan melalui sumber Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/TJSLP (perkebunan; pertanian, perikanan dan peternakan; perbankan; BUMN dan BUMD; perhotelan dan restoran; perdagangan dan telekomunikasi, pertambangan dan ESDM) untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sosial.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
- b. Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.

2.1.6. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai "*gap expectation*" yaitu kesenjangan antara kinerja pembangunan yang telah dicapai dengan target yang direncanakan, serta antara visi masa depan dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Secara umum, permasalahan ini muncul akibat potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang terabaikan, serta ancaman yang tidak diantisipasi dengan baik. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan di masa lalu. Proses identifikasi yang dilakukan mencakup analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah (PD).

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan berdasarkan bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau terhadap beberapa urusan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap bidang lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memetakan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.

Proses identifikasi ini menjadi dasar dalam merumuskan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, ketepatan dalam mengidentifikasi permasalahan sangat penting, dengan menggunakan kriteria tertentu agar menghasilkan daftar permasalahan yang faktual dan relevan. Adapun kriteria yang digunakan dalam identifikasi permasalahan meliputi:

- a. memiliki cakupan yang luas: masalah ini mempengaruhi banyak orang, wilayah, atau sektor, sehingga dampaknya dirasakan secara luas dalam berbagai aspek kehidupan;
- b. berpotensi meningkat atau membesar di masa mendatang serta berdampak negatif: jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat berkembang lebih besar dan menimbulkan konsekuensi yang semakin serius bagi masyarakat dan lingkungan;

- c. membutuhkan penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu dengan melibatkan sinergi berbagai pihak: penyelesaian masalah ini memerlukan upaya berkelanjutan serta koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang efektif;
- d. dampak terhadap kesejahteraan: masalah ini secara langsung mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial; dan
- e. keterjangkauan solusi: penyelesaian masalah ini harus realistis, dapat diterapkan, dan sesuai dengan ketersediaan sumber daya baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun sumber data permasalahan terdiri dari:

- a. Perbandingan data capaian kinerja antar tahun;
- b. Perbandingan data capaian dengan antar daerah;
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
- d. Pokok pikiran dewan;
- e. Diskusi dengan kelompok masyarakat (Gapoktan, Aliansi Masyarakat);
- f. Kajian akademis;
- g. Data dan fakta yang terjadi; dan
- h. Kajian dan *press release* BPS.

Identifikasi permasalahan terbagi menjadi tiga yaitu masalah pokok, masalah, dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, dipecahkan melalui perumusan misi, tujuan, dan sasaran. Kemudian untuk masalah merupakan hal – hal yang harus dicari penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik, biasanya dipecahkan dalam bentuk strategi-strategi khusus. Dan akar masalah adalah Hal-hal yang harus dicari penyebab dari masalah yang lebih rinci, biasanya pemecahan akar masalah dilakukan melalui rumusan program/kegiatan.

Penentuan isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

2.1.6.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG's)

Ada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai bagian dari agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan:

- a. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia;
- b. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendukung pertanian berkelanjutan;
- c. Memastikan kehidupan sehat dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua usia;
- d. Memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua;
- e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan;
- f. Memastikan ketersediaan air dan pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
- g. Memastikan akses universal terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, pekerjaan penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara;
- k. Membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- n. Menghentikan dan membalikkan kerusakan ekosistem laut, serta mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, serta menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses keadilan untuk semua, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan; dan
- q. Memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Laporan kemajuan SDGs 2024 memberikan gambaran global mengenai status pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2024, menjelang batas waktu 2030. Laporan ini mengungkapkan bahwa upaya global untuk mencapai SDGs menghadapi tantangan signifikan, dengan hanya 17% dari target yang berada pada jalur yang sesuai untuk tercapai pada 2030. Sebagian besar, yaitu hampir setengah dari target, menunjukkan kemajuan yang terbatas atau moderat, sementara lebih dari sepertiga dari target mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Krisis global yang meliputi pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, serta dampak perubahan iklim telah memperburuk situasi, mempengaruhi pencapaian SDGs secara keseluruhan. Namun di tengah tantangan tersebut, beberapa indikator menunjukkan adanya kemajuan, terutama di sektor kesehatan, akses terhadap air, serta konektivitas digital.

Laporan kemajuan SDGs 2024 menyoroti perlunya tindakan segera dan berkelanjutan untuk mengejar pencapaian SDGs, dengan fokus pada peningkatan pendanaan untuk negara-negara berkembang, mempercepat transisi menuju energi bersih, serta memperbaiki sistem sosial dan ekonomi global. Tantangan utama mencakup kesenjangan dalam ketersediaan data

yang dapat diandalkan serta ketidakmerataan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pencapaian SDGs. Sebagai contoh, sektor kemiskinan menunjukkan kemunduran akibat dampak langsung dari pandemi, yang menyebabkan peningkatan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Begitu pula dengan kelaparan dan ketahanan pangan, yang semakin memburuk akibat lonjakan harga pangan global.

Dalam sektor kesehatan, meskipun ada beberapa perbaikan dalam pengurangan angka kematian bayi dan prevalensi HIV, secara umum pencapaian di bidang ini lebih lambat dari yang diharapkan, dengan ketimpangan yang tetap signifikan, khususnya di negara-negara berkembang. Pendidikan, sebagai sektor yang mendasari pencapaian SDGs lainnya, juga menghadapi tantangan besar, di mana pencapaian pembelajaran di banyak negara menunjukkan penurunan, meskipun ada peningkatan dalam tingkat partisipasi anak-anak di pendidikan dasar. Kesetaraan gender juga masih jauh dari tercapai, dengan lambatnya peningkatan partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta kekerasan terhadap perempuan yang tetap tinggi.

Di bidang perubahan iklim, meskipun ada penurunan emisi di beberapa negara maju, tren global secara keseluruhan menunjukkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang mencapai tingkat tertinggi yang pernah tercatat. Kehilangan keberagaman hayati dan peningkatan asidifikasi laut juga menjadi perhatian serius, yang memerlukan upaya global yang lebih intensif untuk mengurangi dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan manusia.

Tantangan utama dalam mencapai SDGs ini berkaitan dengan kekurangan investasi yang diperlukan untuk transisi ekonomi yang lebih berkelanjutan, serta ketergantungan global terhadap bahan bakar fosil yang memperburuk krisis iklim. Selain itu, meskipun kemajuan dalam pengumpulan data untuk pemantauan SDGs semakin baik, masih terdapat kesenjangan besar dalam hal ketersediaan data yang tepat waktu dan akurat, yang menghambat perumusan kebijakan yang efektif. Laporan 2024

mengingatkan bahwa pencapaian SDGs di tahun 2030 memerlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak. Tindakan yang lebih cepat dan lebih terkoordinasi sangat diperlukan, termasuk peningkatan kerjasama internasional, pembiayaan yang lebih besar, dan dukungan terhadap negara-negara berkembang yang paling rentan. Keberhasilan pencapaian SDGs akan sangat bergantung pada kebijakan yang inklusif dan transformatif yang memperhatikan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam pencapaian SDGs dengan berhasil memenuhi 62,5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2030, mencakup 139 indikator dari total target yang ada. Pencapaian ini menempatkan Indonesia di posisi teratas di Asia dan peringkat ketujuh secara global, yang menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Angka tersebut jauh melampaui rata-rata global yang hanya mencapai 17%. Posisi unggul Indonesia ini mencerminkan upaya nyata dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang sejalan dengan prinsip-prinsip SDGs. Meskipun pencapaian ini menggembirakan, tantangan untuk memenuhi seluruh target SDGs pada tahun 2030 masih besar, dan Indonesia harus terus bekerja keras untuk mengatasi hambatan yang ada. Negara ini menjadi referensi penting bagi negara-negara lain dalam upaya mencapai SDGs, yang menyoroti potensi besar dalam mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional.

Berdasarkan data dari indikator SDGs 2024, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam mencapai beberapa tujuan SDGs meskipun masih ada tantangan besar dalam beberapa sektor. Pencapaian pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) menunjukkan penurunan kemiskinan ekstrem dari 2,15% menjadi 1,8% pada 2023, dengan daerah pedesaan masih memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Indonesia juga meningkatkan proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, mencapai 90,11% pada 2020, yang mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Indonesia mengalami penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, yang tercatat sebesar 8,53% pada 2023. Meskipun ada penurunan stunting dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,5% pada 2023, masalah gizi buruk, termasuk anemia pada ibu hamil dan malnutrisi akut pada anak, tetap menjadi isu utama yang perlu diatasi. Di bidang Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematian balita dan bayi, serta memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencakup 91,77% penduduk pada 2022. Namun, prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, obesitas, dan merokok masih menjadi tantangan besar, di mana prevalensi merokok pada usia 10-18 tahun mencapai 7,4% pada 2023. Di sisi pendidikan (Tujuan 4), Indonesia menunjukkan peningkatan dalam angka partisipasi dan penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang. Pada 2023, 97,83% anak menyelesaikan pendidikan dasar, meskipun terdapat kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara penyandang disabilitas dan non disabilitas.

2.1.6.2. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 disusun sebagai bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, dengan tujuan untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Visi Presiden periode 2024-2029 adalah "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini mencerminkan bahwa pembangunan negara memerlukan kerjasama dari seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan tekad yang sama, berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai visi ini, Presiden mengemukakan 8 (delapan) Asta Cita yang menjadi arah kebijakan utama. Visi ini mencakup pencapaian negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju, pengurangan kemiskinan, dan berkurangnya ketimpangan

sosial-ekonomi. Pencapaian tersebut dijabarkan melalui **Delapan Asta Cita**, yang meliputi:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025-2029 menetapkan 17 (tujuh belas) arah pembangunan nasional, yang terfokus pada tiga pilar utama: transformasi ekonomi, transformasi sosial, dan transformasi wilayah. Setiap pilar ini memiliki sasaran yang terukur untuk mendorong perkembangan Indonesia menjadi negara maju. Dalam konteks ini, sektor yang memperoleh prioritas tinggi adalah: (1) pendidikan dan kesehatan, (2) pengurangan kemiskinan, (3) pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, dan (4)

peningkatan daya saing sektor ekonomi, khususnya melalui hilirisasi industri berbasis sumber daya alam dan teknologi.

Dalam periode 2020-2024, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif, meskipun terdampak pandemi COVID-19, dengan angka 5,05% pada tahun 2023. *Gross National Income* (GNI) per kapita Indonesia juga meningkat menjadi USD 4,870, mengembalikan Indonesia ke kategori negara berpendapatan menengah atas, setelah sempat menurun akibat dampak pandemi. Sebagai gambaran, kemiskinan di Indonesia menurun secara bertahap, tercatat 9,03% pada Maret 2024.

Di bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan dasar mengalami peningkatan, dengan 97,83% siswa menyelesaikan pendidikan di jenjang SD pada tahun 2023. Namun, terdapat ketimpangan di daerah, dengan provinsi-provinsi seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan intervensi lebih lanjut dalam hal akses pendidikan. Di sektor kesehatan, cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 91,77% pada 2022, namun angka prevalensi stunting masih tinggi, meskipun ada penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 21,5% pada 2023.

Pembangunan infrastruktur juga menjadi prioritas, dengan fokus pada konektivitas wilayah, terutama di daerah terpencil dan perbatasan. Rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 99% pada 2023, namun daerah seperti Papua dan Maluku masih menghadapi tantangan dalam hal akses energi. Pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan energi terbarukan turut menjadi bagian penting dari upaya ini, dengan potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai 3.687 gigawatt, namun pada 2023, pemanfaatannya baru mencapai 0,35% dari total potensi.

Dalam menghadapi tantangan pembangunan, Indonesia juga berhadapan dengan masalah perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta ketidakmerataan sumber daya alam di wilayah-wilayah tertentu. Misalnya, kawasan pesisir di Indonesia sangat rentan terhadap perubahan iklim dan penurunan muka air laut, dengan 23 juta penduduk pesisir diperkirakan menghadapi banjir tahunan pada 2050.

Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN 2025-2029 memuat indikator-indikator yang menunjukkan pencapaian pembangunan yang diharapkan

selama periode tersebut. Pencapaian ini mencakup berbagai sektor dengan fokus pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Pencapaian sasaran ekonomi yang diharapkan mencakup peningkatan PDB per kapita, yang diproyeksikan meningkat dari USD 4,870 pada 2023 menjadi USD 5,470 pada 2025 dan mencapai USD 8,000 pada 2029. Kontribusi PDB Maritim diperkirakan meningkat dari 7,9% pada 2023 menjadi 8,1% pada 2025 dan 9,1% pada 2029. Sementara itu, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB diperkirakan naik dari 18,67% pada 2023 menjadi 20,8% pada 2025 dan mencapai 21,9% pada 2029. Selain itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat dari 5,05% pada tahun 2024 menjadi 5,3% pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 8% pada tahun 2029.

Tingkat kemiskinan juga diharapkan turun secara signifikan, dengan sasaran mencapai 7,0-8,0% pada 2025 dan 4,5-5,0% pada 2029, berbanding dengan 9,03% pada Maret 2024. Kemiskinan ekstrem yang dihitung berdasarkan standar 2,15 USD PPP diperkirakan akan menurun menjadi <0,5% pada 2026. Indeks Gini, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan, ditargetkan turun menjadi 0,378-0,382 pada 2025 dan 0,372-0,375 pada 2029, berbanding dengan 0,379 pada Maret 2024. Kontribusi PDRB KTI meningkat dari 20,9% pada tahun 2023 menjadi 21,4% pada tahun 2025 dan 22,4% pada tahun 2029. Selain itu, Indeks Modal Manusia (IMM) diperkirakan akan meningkat dari 0,54 pada 2020 menjadi 0,56 pada 2025 dan 0,59 pada 2029. Indeks kualitas lingkungan hidup juga diharapkan meningkat dari 72,54 pada 2023 menjadi 76,49 pada 2025 dan 77,20 pada 2029. Dalam hal keberlanjutan lingkungan, intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) ditargetkan menurun dari 34,09 pada 2022 menjadi 35,53 pada 2025 dan 45,17 pada 2029. Penurunan ini mendukung target jangka panjang untuk mencapai net-zero emissions.

2.1.6.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas 2025-2045

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan

mempertimbangkan isu-isu strategis utama yang dihadapi daerah. Visi yang diusung adalah **"Kabupaten Sambas Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan"**, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang.

Aspek *unggul* dalam visi ini merujuk pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta optimalisasi tata kelola pemerintahan. Dengan SDM yang unggul, diharapkan masyarakat Kabupaten Sambas dapat lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik akan mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Dimensi *sejahtera* dalam visi ini menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatnya taraf hidup masyarakat, diharapkan Kabupaten Sambas mampu menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis dan produktif. Sementara itu, prinsip *berkelanjutan* menjadi landasan dalam menjaga keseimbangan pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Pemerataan konektivitas dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam upaya menciptakan daerah yang tangguh menghadapi tantangan global serta perubahan iklim.

Dengan visi tersebut, Kabupaten Sambas bertekad untuk menjadi daerah yang maju dan mandiri, dimana kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup dan keberlangsungan generasi mendatang. Sasaran visi dan indikatornya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 74
Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sambas

SASARAN VISI	INDIKATOR SASARAN VISI	TARGET	
		2025	2045
Mengoptimalkan pengembangan perekonomian daerah	PDRB per Kapita (Rp Juta)	43,70-50,47	240,55-320,55
	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	30,57-32,80	31,50-34,45

SASARAN VISI	INDIKATOR SASARAN VISI	TARGET	
		2025	2045
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	11,60-12,40	12,45-20,90
Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,64	2,21
	Pertumbuhan Ekonomi	4,75-5,35	6,15-8,00
	Rasio Gini	0,274	0,254
	Kontribusi PDRB Kab/Kota	9,50-9,65	9,70-10,02
Meningkatkan daya saing dengan daerah lain	Indeks Daya Saing Daerah	3,22	3,97
	Indeks Inovasi Daerah	56,00	60,01
Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Indeks Modal Manusia	Na	Na
	Indeks Pembangunan Manusia	71,78	-
Mengurangi Intensitas Emisi GRK	Penurunan intensitas emisi GRK menuju net zero emission	65,31	97,51
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,65	79,14

Adapun arah kebijakan periode 2025-2029 RPJPD Kabupaten Sambas adalah Perkuatan Pondasi Transformasi yang diuraikan sebagai berikut.

1. Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia Berkualitas.

Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai langkah strategis, seperti perluasan upaya promotif-preventif dalam kesehatan, percepatan eliminasi stunting dan malaria dengan pendekatan multisektor, serta pemenuhan tenaga kesehatan berkualitas terutama di daerah terpencil. Pendidikan juga menjadi prioritas dengan percepatan wajib belajar 13 tahun dan peningkatan akses pendidikan, khususnya di daerah perbatasan dan terpencil melalui sistem pembelajaran jarak jauh. Selain itu, program jaminan sosial dan ketenagakerjaan diperluas bagi pekerja informal dan lansia miskin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

2. Transformasi Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Kebijakan ekonomi diarahkan pada pengembangan industri hijau berkelanjutan dan inovasi di berbagai sektor, seperti bioteknologi dan energi terbarukan. Penguatan ketahanan pangan dilakukan dengan membangun sentra produksi pangan modern dan berkelanjutan, serta pengembangan ekowisata berbasis alam. Selain itu, keterkaitan UMKM dengan rantai industri global diperkuat melalui akses ke sumberdaya produktif dan adopsi teknologi. Digitalisasi juga menjadi fokus utama dengan penguatan infrastruktur TIK serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

3. Transformasi Tata Kelola Menuju Pemerintahan Akuntabel dan Transparan.

Upaya reformasi birokrasi diarahkan pada optimasi regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan, dan transparansi layanan publik berbasis digital. Penguatan sistem pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan antikorupsi serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penganggaran. Digitalisasi dalam layanan pemerintahan dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

4. Keamanan, Ketertiban, dan Supremasi Hukum.

Keamanan dan ketertiban dijaga dengan peningkatan kapasitas aparat dalam mengurangi kriminalitas lintas batas. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti skema kerjasama publik-swasta. Upaya pengendalian inflasi daerah juga diperkuat melalui sinergi kebijakan nasional dan daerah.

5. Ketahanan Budaya Berbasis Kearifan Lokal.

Kebijakan budaya menekankan pada penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai lokal, penyediaan ruang publik inklusif, serta pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Tata ruang wilayah akan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, serta mitigasi bencana berbasis solusi alami. Pemberdayaan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan juga menjadi fokus utama dalam memperkuat ketahanan sosial.

6. Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kondusivitas Daerah.

Pembangunan infrastruktur dasar akan ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan daerah, termasuk penyediaan perumahan layak, air minum, dan sanitasi yang aman. Infrastruktur kelistrikan akan dikembangkan dengan pendekatan energi rendah karbon serta pemanfaatan teknologi digital dalam jaringan listrik pintar (smart grid). Reformasi pengelolaan sampah juga diarahkan untuk mencapai minimasi residu dan daur ulang yang optimal.

7. Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Kelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas dengan rehabilitasi hutan, penghambatan laju deforestasi, dan penguatan ekosistem alami. Penanggulangan bencana akan diperkuat dengan peningkatan sistem peringatan dini serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Program pengelolaan air dan sanitasi juga diintegrasikan untuk memastikan akses yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

8. Keberlanjutan Pembangunan Daerah Menuju Indonesia Emas.

Seluruh kebijakan ini disusun sebagai fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Integrasi program sosial, ekonomi, tata kelola, dan lingkungan diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi di tingkat global.

2.1.6.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 memiliki korelasi dan implikasi yang luas terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Hal ini terkait dengan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang, dan Penetapan Kawasan Strategis yang telah dijabarkan secara terperinci dalam peraturan daerah tersebut. Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Sambas mencakup berbagai pusat kegiatan, yaitu:

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);

- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Selain itu, sistem jaringan prasarana utama yang mendukung struktur ruang terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi, meliputi transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian; dan
- b. Sistem jaringan prasarana lainnya, meliputi jaringan energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Rencana pola ruang Kabupaten Sambas mencakup pemantapan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya.

- a. **Kawasan Lindung**, terdiri dari:

- 1) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;
- 2) kawasan perlindungan setempat;
- 3) kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- 4) kawasan rawan bencana alam.

- b. **Kawasan Budidaya**, mencakup:

- 1) kawasan peruntukan hutan produksi dan hutan rakyat;
- 2) kawasan peruntukan pertanian, perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil;
- 3) kawasan peruntukan pertambangan, industri, dan pariwisata; dan
- 4) kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan Strategis merupakan kawasan yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Strategis di Kabupaten Sambas terdiri atas:

- a. **Kawasan Strategis Nasional (KSN)**

Kawasan Perbatasan Darat Republik Indonesia Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar (Aruk) yang merupakan kawasan strategi dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

- b. **Kawasan Strategis Provinsi (KSP)**

- a. Kawasan Industri Semparuk (KIS);

- b. Terminal khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api di Kecamatan Paloh;
 - c. Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) di Kecamatan Pemangkat; dan
 - d. Kawasan rawan bencana alam Gayung Bersambut di Kecamatan Selakau.
- c. **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**
- a. **Kawasan Perbatasan Negara:** Meliputi Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, kawasan ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta mendorong aktivitas ekonomi lintas batas;
 - b. **Kawasan Perkotaan Sambas:** Sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, kawasan ini menjadi fokus pengembangan infrastruktur dan pelayanan masyarakat;
 - c. **Kawasan Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT):** Terdiri dari Kecamatan Tebas dan Galing, kawasan ini diarahkan untuk pengembangan sektor pertanian terpadu guna meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani;
 - d. **Kawasan Minapolitan Budidaya:** Terletak di Kecamatan Jawai Selatan dengan *hinterland* Kecamatan Pemangkat dan Jawai, kawasan ini difokuskan pada pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya;
 - e. **Kawasan Minapolitan Penangkapan:** Berada di Kecamatan Pemangkat dengan *hinterland* Kecamatan Selakau, kawasan ini difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap;
 - f. **Kawasan Waterfront City dan Kompleks Istana Kesultanan Sambas:** Mencakup Istana Alwatzikhoebillah, Masjid Jami', dan Makam Raja-raja Kesultanan Sambas, kawasan ini memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, serta berpotensi sebagai destinasi wisata budaya;
 - g. **Kawasan Wisata:** Terdiri dari Pantai Sinam (Kecamatan Pemangkat), Pantai Putri Serayi (Kecamatan Jawai Selatan), Danau Sebedang (Kecamatan Sebawi), Pantai Temajuk (Kecamatan Paloh), dan Riam

Merasap (Kecamatan Sajingan Besar), kawasan-kawasan ini memiliki potensi wisata alam yang signifikan;

- h. **Kawasan Industri Semparuk (KIS):** Difokuskan sebagai pusat pengembangan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal;
- i. **Terminal Khusus dan Kawasan Industri Tanjung Api:** Terletak di Kecamatan Paloh, kawasan ini direncanakan untuk mendukung aktivitas industri dan logistik;
- j. **Kawasan Transmigrasi (KT) Kabupaten Sambas** diantaranya berada di Kecamatan Subah dan Sajingan Besar;
- k. **Kota Terpadu Mandiri (KTM) Subah:** Dengan *hinterland* di Kecamatan Sajad dan Sejangkung, kawasan ini dirancang untuk pengembangan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya;
- l. **Kota Terpadu Mandiri (KTM) Gerbang Mas Perkasa Sebunga:** Dengan *hinterland* di Kecamatan Paloh, Galing, dan Sejangkung, kawasan ini direncanakan untuk pengembangan permukiman dan fasilitas pendukung lainnya;
- m. **Kawasan Kebun Raya Sambas:** Terletak di Kecamatan Subah, kawasan ini berfungsi sebagai area konservasi dan edukasi botani;
- n. **Kawasan Ekosistem Tanjung Belimbing:** Berada di Kecamatan Paloh, kawasan ini memiliki nilai ekologis yang penting dan perlu dilestarikan; dan
- o. **Kawasan Ekosistem Gunung Bentarang:** Terletak di Kecamatan Sajingan Besar, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan penting untuk konservasi.

2.1.6.7. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2035

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dilakukan pada tahap awal dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. KLHS ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyusunan RPJMD, sehingga dapat diperkirakan dampak negatif terhadap lingkungan hidup apabila Kebijakan

Rencana dan Program (KRP) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kajian ini mengkaji dampak lingkungan yang timbul akibat pelaksanaan KRP dan oleh karena itu, hasil kajian ini bersifat strategis untuk memberikan rekomendasi penyempurnaan KRP yang ada dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Adanya kajian yang mendalam dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan diharapkan dapat mendorong pengendalian lingkungan yang lebih baik melalui KLHS. Dengan demikian, potensi permasalahan lingkungan yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalisasi, sehingga pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sambas dapat diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi acuan utama dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Selain itu, acuan lainnya yang digunakan dalam penyusunan KLHS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017. Operasionalisasi pelaksanaan kajian ini, digunakan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018, disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS RPJMD merupakan analisis yang dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan partisipatif, yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Proses ini bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program yang terkandung dalam RPJMD dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 tidak dapat dipisahkan dari indikator-indikator dalam TPB. Oleh karena itu, selain memberikan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, KLHS RPJMD ini juga berperan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden tersebut juga menjadi dasar operasional penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas, yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian TPB, dengan indikator-indikator yang menjadi bagian dari penyusunan RPJMD.

Substansi rencana pembangunan dalam KLHS RPJMD didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan, yang bertujuan untuk mengarahkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap TPB, diharapkan KLHS RPJMD Kabupaten Sambas dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP), serta mendukung percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) TPB.

Pentingnya mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pembangunan adalah untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak kapasitas lingkungan untuk mendukungnya. Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup pada dasarnya mengandung dua komponen utama: komponen penyedia (*supply*), yang mencakup sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan, dan komponen pemanfaat/pengguna (*demand*), yang menggambarkan sejauh mana sumber daya tersebut digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam konteks kajian ini, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang disajikan meliputi tiga aspek utama: pangan, air, dan daya dukung lahan terkait pertanian. Aspek-aspek ini dipilih karena selain dapat menggambarkan struktur ekologis dan proses biofisik dalam

suatu wilayah, juga mampu menunjukkan pola pemanfaatan sumber daya alam oleh populasi di wilayah tersebut. Pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung ini penting untuk menilai sejauh mana kapasitas lingkungan mampu mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyediaan pangan, air, dan ruang untuk pertanian, yang merupakan komponen vital dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Skenario kondisi lingkungan hidup dilakukan untuk menilai kemampuan lingkungan di Kabupaten Sambas dalam mendukung pencapaian program pembangunan berkelanjutan. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung, khususnya terkait kebutuhan air dan pangan, dilakukan untuk mengevaluasi kapasitas daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan melakukan proyeksi ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana sumber daya alam yang ada mampu mendukung kebutuhan jangka panjang, serta mengidentifikasi potensi kekurangan atau tekanan terhadap lingkungan yang perlu diatasi untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan perhitungan skenario daya dukung air, kebutuhan air domestik dan non-domestik di Kabupaten Sambas diperkirakan akan meningkat dari tahun 2020 hingga 2040 (m³/tahun). Namun, dengan mempertimbangkan proyeksi jumlah penduduk, ketersediaan air di Kabupaten Sambas sampai tahun 2040 diprediksi masih surplus secara keseluruhan. Jasa ekosistem penyediaan air terbagi dalam 15 (lima kelas), yaitu sangat rendah (11,62%), rendah (0%), sedang (42,76%), tinggi (45,61%), dan sangat tinggi (0%).

Wilayah yang dominan dalam kategori rendah (sangat rendah dan rendah) terdapat di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Sajad (53,67%), Kecamatan Sambas (37,85%), Kecamatan Sejangkung (35,68%), dan Kecamatan Jawai (30,69%). Meskipun demikian, secara keseluruhan, ketersediaan air di Kabupaten Sambas masih dalam kategori aman, dengan kategori sedang dan tinggi yang sangat dominan, yaitu mencapai 88,37% atau sekitar 465.640 ha. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, Kabupaten Sambas masih memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air di masa depan.

Berdasarkan skenario daya dukung pangan dengan skenario *Business As Usual* (BAU), kebutuhan pangan di Kabupaten Sambas diperkirakan akan terus meningkat dari tahun 2020 hingga 2040, dengan kenaikan sebesar 8.838 ha per tahun, seiring dengan angka pertumbuhan penduduk sekitar 2,10% per tahun. Meskipun demikian, proyeksi yang dibuat dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk, lahan pertanian, dan produksi pertanian menunjukkan bahwa tidak akan terjadi penurunan produksi pangan akibat alih fungsi lahan pertanian. Secara keseluruhan, kebutuhan pangan di Kabupaten Sambas masih berada di bawah nilai ketersediaan pangan, yang menunjukkan bahwa potensi pangan di daerah ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kecamatan-kecamatan seperti Pemangkat, Selakau, Teluk Keramat, dan Tebas memiliki potensi pengembangan pangan yang sangat tinggi, berpotensi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, intensifikasi lahan pertanian melalui penggunaan teknologi pertanian dan manajemen yang lebih efisien akan menjadi kunci untuk memastikan kecukupan pangan di masa depan.

Secara keseluruhan, potensi penyediaan pangan di Kabupaten Sambas berada dalam kategori aman, dengan kategori sedang hingga sangat tinggi. Kategori sangat rendah mencakup 1,74% atau 9.064 ha, yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Jawai, Tangaran, dan Subah. Kategori rendah mencakup 12,49% atau 65.116 ha, yang tersebar di Kecamatan Galing, Paloh, Sajingan Besar, Sambas, Sebawi, Selakau Timur, Tebas, Tekarang, dan Subah. Sementara itu, kategori sedang mencakup 36,21% atau 188.757 ha, kategori tinggi mencakup 32,26% atau 168.181 ha, dan kategori sangat tinggi mencakup 31,13% atau 162.285 ha, yang tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Sambas.

Dengan potensi ini, intensifikasi lahan pertanian dapat dilakukan melalui penggunaan sistem tanam polikultur dan pemanfaatan bibit unggul untuk meningkatkan hasil produksi. Selain itu, untuk menjaga ketersediaan pangan domestik, perlu adanya usaha untuk mengurangi, bahkan mencegah konversi lahan-lahan pertanian yang produktif, sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Sambas dapat terjaga dan berkembang secara berkelanjutan.

Skenario pencapaian TPB berdasarkan isu prioritas untuk Kabupaten Sambas mengidentifikasi perlunya upaya tambahan guna mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan hingga tahun 2030. Upaya ini berupa arahan program yang bertujuan untuk menangani permasalahan yang ada dalam beberapa sektor utama, yaitu penegakan serta tata kelola hukum dan pemerintahan daerah, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah, pengelolaan ekosistem, serta tata kelola perkotaan dan kualitas hidup masyarakat. Program-program ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB, terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu tersebut meliputi: pertama, penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif; kedua, peningkatan dan penguatan ekonomi daerah untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif; ketiga, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan; dan keempat, tata kelola perkotaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perumusan skenario dalam kajian ini menggunakan pendekatan *Business As Usual* (BAU), yang merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian TPB. Analisis BAU ini memperhatikan tren perubahan kondisi lingkungan dan pencapaian target TPB, dengan mempertimbangkan kinerja yang telah dilakukan Kabupaten Sambas selama ini. Skenario ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pencapaian TPB dapat terwujud dalam jangka panjang, serta upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan yang ada.

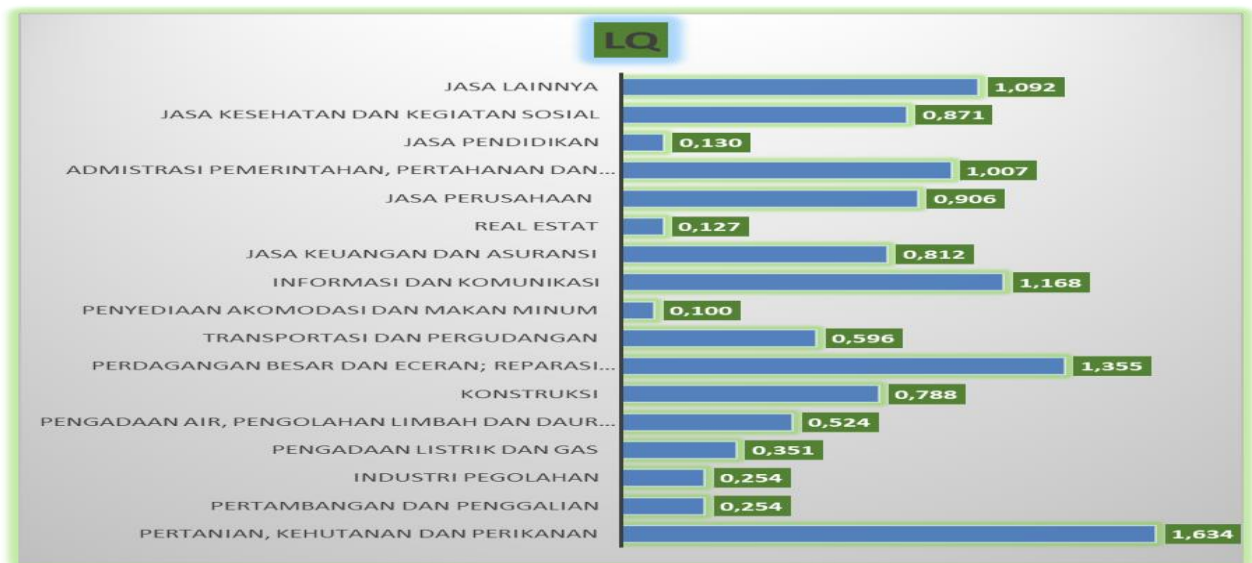
2.1.6.8. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal

Kabupaten Sambas memiliki sejumlah sektor ekonomi yang sangat potensial dan dapat dijadikan landasan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu sektor yang menjadi pilar utama ekonomi Kabupaten Sambas adalah pertanian. Produksi padi pada tahun 2023 mencapai 177.411 ton, meskipun luas panen mengalami penurunan dari 67.602 ha pada tahun 2019 menjadi 58.031 ha pada tahun 2023. Selain padi,

jeruk siam juga menjadi komoditas unggulan dengan produksi mencapai 88.119 ton pada tahun 2023, meskipun ada penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat 123.739 ton. Luas lahan pertanian sawah pada tahun 2024 mencapai 43.514 ha, menunjukkan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Sambas masih memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan daerah, meskipun ada tantangan terkait penurunan produksi beberapa komoditas.

Selain sektor pertanian, perkebunan juga berperan penting dalam perekonomian Kabupaten Sambas. Produksi kelapa sawit pada tahun 2023 tercatat 378.188 ton, dengan luas perkebunan mencapai 129.539 ha. Begitu pula dengan karet, yang pada tahun 2023 menghasilkan 18.128 ton dari lahan perkebunan seluas 54.324 ha. Potensi sektor perkebunan ini sangat besar, terutama jika dikembangkan melalui industri hilir yang dapat meningkatkan nilai tambah produk-produk berbasis kelapa sawit dan karet. Dengan demikian, sektor ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB dan lapangan kerja di daerah.

Perikanan juga merupakan sektor yang memiliki potensi luar biasa di Kabupaten Sambas, mengingat garis pantai yang panjang dan kondisi geografis yang mendukung. Pada tahun 2024, produksi perikanan laut tercatat mencapai 36.325 ton, sementara perikanan budidaya menghasilkan 2.450 ton. Total produksi perikanan pada tahun 2024 mencapai 39.401 ton, yang menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil perikanan, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor ini dapat menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.



Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2. 29.

Grafik LQ Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Sambas

Berdasarkan grafik LQ yang menunjukkan kontribusi sektor terhadap PDRB Kabupaten Sambas, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor basis dengan kontribusi terbesar. Sektor ini sangat penting dalam perekonomian daerah dan mendominasi dibandingkan dengan sektor lainnya. Diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Konstruksi, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB. Oleh karena itu, sektor pertanian harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas, dengan memperkuat sektor-sektor pendukung lainnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Peningkatan infrastruktur menjadi langkah awal yang krusial untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan jalan, sistem irigasi yang efisien, serta akses pasar untuk produk pertanian dan perikanan. Penguatan penyuluhan kepada petani dan nelayan mengenai teknik-teknik pertanian dan perikanan modern juga penting untuk meningkatkan hasil produksi serta daya saing produk. Dengan cara ini, sektor pertanian dapat terus berkembang dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi daerah.

Selain itu, diversifikasi produk dan pengolahan hasil pertanian dan perikanan menjadi langkah strategis untuk memaksimalkan potensi sektor ini. Pengembangan industri pengolahan pangan atau produk perikanan lokal

yang memiliki nilai tambah akan membuka peluang pasar baru dan memperkuat ekonomi lokal. Mengintegrasikan keberlanjutan dalam praktik pertanian dan perikanan juga sangat penting untuk menjaga kesinambungan sumber daya alam yang mendukung sektor ini.

Sektor Perdagangan dan Konstruksi, yang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, perlu didorong untuk berkembang lebih lanjut. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan raya dan fasilitas transportasi, dapat mempermudah distribusi produk pertanian dan perikanan ke pasar lebih luas. Proyek-proyek konstruksi yang memperbaiki kualitas infrastruktur daerah juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antara daerah.

Untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor tersebut, sektor Jasa dan Keuangan juga memegang peranan penting. Pengembangan layanan keuangan seperti akses pembiayaan untuk UMKM, termasuk di sektor pertanian, akan memberikan dampak besar bagi kemajuan ekonomi lokal. Selain itu, sektor pendidikan dan pelatihan harus diperkuat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di berbagai sektor. Dengan menciptakan kolaborasi yang efektif antara sektor-sektor yang ada, baik itu sektor pertanian, perdagangan, konstruksi, maupun jasa, Kabupaten Sambas dapat membangun ekosistem bisnis yang saling mendukung dan berkelanjutan. Fokus pada sektor basis seperti pertanian dan kehutanan, bersama dengan pengembangan sektor-sektor pendukung, akan memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan daya saing Kabupaten Sambas secara keseluruhan.

Meski sektor-sektor primer seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi pilar utama, industri pengolahan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Sambas. Pada tahun 2023, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 11,44% terhadap PDRB Kabupaten Sambas. Ini menunjukkan adanya peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah produk-produk lokal, khususnya yang berasal dari sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut adalah industri kreatif berbasis budaya lokal,

seperti tenun Sambas dan kerajinan tangan, yang memiliki daya tarik baik di pasar domestik maupun internasional.

Sektor pariwisata Kabupaten Sambas juga memiliki potensi besar, terutama dengan keberadaan wisata Temajuk, yang sudah dikenal luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, Kabupaten Sambas juga memiliki destinasi wisata lainnya, seperti Pantai Temajuk dan Pulau Selimpai, yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan sektor pariwisata ini akan membutuhkan peningkatan infrastruktur yang memadai, seperti penginapan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Meskipun Kabupaten Sambas memiliki berbagai sektor yang potensial, tantangan dalam pendidikan dan ketenagakerjaan masih cukup besar. Sekitar 55,2% tenaga kerja di Kabupaten Sambas hanya memiliki pendidikan rendah, yang menghambat mereka untuk bersaing di sektor formal dan industri. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas tercatat 5,04% pada 2023, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan peluang kerja yang tersedia. Oleh karena itu, pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan pasar kerja yang semakin kompetitif.

Infrastruktur juga menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konektivitas perbatasan dengan Malaysia memberikan peluang besar dalam sektor perdagangan lintas batas, yang dapat didorong dengan pembangunan infrastruktur perbatasan seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan. Selain itu, infrastruktur digital juga perlu diperkuat, terutama di daerah perbatasan dan pedesaan, untuk mendukung perkembangan ekonomi digital dan *e-commerce* yang semakin pesat di Kabupaten Sambas.

Secara keseluruhan, dengan mengoptimalkan sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata, serta memperkuat pendidikan dan ketenagakerjaan, infrastruktur, dan konektivitas, Kabupaten Sambas memiliki peluang besar

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.1.6.9. Permasalahan Daerah

2.1.6.9.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan Daerah terkait pendidikan diantaranya:

- 1) rapor pendidikan (Indeks SPM) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 adalah 62,61 masih lebih rendah dari beberapa Kabupaten lain di Kalimantan Barat seperti Kapuas Hulu, Kubu Raya, Landak, Sekadau, dan masih lebih rendah daripada Indeks SPM Kalimantan Barat 64,27;
- 2) rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sambas pada tahun 2023 adalah 6,75 tahun masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 7,71 tahun. Permasalahan rendahnya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga banyak putra daerah yang keluar dan tidak kembali;
- 3) tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, meskipun terdapat peningkatan dalam APK dan APM, partisipasi pendidikan di tingkat dasar dan menengah masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKPD;
- 4) angka putus syang tinggi masih didominasi oleh masyarakat miskin dan difabel sehingga menghambat pencapaian pendidikan yang inklusif;
- 5) masih adanya masyarakat yang buta huruf, terutama di kawasan pedesaan, sehingga menjadi hambatan dalam menciptakan masyarakat yang teredukasi dengan baik;
- 6) kualitas pendidikan yang masih belum merata di seluruh kecamatan, dengan kecenderungan pendidikan yang lebih baik di daerah perkotaan daripada di pedesaan;

- 7) infrastruktur pendidikan yang terbatas berupa kurangnya fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah terpencil menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas;
- 8) keterbatasan guru yang terlatih. Masih terdapat kekurangan jumlah guru terlatih dan berkompeten di daerah tertentu, yang mempengaruhi kualitas pengajaran di sekolah-sekolah daerah;
- 9) kesenjangan akses pendidikan untuk anak difabel. Akses pendidikan bagi anak-anak difabel masih terbatas, yang menghambat mereka untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya; dan
- 10) kurikulum yang belum responsif terhadap era digital. Kurikulum pendidikan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan era digital, yang mengurangi kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan.

b. Kesehatan

Permasalahan Daerah terkait kesehatan diantaranya:

- 1) umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 69,39 tahun (2022) menjadi 69,76 tahun (2023), tetapi masih di bawah rata-rata Kalimantan Barat (71,32 tahun);
- 2) kasus HIV dari tahun 2021 hingga 2023 mengalami peningkatan, dari 43 kasus menjadi 68 kasus;
- 3) tingkat Suspek TBC yang tinggi;
- 4) rendahnya terapi pencegahan TBC menyebabkan tingkat penularan mencapai 99%;
- 5) keterbatasan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas. Pada tahun 2023 puskesmas dengan status jumlah dokter berstatus kurang sebesar 14%;
- 6) untuk kepesertaan JKN, UHC di Kabupaten Sambas 76%, belum ada satupun kecamatan yang mencapai UHC sesuai dengan target nasional (98%);
- 7) status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan meningkatnya kasus ibu melahirkan dan angka kematian bayi;

- 8) status gizi masyarakat masih rendah, tercermin dari masih tingginya proporsi bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kasus gizi buruk (>30%). Kondisi ini berdampak negatif pada pertumbuhan fisik anak, yang berisiko mengalami stunting (sangat pendek dan pendek);
- 9) kekurangan tenaga medis, terutama dokter spesialis dan dokter gigi, sehingga layanan kesehatan masyarakat belum optimal;
- 10) perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum optimal, yang berkontribusi pada tingginya risiko penyakit menular dan tidak menular; dan
- 11) pemerataan sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan masih kurang, sehingga akses layanan kesehatan belum merata di seluruh wilayah.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan Daerah terkait Pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya:

- 1) pada tahun 2024, kondisi jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat masih cukup Panjang (100,46 km dalam kondisi rusak dan 187,811 km rusak berat);
- 2) masih rendahnya infrastruktur dalam kondisi mantap sehingga kurang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Sambas;
- 3) belum jelasnya penataan ruang dan pemanfaatan sumber daya alam;
- 4) minimnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di wilayah kecamatan dan zonasi pusat kegiatan;
- 5) masih belum tuntasnya tapal batas antar desa; dan
- 6) kurang optimalnya koordinasi antar sektor.

Selain masalah di atas tata ruang di Kabupaten Sambas memerlukan peraturan tata ruang yang jelas, rinci, dan dapat dilaksanakan. Salah satu produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah ini adalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR harus disusun untuk kawasan perkotaan atau kawasan strategis di kabupaten atau kota. RDTR ini mencakup berbagai ketentuan penting, seperti kegiatan dan penggunaan lahan, intensitas pemanfaatan ruang,

tata bangunan, prasarana minimal, serta ketentuan teknis dan peraturan zonasi yang diperlukan untuk memastikan pemanfaatan ruang yang optimal dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Dengan adanya RDTR yang jelas, diharapkan tata ruang di Kabupaten Sambas dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan efisien, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan terorganisir.

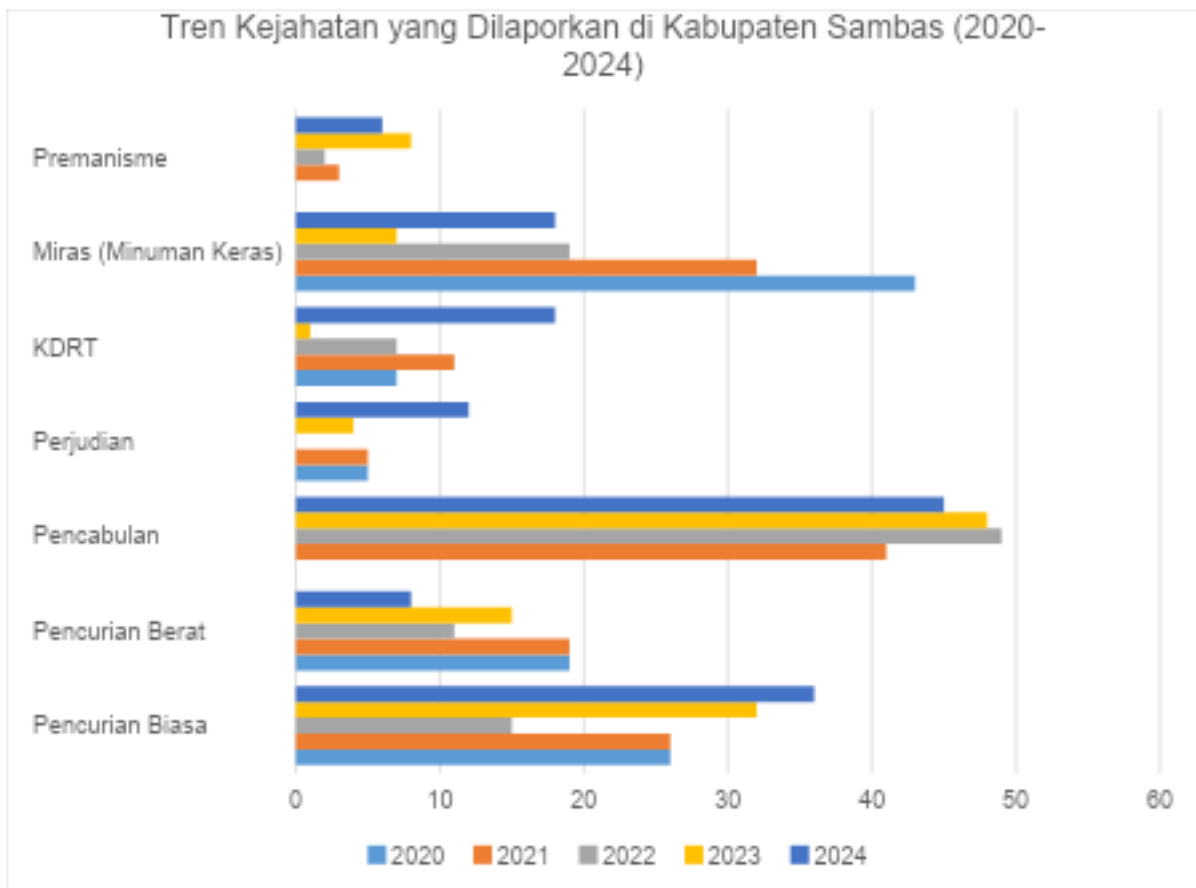
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan Daerah terkait Pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum pada tahun 2023 hanya 58,78%.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan Daerah terkait pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya:

- 1) kasus pencabulan masih tinggi (45 kasus pada tahun 2024);
- 2) melonjaknya kasus KDRT (dari 1 kasus pada tahun 2023 menjadi 18 kasus pada tahun 2024);
- 3) masih tingginya kasus pencurian biasa (tren meningkat dari tahun 2020 sebanyak 26 kasus menjadi 36 kasus pada tahun 2024); dan
- 4) pencurian berat masih terjadi, meskipun tren mengalami penurunan (19 kasus pada tahun 2020 menjadi hanya 8 kasus pada tahun 2024).



Sumber: BPS, Kabupaten Sambas dalam Angka Tahun 2025

Gambar 2.30.
Tren Kejahatan yang dilaporkan di Kab. Sambas Tahun 2020-2024

Selain itu, permasalahan juga tampak pada beberapa kasus seperti:

- 1) kejahatan transnasional, termasuk kejahatan di wilayah perbatasan darat dan laut;
- 2) masih lemahnya koordinasi dan kerja sama di bidang ketertiban dan keamanan lingkungan dengan pihak terkait;
- 3) rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) lamanya waktu penanganan terhadap bencana kebakaran yang menunjukkan kurangnya responsivitas dalam menghadapi situasi darurat;
- 5) perkelahian antar remaja, judi online dan balap liar; dan
- 6) jumlah komunitas LGBT yang terus meningkat.

f. Sosial

Urusan wajib bidang sosial merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang sosial mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan perencanaan sosial, kerjasama serta pembinaan sosial, penanggulangan masalah sosial, pengembangan sumber kesejahteraan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Saat ini, Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius, antara lain:

- 1) masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2024, Kabupaten Sambas memiliki angka kemiskinan (6,53%) yang masih lebih tinggi dibandingkan Kubu Raya (4,08%), Mempawah (4,83%), Sanggau (4,67%), dan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat (6,32%). Selain itu, target SDGs yang untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk menandakan masalah ini perlu ditangani. Bila dibandingkan dengan target nasional yang tercantum dalam RPJMN dengan target capaian angka kemiskinan berada dalam rentang 7,0-8,0% pada 2025 dan 4,5-5,0% pada 2029, persentase kemiskinan di Kabupaten Sambas pada 2024 masih cukup tinggi;

- 2) tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Sambas (0,85) masih lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya seperti Kubu Raya (0,36), Sanggau (0,45), dan Kota Singkawang (0,47) pada tahun 2024;
- 3) belum optimalnya pelayanan terhadap PPKS, sehingga masih terdapat kelompok rentan yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal;
- 4) ketiadaan shelter atau rumah singgah, menyebabkan kesulitan dalam menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT);
- 5) minimnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, menyebabkan mereka masih menghadapi risiko sosial yang tinggi;
- 6) derasnya arus budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila, berkontribusi terhadap dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
- 7) masih adanya perbedaan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama/ penghayat kepercayaan, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan sosial;
- 8) masyarakat semakin kecanduan gadget, anak-anak dan orang tua kurang berinteraksi langsung;
- 9) kontrol keluarga masih lemah, sehingga diperlukan strategi penguatan sosial; dan
- 10) perceraian dan perselingkuhan banyak terjadi akibat faktor ekonomi.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial ini, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan program perlindungan sosial, penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, serta penguatan nilai budaya dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.

2.1.6.9.2. Urusan Pemerintahan Tidak Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan Daerah terkait tenaga kerja diantaranya:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sambas Tahun 2024 (4,99). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) pada tahun 2023, penduduk bekerja di Kabupaten Sambas sebagian besar merupakan lulusan SD ke bawah (51,17%);
- 3) sebesar 70,10% penduduk Kabupaten Sambas bekerja di Sektor informal sehingga tidak memiliki jaminan ketenagakerjaan;
- 4) tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal;
- 5) rendahnya tingkat pendidikan rendah dan minim keterampilan tenaga kerja; dan
- 6) usia 15-24 tahun yang tidak terakses pada pendidikan, pekerjaan, dan pelatihan mencapai 26,7%.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan Daerah terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya:

- 1) kasus kekerasan terhadap anak masih terjadi (72 kasus Tahun 2023 dan 43 kasus dari Januari-Agustus 2024);
- 2) kasus kekerasan seksual pada anak masih terjadi (46 kasus 2024); dan
- 3) kekerasan terhadap perempuan termasuk tindak pidana perdagangan orang (per 100.000 penduduk perempuan) pada tahun 2024 sebesar 2,20%.

c. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia. Ketersediaan pangan di suatu daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara hingga tingkat individu, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, serta aman, beragam,

bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, serta budaya masyarakat, sehingga dapat mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Namun, situasi pangan di Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya:

- 1) Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Sambas 70,83 tahun 2024, masih di bawah beberapa Kabupaten di Kalimantan Barat seperti Ketapang, Bengkayang, Landak, Mempawah, Sintang, Kapuas Hulu, dan Sekadau. IKP Kabupaten Sambas dalam beberapa tahun terakhir juga fluktuatif. IKP mencakup berbagai dimensi, seperti ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pasokan pangan. Salah satu permasalahan adalah masih rendahnya IKP Kabupaten Sambas adalah indeks pemanfaatan pangan yang masih rendah (45);
- 2) kerentanan terhadap rawan pangan. Masih terdapat desa-desa yang rentan terhadap rawan pangan. Hal ini terlihat dari rendahnya penguatan pangan masyarakat dalam menangani daerah rentan pangan, kurangnya diversifikasi konsumsi pangan, serta masih belum optimalnya kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat;
- 3) rendahnya pemanfaatan sumber daya pangan lokal. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya pangan lokal masih terbatas. Selain itu, penguatan dan peningkatan cadangan pangan daerah sebagai stok dalam menghadapi potensi rawan pangan masih perlu ditingkatkan;
- 4) belum optimalnya pemanfaatan lahan produktif. Potensi pertanian dan lahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Sambas belum dimanfaatkan secara maksimal;
- 5) kurangnya kesinambungan dalam aspek gizi, akses pangan, dan pola konsumsi masyarakat. Akses terhadap pangan yang berkualitas, pola konsumsi yang sehat dan beragam, serta peningkatan mutu dan ketahanan pangan masih perlu diperhatikan lebih lanjut untuk menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Upaya yang

komprehensif diperlukan guna memastikan masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang sehat dan bergizi;

- 6) kenaikan harga bahan pangan pokok;
- 7) ketidakstabilan pasokan pangan;
- 8) masih belum optimalnya sertifikasi jaminan mutu dan keamanan pangan; dan
- 9) lemahnya pengawasan keamanan pangan.

d. Pertanahan

Permasalahan Daerah terkait pertanahan diantaranya:

- 1) tumpang tindih sertifikat hak tanah; dan
- 2) permasalahan tapal batas desa seperti Desa Santaban Kecamatan Saringan Besar dengan Desa Sijang Kecamatan Galing.

e. Lingkungan Hidup

Pada tahun 2023, Indeks Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas tercatat sebesar 71,31. Meskipun sudah menunjukkan angka yang cukup baik, target yang ingin dicapai pada tahun 2025 menurut RPJPD Kabupaten Sambas adalah 76,65, yang menunjukkan komitmen Daerah untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dalam beberapa tahun mendatang. Di tingkat nasional, target RPJMN untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 adalah 76,49, dan diharapkan meningkat menjadi 77,20 pada tahun 2029. Dengan demikian, Kabupaten Sambas harus melakukan upaya signifikan untuk mencapai target 76,65 pada tahun 2025, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional untuk 2025.

Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas memiliki komitmen untuk tidak hanya mengikuti tren nasional, tetapi juga untuk menjadi salah satu daerah yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Sambas perlu fokus pada peningkatan pengelolaan sumber daya alam, penurunan polusi, konservasi kawasan hijau, serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Peningkatan kualitas air, udara, dan pengelolaan limbah harus menjadi prioritas agar kualitas lingkungan hidup di Kabupaten

Sambas dapat mencapai angka yang ditargetkan dan mendukung keberlanjutan ekonomi serta sosial masyarakat.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi meliputi:

- 1) belum optimalnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, yang berdampak pada kualitas ekosistem dan kesehatan masyarakat;
- 2) kurangnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam, sehingga keberlanjutan sumber daya dan keragaman hayati masih terancam;
- 3) sistem penegakan hukum lingkungan yang belum terkoordinasi dengan baik, menghambat efektivitas perlindungan lingkungan dari berbagai aktivitas yang merusak;
- 4) minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan tantangan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran yang berdampak luas pada lingkungan;
- 5) menurunnya kualitas lingkungan akibat aktivitas yang tidak ramah lingkungan, seperti penambangan tanpa izin dan pembakaran lahan yang memperburuk kondisi ekosistem;
- 6) kurangnya sumber daya manusia yang peduli terhadap lingkungan, menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian alam; dan
- 7) terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah, termasuk minimnya armada pengangkutan dan kurangnya manajemen yang efisien dalam sistem pengelolaan sampah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti peningkatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih baik, serta kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kabupaten Sambas terus mengalami peningkatan dan diperkirakan mencapai 686.010 jiwa pada tahun 2029. Pertumbuhan ini menciptakan tantangan dalam pengelolaan kependudukan, terutama terkait dengan bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan

usia non-produktif. Jika tidak dikelola dengan baik, bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di masa depan.

Permasalahan utama dalam kependudukan di Kabupaten Sambas, diantaranya:

- 1) belum optimalnya pembaharuan data penduduk secara berkala;
- 2) adanya bonus demografi sehingga banyaknya penduduk usia produktif harus dioptimalkan agar tidak menjadi pengangguran di masa depan. Dengan rasio ketergantungan 48,26% pada tahun 2023, Kabupaten Sambas telah memasuki era bonus demografi. Bonus demografi hanya akan menguntungkan jika penduduk usia produktif memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi, seperti pendidikan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang baik. Jika tidak, bonus demografi bisa menjadi bencana demografi, di mana banyak usia produktif tidak memiliki pekerjaan dan hanya menjadi beban ekonomi;
- 3) meningkatnya jumlah lansia. Kesadaran pola hidup sehat dan peningkatan layanan kesehatan menyebabkan pertumbuhan jumlah lansia. Lansia berpotensi menjadi beban pembangunan jika tidak memiliki keterampilan atau dukungan ekonomi. Kurangnya fasilitas untuk lansia, seperti panti jompo atau program pemberdayaan lansia.
- 4) pertumbuhan dan persebaran penduduk yang tidak merata. Perubahan parameter kependudukan (kelahiran lebih tinggi dari kematian dan migrasi masuk lebih besar dari migrasi keluar) memicu peningkatan jumlah penduduk. Penduduk cenderung terkonsentrasi di daerah maju, meninggalkan ketimpangan dalam pembangunan antar wilayah. Kepadatan penduduk meningkat dan berisiko menyebabkan masalah lingkungan seperti sampah, polusi udara, dan pencemaran air. Kecamatan-kecamatan di daerah perkotaan dan pesisir lebih padat dibandingkan dengan daerah perbatasan dan pedalaman. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pemerataan pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur di daerah dengan kepadatan rendah dan pengelolaan tata ruang yang lebih baik di daerah yang padat penduduk.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi kependudukan yang komprehensif, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pembangunan wilayah, penguatan layanan sosial bagi lansia, serta optimalisasi program KB guna menekan angka kelahiran yang tidak terencana.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan Daerah terkait pemberdayaan masyarakat dan desa diantaranya:

- 1) kebakaran hutan dan lahan terjadi di 24 (dua puluh empat) desa sehingga dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat desa terkait kesadaran lingkungan hidup;
- 2) hanya 46 (empat puluh enam) desa yang memiliki tempat penampungan sampah sementara (TPS) sehingga dibutuhkan program penambahan TPS yang lebih merata;
- 3) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) desa membuang sampah ke sungai, saluran irigasi, danau/laut sehingga dibutuhkan program pemberdayaan masyarakat desa terkait kesadaran lingkungan hidup; dan
- 4) masih kurangnya infrastruktur digital di pedesaan.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diantaranya:

- 1) angka pernikahan anak sepanjang tahun 2024 mencapai 111 (seratus sebelas) kasus yang tergolong masih tinggi dan diduga disebabkan oleh pergaulan bebas;
- 2) *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 di Kabupaten Sambas (2,5) adalah yang tertinggi di Kalimantan Barat sehingga perlu penguatan program KB;
- 3) Tahun 2023, peserta KB baru mencapai 20,62% dari target; dan
- 4) *Unmet need* (kebutuhan alat kontrasepsi yang belum terpenuhi) juga masih tinggi, menyebabkan rendahnya capaian akseptor KB baru.

i. Perhubungan

Permasalahan Daerah terkait perhubungan diantaranya:

- 1) keterbatasan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan.

Keterbatasan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan pembangunan di Indonesia. Di daerah seperti Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, kondisi jalan yang rusak, jembatan yang tidak layak pakai, serta minimnya konektivitas antar wilayah menghambat mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi lokal. Hal ini semakin memprihatinkan mengingat wilayah perbatasan memiliki posisi strategis baik dari segi pertahanan maupun potensi ekonomi lintas negara.

Dampak dari buruknya infrastruktur tersebut sangat nyata dirasakan oleh masyarakat. Distribusi logistik menjadi lambat dan mahal, karena kendaraan pengangkut barang kesulitan mencapai daerah terpencil. Biaya transportasi meningkat tajam, yang akhirnya mempengaruhi harga barang kebutuhan pokok dan komoditas lokal. Selain itu, akses masyarakat terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan juga terhambat, memperlebar kesenjangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan/perbatasan.

Pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penting dalam penanganan masalah ini, khususnya dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten serta jembatan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kewenangan pembangunan jalan kabupaten adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten. Artinya, pemda setempat harus menyusun rencana pembangunan infrastruktur yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memperjuangkan alokasi anggaran yang proporsional melalui APBD maupun dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang infrastruktur.

Namun, kewenangan tersebut kerap terbentur oleh keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis pemerintah daerah. Wilayah-wilayah terpencil dengan jumlah penduduk yang rendah sering kali tidak mendapatkan prioritas, karena dianggap tidak memberikan dampak ekonomi langsung yang besar. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, termasuk kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam bentuk skema pembangunan berbasis komunitas atau public-private partnership (PPP).

Perbaikan infrastruktur transportasi darat di wilayah perbatasan dan pedesaan bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut keadilan sosial dan kedaulatan negara. Pemerintah kabupaten harus mampu mengoptimalkan kewenangannya dengan kebijakan yang responsif dan inklusif, memperjuangkan dukungan lintas sektor dan memprioritaskan wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal. Tanpa itu, kesenjangan antarwilayah akan terus melebar dan potensi strategis wilayah perbatasan tak akan tergarap optimal.

2) Kurangnya Angkutan Umum yang Terintegrasi

Salah satu tantangan utama dalam sistem transportasi lokal adalah belum adanya sistem angkutan umum yang terintegrasi dan memadai, khususnya di wilayah kabupaten. Kondisi ini terlihat jelas di banyak daerah di mana pusat kota tidak terhubung secara efisien dengan kecamatan-kecamatan terpencil. Tidak tersedianya layanan seperti bus antar kecamatan atau transportasi berbasis digital menyebabkan keterisolasian wilayah, yang seharusnya bisa diatasi dengan kebijakan transportasi yang inklusif dan modern.

Ketiadaan angkutan umum terpadu ini berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Warga di kecamatan atau desa terpencil terpaksa mengandalkan kendaraan pribadi atau ojek lokal yang biayanya relatif mahal dan tidak selalu tersedia secara konsisten. Ketergantungan pada moda transportasi informal ini mengurangi mobilitas kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan memperparah ketimpangan sosial antarwilayah dalam satu kabupaten.

Dari sisi pusat kota, ketidakterpaduan transportasi memperburuk kemacetan. Karena tidak ada alternatif transportasi massal yang nyaman dan terjangkau, penduduk yang masuk ke kota menggunakan kendaraan pribadi. Ini menambah beban lalu lintas, meningkatkan polusi udara, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat kota. Dalam jangka panjang, situasi ini tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga membebani infrastruktur jalan kota yang semakin padat.

Secara regulasi, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan penuh untuk merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan angkutan umum dalam wilayahnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, solusi terhadap persoalan ini sebenarnya berada dalam kendali pemerintah daerah, yang dapat merancang sistem angkutan umum antar kecamatan berbasis kebutuhan lokal, seperti bus rute tetap, angkutan feeder, atau kerja sama dengan platform digital transportasi.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini seringkali terkendala oleh keterbatasan fiskal, kurangnya data transportasi, serta minimnya minat swasta untuk berinvestasi di sektor transportasi pedesaan. Oleh karena itu, pendekatan yang dapat diambil termasuk subsidi operasional untuk rute tidak komersial, kolaborasi dengan pelaku usaha mikro seperti koperasi angkutan desa, serta digitalisasi layanan agar lebih transparan dan terpantau. Penyusunan rencana transportasi terpadu berbasis wilayah (integrated transport master plan) juga penting agar semua kecamatan masuk dalam perencanaan jaringan.

Absennya sistem angkutan umum yang terintegrasi memperlebar kesenjangan antarwilayah dan menurunkan efisiensi mobilitas masyarakat. Pemerintah kabupaten perlu mengambil peran proaktif untuk membangun sistem transportasi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan demi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya.

3) Masalah Parkir dan Kemacetan di Pusat Kota Sambas

Permasalahan kemacetan dan parkir di pusat kota seperti Sambas, Tebas dan Pemangkat merupakan isu yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Ketidaktertiban dalam tata kelola parkir, seperti parkir di badan jalan secara sembarangan, serta minimnya fasilitas parkir umum, telah menyebabkan penyempitan ruang lalu lintas dan menurunnya kenyamanan pengguna jalan. Masalah ini menandakan perlunya sistem pengelolaan ruang kota yang lebih tertib dan modern. Kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh buruknya manajemen parkir tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak langsung terhadap efektivitas aktivitas ekonomi. Waktu tempuh yang lebih lama, keterlambatan distribusi barang, serta berkurangnya akses konsumen ke pusat-pusat perbelanjaan adalah beberapa efek nyata. Selain itu, kendaraan yang berhenti sembarangan mengganggu visibilitas dan keselamatan pengemudi lain, meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam menangani persoalan ini karena pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten dan tata kelola parkir merupakan wewenang Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Sambas dapat membuat kebijakan terkait zonasi parkir, menetapkan tarif parkir elektronik, serta menyediakan lahan parkir khusus baik di tepi jalan maupun dalam bentuk gedung parkir bertingkat untuk kawasan yang padat aktivitas. Namun, hingga saat ini penanganan masalah parkir di banyak daerah kabupaten masih bersifat reaktif dan minim inovasi. Belum banyak terlihat penggunaan sistem manajemen parkir berbasis teknologi, seperti parkir digital atau sensor parkir otomatis. Padahal, penerapan teknologi informasi dalam manajemen parkir dapat membantu mengurangi praktik parkir liar, mempercepat rotasi kendaraan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir.

Selain penambahan fasilitas parkir, penataan lalu lintas melalui rekayasa jalan juga perlu dipertimbangkan. Beberapa langkah seperti penerapan sistem satu arah, pembatasan kendaraan besar masuk ke pusat kota pada jam sibuk, serta pembangunan jalur pedestrian yang nyaman bisa menjadi solusi jangka menengah. Kolaborasi lintas sektor antara dinas perhubungan, kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga diterima publik.

Secara keseluruhan, persoalan parkir dan kemacetan di pusat kota Sambas, Tebas dan Pemangkat mencerminkan kebutuhan mendesak akan tata kelola transportasi perkotaan yang modern dan terintegrasi. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan kewenangannya dalam manajemen lalu lintas dengan pendekatan berbasis data, teknologi, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan kota yang lebih tertib, nyaman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

4) Konektivitas Transportasi Laut yang Lemah

Konektivitas transportasi laut merupakan salah satu kunci strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah berbasis kelautan dan perdagangan lintas wilayah. Kabupaten Sambas, khususnya Kecamatan Paloh yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan memiliki pelabuhan penyeberangan serta pelabuhan perikanan, sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi simpul konektivitas regional. Namun, hingga kini potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena lemahnya infrastruktur dan belum adanya sistem transportasi laut yang efisien dan terorganisir.

Pelabuhan perikanan dan pelabuhan penyeberangan yang ada masih menghadapi berbagai kendala seperti fasilitas dermaga yang minim, tidak adanya jadwal penyeberangan tetap, dan keterbatasan sarana pendukung seperti gudang pendingin, sistem logistik pelabuhan, serta akses jalan darat yang buruk ke pelabuhan. Akibatnya, arus barang dan mobilitas antarpulau, termasuk potensi kerja sama ekonomi dengan negara tetangga seperti Malaysia, belum berkembang signifikan.

Dampak dari kondisi ini sangat terasa terhadap perekonomian lokal. Sektor kelautan yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan masyarakat pesisir belum mampu berkembang maksimal karena keterbatasan sarana distribusi hasil tangkapan. Nelayan kesulitan menjual hasil laut ke luar daerah atau ekspor karena rantai pasok yang tidak efisien dan biaya logistik yang tinggi. Selain itu, lemahnya pelabuhan penyeberangan menghambat pergerakan orang dan barang yang seharusnya bisa mendorong kegiatan perdagangan dan jasa.

Padahal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan membangun pelabuhan skala kecil dan mengelola dermaga perikanan. Dengan wewenang tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas seharusnya dapat menyusun rencana pembangunan pelabuhan lokal secara bertahap, mulai dari perbaikan fisik dermaga, penyediaan sarana pendukung seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) modern, hingga penyusunan sistem penjadwalan transportasi laut antarpulau.

Selain pembangunan fisik, penting pula dilakukan integrasi antara transportasi laut dan darat, agar hasil tangkapan laut dan barang dari pelabuhan bisa segera didistribusikan ke pasar lokal maupun regional. Pendekatan ini harus berbasis pada potensi komoditas unggulan daerah, seperti ikan, hasil tangkapan laut lainnya, serta barang dagangan lintas batas yang memiliki nilai tambah tinggi. Dengan begitu, pelabuhan tak hanya menjadi tempat sandar kapal, tapi juga pusat ekonomi masyarakat pesisir.

Untuk mendorong efektivitas pembangunan sektor ini, Pemerintah Kabupaten Sambas dapat menjalin kerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perhubungan, khususnya untuk mendapatkan dukungan teknis dan pendanaan. Pelibatan swasta dan koperasi nelayan juga penting agar pengelolaan dermaga lebih berorientasi pada kebutuhan pasar. Di samping itu, pendekatan berbasis digitalisasi dan sistem informasi logistik laut akan mempercepat transformasi sektor ini ke arah yang lebih modern dan efisien.

Lemahnya konektivitas transportasi laut di Kabupaten Sambas mencerminkan perlunya perencanaan strategis yang lebih serius dari pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten memiliki peran kunci dalam mengoptimalkan pelabuhan lokal sebagai pendorong utama ekonomi kelautan dan perdagangan lintas pulau maupun lintas negara. Dengan pengelolaan yang tepat, wilayah pesisir seperti Paloh bisa bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang inklusif dan berkelanjutan

5) Kurangnya Pengawasan dan Penertiban Alat Angkut Tidak Bermotor

Alat angkut tidak bermotor seperti gerobak dorong, dan kendaraan tradisional lainnya masih menjadi bagian penting dari sistem transportasi lokal, terutama di kawasan perkotaan dan pasar tradisional. Di satu sisi, alat transportasi ini menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga, namun di sisi lain, operasionalnya yang tidak diatur secara baik dapat menimbulkan berbagai masalah lalu lintas. Ketidakteraturan ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan terarah dari Pemerintah Daerah.

Isu utama yang muncul adalah absennya regulasi yang jelas mengenai zona operasional, jumlah kendaraan yang diizinkan, serta standar keselamatan dari alat angkut tidak bermotor tersebut. Banyak di antaranya beroperasi di jalan utama yang semestinya diperuntukkan bagi kendaraan bermotor, sehingga memperbesar risiko kecelakaan lalu lintas, khususnya pada jam-jam sibuk. Beberapa alat angkut bahkan digunakan untuk membawa muatan berlebih, yang memperlambat arus kendaraan dan menimbulkan hambatan di titik-titik padat.

Dampak lain dari ketidakteraturan ini adalah terganggunya kelancaran lalu lintas dan meningkatnya kepadatan di beberapa ruas jalan strategis. Alat angkut tidak bermotor yang berjalan lambat seringkali memicu antrean kendaraan di belakangnya, terutama di kawasan pasar, terminal, dan sekolah. Hal ini bukan hanya merugikan pengguna jalan lain dari sisi waktu, tapi juga menurunkan efisiensi distribusi barang dan jasa di wilayah perkotaan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan dalam pengaturan lalu lintas lokal, memiliki tanggung jawab langsung untuk menertibkan penggunaan alat angkut tidak bermotor. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta aturan turunan di tingkat daerah, pemerintah memiliki kewenangan menetapkan rute, area operasional, serta regulasi teknis bagi alat angkut tersebut. Namun, dalam praktiknya, penegakan aturan ini masih sangat lemah atau bahkan belum diterapkan secara konsisten.

Penertiban bukan berarti pelarangan total, melainkan pengaturan yang memastikan bahwa alat angkut tradisional tetap dapat beroperasi dengan aman, tertib, dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Pemerintah Daerah bisa melakukan pendekatan berbasis zonasi, misalnya dengan menetapkan area-area tertentu sebagai zona khusus bagi gerobak. Di zona tersebut, alat angkut bisa berfungsi optimal tanpa membahayakan pengguna jalan lain. Penerapan ini perlu disertai dengan edukasi kepada pelaku transportasi tradisional agar mereka memahami batasan dan tanggung jawab mereka.

Upaya penertiban juga harus dibarengi dengan penyediaan infrastruktur pendukung, seperti jalur lambat khusus, area parkir gerobak, atau tempat bongkar muat gerobak di pasar. Tanpa infrastruktur ini, kebijakan hanya akan menekan pelaku ekonomi kecil tanpa memberikan solusi. Oleh karena itu, penataan ini harus bersifat inklusif, mempertimbangkan aspek sosial, dan tidak merugikan mata pencaharian masyarakat kecil.

Selain regulasi dan infrastruktur, pengawasan rutin dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Daerah dapat melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian dalam patroli gabungan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Penertiban yang konsisten akan menciptakan efek jera bagi pelanggar, sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku transportasi lain.

Keberadaan alat angkut tidak bermotor harus dikelola dengan baik, bukan diabaikan. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan alat transportasi tradisional tetap menjadi bagian dari sistem mobilitas masyarakat secara tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum. Dengan regulasi yang adil, infrastruktur pendukung, dan pengawasan yang konsisten, alat angkut tradisional bisa bertransformasi menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah.

6) Permasalahan transportasi

Salah satu tantangan utama di Kabupaten Sambas adalah belum berkembangnya sistem angkutan umum terpadu yang menghubungkan pusat kota dengan kecamatan-kecamatan terpencil. Masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi dan ojek sebagai moda utama transportasi. Hal ini tidak hanya meningkatkan biaya perjalanan, tetapi juga memperburuk kemacetan di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Sambas dan Pemangkat. Pengembangan angkutan umum berbasis trayek tetap dan terjadwal, baik melalui minibus, bus kecil, maupun transportasi digital, menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mobilitas masyarakat.

Upaya pengembangan angkutan umum harus dibarengi dengan perencanaan sistem transportasi terpadu antar moda, termasuk integrasi antara darat dan laut. Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Induk Transportasi Daerah (RITD) untuk mengidentifikasi kebutuhan jaringan rute, titik transit, serta skema pembiayaan yang melibatkan kerjasama dengan sektor swasta dan koperasi lokal. Penyediaan subsidi operasional untuk trayek tidak komersial juga perlu dipertimbangkan sebagai insentif agar layanan bisa menjangkau wilayah-wilayah minim akses.

Selain sistem transportasi umum, kondisi infrastruktur jalan di wilayah terpencil di Kabupaten Sambas juga masih menjadi hambatan serius. Beberapa kecamatan seperti Paloh, Sajingan Besar, dan Subah masih memiliki akses jalan yang rusak atau belum diaspal, terutama pada jalur penghubung antar desa. Akses yang buruk menyebabkan

biaya logistik meningkat, memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal, dan menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan atas jalan kabupaten memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara jalan-jalan strategis tersebut. Pendanaan bisa diperoleh melalui kombinasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta program padat karya infrastruktur. Prioritas harus diberikan kepada jalur yang menghubungkan sentra produksi, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelabuhan, agar memiliki dampak luas terhadap pembangunan sosial ekonomi. Berikut ini disajikan Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas

Tabel 2.75

Kompilasi Data Angkutan Pedesaan Kabupaten Sambas

No.	Nama Perusahaan	Alamat	Tahun	Jaringan Trayek
1	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sambas - Aruk PP
2	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sambas - Aruk PP
3	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sambas - Aruk PP
4	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Pemangkat Penjajap (PP) -
5	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Pemangkat Penjajap (PP) -
6	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Pemangkat Penjajap (PP) -
7	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Pemangkat Penjajap (PP) -
8	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Satai - Sambas PP
9	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Satai - Sambas PP
11	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Satai - Sambas PP
12	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Jawai – Aruk
13	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Jawai – Aruk

14	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Jawai – Aruk
15	PT. SURYA TIMUR TRANSPORT	Sambas	2023	Simpang Empat - Aruk (PP)
16	PT. SURYA TIMUR TRANSPORT	Sambas	2023	Simpang Empat - Aruk (PP)
17	PT. SURYA TIMUR TRANSPORT	Sambas	2023	Simpang Empat - Aruk (PP)
18	KOPERASI BINA SEJAHTERA	Sambas	2023	Simpang Empat - Aruk
19	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sambas - SPB PP
20	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Singkawang	2023	Sambas - SPB PP
21	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Matang Suri - Aruk (PP)
22	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Matang Suri - Aruk (PP)
23	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Sentebang - Aruk
24	PT. TAMARA MAS TRANSPORT	Sambas	2023	Sentebang - Aruk (PP)
25	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Sambas - Temajuk
26	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Sambas - Temajuk PP
27	PT. BAYU DEWI BERKAH	Sambas	2023	Pemangkat - Tebas (PP)
28	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Sambas	2023	Pemangkat - Tebas (PP)
29	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Singkawang	2023	Pemangkat - Tebas (PP)
30	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Singkawang	2023	Kartiasa - Tanjung Harapan (PP)
31	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Singkawang	2023	Kartiasa - Tanjung Harapan (PP)
32	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Subah – Sui. Kajang – Sambas. PP

33	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sambas - Subah PP
34	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sejangkung Sambas PP -
35	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Sepandak - Sambas PP
36	KOPERASI TRANS JAYA	Sambas	2023	Keraban - Sambas PP
37	PT. ARIS MANDIRI BERSAUDARA	Singkawang	2023	Pemangkat Sempalai PP -
38	PT. BAYU DEWI BERKAH	Sambas	2023	Pemangkat Sambas (PP) -
39	PT. AIR SAMBAS PRATAMA	Sambas	2023	Sambas - Aruk
40	PERUM DAMRI	Sambas	2023	Sambas - Aruk (PP)

Sumber : Open Data tahun 2024

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Sambas telah memiliki sejumlah operator angkutan umum, baik dari koperasi maupun perusahaan swasta seperti Koperasi Trans Jaya, PT. Air Sambas Pratama, dan PERUM DAMRI, yang mengoperasikan berbagai trayek utama seperti Sambas-Aruk, Pemangkat-Penjajap, dan Sambas-Temajuk. Namun, terlihat bahwa beberapa trayek didominasi oleh operator yang sama secara berulang, menunjukkan konsentrasi layanan pada rute tertentu sementara wilayah lain mungkin belum terjangkau secara optimal. Kesimpulannya, meskipun jaringan trayek sudah mulai terbentuk, distribusi layanan masih belum merata dan diperlukan evaluasi serta ekspansi rute ke wilayah dengan akses terbatas agar sistem angkutan umum menjadi lebih inklusif dan efisien.

Di sisi lain, potensi besar sektor kelautan di Kabupaten Sambas belum dimanfaatkan maksimal akibat lemahnya pengelolaan pelabuhan perikanan. Kawasan pesisir seperti Kecamatan Paloh memiliki pelabuhan dan dermaga yang bisa mendukung aktivitas perikanan tangkap dan perdagangan lintas pulau, termasuk dengan negara tetangga Malaysia. Namun, keterbatasan fasilitas seperti dermaga,

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), *cold storage*, dan akses logistik menjadikan hasil laut sulit dikembangkan secara bernilai tambah.

Optimalisasi pelabuhan perikanan dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi pelabuhan sebagai pusat distribusi dan pengolahan hasil laut. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dapat membangun pelabuhan skala kecil yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan pasar. Dukungan infrastruktur digital untuk sistem pencatatan dan pelelangan hasil perikanan juga dapat mempercepat modernisasi sektor ini. Jika dilakukan dengan tepat, pelabuhan perikanan dapat menjadi motor ekonomi baru, khususnya bagi masyarakat pesisir.

j. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan Daerah terkait komunikasi dan informatika diantaranya:

- 1) keterbatasan akses internet di kantor desa, banyak kantor kepala desa di Kabupaten Sambas yang belum memiliki fasilitas internet, sehingga menghambat akses informasi dan komunikasi. Kondisi ini berdampak pada efisiensi administrasi desa, pengambilan keputusan, serta respons terhadap situasi darurat. Selain itu, keterbatasan akses internet juga menghambat pembangunan dan inovasi desa, mengingat internet berperan penting dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kolaborasi dengan berbagai entitas;
- 2) kurangnya komitmen dan kesadaran OPD, masih rendahnya kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik dan diseminasi informasi pembangunan daerah;
- 3) kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah, sumber daya manusia aparatur di bidang komunikasi dan informatika masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun kompetensi;
- 4) sarana dan prasarana komunikasi yang belum memadai, infrastruktur komunikasi dan informatika masih terbatas, terutama di daerah perbatasan dan pedalaman. Kondisi ini berdampak pada

keterlambatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kunci kemajuan desa. Internet yang stabil dan merata sangat diperlukan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, inovasi ekonomi, serta kerja sama dengan pihak lain; dan

- 5) Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar OPD. Masih rendahnya koordinasi dalam pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar-OPD, sehingga sistem komunikasi dan informasi belum berjalan secara optimal.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan Daerah terkait Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diantaranya:

- 1) pada tahun 2023 Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya;
- 2) volume usaha koperasi primer Kabupaten Sambas tahun 2024 (Rp202.505.329) masih jauh di bawah beberapa Kabupaten lainnya di Kalimantan Barat seperti Landak, Sanggau, Ketapang, Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, dan Kota Pontianak;
- 3) koperasi belum menjadi motor penggerak ekonomi lokal;
- 4) minimnya koperasi yang dikelola secara profesional;
- 5) keterbatasan akses permodalan dan teknologi;
- 6) sebagian besar UMKM belum tersertifikasi halal;
- 7) kurangnya kapasitas manajerial pelaku UMKM; dan
- 8) UMKM belum banyak memanfaatkan e commerce dan pemasaran digital.

1. Penanaman Modal

Permasalahan Daerah terkait Penanaman Modal diantaranya:

- 1) pada tahun 2023 Kabupaten Sambas memiliki tingkat investasi yang cukup baik dalam industri mikro dan kecil, namun masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Ketapang, Pontianak, Singkawang, Sintang, dan Kubu Raya;

- 2) realisasi investasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 sebesar 15.808,52 (US\$ Ribu) masih berada di bawah beberapa Kabupaten lain seperti Ketapang, Mempawah, Sanggau, Sintang, dan Sekadau;
- 3) sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan;
- 4) minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern;
- 5) sektor jasa belum berkembang pesat dibandingkan pertanian dan perdagangan; dan
- 6) minimnya pusat bisnis dan perdagangan modern.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan Daerah terkait Kepemudaan dan Olahraga diantaranya:

- 1) optimalisasi potensi pemuda dalam pembangunan daerah melalui berbagai program kepemudaan;
- 2) optimalisasi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri;
- 3) peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan; dan
- 4) peningkatan prestasi olahraga, dimana pada tahun 2024 kabupaten sambas mendapatkan 11 prestasi.

n. Statistik

Permasalahan Daerah terkait Statistik diantaranya penyediaan data statistik daerah yang berkualitas menjadi penting untuk perencanaan daerah dan pengambilan kebijakan.

o. Persandian

Permasalahan Daerah terkait persandian memegang peranan yang cukup penting, terutama dikaitkan dengan bagaimana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap, karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah yang bersih dan terbuka.

p. Kebudayaan

Permasalahan Daerah terkait kebudayaan diantaranya:

- 1) kurangnya pelestarian, pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan khasanah seni dan budaya daerah Kabupaten Sambas;
- 2) masih adanya pemahaman toleransi yang berbeda antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan di daerah;
- 3) belum optimalnya pelestarian nilai budaya, adat, dan seni, yang seharusnya menjadi bagian dari identitas dan daya tarik daerah; dan
- 4) kurangnya pengelolaan budaya sebagai aset strategis, yang dapat menarik perhatian wisatawan dan investor dari luar daerah maupun dunia internasional.

q. Perpustakaan dan Kearsipan

Permasalahan Daerah terkait perpustakaan dan kearsipan diantaranya:

- 1) rendahnya minat baca masyarakat Kabupaten Sambas (1/1000);
- 2) volume dokumen yang besar dengan tempat penyimpanan fisik yang terbatas;
- 3) jumlah perpustakaan yang masih minim; dan
- 4) pengelolaan perpustakaan yang masih perlu dioptimalkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Restu Hardiyansah (2023), tentang penataan arsip dinamis aktif di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas, beberapa permasalahan utama yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan arsip yang belum optimal. Penataan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas masih menghadapi kendala dalam penerapan tata cara pemberkasan yang sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 50 Tahun 2019. Arsip belum sepenuhnya diklasifikasikan dengan baik, dan proses pemberkasan seringkali tidak mengikuti pola yang jelas, mengakibatkan kesulitan dalam menemukan arsip yang dibutuhkan.

- 2) Keterbatasan keahlian sumber daya manusia. Salah satu hambatan signifikan adalah kurangnya keahlian yang memadai di kalangan petugas arsip. Beberapa petugas tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kearsipan dengan baik, serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip dalam administrasi pemerintahan. Hal ini mengarah pada penataan arsip yang tidak efektif dan efisien.
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Infrastruktur untuk pengelolaan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sambas belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Meskipun sarana dan prasarana di Dinas sudah cukup memadai, kondisi di beberapa OPD lain masih kurang, yang mempengaruhi kelancaran penataan arsip di seluruh daerah.
- 4) Rendahnya kesadaran tentang pentingnya penataan arsip di OPD Lain. Banyak OPD lain di Kabupaten Sambas yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya penataan arsip yang baik. Hal ini menyebabkan penataan arsip yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghambat pencarian arsip yang dibutuhkan, serta memperlambat administrasi pemerintahan.
- 5) Koordinasi yang kurang efektif antar instansi. Terjadi kekurangan koordinasi antar instansi, yang berujung pada proses akuisisi arsip yang terhambat. Beberapa OPD tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan arsip, yang menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas penataan arsip di seluruh instansi pemerintah.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini meliputi peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta melakukan koordinasi yang lebih baik antar OPD untuk memastikan penataan arsip berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.6.9.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sambas menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi produksi perikanan secara keseluruhan. Produksi perikanan di wilayah ini berasal dari dua sumber utama, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Namun, dinamika produksi perikanan masih mengalami kendala yang perlu segera diatasi. Beberapa permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan meliputi:

- 1) keberlanjutan sumber daya laut: Produksi perikanan laut mengalami penurunan signifikan dari 2020 (Rp 197.980.540.000) hingga 2022 (Rp38.358.875.000). Meskipun ada sedikit pemulihan pada tahun 2023 (Rp50.741.380.000) dan 2024 (60.594.870.000), fluktuasi ini menandakan adanya tantangan dalam pengelolaan perikanan laut yang perlu ditangani;
- 2) belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya;
- 3) belum optimalnya penguasaan teknologi pembenihan dan pembesaran beberapa komoditas ikan;
- 4) kurangnya pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang inovatif, produktif, lestari, dan berkelanjutan;
- 5) keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan sektor perikanan;
- 6) terjadinya abrasi di sepanjang garis pantai daerah tambak, rendahnya sarana produksi, produktivitas usaha budidaya yang masih rendah, belum terintegrasinya pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, serta lemahnya kelembagaan kelompok perikanan;
- 7) belum mantapnya tata ruang lahan untuk perikanan budidaya;
- 8) belum optimalnya dukungan lembaga keuangan bagi usaha perikanan budidaya;
- 9) kurangnya tenaga penyuluh perikanan dan belum optimalnya mekanisme penyuluhan;

- 10) terbatasnya jumlah penangkar ikan budidaya serta ketersediaan benih ikan unggul bagi pembudidaya ikan;
- 11) belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan produk;
- 12) kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan serta belum berkembangnya teknologi pengolahan dan pengawetan ikan;
- 13) rendahnya keterjangkauan armada perikanan tangkap yang beroperasi di perairan lepas pantai;
- 14) belum optimalnya pertumbuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan;
- 15) kurangnya monitoring terhadap distribusi produk perikanan dan sistem pemasarannya; dan
- 16) kesulitan akses BBM bagi nelayan.

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu segera diatasi melalui peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi perikanan yang lebih baik, serta dukungan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sambas.

b. Pariwisata

Permasalahan Daerah terkait pariwisata diantaranya:

- 1) tingkat hunian kamar hotel di tahun 2024 hanya 17,45%, menunjukkan rendahnya jumlah wisatawan yang menginap di Kabupaten Sambas;
- 2) data tahun 2024 menyebutkan bahwa 99,65% dari wisatawan yang datang adalah wisatawan domestik, sedangkan wisatawan mancanegara hanya 0,35%. Rendahnya jumlah wisatawan asing mengindikasikan kurangnya daya tarik internasional serta promosi wisata yang kurang efektif di pasar global;
- 3) rendahnya jumlah kunjungan wisatawan;
- 4) minimnya promosi destinasi wisata unggulan;
- 5) Kabupaten Sambas memiliki 71 objek wisata yang terdiri dari wisata alam dan warisan budaya, tetapi pengelolaannya masih kurang profesional;

- 6) fasilitas pendukung seperti akses jalan ke lokasi wisata, penginapan, dan transportasi umum masih terbatas;
- 7) sebagian besar wisata yang ditawarkan adalah wisata alam dan budaya, namun minim pengembangan wisata modern seperti ekowisata, wisata petualangan, dan wisata berbasis digital; dan
- 8) Wisata minat khusus seperti museum dan perkampungan tenun masih belum menjadi daya tarik utama wisatawan.

c. Pertanian

Sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Sambas merupakan salah satu sektor strategis dalam menunjang perekonomian. Namun, untuk mengoptimalkan pembangunan sektor ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, di antaranya:

- 1) rendahnya nilai tambah produk pertanian;
- 2) fluktuasi harga komoditas pertanian;
- 3) penurunan produktivitas hasil pertanian;
- 4) pengelolaan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan rakyat masih berskala kecil serta dikelola secara tradisional sehingga efisiensi produksi dan produktivitasnya masih rendah;
- 5) industri pengolahan di bidang pertanian pangan dan hortikultura belum berkembang dengan baik;
- 6) sektor pertanian masih mengalami tantangan dalam hal proteksi dan produktivitas;
- 7) kualitas beras yang masih memiliki kadar air tinggi perlu peningkatan melalui industri pengolahan;
- 8) minimnya alat pengering (*dryer*) di lokasi penggilingan padi UMKM
- 9) kegiatan usahatani belum terintegrasi dengan sistem pemasaran tanaman pangan dan hortikultura;
- 10) peran dan fungsi kelembagaan tani belum optimal;
- 11) tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman, serta meningkatnya kejadian banjir, kekeringan, dan anomali iklim yang terus mengancam;

- 12) berkurangnya luas lahan tanam akibat alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain;
- 13) tingginya biaya produksi pertanian, termasuk upah kerja, benih, pupuk, dan pestisida, menjadi beban yang cukup berat bagi petani;
- 14) belum optimalnya sumber daya manusia terampil di sektor pertanian, ditambah dengan rendahnya minat generasi muda untuk bekerja di bidang ini, yang mengancam kelangsungan produksi pertanian; dan
- 15) ketersediaan benih atau bibit unggul bersertifikat, sarana produksi, fasilitas pengolahan hasil, serta alat dan mesin pertanian masih belum optimal.

Selain itu, sektor perkebunan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten Sambas. Beberapa komoditas utama yang dihasilkan antara lain kelapa sawit, karet, lada, kelapa dalam, dan kopi. Namun, pengembangan sektor perkebunan di Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai permasalahan, di antaranya:

- 1) rendahnya produktivitas perkebunan rakyat;
- 2) harga karet yang kurang stabil serta cenderung berada di bawah tingkat kelayakan usaha;
- 3) belum terjaminnya mutu, ketersediaan, dan akses terhadap benih tanaman perkebunan;
- 4) tingginya potensi serangan hama dan penyakit tanaman perkebunan;
- 5) pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan rakyat yang belum optimal;
- 6) kelembagaan petani perkebunan yang masih belum berkembang dengan baik;
- 7) kemitraan antara petani, lembaga pemasaran, dan industri yang belum optimal; dan
- 8) ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pembangunan perkebunan yang masih terbatas.

Sektor peternakan memiliki peran signifikan dalam menopang kehidupan di Kabupaten Sambas. Populasi hewan ternak di wilayah ini mencerminkan pentingnya sektor ini dalam menyediakan sumber pangan dan bahan baku yang vital. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, terjadi

perubahan dominasi populasi unggas, yang menimbulkan berbagai tantangan dalam manajemen dan pengembangan sub-sektor peternakan. Beberapa permasalahan utama di bidang peternakan meliputi:

- 1) rendahnya produktivitas peternakan. Produktivitas yang masih rendah menjadi tantangan dalam meningkatkan produksi dan efisiensi pemeliharaan hewan ternak. Hal ini dapat menghambat pengembangan sektor peternakan dan ketahanan pangan;
- 2) minimnya sarana dan prasarana peternakan. Keterbatasan infrastruktur seperti tempat penyimpanan pakan, fasilitas kesehatan hewan, serta akses pasar yang memadai menjadi kendala dalam pertumbuhan sektor peternakan. Sarana ini sangat penting untuk menjaga kesejahteraan hewan ternak dan mendukung peningkatan produksi; dan
- 3) rendahnya keterampilan dan pengetahuan peternak dalam penerapan inovasi teknologi. Teknologi dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas peternakan. Namun, kurangnya pemahaman serta minimnya pelatihan bagi peternak menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor ini.

d. Kehutanan

Kehutanan merupakan salah satu aset penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menyediakan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan manusia. Namun, berbagai permasalahan telah muncul di sektor kehutanan yang mengancam keberlanjutan hutan dan lingkungan di Kabupaten Sambas. Beberapa permasalahan utama dalam sektor kehutanan meliputi:

- 1) ancaman terhadap keberlanjutan hutan akibat tindakan ilegal, seperti *illegal logging* dan perambahan, yang merusak ekosistem hutan dan mengganggu keseimbangan alam;
- 2) kebakaran hutan dan lahan yang sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia, mengancam keberlanjutan hutan serta berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca;

- 3) kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem hutan, yang dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan hutan;
- 4) lemahnya penegakan hukum dalam sektor kehutanan, sehingga aturan dan regulasi terkait pengelolaan hutan belum diterapkan secara optimal; dan
- 5) tata kelola dan pengelolaan hutan yang masih lemah, mengakibatkan pemanfaatan hutan yang tidak berkelanjutan, termasuk penggundulan hutan yang berdampak negatif pada ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan kebijakan perlindungan hutan, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi tata kelola hutan, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal yang merusak ekosistem hutan.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan Daerah terkait energi dan sumber daya mineral diantaranya:

- 1) Kesulitan akses BBM bagi nelayan;
- 2) Adanya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI); dan
- 3) Masih adanya aktivitas tambang galian C secara ilegal.

f. Perdagangan

Perekonomian Kabupaten Sambas masih menghadapi berbagai persoalan transformasi struktural yang belum optimal. Struktur ekonomi daerah ini masih terkonsentrasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sebaliknya, kontribusi sektor industri pengolahan masih di bawah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor konstruksi. Selain persoalan struktural, dinamika perekonomian Kabupaten Sambas juga dihadapkan pada kondisi seperti terbatasnya penyebaran kegiatan ekonomi produktif dan relatif sulitnya akses permodalan usaha. Di samping itu, perekonomian daerah juga masih menghadapi tantangan dalam pengembangan produk unggulan, pengembangan ekonomi kreatif, serta usaha skala mikro, kecil, dan

menengah, yang disebabkan oleh rendahnya ekosistem inovatif. Lambannya peningkatan kegiatan penanaman modal dan investasi juga terjadi karena potensi daerah belum dipromosikan secara optimal, serta insentif bagi investor yang masih terbatas. Pengembangan industri pengolahan yang memanfaatkan hasil produksi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, serta pertambangan dan penggalian juga belum berkembang dengan baik. Selain itu, rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri disebabkan oleh masalah jaringan distribusi dan rantai pasok yang kurang mendukung. Berdasarkan kondisi umum yang dipaparkan, secara ringkas permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan perdagangan di Kabupaten Sambas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) belum optimalnya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh lambatnya transformasi struktur ekonomi dan belum maksimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah;
- 2) belum kuatnya basis ekonomi daerah untuk mempercepat dinamika perekonomian daerah;
- 3) keterbatasan akses transportasi ke sentra produksi dan pasar; dan
- 4) kurangnya infrastruktur pendukung seperti irigasi dan listrik.

g. Perindustrian

Permasalahan Daerah terkait perindustrian diantaranya:

- 1) terbatasnya sektor-sektor unggulan dalam menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi;
- 2) belum optimalnya peningkatan realisasi investasi pada beberapa sektor kegiatan;
- 3) lambannya hilirisasi industri berbasis pengolahan komoditas unggulan daerah, serta belum berkembangnya kegiatan perdagangan dalam lingkup usaha perdagangan skala menengah/besar; dan
- 4) belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk memperkuat kemitraan antara pelaku usaha menengah/besar dengan pelaku usaha kecil, termasuk koperasi dan UMKM.

h. Transmigrasi

Permasalahan Daerah terkait transmigrasi diantaranya:

- 1) belum optimalnya pemenuhan hak-hak transmigran oleh Pemerintah; dan
- 2) masih adanya tumpang tindih lahan di kawasan transmigrasi.

2.1.6.9.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

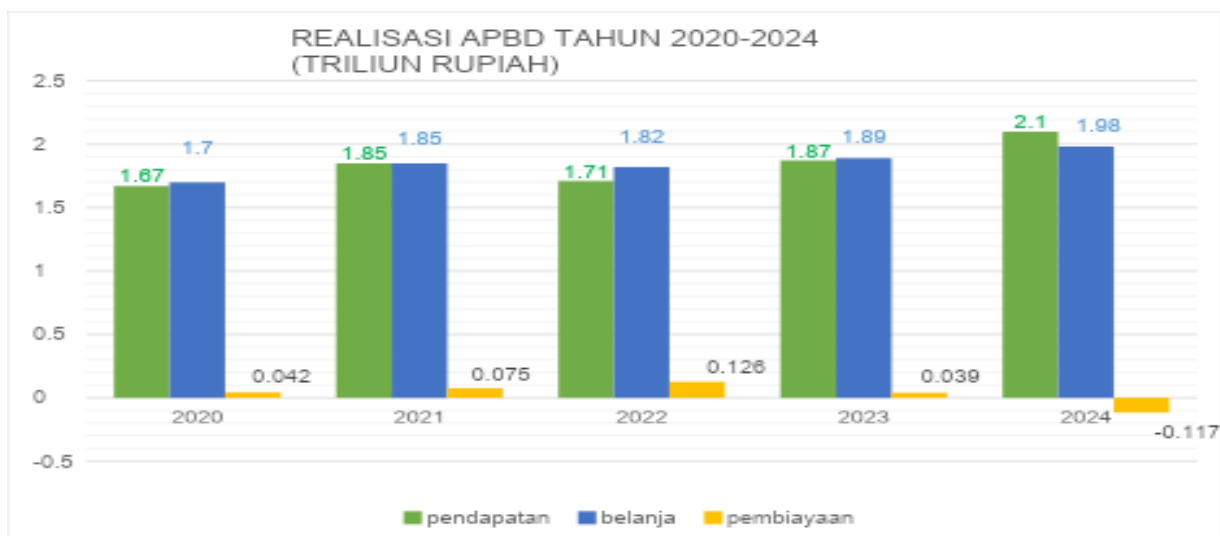
a. Perencanaan

Permasalahan Daerah terkait perencanaan diantaranya:

- 1) keterbatasan kemampuan keuangan Daerah; dan
- 2) keterbatasan data dan informasi faktual/lapangan dalam identifikasi permasalahan pembangunan.

b. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas baik dari sisi pendapatan dan belanja terus mengalami peningkatan, bahkan dari sisi belanja lebih besar dari pendapatan. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sambas harus dapat menggali sumber pembiayaan guna menutupi kekurangan pendapatan (defisit) baik dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya maupun melalui sumber pembiayaan lainnya.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab, Sambas Tahun 2020-2024 (diolah)

Gambar 2. 31.
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan Daerah terkait kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diantaranya Profesionalitas ASN yang kurang maksimal. Capaian penilaian profesionalitas ASN di Kabupaten Sambas masih kurang maksimal terlihat dari rendahnya kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas. Hal ini tercermin pada Indeks Profesionalitas ASN yang memperoleh predikat “Sangat Rendah” pada tahun 2021 dan 2022.

d. Pemerintahan Umum

Permasalahan utama dalam bidang politik di Kabupaten Sambas terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

- 1) rendahnya Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Sambas, baik pada Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 yakni 71,15% pada Pemilu 2019 dan 74,45% pada Pemilu 2024, yang jauh di bawah rata-rata nasional (81,69%).
- 2) Pencapaian Target Partisipasi yang Tidak Memadai: Meskipun ada peningkatan partisipasi pada Pilkada 2015 dan 2020 (dari 59,50% menjadi 66,85%), angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan KPU RI, yang sebesar 77,5%.

Beberapa aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, perlakuan yang sama, serta kebijaksanaan. Namun, terdapat beberapa permasalahan dalam bidang tata kelola pemerintahan yang perlu perhatian lebih, antara lain:

- 1) belum optimalnya peran organisasi kemasyarakatan dan LSM. Peran organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sambas masih belum optimal, padahal mereka dapat berperan penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap pembangunan;
- 2) akuntabilitas kinerja Aparatur yang belum optimal. Upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur dan

penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik masih belum optimal;

- 3) aspek pelayanan publik perlu dievaluasi. Beberapa aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik, seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme, Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, serta konsultasi dan pengaduan, perlu dievaluasi ulang. Hal ini penting agar kualitas pelayanan publik dapat meningkat dan Indeks Pelayanan Publik yang sebelumnya berpredikat “Baik” pada tahun 2022 dapat mencapai predikat “Sangat Baik” pada tahun-tahun mendatang; dan
- 4) kurangnya komitmen dalam manajemen kinerja pegawai. Kinerja Pemerintah Daerah, terutama terkait pelaksanaan akuntabilitas instansi dan organisasi perangkat daerah, masih belum maksimal. Belum ada komitmen yang utuh dalam manajemen kinerja pegawai, meskipun pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sambas memperoleh predikat “Baik” pada Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah;
- 5) Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum optimal. Pengelolaan domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE di Kabupaten Sambas masih belum maksimal, sehingga perlu adanya upaya perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan berbasis teknologi; dan
- 6) capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada setiap unit kerja instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik di Kabupaten Sambas masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan secara berkala agar masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun permasalahan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengemuka di Kabupaten Sambas saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) pembinaan, pengawasan, dan penegakan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah yang belum maksimal; dan
- 2) masih tingginya tingkat kriminalitas, termasuk peredaran dan penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras (miras),

penularan HIV/AIDS, kekerasan terhadap anak dan perempuan, pelecehan seksual terhadap anak, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, identifikasi masalah pokok, permasalahan, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut.

Tabel 2.76
Identifikasi Masalah Pokok, Permasalahan, dan Akar Masalah Pembangunan Kabupaten Sambas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Kualitas hidup masyarakat belum merata	1. Tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial 2. Masih tingginya angka stunting dan penyakit menular 3. Akses pendidikan dan kesehatan belum merata 4. Banyaknya kelompok rentan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup, seperti penyandang disabilitas dan warga lansia.	1. Terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah perbatasan dan pedalaman 2. Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan profesional 3. Masih rendahnya kesadaran PHBS dan gizi keluarga 4. Belum optimalnya kebijakan dan layanan sosial yang ditujukan kepada kelompok rentan. 5. Kurangnya fasilitas seperti panti sosial untuk lansia dan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). 6. Minimnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial. 7. Keterbatasan anggaran untuk Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM)	1. Tingginya angka pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah 2. ketidaksesuaian antara kualifikasi SDM dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Sambas.	1. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. 2. Terbatasnya pelatihan dan pendidikan vokasi untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri. 3. Kurangnya kesempatan kerja di sektor formal.
Pertumbuhan ekonomi belum berkelanjutan dan inklusif	1. Ketergantungan ekonomi pada sektor primer 2. UMKM belum menjadi penggerak utama ekonomi lokal 3. Belum optimalnya investasi dan daya saing produk daerah	1. Minimnya hilirisasi dan agroindustri berbasis potensi lokal 2. Akses pembiayaan, pelatihan, dan teknologi belum merata 3. Infrastruktur ekonomi belum mendukung kawasan produktif 4. Belum optimalnya iklim berusaha seperti penataan kelembagaan perizinan, layanan sertifikasi halal, sarana prasarana pendukung perizinan dan investasi 5. Pengembangan Pembangunan Perbatasan yang belum optimal
Ketimpangan infrastruktur antar wilayah	1. Konektivitas wilayah belum mendukung	1. Anggaran pembangunan terbatas

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pertumbuhan ekonomi 2. Rendahnya akses air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah tertentu	2. Kurangnya perencanaan lintas sektor 3. Letak geografis yang sulit dijangkau
Ketahanan lingkungan hidup rendah	1. Pengelolaan sampah dan limbah belum optimal 2. Laju alih fungsi lahan tidak terkendali	1. Minimnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan 2. Lemahnya penegakan regulasi lingkungan 3. Tidak optimalnya program pengendalian dan konservasi lingkungan
Ketahanan pangan yang belum optimal	1. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional 2. Penurunan produktivitas pertanian 3. ketidakberlanjutan produksi pangan yang mengancam ketahanan pangan daerah.	1. Minimnya teknologi pertanian yang diterapkan. 2. Keterbatasan dalam pengelolaan lahan pertanian, serta permasalahan iklim yang merusak hasil pertanian. 3. Kurangnya diversifikasi produk pangan dan minimnya akses ke pasar. 4. Rendahnya pemanfaatan pangan
Tata kelola pemerintahan belum efektif dan adaptif	1. SPBE belum berjalan optimal 2. Kualitas pelayanan publik belum konsisten	1. Kompetensi ASN masih rendah 2. Sistem informasi belum terintegrasi 3. Kurangnya budaya kerja berbasis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kinerja dan akuntabilitas
Kehidupan sosial belum harmonis dan inklusif	1. Masih adanya konflik sosial, intoleransi, dan tindak kekerasan dan kejahatan 2. Partisipasi masyarakat dalam demokrasi masih rendah	1. Lemahnya pendidikan nilai, religiusitas, dan kebhinekaan 2. Minimnya ruang dialog dan kerjasama sosial lintas kelompok
Tantangan dalam pengelolaan tata ruang wilayah	1. Kurangnya penataan ruang yang jelas dan efektif di beberapa daerah Kabupaten Sambas 2. tumpang tindih penggunaan lahan.	1. Minimnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah kecamatan. 2. Masih terdapat sengketa tapal batas antar desa. 3. Kurangnya koordinasi antar sektor terkait pengelolaan ruang dan sumber daya alam.
Ketahanan budaya dan identitas lokal menurun	1. Budaya lokal kurang diminati generasi muda 2. Minimnya fasilitas budaya dan promosi digital	1. Kegiatan pelestarian budaya belum menyentuh komunitas secara luas 2. Akses generasi muda terhadap warisan budaya masih rendah

2.1.6.10. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan. Isu ini memiliki karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan

pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di waktu mendatang. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun memiliki potensi untuk menjadi masalah di masa yang akan datang, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Oleh karena itu, identifikasi isu strategis memerlukan analisis yang mendalam terhadap tren dan dinamika yang berkembang, baik secara lokal, nasional, maupun global. Dengan memahami isu-isu ini sejak dini, perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan secara lebih proaktif, memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik dan pemanfaatan peluang yang dapat mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan daerah di masa depan.

Penentuan isu strategis daerah disusun dengan memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan yang ada, serta tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah ke depan. Salah satu aspek penting dalam penentuan isu strategis adalah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang memberikan gambaran tentang keberlanjutan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, isu-isu lingkungan yang bersifat dinamis, baik yang terjadi di tingkat global, nasional, maupun regional (provinsi), juga harus menjadi pertimbangan utama. Isu-isu ini meliputi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan dan regulasi yang berkembang di berbagai tingkatan pemerintahan. Dengan memperhatikan keseluruhan aspek ini, diharapkan isu strategis yang ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan nyata daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kajian atas permasalahan, potensi daerah, dan isu-isu dinamis global, nasional, dan regional, terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Sambas ke depan. Isu-isu ini melibatkan Kehidupan yang Demokratis dan Agamis, Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas Lingkungan Hidup, dan Peningkatan Ekonomi. Setiap isu ini memiliki

tantangan yang signifikan, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat menghambat laju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas.

Kehidupan yang demokratis dan agamis menjadi pondasi utama bagi terciptanya tatanan sosial yang damai, inklusif, dan berkeadilan. Kabupaten Sambas memiliki latar belakang historis dan kultural yang kuat sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, sebagaimana dikenal melalui identitas budaya lokal “Sambas sebagai Serambi Mekah”. Branding tersebut tidak hanya mencerminkan ketaatan religius masyarakat, tetapi juga menggambarkan nilai-nilai moral yang menjadi bagian dari karakter daerah.

Namun demikian, realitas menunjukkan masih terdapat ketimpangan dalam penerapan nilai demokrasi dan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses politik masih rendah, terutama di kalangan perempuan, pemuda, dan kelompok rentan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman terhadap hak-hak dasar warga negara dalam sistem demokrasi. Di sisi lain, meskipun aktivitas keagamaan cukup aktif, pemahaman terhadap nilai-nilai agama yang moderat, toleran, dan inklusif belum sepenuhnya melembaga. Terdapat indikasi munculnya segregasi sosial dan sikap eksklusif di sebagian kelompok masyarakat yang dapat mengancam keharmonisan antar umat beragama dan antar kelompok sosial.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, isu ini sejalan dengan Tujuan 16 SDGs, yaitu mendorong masyarakat yang damai, inklusif, dan memastikan akses terhadap keadilan serta institusi yang akuntabel di semua tingkatan. Kehidupan demokratis yang ditopang oleh literasi politik yang memadai dan kesadaran akan hak-hak sipil akan menciptakan iklim partisipatif dan kolaboratif dalam pembangunan. Begitu pula dengan penguatan nilai-nilai agama yang menekankan pada etika sosial dan persaudaraan lintas iman akan menjadi modal sosial dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial.

Oleh karena itu, isu ini perlu menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas ke depan. Diperlukan upaya

sistematis dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara melalui pendidikan politik dan sosial sejak dini. Penguatan pendidikan karakter, dialog antarumat beragama, serta revitalisasi fungsi lembaga adat dan keagamaan juga perlu dilakukan. Pemerintah daerah diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam menciptakan ruang-ruang publik yang mendorong interaksi sosial yang sehat, serta memfasilitasi kerjasama lintas kelompok sosial dan keagamaan dalam semangat toleransi dan kebhinekaan.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan isu strategis yang sangat mendesak untuk segera diatasi di Kabupaten Sambas. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,99%, sementara 51,17% penduduk bekerja di sektor informal. Tingginya proporsi pekerja informal mencerminkan belum optimalnya kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat dalam menghadapi dinamika pasar kerja modern. Rendahnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan berkualitas, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman, merupakan akar dari persoalan ini. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya tenaga pendidik profesional dan fasilitas pendidikan yang memadai. Sementara itu, rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan usia 15–24 tahun juga berkontribusi pada kurangnya literasi gizi dan kesehatan keluarga, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan rumah tangga dan kualitas hidup jangka panjang.

Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat juga menghadapi tantangan serius. Minimnya penerapan teknologi tepat guna, keterbatasan pengelolaan lahan, serta faktor iklim yang tidak menentu menyebabkan produktivitas pertanian belum optimal. Rendahnya diversifikasi pangan lokal dan terbatasnya akses petani ke pasar menurunkan nilai tambah produk pertanian dan menyebabkan pendapatan petani stagnan. Hal ini terkait erat dengan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer dan belum optimalnya peran UMKM serta BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal.

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pendekatan integratif yang menempatkan pembangunan SDM dan penguatan sistem pangan sebagai prioritas utama:

- a. revitalisasi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan, khususnya pendidikan vokasi berbasis potensi lokal seperti agrowisata, pertanian modern, dan kewirausahaan berbasis produk lokal;
- b. penguatan kapasitas petani melalui pelatihan teknologi pertanian tepat guna, penyediaan alat pertanian modern, dan kemudahan akses input produksi;
- c. program makan bergizi gratis di sekolah, khususnya di daerah dengan angka stunting tinggi, sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan mendukung partisipasi pendidikan anak-anak; dan
- d. pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan gizi, dan kewirausahaan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan.

Tata kelola pemerintahan yang belum optimal menjadi salah satu isu strategis utama yang perlu segera diatasi oleh Kabupaten Sambas dalam rangka mendukung percepatan pembangunan. Kinerja birokrasi yang lamban, tidak efisien, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat menghambat penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Ditambah masih lemahnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), belum terintegrasinya sistem informasi, serta masih minimnya budaya kerja berbasis kinerja.

Padahal, transformasi birokrasi menjadi kunci utama untuk mendukung implementasi berbagai program strategis, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025. Instruksi ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang hanya dapat diwujudkan jika sistem pemerintahan daerah berjalan dengan efisien, transparan, dan akuntabel.

Kelemahan dalam tata kelola juga berdampak langsung pada pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta berkontribusi pada ketimpangan wilayah dan rendahnya kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, reformasi birokrasi bukan hanya merupakan kebutuhan internal pemerintah daerah, tetapi juga syarat mutlak untuk memastikan keberhasilan agenda pembangunan jangka menengah.

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi penguatan tata kelola yang dapat diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Sambas antara lain:

- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, melalui pelatihan berkelanjutan, pengembangan manajemen talenta, dan sistem merit yang adil;
- b. digitalisasi dan integrasi sistem informasi pemerintahan, guna mempercepat proses pelayanan, memperkuat transparansi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data;
- c. penguatan budaya kerja berbasis kinerja dan akuntabilitas, termasuk melalui penerapan *reward and punishment* yang konsisten serta evaluasi kinerja yang objektif;
- d. pembentukan tim koordinasi lintas sektor, untuk memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional; dan
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik, melalui mekanisme pelayanan berbasis aspirasi, sistem pengaduan digital, serta forum konsultasi publik secara berkala.

Kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu isu strategis penting dalam pembangunan Kabupaten Sambas yang menuntut penanganan serius dan menyeluruh. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sambas tercatat sebesar 71,31, dengan target yang ditetapkan dalam RPJPD sebesar 76,65 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, Kabupaten Sambas menghadapi berbagai tantangan lingkungan, antara lain:

- a. kerusakan ekosistem akibat aktivitas ilegal seperti penambangan liar dan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- b. penurunan keanekaragaman hayati, khususnya di kawasan hutan lindung dan pesisir;
- c. minimnya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai; dan

- d. kurangnya sistem penegakan hukum lingkungan yang terintegrasi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Isu ini menjadi semakin mendesak mengingat Kabupaten Sambas juga memiliki target untuk menurunkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju *net zero emissions*, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD dan selaras dengan RPJMN 2025–2029. Penurunan emisi GRK ini menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya:

- **SDG 13:** *Mengambil tindakan cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya*
- **SDG 15:** *Melindungi, memulihkan, dan mendorong penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan*

RPJMN 2025–2029 juga menargetkan penurunan intensitas emisi GRK nasional menjadi 35,53 pada tahun 2025 dan 45,17 pada 2029, menandakan bahwa daerah harus turut andil dalam aksi mitigasi dan adaptasi iklim melalui pengurangan deforestasi, efisiensi energi dan peningkatan kapasitas karbon melalui rehabilitasi hutan dan mangrove. Dalam konteks ini, strategi pembangunan lingkungan di Kabupaten Sambas harus diarahkan pada:

- a. penguatan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pemantauan kualitas air, udara, dan pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- b. rehabilitasi lahan kritis dan kawasan konservasi, seperti Ekosistem Gunung Bentarang dan Tanjung Belimbing, untuk meningkatkan daya dukung lingkungan dan memperkuat penyerapan karbon;
- c. penerapan sistem pertanian dan perkebunan rendah emisi, dengan mendorong praktik ramah lingkungan, seperti agroforestri, pertanian organik dan pertanian regenerative;
- d. peningkatan kapasitas dan infrastruktur penanggulangan karhutla, termasuk penyediaan armada pemadam, sistem peringatan dini, dan pelatihan masyarakat siaga bencana lingkungan;
- e. penguatan regulasi dan penegakan hukum lingkungan, serta insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan prinsip pembangunan hijau (*green business*);

- f. pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, seperti pemanfaatan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di wilayah perbatasan dan pedalaman yang belum terjangkau jaringan listrik PLN; dan
- g. kampanye dan edukasi perubahan iklim serta gaya hidup berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, sebagai bagian dari literasi lingkungan.

Perekonomian Kabupaten Sambas hingga saat ini masih menghadapi tantangan mendasar berupa terbatasnya lapangan usaha produktif. Hal ini menjadi pemicu meningkatnya migrasi tenaga kerja, khususnya generasi muda, ke luar daerah bahkan ke luar negeri secara non-prosedural. Kondisi ini tidak hanya menguras potensi SDM lokal, tetapi juga berpotensi meningkatkan masalah sosial seperti kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perdagangan orang, terutama di wilayah perbatasan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sambas pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,99%, sedikit lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Kalimantan Barat. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal (70,10%), dan 51,17% di antaranya hanya berpendidikan SD ke bawah, menandakan rendahnya akses terhadap pekerjaan formal yang layak dan berpenghasilan stabil.

Padahal, Kabupaten Sambas memiliki sumber daya ekonomi lokal yang sangat potensial. Namun, nilai tambah ekonomi dari sektor-sektor tersebut belum optimal karena rendahnya pengembangan industri pengolahan, terbatasnya akses pasar, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Sektor industri pengolahan baru menyumbang sekitar 11,44% terhadap PDRB Kabupaten Sambas, mencerminkan belum tumbuhnya sektor hilir sebagai penggerak utama ekonomi lokal.

RPJMN 2025–2029 menempatkan transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam sebagai prioritas, dengan penekanan pada pengembangan industri hilirisasi, inovasi produk lokal, dan ekonomi hijau. Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan pentingnya penguatan penyuluhan pertanian sebagai elemen kunci dalam mempercepat

swasembada pangan nasional, yang relevan untuk meningkatkan produktivitas sektor agraris di Kabupaten Sambas.

Untuk menjawab tantangan ini, pembangunan ekonomi Kabupaten Sambas harus diarahkan pada transformasi struktural dan optimalisasi potensi daerah melalui strategi sebagai berikut:

- a. penguatan Industri Pengolahan Berbasis SDA Lokal dengan:
 - 1) mendorong hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi produk bernilai tambah tinggi (beras kemasan, olahan kelapa sawit, produk perikanan beku); dan
 - 2) membangun kawasan industri skala kecil menengah berbasis komoditas unggulan seperti jeruk siam dan hasil laut.
- b. revitalisasi Penyuluhan dan SDM Pertanian dengan:
 - 1) mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 melalui pelatihan dan digitalisasi penyuluhan; dan
 - 2) meningkatkan literasi dan kapasitas petani untuk menggunakan teknologi pertanian modern dan sistem pertanian berkelanjutan.
- c. Pengembangan Ekowisata dan Wisata Budaya dengan:
 - 1) menjadikan kawasan unggulan seperti Temajuk sebagai destinasi wisata berbasis konservasi dan budaya lokal; dan
 - 2) penguatan kelembagaan desa wisata dan pelatihan SDM pariwisata lokal.
- d. Penguatan UMKM dan Koperasi dengan:
 - 1) memberikan fasilitasi akses permodalan berbasis syariah, pelatihan digital marketing, dan pendampingan produk untuk pelaku UMKM; dan
 - 2) mendorong terbentuknya koperasi sektor pangan dan perikanan untuk memperkuat rantai pasok dan akses pasar.
- e. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah dengan:
 - 1) mempercepat pembangunan jalan usaha tani, irigasi, jaringan logistik, serta infrastruktur digital untuk menunjang pertumbuhan ekonomi berbasis desa; dan
 - 2) mengintegrasikan pengembangan kawasan perbatasan dengan aktivitas ekonomi produktif.

f. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif dengan:

- 1) penyederhanaan perizinan melalui digitalisasi dan pembentukan kawasan ekonomi strategis; dan
- 2) mendorong kerjasama investasi publik swasta dalam pengembangan agroindustri.

Secara keseluruhan, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Sambas perlu menghadapi isu-isu strategis ini dengan kebijakan yang terkoordinasi dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sambas harus memperbaiki kualitas SDM, meningkatkan tata kelola pemerintahan, melestarikan lingkungan hidup, dan mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang inklusif. Data dan kebijakan terkait, seperti RPJMN, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, serta RPJPD Kabupaten Sambas 2025-2029, memberikan kerangka yang jelas untuk merumuskan solusi yang tepat bagi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, terdapat 5 (lima) isu strategis pembangunan Kabupaten Sambas yaitu:

- a. kehidupan yang demokratis dan agamis;
- b. kualitas sumber daya manusia;
- c. tata kelola pemerintahan;
- d. kualitas lingkungan Hidup; dan
- e. Peningkatan Ekonomi.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

3.1.1.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan *stakeholders* agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Untuk menetapkan visi Kabupaten Sambas lima tahun kedepan, jargon yang digunakan adalah **“Sambas Berkah Berkemajuan”**, Berkah adalah sebuah Akronim **Bersama Kuatkan Langkah**, mengandung nilai filosofis yang menunjukkan derap langkah **BERSinergi**, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** dalam limpahan karunia Allah SWT untuk terus mewujudkan **Sambas BERKEMAJUAN**: Kata **Berkemajuan** merupakan singkatan dari **Beriman** kepada Allah SWT, **Kemandirian**, **Maju**, **Berkelanjutan**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta melihat perkembangan kondisi umum Kabupaten Sambas hingga tahun 2025 sebagaimana digambarkan pada bab 2, maka visi pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 adalah:

“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Bersama Kuatkan Langkah mencerminkan filosofi kerja yang menekankan kolaborasi, sinergi, dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan besar. Dalam dunia kerja, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian

setiap individu adalah bagian dari rantai yang saling menguatkan. Seperti roda gigi yang bergerak selaras, kerja tim yang solid mampu mengatasi rintangan, mempercepat inovasi, dan menciptakan solusi yang lebih kuat. Filosofi ini mengajarkan bahwa dengan menyatukan visi, berbagi peran, dan saling mendukung, setiap langkah yang diambil akan lebih kokoh, penuh keyakinan, dan membawa dampak yang lebih luas. Berkah juga bisa dimaknai **BERSinergi**, **Kompetitif**, **Amanah** dan **Harmonis** adalah fondasi utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang dinamis dan berkelanjutan. **Bersinergi** menekankan pentingnya kolaborasi, di mana setiap individu dan tim bekerja bersama untuk mencapai hasil yang lebih besar dari sekadar upaya individu. Yakni kemampuan membangun kolaborasi antar Perangkat Daerah (PD), masyarakat, sektor swasta, dan institusi vertikal secara aktif dan fungsional. Adapun indikatornya adalah, pertama persentase program lintas sektor/perangkat daerah yang dilaksanakan secara kolaboratif tiap tahun. Kedua jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan mitra eksternal yang dijalankan secara aktif, utamanya nota kesepahaman untuk mendorong investasi dengan dunia usaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan, misalnya pada musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) desa dan kabupaten.

Kompetitif menjadi pendorong inovasi dan semangat juang, memastikan setiap langkah diambil dengan optimal dan penuh strategi. Yakni meningkatkan daya saing daerah melalui kualitas SDM, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, Penurunan Prevalensi Stunting, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB Pendapatan perkapita, indikatornya meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Indeks Modal Manusia (IMM), penurunan prevalensi stunting, indeks infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita dan penurunan tingkat kemiskinan.

Amanah mencerminkan integritas dan tanggung jawab, baik dalam menjalankan tugas maupun menjaga kepercayaan yang diberikan. Yakni tata kelola pemerintahan yang jujur, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh publik. Indikator ukuran meliputi Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks

Pemerintahan Digital, Skor hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Harmonis menjadi kunci dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan. Yakni hubungan yang seimbang dan damai antar elemen masyarakat, agama, budaya, serta organisasi pemerintahan. Indikator ukuran meliputi, Tingkat kerukunan umat beragama, Jumlah konflik horizontal yang terjadi per tahun (target: menurun), Frekuensi kegiatan lintas budaya/agama yang difasilitasi pemerintah.

Dengan mengintegrasikan keempat nilai ini, setiap individu dan organisasi dapat tumbuh bersama, menciptakan prestasi yang bermakna, dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Adapun makna berkemajuan mempunyai makna:

Beriman adalah kondisi kehidupan masyarakat yang agamis, harmonis, beriman, dan bertakwa pada Allah (Tuhan Yang Maha Esa), senantiasa menghormati dan menjaga nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta taat dan tertib hukum termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan (*good and clean Government*).

Kemandirian adalah kondisi masyarakat yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pokoknya dari potensi sumber daya dan produksi daerah, yang ditandai dengan meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, peningkatan kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Maju adalah kondisi dimana hasil produksi, investasi, kontribusi industri, dan peranan UMKM dan koperasi dalam perekonomian terus meningkat sehingga laju pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih tinggi dari periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2019-2024). Untuk itu dibutuhkan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.

Berkelanjutan adalah suatu kondisi dimana pelaksanaan pembangunan senantiasa menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan

pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Sambas berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang disebut sebagai implementasi dari asta cita. Visi Kabupaten Sambas juga berpedoman pada visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Kalimantan Barat Yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1.
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten Sambas

3.1.1.2 Misi

Visi RPJMD Kabupaten Sambas tersebut akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. **Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis** yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyelundupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.
2. **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing** yaitu kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.
3. **Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah** yaitu mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, agro maritim, perikanan dan didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.
4. **Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan** yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.
5. **Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan** yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Misi RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029, sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Keselaran antara Misi RPJMN dengan RPJMD
Kabupaten Sambas

No	Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis.
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi biru	Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;	Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;	Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah

No	Misi Pembangunan RPJMN 2025-2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2029
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Misi 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis. Misi 4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5. Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - Mewujudkan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM		Tingkat Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa (%)	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan									
		Meningkatnya ketentraman serta ketertiban masyarakat	Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas (%)	75	76	77	78	79	80
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan (%)	91	92	93	94	95	96
	Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Daerah dan Investasi		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.75-5.35	4.85-5.90	5.01-6.27	5.20-6.90	5.30-7.10	5.40-7.25
			PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	43.70-50.47	45.50-55.60	47.60-60.72	49.74-65.01	51.73-72.47	52.88-75.76
		Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor-sektor Unggulan	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	30.57-32.80	30.60-32.82	30.63-32.84	30.66-32.86	30.69-32.88	30.72-32.90
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11.60-12.40	11.65-12.45	11.70-12.50	11.75-12.55	11.80-12.60	11.85-12.70
			Kontribusi PDRB sektor Perdagangan (%)	17.80-18.08	17.82-18.10	17.84-18.12	17.86-18.14	17.88-18.16	17.90-18.18
			Nilai Ekspor Barang dan Jasa (Rp)	13.725.172.553	15.097.689.808	16.607.458.789	18.268.204.668	20.095.025.135	22.104.527.648
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	72,44	74,05	75,66	77,27	78,88	80,49

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital	Rasio Kewirausahaan (Persentase)	2,65	2,8	2,98	3,05	3,25	3,41
			Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	3,17	3,21	3,25	3,29	3,33	3,35
		Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	3,33	4	4,75	5,5	6,25	7
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ((%))	0,45	0,46	0,47	0,49	0,5	0,51
		Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah	Indeks Perkembangan Harga (Indeks)	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Wisata dan Ekonomi Kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,98	2	2,02	2,04	2,05	2,06
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,78	72,35	73,77	74,19	75,05	75,9
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,80	4,60	4,40	4,20	4	3,80
			Tingkat Kemiskinan (%)	6.07-6.48	5.97-6.45	5.64-6.14	5.12-5.59	4.45-5.03	4.31-4.97
			Rasio Gini (Indeks)	0,2484	0,2428	0,2372	0,2316	0,226	0,2204
		Meningkatnya derajat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	90	90	90	90	90	90

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kesehatan masyarakat	(treatment success rate) (%)						
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	80	85	90	95	100	100
			Indeks Keluarga Sehat (Angka)	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
			Jumlah kematian balita (Kasus)	84	83	82	81	80	79
			Jumlah kematian ibu (Kasus)	9	9	8	8	7	6
			Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	36	46	56	66	70	76
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	100
			Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	65	66,1	67,9	69,7	71,5	73,3
			Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25
			Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (%)	82	86	90	94	98,6	98,8
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	32	30	28	26	23	20
		Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	SPM Pendidikan (Raport Pendidikan) (%)	67,12	69,62	72,62	75,62	78,62	81,62
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	7,25	7,56	7,87	8,19	8,5	8,81
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,98	13,1	13,22	13,35	13,48	13,51

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	67	71	73	77	79	81
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	75,25	76,25	77,25	78,25	79,25	80,25
		Meningkatnya Manajemen Kearsipan	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (indeks)	75	78	80	82	85	87
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (%) Indeks)	0,414	0,409	0,404	0,399	0,394	0,394
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	88,39	89,29	90,19	91,09	92,34	92,34
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	56,3	61,05	65,8	70,55	75,29	75,29
		Penduduk Tumbuh Seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) (%)	65,95	66,11	66,27	66,43	66,59	66,75
		Meningkatnya kesempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,02	73,27	73,52	73,76	74,01	74,25
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	47,68	47,99	48,72	49,42	50,11	50,73
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	26,16	29,55	32,94	36,33	39,72	43,11
		Terwujudnya transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Rupiah/Kapita)	16.285.888,11	17.100.180,41	17.955.189,43	18.852.948,9	19.795.596,35	20.785.376,17
		Meningkatnya prestasi Olahraga dan pemuda	Jumlah Pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional (Orang)	3	3	3	3	3	3
			Jumlah Perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi (Medali emas)	10	30	10	15	10	30
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	56,88	57,38	57,88	58,38	58,88	59,38
	Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah		Indeks Infrastruktur (Indeks)	58,92	60,39	61,91	63,45	65,03	66,64
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam kondisi mantap (%)	58,92	60,39	61,91	63,45	65,03	66,64
		Meningkatnya Konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan	Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	82,54	83,8	85,06	86,32	87,58	88,83

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (Indeks)	0,63	0,67	0,7	0,73	0,77	0,81
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Predikat)	B	B	BB	BB	BB	A
			Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A
		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)	B	B	B	A-	A-	A
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3	3	3	3	3	4
			Nilai Sakip Komponen Pengukuran dan Pelaporan Kinerja (poin)	10,75	11	11,25	11,5	11,75	12
			Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	BB	BB	BB	BB	A	A
			Kabupaten Peduli HAM	Peduli	Peduli	Peduli	-Peduli	-Peduli	-Peduli
			Tingkat Kerukunan Umat Beragama (%)	80	81	82	83	84	85
			Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Indeks)	95	96	97	98	99	99
			Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
			Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja (Poin)	20,81	21,63	22,13	23	23,5	24

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal (Poin)	14,6	14,65	14,66	14,68	14,7	14,8
			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76	77	78	79	80	81
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	80	82	84	86	88	90
			Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	81	81	82	83	84	85
		Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	62,4	62,88	63,39	64,21	65,01	65,2
		Meningkatnya Tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing	Persentase Desa Mandiri (%)	21,61	28,01	28,59	29,28	29,62	30
			Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital (Desa)	195	195	195	195	195	195
		Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	69	72	75	78	81	84
		Meningkatnya sistem	Predikat Pemerintahan	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		pemerintah berbasis digital	Digital (PEMDI) (Predikat)						
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	76,65	76,78	76,9	77,03	77,15	77,28
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (Indeks)	76,65	76,78	76,9	77,03	77,15	77,28
	Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	132,94	131,34	129,76	128,21	126,67	125,15
		Meningkatnya layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan tentang cara atau pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimana akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, ditetapkan lokasi prioritas di Kabupaten Sambas meliputi:

1. Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah pusat menetapkan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu lokasi prioritas nasional dalam pengembangan pariwisata berbasis kawasan strategis. Penetapan ini memperkuat posisi Kabupaten Sambas sebagai bagian dari wilayah perbatasan yang memiliki potensi unggulan dalam pengembangan destinasi wisata yang terpadu dan berkelanjutan. Kawasan ini memiliki keunggulan geografis dan kultural yang unik, terletak di bagian utara Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Keberadaan objek wisata unggulan seperti Pantai Temajuk, Danau Sebedang, Pantai Tanjung Api, Istana Keraton Kesultanan Sambas, serta berbagai atraksi budaya Melayu, Dayak, dan Tionghoa menjadikan kawasan ini strategis untuk dikembangkan sebagai koridor pariwisata perbatasan bertaraf internasional. Selain itu, pembangunan dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Temajuk yang telah menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN), mendukung integrasi antara fungsi pertahanan, perdagangan, dan pariwisata.

Menindaklanjuti penetapan Program Strategis Nasional, Pemerintah Kabupaten Sambas dalam dokumen RPJMD tahun 2025–2029 menetapkan

pengembangan Kawasan Pariwisata Sambas–Singkawang sebagai salah satu prioritas utama daerah. Fokus kebijakan diarahkan pada:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi),
- b. Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (*community-based tourism*),
- c. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata, serta
- d. Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital.

Pemerintah Kabupaten Sambas juga akan mendorong pengembangan kemitraan daerah dan antarwilayah, khususnya dengan Kota Singkawang dan provinsi Kalimantan Barat, dalam kerangka pembangunan lintas batas yang bersifat integratif. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara, tetapi juga untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sebagai bagian dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, seluruh rencana dan program strategis di sektor pariwisata ini akan dirancang agar sejalan dengan target Sasaran Pembangunan Nasional 2025–2029, khususnya dalam penguatan daya saing wilayah dan pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal.

2. Daerah Perbatasan (PKSN PALOH-ARUK)

Wilayah Perencanaan Paloh–Aruk merupakan bagian dari Kawasan Perbatasan Negara yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan mencakup dua kecamatan strategis, yaitu Paloh dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas. Kawasan ini ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) karena memiliki fungsi penting sebagai gerbang negara, pusat pertumbuhan ekonomi lokal, serta wilayah yang berperan dalam mendukung ketahanan dan keamanan nasional.

Secara eksisting, kawasan Paloh–Aruk memiliki beberapa fungsi ruang yang menonjol. Fungsi pertahanan dan keamanan direpresentasikan melalui keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, serta instalasi militer dan kepolisian yang tersebar di sejumlah titik strategis. Selain itu, kawasan ini juga menjalankan fungsi sebagai kawasan ekonomi mandiri,

didukung oleh aktivitas perdagangan lintas batas, keberadaan pasar rakyat, serta potensi komoditas unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan hortikultura. Tidak kalah penting, kawasan ini juga mencakup fungsi kawasan lindung, khususnya di wilayah pesisir, sungai, dan daerah dengan keanekaragaman hayati yang tinggi.

Infrastruktur dasar di kawasan ini masih dalam tahap pengembangan. Jaringan jalan utama yang menghubungkan Paloh, Aruk, dan Temajuk sepanjang $\pm 2,7$ kilometer saat ini masih memerlukan peningkatan kondisi dan konektivitas. Pelayanan air bersih dan sanitasi masih belum merata, sementara penyediaan energi listrik baru mampu melayani sekitar 11 jam per hari. Dari sisi pelayanan publik, telah tersedia sejumlah puskesmas, posyandu, dan fasilitas pendidikan dasar, meskipun sebaran dan kapasitasnya perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas kawasan.

Potensi ekonomi kawasan cukup menjanjikan, terutama dengan dukungan dari komoditas unggulan seperti buah naga, salak, kelapa sawit, serta hasil tangkapan laut seperti ubur-ubur dan cumi-cumi. Selain itu, kawasan Paloh-Aruk memiliki daya tarik wisata alam seperti Pantai Temajuk, Pantai Batu Nenek, dan Riam Merasap, yang kerap dikunjungi wisatawan, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Dari sisi keamanan dan ketahanan wilayah, terdapat lebih dari tujuh instalasi TNI dan kepolisian yang tersebar, dengan intensitas tertinggi di Kecamatan Paloh. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya penting secara ekonomi, tetapi juga strategis dalam konteks pertahanan negara. Secara keseluruhan, kondisi eksisting PKSN Paloh-Aruk menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki peran penting dan multifungsi, baik dalam aspek ekonomi, sosial, pertahanan, maupun ekologi. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kapasitas pelayanan publik, serta pengelolaan ruang yang berkelanjutan. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penting dalam mengarahkan pembangunan kawasan ini secara terstruktur, integratif, dan berkelanjutan untuk mendukung visi pembangunan perbatasan negara yang maju, aman, dan berdaya saing tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nanga Badau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat Wilayah Perencanaan Paloh-Aruk memiliki fungsi:

- a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
 - b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. pusat perdagangan dan jasa;
 - d. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;
 - e. pusat pelayanan pemerintahan;
 - f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - g. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan barang;
 - h. pusat pelayanan transportasi laut; dan
- pusat pelayanan transportasi udara.

Daerah perbatasan di Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, memiliki potensi strategis dalam pengembangan perdagangan lintas negara dan diplomasi ekonomi. Pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan. Selain itu, perlu dikembangkan pusat logistik dan fasilitas perdagangan agar daerah ini tidak hanya menjadi jalur keluar masuk barang dan orang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat ketahanan nasional

3. Kawasan Transmigrasi (KT. Gerbang Mas Perkasa)

Kawasan Transmigrasi (KT) Gerbang Mas Perkasa merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang terletak di Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Kawasan ini dikembangkan sebagai bagian dari program transmigrasi dengan pendekatan Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang bertujuan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di wilayah perbatasan melalui integrasi pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Secara administratif, kawasan ini mencakup luas sekitar 136.657 hektar dan terbagi menjadi beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), meliputi SKP A hingga SKP D.

Pada tahun 2024, kondisi sosial dan ekonomi kawasan ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Perkembangan positif dalam aspek sosial dan ekonomi, khususnya dalam pemanfaatan lahan untuk sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Komoditas unggulan yang mendominasi antara lain padi, kelapa sawit, karet, lada, serta hasil tangkapan laut seperti ikan dan udang. Dari sisi infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana telah berjalan meski belum merata. Jalan penghubung antar kawasan dan akses menuju pusat ekonomi masih menghadapi kendala dalam hal kualitas dan keberlanjutan pembiayaan. Terdapat pembangunan jalan *boulevard*, pasar lokal, serta jaringan irigasi, namun beberapa proyek mengalami hambatan administratif dan teknis. Selain itu, persoalan klasik seperti keterbatasan listrik dan akses air bersih juga masih menjadi tantangan utama dalam mendorong kualitas hidup masyarakat transmigran.

Tata ruang kawasan juga menghadapi persoalan serius, terutama terkait tumpang tindih lahan antara Hak Pengelolaan (HPL) transmigrasi dengan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan perkebunan swasta. Sengketa lahan yang terjadi di beberapa desa transmigrasi telah menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi lahan bagi warga, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang menghambat investasi dan keberlanjutan pengembangan kawasan. Rencana pengembangan kawasan ke depan diarahkan untuk lebih berpihak pada masyarakat lokal, dengan fokus pada penataan infrastruktur dasar, penyelesaian konflik agraria, dan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah juga merencanakan untuk menjadikan KT. Gerbang Mas Perkasa sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana abrasi pantai dari desa-desa pesisir seperti Sebusus dan Temajuk, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai model transmigrasi berbasis penguatan komunitas lokal.

Berdasarkan aspek kewilayahan, strategi pembangunan kabupaten Sambas dapat dipetakan menjadi empat aspek kewilayahan yang potensial untuk dikelola dan kembangkan meliputi:

1. Daerah Perbatasan

Daerah perbatasan di Kabupaten Sambas, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, memiliki potensi strategis dalam pengembangan perdagangan lintas negara dan diplomasi ekonomi.

Pemanfaatan potensi ini dapat dilakukan melalui penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan. Selain itu, perlu dikembangkan pusat logistik dan fasilitas perdagangan agar daerah ini tidak hanya menjadi jalur keluar masuk barang dan orang, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan memperkuat ketahanan nasional

2. Daerah Transmigrasi

Daerah transmigrasi di Sambas memiliki peran penting dalam pemerataan pembangunan dan penguatan sektor pertanian. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga menciptakan keragaman budaya dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia. Strategi pembangunan pada daerah transmigrasi berfokus pada peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian. Pengembangan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan masyarakat dan integrasi antara transmigran dan penduduk lokal juga sangat penting agar tercipta harmoni sosial dan keberlanjutan pembangunan.

3. Daerah Pesisir

Daerah pesisir Kabupaten Sambas memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan, serta peluang pengembangan pariwisata bahari. Pemanfaatan wilayah ini diarahkan pada pembangunan pelabuhan perikanan, peningkatan kapasitas nelayan, dan pelestarian ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang. Selain itu, pembangunan desa-desa pesisir yang tangguh terhadap perubahan iklim dan bencana alam seperti abrasi dan banjir rob menjadi sangat penting. Penguatan kelembagaan masyarakat pesisir juga perlu dilakukan agar mereka mampu mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

4. Daerah Wisata

Kabupaten Sambas memiliki potensi wisata budaya, sejarah, dan alam yang dapat dikembangkan menjadi sektor unggulan ekonomi daerah. Strategi pembangunan daerah wisata harus mencakup perbaikan infrastruktur akses ke lokasi wisata, promosi destinasi unggulan, serta pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata

berbasis komunitas. Selain itu, penting untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kawasan wisata agar daya tariknya tetap terjaga dan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap perekonomian lokal.

Arah kebijakan akan menjadi tuntunan yang dilakukan dalam menjalankan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029.

3.2.1.1 Arah Kebijakan Periode 2026

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun pertama (periode 1) di Kabupaten Sambas difokuskan pada penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan modal dasar pembangunan diwujudkan melalui pengembangan sumber daya manusia daerah; penguatan peran, tugas, fungsi dan kelembagaan pemerintahan, pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana dasar, pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya alam yang lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

3.2.1.2 Arah Kebijakan Periode 2027

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun kedua (periode 2) di Kabupaten Sambas pada akselerasi pembangunan daerah. Akselerasi pembangunan daerah diwujudkan melalui akselerasi pemerataan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat; peningkatan kapabilitas dalam penyediaan jaminan sosial, pendampingan anak dan perempuan, dan pemberdayaan komunitas; penguatan tata kelola pemerintahan, implementasi layanan publik, peningkatan jangkauan infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi; peningkatan pemanfaatan tata ruang, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengembangan produk unggulan daerah, pengembangan industri berbasis inovasi dan berdaya saing; peningkatan produktivitas dan nilai tambah bagi produk-produk hasil pertanian dan komoditas UMKM, dan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

3.2.1.3 Arah Kebijakan Periode 2028

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun ketiga (periode 3) di Kabupaten Sambas difokuskan pada perluasan aktivitas pembangunan daerah. Perluasan aktivitas pembangunan daerah difokuskan pada penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, Transformasi tata kelola kelembagaan pemerintahan yang adaptif, ASN yang kompetitif, partai politik yang transparan dan akuntabel, dan masyarakat sipil mandiri dan berbudaya, peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana/infrastruktur pendukung kegiatan sosial dan ekonomi, peningkatan daya saing, penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global, tata kelola lingkungan hidup selaras, lestari, dan berkelanjutan.

3.2.1.4 Arah Kebijakan Periode 2029

Berdasarkan pada pelaksanaan dan capaian kinerja pembangunan tahap sebelumnya, maka arah kebijakan pembangunan pada 5 (lima) tahun keempat (periode 4) di Kabupaten Sambas difokuskan pada pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian Pembangunan pembangunan diwujudkan melalui pengoptimalan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia; perlindungan sosial yang adaptif; dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, berkualitas, dan kolaboratif, pemantapan kondisi sarana dan prasarana pembangunan; pengendalian pertumbuhan kawasan permukiman; pengendalian ruang terbuka hijau, pertumbuhan ekonomi yang stabil, produktivitas yang kuat, dan nilai daya saing tinggi; serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kualitas lingkungan.

3.2.1.5 Arah Kebijakan Periode 2030

Terakhir, pada tahun 2030, kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas akan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan melalui kebijakan perlindungan sosial, pengurangan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif. Seluruh penahapan kebijakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penguatan Modal Dasar Pembangunan meliputi; • Pengembangan SDM daerah • Pemenuhan sarana dan prasarana dasar • Pembangunan ekonomi dan peningkatan taraf hidup	Akselerasi Pembangunan Daerah meliputi: • Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan produk unggulan • Peningkatan nilai tambah pertanian dan UMKM, serta pemanfaatan SDA lestari • Penguatan tata kelola, layanan publik, dan infrastruktur sosial-ekonomi	Perluasan Aktivitas Pembangunan Daerah meliputi: • Penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan • Pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi • Penguatan jaringan rantai nilai domestik dan global	Pemantapan Capaian Pembangunan meliputi: • Pemantapan infrastruktur, pengendalian kawasan permukiman dan ruang terbuka hijau • Pertumbuhan ekonomi stabil dan daya saing tinggi dengan menjaga kualitas lingkungan • Tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kolaboratif	Kesejahteraan Merata dan Berkeadilan meliputi: • Peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan • Perlindungan sosial dan pengurangan kemiskinan • Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang inklusif

3.2.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kabupaten Sambas, sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Kalimantan Barat, terus berkomitmen untuk mempercepat pembangunan daerah melalui berbagai program prioritas yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan mengacu pada potensi lokal, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. Fokus utama diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas infrastruktur dasar, serta optimalisasi pelayanan publik sebagai fondasi utama.

Merealisasikan visi pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Sambas menempatkan prinsip kolaborasi, partisipatif dan transparan sebagai landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan program prioritas. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, pemangku kepentingan, dan perangkat daerah, pembangunan diarahkan untuk

menjawab permasalahan riil di lapangan serta mempercepat capaian indikator pembangunan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga mendorong pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Sambas. Adapun tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Program Prioritas Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
20252029 - Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif, Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing - Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah - Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan - Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan HAM			TINGKAT STABILITAS POLITIK SERTA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA	
		Meningkatnya ketentraman serta ketertiban masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Penyelenggaraan Tibum Tranmas	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila		Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan	
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			Indeks Pembangunan Manusia	
				Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Tingkat Kemiskinan	
				Rasio Gini	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	
				Cakupan imunisasi bayi lengkap	
				Jumlah kematian ibu	
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Jumlah kematian balita	
				Usia Harapan Hidup (UHH)	
				Persentase cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	
				Indeks Keluarga Sehat	
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Persentase Rumah Sakit pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Persentase SDM yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan pelayanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian obat cacing pada anak BALITA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Insidensi HIV/AIDS	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase lanjut usia yang mandiri	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				BADUTA mendapatkan imunisasi rutin lengkap	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Akses terhadap sanitasi aman	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian tablet tambah darah/ <i>Multiple Micronutrient Supplementation</i> (MMS)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				informasi kesehatan nasional	
				Penemuan kasus pneumonia balita	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi obesitas lebih dari 18 tahun	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Remaja putri yang konsumsi TTD	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Praktik inisiasi menyusui dini	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian obat cacing pada anak BADUTA	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemeriksaan kesehatan pranikah	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil KEK	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Remaja putri yang di skrining anemia	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi merokok pada penduduk 10-21 Tahun	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Akses terhadap air minum aman	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Meningkatnya mutu dan akses pendidikan		SPM Pendidikan (Raport Pendidikan)	
				Rata-rata Lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Harapan Lama Sekolah	
				Skor Kemampuan Numerasi SMP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor Kemampuan Literasi SD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SMP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebhinekaan SMP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor Kemampuan Numerasi SD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebhinekaan SD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SMP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Skor Kemampuan Literasi SMP	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SD	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas literasi Masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat	
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
		Meningkatnya Manajemen Kearsipan		Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
				Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			perempuan dalam pembangunan		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Penduduk tumbuh seimbang dan meningkatnya keluarga berkualitas		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Persentase kampung keluarga berkualitas yang mandiri	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				materi pencegahan stunting	
				Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
				Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	
				Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Perusahaan)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Terwujudnya transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal transmigrasi		Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi (Rupiah/Kapita)	
			Meningkatnya infrastruktur di kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	Persentase infrastruktur di kawasan transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
			Meningkatnya jumlah transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	3.32.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
		Meningkatnya prestasi olahraga dan pemuda		Jumlah pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional	
				Jumlah perolehan medali emas pada pekan Olahraga Provinsi	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya kesejahteraan sosial yang Inklusif		Indeks Kesejahteraan Sosial	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Jumlah keluarga miskin penerima perlindungan sosial yang terdegradasi dari kemiskinan	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah dan investasi			PDRB per Kapita(Juta Rupiah)	
				Pertumbuhan Ekonomi	
		Meningkatnya kontribusi PDRB sektor-sektor unggulan		Nilai Ekspor Barang dan Jasa	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Kontribusi PDRB sektor perdagangan	
				Rasio PDRB industri pengolahan	
				Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi perkebunan (Kelapa Sawit)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan produksi hortikultura (Jeruk)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (Padi)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok Masyarakat)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
			Meningkatnya kualitas perizinan	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			berusaha sektor perindustrian		
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang non migas	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase pembinaan industri kecil dan menengah (IKM)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
				Persentase peningkatan produk bersertifikasi halal	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
		Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rata-rata konsumsi energi	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya penanganan rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Meningkatnya Kontribusi Produktivitas UMKM dan Koperasi, Akses Keuangan Daerah serta Ekonomi Syariah dan Digital		Indeks Akses Keuangan Daerah	
				Rasio Kewirausahaan	
				Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
		Meningkatnya Pendapatan dan Kemandirian Fiskal Daerah		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	
				Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko		2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
		Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah		Indeks Perkembangan Harga	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rata-rata konsumsi energi	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas kebijakan peningkatan akses keuangan daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Meningkatnya Kontribusi Sektor Wisata dan Ekonomi Kreatif		Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
	Meningkatkan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah			Indeks Infrastruktur	
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Mantap		Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi mantap	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari tanah maksimum dan tanah Absentee	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
			Meningkatnya kualitas	Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			penyelenggaraan penataan ruang	Ruang berdasarkan RTRW	
			Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
				Persentase jalan lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Meningkatnya tata kelola persampahan	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan		Rasio konektivitas kabupaten/kota	
				Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Konektivitas darat	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase sarana, prasarana, informasi, koordinasi dan disiplin angkutan penyeberangan dengan kondisi baik	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN
	Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	
				Indeks Reformasi Birokrasi	
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien			Nilai sakip komponen pengukuran dan pelaporan kinerja	
				Kabupaten Peduli HAM	
				Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	
				Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
				Tingkat Kerukunan Umat Beragama	
				Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Indeks Profesionalitas ASN	
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	
				Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	
				Indeks Reformasi Hukum	
				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	
				Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase produk hukum yang dihasilkan	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Efektivitas kerjasama daerah	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Indeks Zakat Nasional (IZN)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
				Indeks Tata Kelola Pengadaan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
			meningkatnya layanan pengembangan sumber daya manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
				Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
		Meningkatnya jumlah inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah		Indeks Inovasi Daerah	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing		Persentase Desa Mandiri	
				Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	
			Meningkatnya kualitas pembinaan	Jumlah Desa Mandiri	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			dan pengawasan pemerintahan desa		
				Persentase aparatur desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
		Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	
			Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
		Meningkatnya sistem pemerintah berbasis digital		Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI)	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi	Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Lingkungan Pemerintah Daerah	Keamanan Informasi (SMKI)	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				Persentase Jumlah OPD yang terhubung melalui jaringan intra pemerintah	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SNN)	Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektor	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lahan	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Air	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Udara	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatkan layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan			Indeks Risiko Bencana	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
	kesiapsiagaan terhadap bencana				
		Meningkatnya layanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Indeks Ketahanan Daerah	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
			Meningkatnya pelayanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

3.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sambas dirancang sebagai penjabaran operasional dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap arah kebijakan disusun untuk menjawab tantangan strategis dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah. Dalam konteks ini, kebijakan diarahkan pada peningkatan ideologi kebangsaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, peningkatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, perbaikan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan ekonomi, kualitas infrastruktur wilayah, menguatkan kemandirian ekonomi serta penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut menjadi kerangka kerja bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai implementasi dari misi pembangunan, arah kebijakan juga menekankan pentingnya integrasi antar sektor dan wilayah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung sinergi lintas sektor untuk hasil yang lebih optimal. Selain itu, arah kebijakan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pembangunan inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya menjadi panduan teknis, tetapi juga sebagai wujud komitmen daerah dalam mewujudkan visi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berikut ini disajikan gambaran arah kebijakan Kabupaten Sambas meliputi:

Tabel 3.5**Misi dan Arah Kebijakan RPJMD**

No	Misi	Arah Kebijakan
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis	✓ Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada ✓ Meningkatkan persatuan dan kesatuan, serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat ✓ Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan kehidupan politik di masyarakat
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	✓ Meningkatkan kesehatan perorangan dan masyarakat ✓ Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan dan Sarpras Kesehatan ✓ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan ✓ Meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses pendidikan ✓ Meningkatkan pelestarian, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan nilai-nilai budaya di masyarakat dalam pemajuan kebudayaan ✓ Meningkatkan budaya literasi masyarakat ✓ Meningkatkan prestasi dan daya saing pemuda ✓ Meningkatkan pembinaan olah raga ✓ Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan ✓ Meningkatkan kualitas keluarga ✓ Meningkatkan perlindungan terhadap anak ✓ Meningkatkan pengendalian penduduk

No	Misi	Arah Kebijakan
3	Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah	✓ Meningkatkan Jalan Kabupaten dan jalan poros desa dalam kondisi mantap
		✓ Meningkatkan penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya
		✓ Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni
		✓ Meningkatkan jaringan Irigasi dalam kondisi baik
		✓ Meningkatkan Rumah Tangga Pengguna Air Minum yang Layak
		✓ Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi yang Layak
		✓ Meningkatkan pengelolaan urusan pertanahan dan tata ruang
		✓ Meningkatkan konektivitas, ketertiban dan keamanan di sektor perhubungan
		✓ Meningkatkan komponen dimensi dan peubah satuan pemukiman
		✓ Meningkatkan produktivitas mekanisasi pertanian dan pemanfaatan teknologi tepat guna
		✓ Meningkatkan produksi di bidang kelautan dan perikanan
		✓ Meningkatkan produksi di sektor peternakan
		✓ Meningkatkan Pembinaan dan pengembangan industri
		✓ Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor
		✓ Peningkatan pertumbuhan omset pedagang Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
		✓ Terjaganya stabilitas harga bahan kebutuhan pokok
		✓ Meningkatkan ketersediaan pangan
		✓ Meningkatkan persentase usaha mikro

No	Misi	Arah Kebijakan
		yang menjadi wirausaha
		✓ Meningkatkan rasio wirausaha berskala mikro naik kelas
		✓ Perizinan Pendaftaran Perusahaan
		✓ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi
		✓ Meningkatkan kemudahan perizinan dan layanan investasi
		✓ Meningkatkan investasi, penanaman modal dan kelancaran izin usaha
		✓ Pengelolaan pendapatan
		✓ Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
		✓ Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
		✓ Meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja
		✓ Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja
4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	✓ Meningkatkan tata kelola kearsipan dan pengelola arsip
		✓ Meningkatkan dukungan dan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD
		✓ Meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN
		✓ Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan ASN
		✓ Meningkatkan koordinasi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah
		✓ Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang adminduk
		✓ Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan daerah

No	Misi	Arah Kebijakan
		✓ Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, dan pelayanan publik
		✓ Meningkatkan efektivitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
		✓ Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		✓ Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah
		✓ Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sosial
		✓ Meningkatkan pemberdayaan sosial
		✓ Meningkatkan kemanfaatan hasil kelitbangan dan fasilitasi penerapan inovasi bagi pembangunan daerah
		✓ Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan kelembagaan desa yang berdaya saing
		✓ Meningkatnya pengelolaan dan akses keuangan daerah
		✓ Meningkatkan komunikasi, informasi dan transparansi pemerintahan
		✓ Meningkatkan kualitas statistik daerah
		✓ Meningkatkan persandian
		✓ Meningkatkan penerapan Aplikasi Informatika pada Pemerintah Daerah / e-Government
5	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	✓ Meningkatkan penanganan sampah perkotaan ✓ Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas ✓ Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan Kebun Raya Sambas ✓ Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan

No	Misi	Arah Kebijakan
		Pengaduan Kualitas Air
		✓ Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Kualitas Udara
		✓ Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap bencana
		✓ Meningkatkan sosialisasi kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kebakaran

3.2.3.1 Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) dalam Konteks Kabupaten Sambas

Program Strategis Nasional (PSN) yang diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dengan menyelaraskan kebijakan lokal dengan arah pembangunan nasional. Adapun Program Strategis Nasional (PSN) yang diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Sambas sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Sambas mendukung penuh agenda nasional pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat. Adapun strategi utama mencakup:

1. Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Sambas (2025–2029)
2. Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Fasilitasi dan dukungan Sekolah Rakyat
4. Fasilitasi regulasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah

b. Ketahanan Pangan

Kabupaten Sambas mengarahkan kebijakan pada penguatan produksi dan distribusi pangan lokal.

1. Penguatan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan
2. Penguatan Lumbung Pangan Desa

3. Peningkatan produktivitas padi lokal Sambas
4. Dukungan pengelolaan cadangan pangan daerah

c. Kesehatan untuk Semua

Komitmen memperluas cakupan layanan kesehatan universal dan pemenuhan gizi masyarakat.

1. Peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif program JKN untuk mencapai target UHC
2. Fasilitasi dan dukungan Program makan bergizi gratis

d. Perluasan Akses Pendidikan

Target kesetaraan layanan pendidikan dasar dan menengah.

1. Pembangunan dan Rehabilitasi ruang kelas baru
2. Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran
3. Peningkatan akreditasi sekolah

e. Pertumbuhan Ekonomi

Strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif.

1. Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
2. Pembentukan 195 Koperasi Desa Merah Putih
3. Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sektor pertanian, perikanan, peternakan perdagangan, industri dan jasa
4. Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)
5. Digitalisasi perizinan berbasis OSS daerah

f. PSN Lainnya

1. Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi)
 - b) Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (community-based tourism)
 - c) Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata
 - d) Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital
2. Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk
 - a) Penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan

3. Kawasan Transmigrasi (KT Gerbang Mas Perkasa)
 - a) Fasilitasi dan Dukungan pembangunan Kawasan Transmigrasi

Berdasarkan program Strategis Nasional (PSN) yang diselaraskan dalam RPJMD Kabupaten Sambas di atas, berikut ini disajikan matrik penjabaran Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas.

Tabel 3. 6
Matrik Penjabaran Program Strategis Nasional (PSN)
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sambas

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan Nasional	Dukungan dan Sinkronisasi Program Kabupaten Sambas
a.	Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	- Program Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Sambas (2025–2029) - Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka
		Sekolah Rakyat	- Fasilitasi dan dukungan Sekolah Rakyat
		Pembangunan 3 Juta Rumah	- Fasilitasi regulasi dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
b.	Ketahanan Pangan	Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah	- Penguatan koordinasi lintas sektor ketahanan pangan - Penguatan Lumbung Pangan Desa - Peningkatan produktivitas padi lokal Sambas - Dukungan pengelolaan cadangan pangan daerah
c.	Kesehatan untuk Semua	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	- Peningkatan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta aktif program JKN untuk mencapai target UHC
		Makan Bergizi Gratis	- Fasilitasi dan dukungan Program makan bergizi gratis
d.	Perluasan Akses Pendidikan	Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah	- Pembangunan dan Rehabilitasi ruang kelas baru - Penyediaan sarana dan prasarana pembelajaran

No.	Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan Nasional	Dukungan dan Sinkronisasi Program Kabupaten Sambas
			- Peningkatan akreditasi sekolah
e.	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	- Optimalisasi peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
		Koperasi Merah Putih	- Pembentukan 195 Koperasi Desa Merah Putih - Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sektor pertanian, perikanan, peternakan perdagangan, industri dan jasa
		Kemudahan Perizinan di Daerah	- Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) - Digitalisasi perizinan berbasis OSS daerah
f.	PSN Lainnya	Kawasan Pariwisata Sambas-Singkawang	- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata (akses jalan, jaringan air bersih, listrik, dan sarana pendukung destinasi), - Pengembangan desa wisata dan kawasan berbasis komunitas (community-based tourism), - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pelaku pariwisata, serta - Penguatan promosi wisata melalui kemitraan lintas sektor dan transformasi digital.
		Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	- Penguatan infrastruktur penunjang seperti jalan perbatasan, pos lintas batas negara (PLBN), serta pengembangan kawasan ekonomi perbatasan
		Kawasan Transmigrasi (KT Gerbang Mas Perkasa)	- Fasilitasi dan Dukungan pembangunan Kawasan Transmigrasi

3.2.4 Program Unggulan Pemerintah Daerah

3.2.4.1 BENTUK IMAN (Pembentukan Insan Madani)

Program Bentuk Iman (Pembentukan Insan Madani) merupakan program yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kualitas kehidupan keagamaan dan kerukunan antar umat beragama berdasarkan nilai agama, budaya dan norma sosial yang berlaku. Strategi yang dilakukan untuk pelaksanaan program ini antara lain:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti.
- b. Peningkatan kepedulian dan kepekaan sosial dalam meningkatkan kerukunan umat beragama.
- c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, kesadaran hukum, rasa kebangsaan dan nilai budaya daerah.

3.2.4.2 Pelayanan DIKTAN (Pendidikan dan Kesehatan)

Program Pelayan Diktan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang pendidikan dan kesehatan Indeks Modal Manusia. Hal tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

- 1) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
- 2) Meningkatkan karakter siswa,
- 3) Menekan angka putus sekolah melalui beasiswa bagi siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah dan beasiswa untuk siswa berprestasi
- 4) Meningkatkan infrastruktur dasar pendidikan.
- 5) Meningkatkan gizi siswa melalui program makan bergizi gratis

b. Bidang kesehatan

- 1) Pengobatan gratis kelas 3 di seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Sambas atau Prosesar Ok (Program Sehat Satono-Hero)
- 2) Peningkatan infrastruktur dasar kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur di RS, pelayanan ambulance pasien maupun ambulance gawat darurat, kemudahan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan SDM Kesehatan
- 3) Peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui persalinan wajib di fasilitas

pelayanan kesehatan, majelis taklim ibu hamil, serta perbaikan gizi anak untuk penurunan *stunting* dengan replikasi Pos Gita (Pos Gizi Balita).

- 4) Gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.

3.2.4.3 Pemajuan Kebudayaan

Program pemajuan kebudayaan merupakan program yang bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan kebudayaan daerah kabupaten Sambas. Program ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan Seni dan Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan seni dan budaya daerah Sambas, seperti tarian, musik, dan teater.
- b. Pengembangan Museum Daerah: Program ini bertujuan untuk membangun museum daerah yang dapat menampilkan dan melestarikan koleksi budaya dan sejarah Sambas.
- c. Pengembangan Bahasa Daerah: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah Sambas, seperti bahasa Melayu Sambas.
- d. Pengembangan Kerajinan Tangan: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan kerajinan tangan daerah Sambas, seperti kerajinan kayu, kerajinan bambu, dan kerajinan tenun.
- e. Pengembangan Pariwisata Budaya: Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan melestarikan pariwisata budaya daerah Sambas, seperti pengembangan destinasi wisata budaya dan pengembangan paket wisata budaya.
- f. Digitalisasi Layanan dan Informasi Wisata
- g. Festival Budaya dan Ekonomi Kreatif Daerah

3.2.4.4 Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM

Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi, dan UMKM adalah serangkaian kebijakan, strategi, dan intervensi pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi lokal melalui penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

modernisasi dan profesionalisasi koperasi, serta penciptaan nilai tambah terhadap produk unggulan daerah berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

a. Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing UMKM

- 1) Pelatihan manajemen usaha, kewirausahaan, dan digital marketing bagi pelaku UMKM.
- 2) Pendampingan untuk mendorong UMKM naik kelas (mikro → kecil → menengah).

b. Penguatan Kelembagaan dan Transformasi Koperasi

- 1) Revitalisasi koperasi agar aktif, sehat, dan adaptif terhadap era digital.
- 2) Fasilitasi legalitas dan akuntabilitas koperasi (NIK, NIB, laporan keuangan).

c. Akses Pembiayaan dan Permodalan Usaha

- 1) Fasilitasi UMKM dalam memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), LPDB, dan skema pembiayaan lainnya.

d. Pengembangan Produk Unggulan Lokal

- 1) Pemberdayaan UMKM berbasis potensi daerah (pertanian, perikanan, kuliner).
- 2) Sertifikasi produk, pelatihan kemasan, dan branding.

e. Digitalisasi UMKM dan Koperasi

- 1) Mendorong UMKM masuk ke e-katalog, marketplace, dan platform digital lainnya.
- 2) Pengembangan sistem informasi koperasi dan UMKM berbasis daring.

f. Penguatan Sentra Ekonomi Desa

- 1) Pembentukan sentra UMKM dan BUMDes produktif di tiap kecamatan.
- 2) Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas dan kelompok usaha bersama (KUB).

g. Peningkatan Kontribusi UMKM terhadap PDRB Daerah

- 1) Monitoring kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Penguatan jejaring usaha dan kemitraan pasar.

3.2.4.5 Pemerintahan Digital (PEMDI)

Pemerintahan digital (PEMDI) adalah program untuk mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui:

- a. Penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat;
- b. Penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah termasuk untuk pengamanan sistem informasi;
- c. Penataan database kepegawaian yang terpadu serta pengembangan kompetensi ASN;
- d. Pendekatan pelayanan adminduk sampai ke tingkat Kecamatan;
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan.
- f. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- g. Reformasi Birokrasi.

3.2.4.6 Membangun Desa Menata Kota

Membangun Desa Menata Kota adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan infrastruktur di desa dan kota, melalui:

- a. Revitalisasi Kota menjadi kota bersih, kota hijau dan kota aman
- b. Peningkatan pembangunan Infrastruktur
- c. Peningkatan penyediaan air bersih dan air minum masyarakat (PASMINUMMAS)
- d. Peningkatan Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal
- e. Peningkatan desa mandiri, desa wisata, dan desa sehat
- f. Pengembangan Kawasan Ekonomi Lokal
- g. Penguatan BUMD & Holding Company Daerah
- h. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Ekonomi Daerah
- i. Optimalisasi Pajak & Retribusi Daerah.

3.2.4.7 Pembangunan Kolaboratif

Pembangunan Kolaboratif adalah suatu pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas dan partisipasi pemerintah, organisasi, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama, melalui:

- a. Peningkatan kualitas guru melalui program guru pembelajar
- b. Peningkatkan kegiatan adiwiyata di sekolah
- c. Peningkatan program beasiswa
- d. Peningkatan di bidang kesehatan dengan peningkatan program posyandu, pencegahan penyakit dan bantuan alat kesehatan
- e. Peningkatan kolaboratif di bidang lingkungan hidup melalui program pengolahan sampah, penanaman pohon dan konservasi air.
- f. Pembangunan Kawasan Industri & UMKM

3.2.4.8 Pembangunan Perbatasan

Pembangunan perbatasan Kabupaten Sambas adalah suatu upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan dukungan pemerintah pusat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, memperkuat integrasi wilayah negara, serta menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang maju, aman, dan berdaya saing. Pembangunan ini mencakup penguatan infrastruktur dasar, layanan publik, pengembangan ekonomi lokal, konektivitas antar wilayah, serta pengelolaan potensi strategis di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan perdagangan lintas batas negara.

Melalui program ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan melalui beberapa strategi utama:

- a. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas
 - 1) Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional dan daerah menuju perbatasan (Temajuk–Aruk–Sambas)
 - 2) Penyediaan listrik 24 jam, jaringan air bersih, dan infrastruktur telekomunikasi di desa-desa perbatasan
 - 3) Pengembangan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai pusat layanan terpadu, perdagangan, dan pariwisata
- b. Penguatan Layanan Publik dan SDM
 - 1) Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara dengan wilayah perkotaan

- 2) Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pertanian modern, dan penguatan kelembagaan lokal
- c. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Perbatasan
 - 1) Peningkatan kapasitas UMKM di sektor agribisnis, ekonomi kreatif, dan kuliner lokal
 - 2) Pengembangan desa wisata di Temajuk, Sebulus, dan Sumber Harapan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas–Singkawang
 - 3) Fasilitasi perdagangan lintas batas dan promosi produk unggulan ke pasar ekspor
- d. Penguatan Ketahanan Sosial dan Keamanan Wilayah
 - 1) Sinergi antara aparat keamanan, masyarakat adat, dan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas wilayah
 - 2) Pembinaan wawasan kebangsaan dan integrasi sosial di daerah perbatasan.

3.2.4.9 Green Growth

Green Growth (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan), melalui kebijakan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan dan pelanggaran tata ruang, peningkatan teknologi produksi dan konservasi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan hidup berbasis komoditas dengan strategi;

- a. Melakukan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
- b. Memastikan pelaksanaan pembangunan memiliki izin lingkungan.
- c. Pengendalian dalam pemanfaatan ruang.
- d. Penataan terhadap perizinan khususnya yang bersinggungan dengan lahan di Kabupaten Sambas.
- e. Meningkatkan pengelolaan Kebun Raya Sambas
- f. Mengembangkan Ruang Terbuka Hijau

Tabel 3. 7
Matrik Penyelarasan Prioritas Pembangunan

Prioritas Nasional (RPJMN 2025-2029/Asta Cita)	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat 2025-2029	Prioritas Pembangunan Kabupaten Sambas	Program Unggulan Bupati Sambas
Asta Cita 1 SDM Unggul	Meningkatkan Kualitas SDM dan Kesetaraan Gender	Penurunan Stunting <20%, Rata-rata lama sekolah, Beasiswa daerah, layanan Kesehatan promotif-preventif.	Bentuk IMAN, Pelayanan DIKTAN
Asta Cita 2 Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Memperkuat Fondasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Hilirisasi Pertanian, perkebunan, perikanan; Revitalisasi pasar rakyat dan UMKM; penguatan ekonomi kreatif	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM
Asta Cita 3 Pembangunan Merata dan berkeadilan	Percepatan Pembangunan infrastruktur yang Adil dan berkelanjutan	Pembangunan jalan; jembatan dermaga; penataan Kawasan perdesaan dan perbatasan	Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Perbatasan
Asta Cita 4 Reformasi Birokrasi	Kepastian Hukum dan Tata pemerintahan	Reformasi birokrasi - Reformasi pelayanan publik berbasis digital - Perencanaan, evaluasi dan pengawasan pembangunan berbasis data	Pemerintahan Digital (PEMDI)
Asta cita 5. Pelestarian lingkungan dan budaya serta penguatan toleransi.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan	- Pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian pencemaran - Penguatan ketahanan lingkungan dan kebencanaan - Pemajuan kebudayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian	Green Growth; Pemajuan Kebudayaan

Tabel 3. 8
Sinkronisasi Program Prioritas RPJMD dengan
Program Unggulan Bupati

No	Misi	Program Prioritas Daerah	Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Kualitas Kehidupan yang Harmonis	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani)
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani)
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani)
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Program Pengelolaan Pendidikan	Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani), Pelayanan Dikatan, Pembangunan Kolaboratif
		Program Pengembangan Kebudayaan	Pemajuan Kebudayaan
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pemajuan Kebudayaan
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Dikatan, Pembangunan Kolaboratif
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan Dikatan
		Program Pemberdayaan Sosial	Pelayanan Dikatan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pelayanan Dikatan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Membangun Desa Menata Kota
		Program Hubungan Industrial	Pelayanan Dikatan, Pembangunan Kolaboratif
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Kolaboratif
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Membangun Desa Menata Kota, Pembangunan Kolaboratif
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelayanan Dikatan
		Program Perlindungan Khusus Anak	Pelayanan Dikatan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelayanan Dikatan
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelayanan Dikatan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pelayanan Dikatan, Pembangunan Kolaboratif

No	Misi	Program Prioritas Daerah	Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahaan	Pelayanan Diklat, Pembangunan Kolaboratif
		Program Pembinaan Perpustakaan	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Pemerintahan Digital (PEMDI), Pemajuan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Arsip	Pemerintahan Digital (PEMDI)
3	Meningkatkan Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemandirian Daerah	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pemajuan Kebudayaan, Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pemajuan Kebudayaan, Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Membangun Desa Menata Kota
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Membangun Desa Menata Kota
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Membangun Desa Menata Kota
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Membangun Desa Menata Kota
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Membangun Desa Menata Kota
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengelolaan Pelayaran	Membangun Desa Menata Kota
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Pembangunan Kolaboratif & Membangun Desa Menata Kota

No	Misi	Program Prioritas Daerah	Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM, Pembangunan Kolaboratif & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Membangun Desa Menata Kota
		Program Pengembangan Ekspor	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM & Pembangunan Kolaboratif
		Program Pengelolaan Perbatasan	Pembangunan Perbatasan

No	Misi	Program Prioritas Daerah	Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati
4	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan	Program Pencatatan Sipil	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pendaftaran Penduduk	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Penataan Desa	Membangun Desa Menata Kota, Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Membangun Desa Menata Kota, Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bentuk IMAN (Pembentukan Insan Madani), Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Pemerintahan Digital (PEMDI), Ekonomi Bernilai Tambah, Koperasi dan UMKM
		Program Kepegawaian Daerah	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Green Growth
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemerintahan Digital (PEMDI)
5	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas, Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Penanggulangan Bencana	Green Growth
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Green Growth

No	Misi	Program Prioritas Daerah	Relevansi Terhadap Program Unggulan Bupati
		Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Green Growth
		Program Pengelolaan Persampahan	Green Growth, Pembangunan Kolaboratif

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Bab ini merupakan bab yang memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan juga memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas pada RPJMD Kab. Sambas Tahun 2025-2029. Dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD harus didukung dan sejalan dengan program pemenuhan layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diselaraskan dengan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif untuk perodesasi RPJMD Kab. Sambas Tahun 2025-2030.

Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah sejak mulai tahun 2025 sampai dengan 2030, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Indikasi rencana program dan kegiatan telah disesuaikan dengan perkembangan situasi yang mendasari dilakukannya perubahan RPJMD ini serta telah menyesuaikan dengan OPD sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam penentuan target kinerja program di masing-masing urusan wajib/pilihan disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Sambas selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2025-2030.

Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dirumuskan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Indikasi program prioritas dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD tahun 2025-2030 disajikan berdasarkan misi pembangunan kabupaten Sambas. Adapun Indikasi program dan pagu indikatif serta target kinerja tahun 2025-2030 ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					472.914.956.000		487.243.061.471,74		502.057.719.074,89		517.233.267.300,22		530.241.301.864,73	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					376.708.678.872,9		388.009.939.239,09		399.650.237.416,26		411.639.744.538,74		421.930.738.152,22	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	376.708.678.872,9	100	388.009.939.239,09	100	399.650.237.416,26	100	411.639.744.538,74	100	421.930.738.152,22	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					92.996.277.127,1		95.958.922.232,65		99.067.797.658,63		102.187.045.081,48		104.835.956.478,91	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun) (%)	15,22	18,66	22,1	92.996.277.127,1	25,54	95.958.922.232,65	28,99	99.067.797.658,63	32,43	102.187.045.081,48	35,87	104.835.956.478,91	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun) (%)	66,85	70,06	73,1		76,14		79,18		82,22		85,18		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun)	97,8	97,4	97,76		98,11		98,47		98,83		99,19		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	55,14	57,64	60,14		62,64		65,14		67,64		70,14		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	55,6	58	60,4		62,8		65,2		67,6		70		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	71,33	72,23	73,13		74,03		74,93		75,83		76,73		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	69,64	71,14	72,64		74,14		75,64		77,14		78,64		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	69,29	70,29	71,29		72,29		73,29		74,29		75,29		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	70,29	71,29	72,29		73,29		74,29		75,29		76,29		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SD (%)	53,34	55,84	58,34		60,84		63,34		65,84		68,34		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Literasi SMP (%)	66,38	67,48	68,58		69,68		70,78		71,88		72,98		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Skor Kemampuan Numerasi SD (%)	47,74	50,64	53,54		56,44		59,34		62,24		65,14		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Skor Kemampuan Numerasi SMP (%)	59,71	61,21	62,71		64,21		65,71		67,21		68,71		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					500.000.000		510.000.000		520.200.000		530.604.000		541.216.080	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	15,86	19,25	20,05	500.000.000	20,85	510.000.000	21,65	520.200.000	22,45	530.604.000	23,25	541.216.080	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.710.000.000		2.764.200.000		2.819.484.000		2.875.873.680		2.933.391.153,6	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	45,13	46,94	51,18	2.710.000.000	56,83	2.764.200.000	63,9	2.819.484.000	72,38	2.875.873.680	80,86	2.933.391.153,6	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	68,53	69,89	70,64		71,39		72,14		72,89		73,54		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					522.329.515.570,8		543.222.696.193,63		559.519.377.079,44		573.443.394.261,68		584.875.613.277,4	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					127.640.445.580,12		132.746.063.403,32		136.728.445.305,42		140.146.656.438,07		142.949.589.566,82	
Tersedianya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	127.640.445.580,12	100	132.746.063.403,32	100	136.728.445.305,42	100	140.146.656.438,07	100	142.949.589.566,82	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					386.929.069.990,68		402.406.232.790,31		414.478.419.774,02		424.777.670.686,56		433.237.295.785,9	
Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Akses terhadap Air Minum Aman (%)	76	80	84	386.929.069.990,68	88	402.406.232.790,31	93	414.478.419.774,02	96	424.777.670.686,56	97	433.237.295.785,9	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Akses terhadap Sanitasi Aman (%)	1,62	2	2,5		3		3,5		4		4,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%)	-	60	61		62		63		64		65		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap (%)	56,8	80	85		90		95		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan (%)	-	65	66,3		67,6		69		70,4		71,8		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi (%)	82,6	82,8	83		83,2		83,5		83,7		84		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif (%)	86,1	86,2	86,3		86,4		86,5		86,7		86,8		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (%)	72,45	90	90		90		90		90		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Insidensi HIV/AIDS (Rasio)	0,09	0,09	0,08		0,07		0,06		0,05		0,04		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan (%)	88	88	88		88		88		88		88		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun (%)	-	61	64		67		70		73		76		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK (%)	72,75	73	74		75		76		77		80		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA (%)	75,03	82,43	75		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA (%)	74,36	81,2	83		85		90		95		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak	84,95	94,9	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA (%)	83,65	97,94	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS) (%)	-	70	74		78		82		86		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan (%)	62,69	64	65		67		68		69		71		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Pemeriksaan kesehatan pranika (%)	85,7	86	86		86		86		86		87		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Penemuan kasus pneumonia balita (%)	2,88	3,31	40		45		50		55		60		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	17	22,6	28		33,4		38,8		44,2		49,6		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	65	65	70		75		80		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	60,71	67,86	75		82,14		89,29		96,43		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	41,95	41,95	41,95		41,95		54,87		54,87		54,87		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	25	30	35		40		45		50		55		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Praktik Inisiasi Menyusu Dini (%)	87,6	88	88,4		88,8		89,2		89,6		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	0,13	1,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	38,92	11,4	11,4		11,4		11,4		11,4		11,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	11,1	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (%)	65	65	70		75		80		85		90		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Remaja putri yang diskriming anemia (%)	84,3	85	87		89		91		93		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Remaja putri yang Konsumsi TTD (%)	97,5	97,6	97,7		97,8		97,9		98		98		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi (%)	-	35	38		41		44		47		50		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan	84,4	85	85,5		86		86,5		87		87,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					4.030.000.000		4.191.200.000		4.316.936.000		4.424.206.258,03		4.512.316.177,38	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase SDMk yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan (%)	15	15	20	4.030.000.000	25	4.191.200.000	30	4.316.936.000	35	4.424.206.258,03	40	4.512.316.177,38	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	20	20	30		40		50		60		70		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	33,34	33,34	66,67		66,67		66,67		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Per 1000 Penduduk)	2,29	2,5	2,7		2,9		3,1		3,3		3,5		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					530.000.000		551.200.000		567.736.000		581.843.502,92		593.431.159,8	
Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan di Pemerintah Daerah	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	100	100	100	530.000.000	100	551.200.000	100	567.736.000	100	581.843.502,92	100	593.431.159,8	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	90	90	91		92		93		94		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar (%)	83	85	87		89		91		93		95		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	81	83,5	84		84,5		85		85,5		86		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	75	75	77		79		81		83		85		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					3.200.000.000		3.328.000.000		3.427.840.000		3.513.017.376,1		3.582.980.587,5	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat (%)	8	9	10	3.200.000.000	12	3.328.000.000	15	3.427.840.000	19	3.513.017.376,1	24	3.582.980.587,5	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase Posyandu Aktif (%)	99,32	90	90		91		91		92		92		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					363.990.674.248,58		398.135.197.294,61		402.142.221.067,09		419.354.700.689,476		435.438.206.285,59	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.438.302.840,57		11.851.364.461,45		12.769.188.087,21		13.244.093.412,23		13.749.764.398,69	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	11.438.302.840,57	100	11.851.364.461,45	100	12.769.188.087,21	100	13.244.093.412,23	100	13.749.764.398,69	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					52.859.655.619,53		54.768.531.029,95		59.010.055.446,08		61.204.728.229,46		63.541.577.897,94	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara (Ha)	-	2.319,69	2.449,36	52.859.655.619,53	2.593,44	54.768.531.029,95	2.737,52	59.010.055.446,08	2.881,6	61.204.728.229,46	3.025,68	63.541.577.897,94	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN					29.763.009.012,33		33.837.815.031,88		33.226.035.839,35		34.461.762.123,53		35.777.542.124,96	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ((%))	18,98	19,13	20,1	29.763.009.012,33	21,08	33.837.815.031,88	22,06	33.226.035.839,35	23,04	34.461.762.123,53	24,04	35.777.542.124,96	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak (%)	42,39	43,79	46,01		48,25		50,49		52,75		55,02		2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.703.781.305,61		4.873.644.925,87		5.251.082.179,71		5.446.377.829,86		5.654.325.264,55	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak (%)	53,29	53,46	53,66	4.703.781.305,61	53,89	4.873.644.925,87	54,14	5.251.082.179,71	54,42	5.446.377.829,86	54,72	5.654.325.264,55	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	-	0,15	0,3		0,5		0,7		1,05		1,41		2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					5.813.461.310,68		6.023.397.853,3		6.489.877.208,91		6.731.245.510,82		6.988.250.309,23	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	15,49	15,71	5.813.461.310,68	15,93	6.023.397.853,3	16,15	6.489.877.208,91	16,73	6.731.245.510,82	16,59	6.988.250.309,23	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					7.219.117.153,95		7.479.814.940,54		8.059.085.866,78		8.358.815.400,62		8.677.962.230,62	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	-	80,16	81,73	7.219.117.153,95	83,3	7.479.814.940,54	84,87	8.059.085.866,78	86,44	8.358.815.400,62	88,02	8.677.962.230,62	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					4.136.195.515,77		4.285.562.397,19		4.617.455.862,34		4.789.185.996,006		4.972.041.275,83	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	-	56,41	57,52	4.136.195.515,77	58,62	4.285.562.397,19	59,73	4.617.455.862,34	60,83	4.789.185.996,006	61,94	4.972.041.275,83	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					244.451.989.429,04		271.279.714.467,64		268.694.805.708,7		280.944.175.090,36		291.743.046.635,83	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap (%)	-	45,72	46,94	244.451.989.429,04	48,16	271.279.714.467,64	49,38	268.694.805.708,7	50,6	280.944.175.090,36	51,82	291.743.046.635,83	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap (%)	-	46,71	47,93		49,15		50,37		51,59		52,81		1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					968.664.172,51		1.003.644.711,04		1.081.371.527,27		1.121.589.362,04		1.164.412.617,77	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	-	51,5	53	968.664.172,51	54,5	1.003.644.711,04	56	1.081.371.527,27	57,5	1.121.589.362,04	59	1.164.412.617,77	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					2.636.497.888,59		2.731.707.475,75		2.943.263.340,74		3.052.727.734,55		3.169.283.530,17	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan	0,17	0,28	0,13	2.636.497.888,59	0,43	2.731.707.475,75	0,51	2.943.263.340,74	0,74	3.052.727.734,55	0,97	3.169.283.530,17	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					43.440.078.701,71		45.008.793.009,31		48.494.478.874		50.298.061.537,3		52.218.485.200,74	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.295.120.543,31		6.522.450.832,72		7.027.579.123,36		7.288.945.368,81		7.567.243.632,05	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	6.295.120.543,31	100	6.522.450.832,72	100	7.027.579.123,36	100	7.288.945.368,81	100	7.567.243.632,05	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					1.365.596.978,55		1.414.911.611,08		1.524.488.808,64		1.581.186.842,09		1.641.557.928,68	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	54,46	15	30	1.365.596.978,55	45	1.414.911.611,08	60	1.524.488.808,64	75	1.581.186.842,09	90	1.641.557.928,68	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					923.662.942,9		957.018.390,61		1.031.134.252,29		1.069.483.687,19		1.110.317.503,01	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani (%)	-	6,3	12,6	923.662.942,9	18,91	957.018.390,61	25,21	1.031.134.252,29	31,51	1.069.483.687,19	37,81	1.110.317.503,01	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					689.595.830		714.498.613		769.832.638		798.463.873		828.949.917	
Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	21,82	21,67	21,52	689.595.830	21,37	714.498.613	21,22	769.832.638	21,07	798.463.873	20,92	828.949.917	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					34.166.102.406,95		35.399.913.561,9		38.141.444.051,71		39.559.981.766,21		41.070.416.220	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	-	100	100	34.166.102.406,95	100	35.399.913.561,9	100	38.141.444.051,71	100	39.559.981.766,21	100	41.070.416.220	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan (%)	12,2	12,81	13,45		14,13		14,83		15,57		16,35		2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.753.825.899,6		16.001.016.032,06		19.828.001.696,37		22.218.210.462,74		25.387.689.755,13	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN					10.792.302.483,2		13.495.359.419,92		16.645.948.100,59		18.606.848.827,59		21.186.790.258,36	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.426.992.884	100	8.952.191.461	100	10.739.829.754	100	11.814.812.729	100	13.308.028.384	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.365.309.599,2	100	4.543.167.958,92	100	5.906.118.346,59	100	6.792.036.098,59	100	7.878.761.874,36	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					684.000.000		781.000.000		940.000.000		1.033.000.000		1.210.000.000	
Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	-	75	76	684.000.000	77	781.000.000	78	940.000.000	79	1.033.000.000	80	1.210.000.000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	-	75	76		77		78		79		80		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	-	75	76		77		78		79		80		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	-	75	76		77		78		79		80		1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					922.523.416,4		1.199.656.612,14		1.557.053.595,78		1.803.361.635,15		2.085.899.496,77	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana serta penanganan bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	-	75	75	922.523.416,4	75	1.199.656.612,14	80	1.557.053.595,78	80	1.803.361.635,15	80	2.085.899.496,77	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	-	35	40		45		45		50		50		1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana (%)	94	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					355.000.000		525.000.000		685.000.000		775.000.000		905.000.000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan pelayanan penyelamatan serta evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	70	45	50	355.000.000	55	525.000.000	60	685.000.000	65	775.000.000	70	905.000.000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	-	75	75		75		80		80		80		1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.254.184.262,26		7.817.730.327,83		10.163.049.426,17		11.687.506.840,1		13.791.258.071,32	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.376.358.846,62		2.970.448.558,28		3.861.583.125,75		4.440.820.594,62		5.240.168.301,66	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.376.358.846,62	100	2.970.448.558,28	100	3.861.583.125,75	100	4.440.820.594,62	100	5.240.168.301,66	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					425.000.000		531.250.000		664.062.500		830.078.125		1.037.597.656,25	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	11,11	11,11	22,22	425.000.000	33,33	531.250.000	44,44	664.062.500	55,56	830.078.125	66,67	1.037.597.656,25	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial (%)	58,66	58,66	59,81		64,59		69,38		74,16		78,95		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					50.000.000		62.500.000		78.125.000		97.656.250		122.070.312,5	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan (%)	3	5	10	50.000.000	15	62.500.000	20	78.125.000	25	97.656.250	30	122.070.312,5	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					1.527.825.415,64		1.909.781.769,55		2.387.227.211,94		2.984.034.014,92		3.730.042.518,65	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	1.527.825.415,64	100	1.909.781.769,55	100	2.387.227.211,94	100	2.984.034.014,92	100	3.730.042.518,65	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					1.325.000.000		1.656.250.000		2.312.676.588,48		2.260.699.105,56		2.684.816.782,26	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (Keluarga)	1,45	3,33	6,66	1.325.000.000	9,99	1.656.250.000	13,32	2.312.676.588,48	16,65	2.260.699.105,56	19,98	2.684.816.782,26	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Daerah yang Melaksanakan	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1,45	3,33	6,66		9,99		13,32		16,65		19,98		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					300.000.000		375.000.000		468.750.000		585.937.500		732.421.875	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	300.000.000	100	375.000.000	100	468.750.000	100	585.937.500	100	732.421.875	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS		
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya (%)	1,03	1,54	2,05		2,56		3,08		3,59		4,1		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					250.000.000		312.500.000		390.625.000		488.281.250		244.140.625	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik (%)	100	100	100	250.000.000	100	312.500.000	100	390.625.000	100	488.281.250	100	244.140.625	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL KABUPATEN SAMBAS
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.089.692.582,22		9.216.600.356,11		11.059.920.428,28		12.718.908.492,55		14.626.744.766,4	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.135.310.484,7		6.675.903.630,11		8.011.084.356,14		9.212.747.009,55		10.594.659.060,99	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.135.310.484,7	100	6.675.903.630,11	100	8.011.084.356,14	100	9.212.747.009,55	100	10.594.659.060,99	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					80.000.000		100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	40	45	50	80.000.000	60	100.000.000	75	120.000.000	90	140.000.000	100	160.000.000	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					651.460.699,34		846.797.818		1.016.278.690		1.168.720.493		1.344.028.568,94	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%)	10	15	20	651.460.699,34	40	846.797.818	60	1.016.278.690	80	1.168.720.493	100	1.344.028.568,94	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian (%)	-	1,5	1,75		2		2,25		2,5		2,75		2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					571.460.699,18		746.898.908		896.278.690,14		1.028.720.494		1.184.028.568,47	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pekerja Informal (%)	68,51	68,25	68	571.460.699,18	67,75	746.898.908	67,5	896.278.690,14	67,25	1.028.720.494	67	1.184.028.568,47	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	70	72,5	75		77,5		80		82,5		85		2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					651.460.699		847.000.000		1.016.278.692		1.168.720.496		1.344.028.568	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Perusahaan)	5	5	5	651.460.699	5	847.000.000	7	1.016.278.692	9	1.168.720.496	11	1.344.028.568	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.532.678.487,4		8.662.580.262,16		9.788.715.694,7		10.669.700.108,25		11.736.670.118,78	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.184.216.438,4		4.811.848.904,16		5.437.389.261,7		5.926.754.295,25		6.519.429.724,78	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.184.216.438,4	100	4.811.848.904,16	100	5.437.389.261,7	100	5.926.754.295,25	100	6.519.429.724,78	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					784.795.793		902.515.162		1.019.842.133		1.111.627.925		1.222.790.717	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	-	4	5	784.795.793	6	902.515.162	7	1.019.842.133	8	1.111.627.925	9	1.222.790.717	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	59,91	73,03	73,28		73,53		73,78		74,03		74,28		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					523.197.195		601.676.775		679.894.755		741.085.283		815.193.812	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	523.197.195	100	601.676.775	100	679.894.755	100	741.085.283	100	815.193.812	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					732.476.073		842.347.484		951.852.657		1.037.519.397		1.141.271.336	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga (Keluarga)	-	100	110	732.476.073	120	842.347.484	130	951.852.657	140	1.037.519.397	150	1.141.271.336	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks)	-	5	10		15		20		25		25		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA					156.959.159		180.503.032		203.968.427		222.325.585		244.558.143	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)	-	50	55	156.959.159	60	180.503.032	65	203.968.427	70	222.325.585	75	244.558.143	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					627.836.634		722.012.130		815.873.706		889.302.340		978.232.574	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	56,07	58,06	61,76	627.836.634	65,46	722.012.130	69,16	815.873.706	72,91	889.302.340	72,91	978.232.574	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					523.197.195		601.676.775		679.894.755		741.085.283		815.193.812	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	-	62,29	68,29	523.197.195	74,29	601.676.775	80,29	679.894.755	86,44	741.085.283	86,44	815.193.812	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100				100				100			100	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	100				100				100			100	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					6.100.000.000		6.477.425.000		7.340.000.000		7.605.500.000		8.008.500.000			
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					1.250.000.000		1.386.425.000		1.550.000.000		1.650.000.000		1.750.000.000			
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	17,93	18	18	1.250.000.000	18	1.386.425.000	18	1.550.000.000	18	1.650.000.000	18	1.750.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					3.650.000.000		3.830.000.000		4.320.000.000		4.450.500.000		4.568.500.000			
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rata-rata konsumsi energi (Kkal/Kapita/Hari)	1.947,38	1.954,65	1.961,92	3.650.000.000	1.969,19	3.830.000.000	1.976,45	4.320.000.000	1.983,72	4.450.500.000	1.990,99	4.568.500.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN		
	Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen (%)	-	5-10	5-10				5-10				5-10		5-10	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					800.000.000		856.000.000		880.000.000		900.000.000		1.020.000.000			
Meningkatnya penanganan rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	1,02	1,02	1,02	800.000.000	1,02	856.000.000	0,5	880.000.000	0,5	900.000.000	0,5	1.020.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					400.000.000		405.000.000		590.000.000		605.000.000		670.000.000			
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	-	62	64	400.000.000	66	405.000.000	68	590.000.000	70	605.000.000	72	670.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.055.475.028,79		1.093.590.493,04		1.178.283.120,32		1.222.105.243,17		1.268.766.282,74	
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					217.340.536,79		225.189.169,2		242.628.843,8		251.652.575,71		261.260.889,56	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Laporan Hasil Penyelesaian masalah ganti Kerugian dan penanganan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	217.340.536,79	100	225.189.169,2	100	242.628.843,8	100	251.652.575,71	100	261.260.889,56	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					350.000.000		362.639.249,84		390.723.684,52		405.255.286,46		420.728.285,18	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)	-	100	100	350.000.000	100	362.639.249,84	100	390.723.684,52	100	405.255.286,46	100	420.728.285,18	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					488.134.492		505.762.074		544.930.592		565.197.381		586.777.108	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum (%)	50	55	60	488.134.492	65	505.762.074	70	544.930.592	75	565.197.381	80	586.777.108	1.03.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					14.429.490.386,91		14.950.570.198,34		16.108.410.427,74		16.707.506.457,8		17.345.413.561,62	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					573.404.743,67		594.111.617,41		640.122.326,19		663.929.439,01		689.278.841,48	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	-	100	100	573.404.743,67	100	594.111.617,41	100	640.122.326,19	100	663.929.439,01	100	689.278.841,48	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					1.324.841.621,98		1.372.684.491,27		1.478.991.428,41		1.533.997.345,8		1.592.566.696,45	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	58,75	74,17	74,37	1.324.841.621,98	74,57	1.372.684.491,27	74,77	1.478.991.428,41	74,97	1.533.997.345,8	75,17	1.592.566.696,45	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	42,49	68,29	68,33		68,37		68,41		68,45		68,49		2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	89,29	83,48	83,58		83,68		83,78		83,88		83,98		2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					2.469.114.673,51		2.558.279.694,17		2.756.404.522,1		2.858.919.355,2		2.968.075.378,6	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	5	6	7	2.469.114.673,51	10	2.558.279.694,17	12	2.756.404.522,1	16	2.858.919.355,2	20	2.968.075.378,6	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					384.096.403,95		397.966.947,98		428.787.320,46		444.734.566,32		461.714.918,22	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	-	90	95	384.096.403,95	100	397.966.947,98	100	428.787.320,46	100	444.734.566,32	100	461.714.918,22	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					50.000.000		51.805.607,12		55.817.669,22		57.893.612,35		60.104.040,74	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	18,97	20,51	22,05	50.000.000	23,59	51.805.607,12	25,13	55.817.669,22	26,67	57.893.612,35	28,21	60.104.040,74	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					184.680.948,73		191.350.173,45		206.169.202,14		213.836.945,09		222.001.425,33	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	-	100	100	184.680.948,73	100	191.350.173,45	100	206.169.202,14	100	213.836.945,09	100	222.001.425,33	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					9.443.351.995,07		9.784.371.666,94		10.542.117.959,22		10.934.195.194,03		11.351.672.260,8	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan persampahan (%)	41,47	41,1	42,8	9.443.351.995,07	52,5	9.784.371.666,94	60,5	10.542.117.959,22	65	10.934.195.194,03	71	11.351.672.260,8	2.11.1.03.1.04.04.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					10.229.417.290,5		12.275.300.748,6		14.116.595.860,89		15.669.421.405,59		17.706.446.188,31	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.123.817.290,5		9.570.520.748,6		11.006.098.860,89		12.216.769.735,59		13.756.576.069,31	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.123.817.290,5	100	9.570.520.748,6	100	11.006.098.860,89	100	12.216.769.735,59	100	13.756.576.069,31	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					790.600.000		1.014.280.000		1.166.422.000		1.294.728.420		1.483.691.267	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan	9,71	9,8	9,9	790.600.000	10	1.014.280.000	10,1	1.166.422.000	10,2	1.294.728.420	10,3	1.483.691.267	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	64,79	65	66		67		68		69		70		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					525.000.000		670.500.000		771.075.000		855.893.250		981.519.997	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	99	99	525.000.000	99	670.500.000	99	771.075.000	99	855.893.250	99	981.519.997	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	99	99		99		99		99		99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	99	99		99		99		99		99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	-	99	99		99		99		99		99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					640.000.000		825.000.000		948.750.000		1.053.112.500		1.205.871.255	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra (Dokumen)	-	1	1	640.000.000	1	825.000.000	1	948.750.000	1	1.053.112.500	1	1.205.871.255	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	-	99	99		99		99		99		99		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					150.000.000		195.000.000		224.250.000		248.917.500		278.787.600	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	-	100	100	150.000.000	100	195.000.000	100	224.250.000	100	248.917.500	100	278.787.600	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					5.330.270.678,06		6.822.746.467,92		8.869.570.408,3		10.200.005.969,54		12.036.007.044,06	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.025.305.835,18		2.592.391.469,04		3.370.108.909,76		3.875.625.246,21		4.573.237.790,54	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.025.305.835,18	100	2.592.391.469,04	100	3.370.108.909,76	100	3.875.625.246,21	100	4.573.237.790,54	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					225.000.000		281.250.000		351.562.500		439.453.125		549.316.406,25	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	225.000.000	100	281.250.000	100	351.562.500	100	439.453.125	100	549.316.406,25	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					100.000.000		121.250.000		147.437.500		179.759.375		219.707.968,75	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa (Persentase)	15,9	20,51	25,64	100.000.000	30,77	121.250.000	35,9	147.437.500	41,03	179.759.375	46,15	219.707.968,75	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.354.964.842,88		3.046.604.998,88		4.023.898.998,54		4.484.465.098,33		5.167.865.972,27	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Desa Mandiri (Desa)	189	43	55	2.354.964.842,88	56	3.046.604.998,88	57	4.023.898.998,54	58	4.484.465.098,33	59	5.167.865.972,27	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	18,39	23,87	29,35		34,83		40,31		45,79		50		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					625.000.000		781.250.000		976.562.500		1.220.703.125		1.525.878.906,25	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	-	100	100	625.000.000	100	781.250.000	100	976.562.500	100	1.220.703.125	100	1.525.878.906,25	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SAMBAS
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					7.115.481.856		8.182.804.135		9.246.568.672		10.078.759.852		11.086.635.838	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.883.509.903		2.166.036.389		2.447.621.119		2.667.907.020		2.934.697.722	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	32,3	32,3	28,68	1.883.509.903	25,05	2.166.036.389	21,43	2.447.621.119	17,80	2.667.907.020	14,18	2.934.697.722	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	-	85,2	85,8		86,4		87		87,7		87,7		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	2,44	2,44	2,33		2,22		2,11		2,00		1,89		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.151.033.830		1.323.688.904		1.495.768.462		1.630.387.623		1.793.426.386	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)	59,2	61,8	61,9	1.151.033.830	62	1.323.688.904	62,1	1.495.768.462	62,2	1.630.387.623	62,2	1.793.426.386	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	9,6	10,5	10		9,5		9		8,5		8		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	11,2	11,2	11		10,8		10,6		10,4		10,2		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					4.080.938.123		4.693.078.842		5.303.179.091		5.780.465.209		6.358.511.730	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	55,3	56,6	58	4.080.938.123	59,3	4.693.078.842	60,8	5.303.179.091	62,2	5.780.465.209	63,7	6.358.511.730	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	81,6	82,7	83,6		84,9		86		87,1		88,2		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) (%)	93,91	90	90		90		90		90		90		90	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting (%)	83,9	90	90		90		90		90		90		90	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	20,3	21,4	22,6		23,9		25,2		26,6		28,1		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	76	76	78		80		82		84		86		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					46.768.843.561,3		48.457.766.699,83		52.210.556.792,34		54.152.345.986,11		56.219.929.576,24		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.230.585.974,36		7.491.697.924,63		8.071.889.123,26		8.372.094.829,48		8.691.748.679,64		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	7.230.585.974,36	100	7.491.697.924,63	100	8.071.889.123,26	100	8.372.094.829,48	100	8.691.748.679,64	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					36.887.208.240		38.212.895.571		41.169.795.097		42.693.361.917		44.315.203.419	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat (%)	76	77,5	79	36.887.208.240	80,5	38.212.895.571	82	41.169.795.097	83,5	42.693.361.917	85	44.315.203.419	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	76	77,5	79		80,5		82		83,5		85		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					2.551.049.346,94		2.643.173.204,2		2.847.872.572,08		2.953.789.239,63		3.066.567.477,6	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase Sarana,Prasarana, Informasi,Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan dengan kondisi baik (%)	69	70,5	72	2.551.049.346,94	73,5	2.643.173.204,2	75	2.847.872.572,08	76,5	2.953.789.239,63	78	3.066.567.477,6	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	
Meningkatnya pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Jumlah Fasilitas Udara yang tersedia (%)	-	-	50	100.000.000	55	110.000.000	60	121.000.000	65	133.100.000	70	146.410.000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.359.851.119,68		5.553.406.826,51		5.983.487.937,04		6.206.022.859,7		6.442.974.201,24	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.990.428.878,56		4.134.531.814,42		4.454.728.783,56		4.620.406.852,24		4.796.817.997,8	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.990.428.878,56	100	4.134.531.814,42	100	4.454.728.783,56	100	4.620.406.852,24	100	4.796.817.997,8	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI					526.700.861,97		545.721.158,5		587.984.289,8		609.852.310,56		633.137.001,32	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	-	82	83	526.700.861,97	84	545.721.158,5	85	587.984.289,8	86	609.852.310,56	87	633.137.001,32	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					842.721.379,15		873.153.853,59		940.774.863,68		975.763.696,9		1.013.019.202,12	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah (%)	-	74	80	842.721.379,15	85	873.153.853,59	90	940.774.863,68	95	975.763.696,9	100	1.013.019.202,12	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah (%)	-	50	60		70		80		90		100		2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					8.326.797.379,56		8.661.322.107,75		9.313.323.718,06		9.694.159.760,85		10.102.475.331,7	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.721.641.379,56		5.928.262.107,75		6.387.373.718,06		6.624.929.760,85		6.877.875.331,7	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	-	100	100	5.721.641.379,56	100	5.928.262.107,75	100	6.387.373.718,06	100	6.624.929.760,85	100	6.877.875.331,7	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					144.500.000		146.000.000		149.500.000		150.300.000		83.600.000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	-	0,5	1	144.500.000	1,5	146.000.000	2	149.500.000	2,5	150.300.000	3	83.600.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					269.000.000		272.000.000		293.000.000		299.000.000		323.000.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	16,78	17,9	18,79	269.000.000	19,65	272.000.000	20,5	293.000.000	21,33	299.000.000	22,15	323.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					192.300.000		197.500.000		200.800.000		203.000.000		240.000.000	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi (%)	-	0,11	0,14	192.300.000	0,16	197.500.000	0,18	200.800.000	0,2	203.000.000	0,23	240.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					236.000.000		237.500.000		239.800.000		240.000.000		252.000.000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	54,08	0,57	0,59	236.000.000	0,62	237.500.000	0,64	239.800.000	0,67	240.000.000	0,69	252.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					448.356.000		450.560.000		459.850.000		468.930.000		488.000.000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	50,77	51,53	52,06	448.356.000	52,57	450.560.000	53,07	459.850.000	53,57	468.930.000	54,05	488.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI,
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					771.000.000		874.500.000		1.001.000.000		1.116.000.000		1.240.000.000	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tanggung dan mandiri	Persentase usaha mikro yang menjadi wisrususaha (%)	-	6,8	7,03	771.000.000	7,89	874.500.000	8,03	1.001.000.000	8,71	1.116.000.000	8,91	1.240.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					544.000.000		555.000.000		582.000.000		592.000.000		598.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase usaha mikro yang naik kelas (%)	0,77	0,79	1,64	544.000.000	2,56	555.000.000	3,55	582.000.000	4,65	592.000.000	5,77	598.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.616.923.725,81		4.783.650.732,8		5.154.118.426,56		5.345.807.848,78		5.549.915.434,26	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.789.201.289,04		3.926.037.465,54		4.230.087.682,98		4.387.411.011		4.554.926.172	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	3.789.201.289,04	100	3.926.037.465,54	100	4.230.087.682,98	100	4.387.411.011	100	4.554.926.172	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					112.000.000		150.000.000		180.000.000		186.396.837,78		187.000.000	
Meningkatnya kemudahan investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Rp)	719.004.187.881	742.947.027.337	772.664.908.431	112.000.000	809.366.491.581	150.000.000	853.881.648.618	180.000.000	907.249.251.657	186.396.837,78	970.756.699.273	187.000.000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					100.000.000		115.000.000		115.000.000		130.000.000		135.000.000	
Meningkatnya promosi penanaman modal	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun (%)	100	100	100	100.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000	100	130.000.000	100	135.000.000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					215.722.436,77		237.000.000		250.000.000		260.000.000		270.000.000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	-	80	82	215.722.436,77	84	237.000.000	86	250.000.000	88	260.000.000	90	270.000.000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					300.000.000		255.613.267,26		279.030.743,58		282.000.000		297.989.262,26	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Fasilitasi Penvelesaian	-	80	82	300.000.000	84	255.613.267,26	86	279.030.743,58	88	282.000.000	90	297.989.262,26	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		105.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	-	90	91	100.000.000	92	100.000.000	93	100.000.000	94	100.000.000	95	105.000.000	2.18.0.00.0.00.23.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					5.415.000.000		5.936.500.000		6.800.150.000		7.741.165.000		8.415.281.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.215.000.000		1.336.500.000		1.470.150.000		1.617.165.000		1.778.881.500	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,5	0,6	1.215.000.000	0,7	1.336.500.000	0,8	1.470.150.000	0,9	1.617.165.000	1	1.778.881.500	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					4.000.000.000		4.400.000.000		5.130.000.000		5.924.000.000		6.436.400.000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang masuk Pelatda (%)	-	70	72	4.000.000.000	75	4.400.000.000	78	5.130.000.000	80	5.924.000.000	82	6.436.400.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	-	1	2	200.000.000	3	200.000.000	4	200.000.000	5	200.000.000	6	200.000.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					316.020.517,18		327.432.695,1		352.790.573,88		365.911.386,34		379.882.200,79	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					316.020.517,18		327.432.695,1		352.790.573,88		365.911.386,34		379.882.200,79	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SNN)	Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral (%)	-	53,8	55	316.020.517,18	56	327.432.695,1	58	352.790.573,88	59	365.911.386,34	60	379.882.200,79	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					421.360.689,58		436.576.926,8		470.387.431,84		487.881.848,45		506.509.601,06	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					421.360.689,58		436.576.926,8		470.387.431,84		487.881.848,45		506.509.601,06	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) (%)	-	20	25	421.360.689,58	35	436.576.926,8	50	470.387.431,84	70	487.881.848,45	100	506.509.601,06	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					14.550.000.000		14.841.000.000		15.137.820.000		15.440.576.400		15.749.387.928	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.500.000.000		2.550.000.000		2.601.000.000		2.653.020.000		2.706.080.400	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan (%)	42	48	48	2.500.000.000	50	2.550.000.000	53	2.601.000.000	58	2.653.020.000	61	2.706.080.400	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					4.500.000.000		4.590.000.000		4.681.800.000		4.775.436.000		4.870.944.720	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	20	22	22	4.500.000.000	24	4.590.000.000	26	4.681.800.000	28	4.775.436.000	30	4.870.944.720	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					3.050.000.000		3.111.000.000		3.173.220.000		3.236.684.400		3.301.418.088	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	78	80	80	3.050.000.000	80	3.111.000.000	85	3.173.220.000	85	3.236.684.400	85	3.301.418.088	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	42	50	50		52		55,6		60,75		60,75		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					4.500.000.000		4.590.000.000		4.681.800.000		4.775.436.000		4.870.944.720	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan ke Museum (Orang)	6.700	7.800	7.800	4.500.000.000	8.000	4.590.000.000	8.600	4.681.800.000	9.100	4.775.436.000	9.600	4.870.944.720	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					6.420.094.116,65		7.943.517.645,81		9.325.293.322,06		10.407.108.780,7		12.059.861.217,81	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.188.094.116,65		5.235.117.645,81		6.177.438.822,06		6.918.731.580,7		7.948.541.202,81	
meningkatkan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.188.094.116,65	100	5.235.117.645,81	100	6.177.438.822,06	100	6.918.731.580,7	100	7.948.541.202,81	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					1.915.200.000		2.305.470.000		2.676.680.500		2.970.085.800		3.492.884.175	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	75,32	76,32	77,32	1.915.200.000	78,32	2.305.470.000	79,32	2.676.680.500	80,32	2.970.085.800	81,32	3.492.884.175	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					316.800.000		402.930.000		471.174.000		518.291.400		618.435.840	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan (naskah)	1	1	1	316.800.000	1	402.930.000	1	471.174.000	1	518.291.400	1	618.435.840	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					624.835.722,4		862.644.653		1.065.978.190,54		1.231.115.313,41		1.324.096.490,42	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					368.576.522,4		557.233.653		724.655.190,54		780.901.313,41		842.463.990,42	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	49,57	50	52	368.576.522,4	54	557.233.653	56	724.655.190,54	58	780.901.313,41	60	842.463.990,42	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					229.468.800		275.172.000		308.853.000		406.514.000		434.952.500	
Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana (Arsip)	0	5	5	229.468.800	6	275.172.000	7	308.853.000	8	406.514.000	9	434.952.500	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					26.790.400		30.239.000		32.470.000		43.700.000		46.680.000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan (SOP)	0	1	1	26.790.400	1	30.239.000	1	32.470.000	1	43.700.000	1	46.680.000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					22.260.866.618,21		22.993.847.178,66		24.667.589.862,34		25.582.843.106,68		26.424.588.356,85	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.094.276.283,05		8.386.577.940,72		9.036.072.722,39		9.372.137.867,94		9.729.974.229,66	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	8.094.276.283,05	100	8.386.577.940,72	100	9.036.072.722,39	100	9.372.137.867,94	100	9.729.974.229,66	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					6.848.295.167,58		7.049.953.557,46		7.284.511.730,94		7.495.346.163,91		7.715.418.026,32	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	49.894,57	43.423,29	44.639	6.848.295.167,58	45.209	7.049.953.557,46	45.774	7.284.511.730,94	46.078	7.495.346.163,91	46.188	7.715.418.026,32	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4.083.295.167,58		4.302.315.680,48		4.562.005.409,01		4.650.359.074,83		4.840.418.026,32	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.218,92	3.400	3.620	4.083.295.167,58	3.975	4.302.315.680,48	4.285	4.562.005.409,01	4.500	4.650.359.074,83	4.830	4.840.418.026,32	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					235.000.000		235.000.000		285.000.000		285.000.000		285.000.000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Jumlah POKMASWAS yang dibina (Kelompok Masyarakat)	3	3	4	235.000.000	4	235.000.000	4	285.000.000	5	285.000.000	5	285.000.000	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					3.000.000.000		3.020.000.000		3.500.000.000		3.780.000.000		3.853.778.074,55	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	55,56	55,67	55,78	3.000.000.000	55,89	3.020.000.000	56,01	3.500.000.000	56,12	3.780.000.000	56,23	3.853.778.074,55	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.670.105.359,4		12.561.371.163,31		13.917.465.702,91		15.048.212.273,2		16.425.139.727,79	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.120.105.359,4		6.466.371.163,31		7.110.965.702,91		7.879.062.273,2		8.450.384.727,79	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.120.105.359,4	100	6.466.371.163,31	100	7.110.965.702,91	100	7.879.062.273,2	100	8.450.384.727,79	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					3.000.000.000		3.290.000.000		3.721.000.000		3.775.100.000		4.241.300.000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	0,79	0,85	0,9	3.000.000.000	0,95	3.290.000.000	1	3.721.000.000	1,05	3.775.100.000	1,1	4.241.300.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					910.000.000		1.001.000.000		1.101.100.000		1.211.210.000		1.332.331.000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran	-	54,55	59,09	910.000.000	63,64	1.001.000.000	68,18	1.101.100.000	72,73	1.211.210.000	75	1.332.331.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					850.000.000		935.000.000		1.028.500.000		1.131.350.000		1.244.485.000	
Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	-	1	2	850.000.000	3	935.000.000	4	1.028.500.000	5	1.131.350.000	6	1.244.485.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					790.000.000		869.000.000		955.900.000		1.051.490.000		1.156.639.000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	7	9	790.000.000	11	869.000.000	13	955.900.000	15	1.051.490.000	17	1.156.639.000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					67.851.629.505,02		70.215.663.304,28		75.399.555.800,97		78.213.435.971,99		81.222.107.378,32	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					18.357.404.235,69		19.020.329.431,36		20.493.350.346,27		21.255.528.892,03		22.067.083.441,51	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	18.357.404.235,69	100	19.020.329.431,36	100	20.493.350.346,27	100	21.255.528.892,03	100	22.067.083.441,51	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					15.331.295.167,58		14.998.318.015,92		16.076.205.454,7		16.187.359.074,83		16.185.196.100,87	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk) (%)	2,18	2,18	2,19	12.250.000.000	2,2	11.753.002.335,44	2,21	12.473.037.115,82	2,22	12.465.000.000	2,23	12.270.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit) (%)	208,81	8	8,5		9		9,5		10		10,5		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (%)	10,05	2	2,5		2,5		2,6		2,6		2,6		2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Ton)	6.819,42	6.983	7.087	3.081.295.167,58	7.194	3.245.315.680,48	7.302	3.603.168.338,88	7.411	3.722.359.074,83	7.522	3.915.196.100,87	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					32.227.000.000		34.068.500.000		36.345.000.000		38.260.000.000		40.360.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (%)	86,67	86,84	86,93	32.000.000.000	87,1	33.931.500.000	87,27	36.145.000.000	87,44	38.000.000.000	87,61	40.100.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana	0	20	20	227.000.000	20	137.000.000	20	200.000.000	20	260.000.000	20	260.000.000	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN,
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					581.024.863		714.265.857		708.000.000		694.320.000		815.905.237	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis PHMS (%)	60	60	60	581.024.863	60	714.265.857	60	708.000.000	60	694.320.000	60	815.905.237	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					850.000.000		884.250.000		985.000.000		1.000.000.000		1.026.000.000	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	397,06	325	375	850.000.000	415	884.250.000	432	985.000.000	445	1.000.000.000	450	1.026.000.000	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					504.905.238,75		530.000.000		792.000.000		816.228.005,13		767.922.598,94	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Penerbitan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan) (%)	7,28	8,25	9,22	479.905.238,75	10,19	500.000.000	11,17	750.000.000	12,14	768.228.005,13	13,11	718.922.598,94	2.09.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan (%)	0	20	20	25.000.000	20	30.000.000	20	42.000.000	20	48.000.000	20	49.000.000	3.25.3.27.0.00.02.0000 - DINAS PERIKANAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					4.388.586.323,19		4.515.188.426,34		4.755.402.575,65		4.871.964.395,31		5.022.770.356,31	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					405.023.000		407.840.000		412.713.000		415.737.000		419.215.000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	-	100	100	405.023.000	100	407.840.000	100	412.713.000	100	415.737.000	100	419.215.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					2.222.563.323,19		2.244.848.426,34		2.314.689.575,65		2.328.227.395,31		2.382.555.356,31	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	-	15,25	16,95	2.222.563.323,19	18,64	2.244.848.426,34	20,34	2.314.689.575,65	22,03	2.328.227.395,31	23,73	2.382.555.356,31	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					650.000.000		703.500.000		796.000.000		835.000.000		887.000.000	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting (%)	4,79	1.0-8.9	1.0-8.9	650.000.000	1.0-8.9	703.500.000	1.0-8.9	796.000.000	1.0-8.9	835.000.000	1.0-8.9	887.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					480.000.000		510.000.000		530.000.000		550.000.000		570.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang non migas (Rp)	20.625.985.973	13.725.172.553	15.097.689.808,3	480.000.000	16.607.458.789,13	510.000.000	18.268.204.668,04	530.000.000	20.095.025.134,84	550.000.000	22.104.527.648,33	570.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					400.000.000		415.000.000		447.000.000		476.000.000		494.000.000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	29,03	30,75	32,29	400.000.000	33,83	415.000.000	35,36	447.000.000	36,9	476.000.000	38,44	494.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					231.000.000		234.000.000		255.000.000		267.000.000		270.000.000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas (%)	-	7	7,7	231.000.000	8,4	234.000.000	9,1	255.000.000	9,8	267.000.000	10,5	270.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					2.560.000.000		2.650.500.000		2.984.000.000		3.120.818.696		3.237.000.000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					2.285.000.000		2.350.000.000		2.588.000.000		2.689.318.696		2.780.000.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%)	13,56	13,62	14	2.285.000.000	14,29	2.350.000.000	14,61	2.588.000.000	14,8	2.689.318.696	15,23	2.780.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal (%)	-	10	12,15		15		17,5		20		22,5		
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					120.000.000		130.000.000		170.000.000		190.000.000		200.000.000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	-	70	75	120.000.000	80	130.000.000	85	170.000.000	90	190.000.000	95	200.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					155.000.000		170.500.000		226.000.000		241.500.000		257.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini (Dokumen)	-	1	1	155.000.000	1	170.500.000	1	226.000.000	1	241.500.000	1	257.000.000	2.17.3.31.3.30.07.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					651.460.699,18		846.898.909,71		1.016.278.690,71		1.168.720.494,28		1.344.028.568,46	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN					212.500.000		229.500.000		337.500.000		387.500.000		492.000.000	
Meningkatnya Program Transmigrasi yang dilaksanakan	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	-	-	20	212.500.000	20	229.500.000	20	337.500.000	20	387.500.000	20	492.000.000	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					222.710.699,18		324.898.909,71		341.278.690,71		393.720.494,28		421.528.568,46	
Meningkatnya Infrastruktur di Kawasan Transmigrasi yang dibangun dan dikembangkan	Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang dibangun dan dikembangkan (%)	-	-	16	222.710.699,18	20	324.898.909,71	24	341.278.690,71	20	393.720.494,28	20	421.528.568,46	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					216.250.000		292.500.000		337.500.000		387.500.000		430.500.000	
Meningkatnya Jumlah Transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	21	23	16	216.250.000	20	292.500.000	20	337.500.000	22	387.500.000	24	430.500.000	2.07.3.32.0.00.02.0000 - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					65.585.827.778		72.144.410.555		75.751.631.083		77.266.663.705		78.811.996.979	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.966.932.876		36.807.511.949		39.783.888.198		41.197.640.301		43.458.165.883	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	30,57	32	35	35.966.932.876	38	36.807.511.949	41	39.783.888.198	43	41.197.640.301	46	43.458.165.883	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	80	80		85		90		95		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					25.312.000.000		30.776.002.000		31.131.602.000		30.943.462.000		29.891.309.000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	100	100	100	25.312.000.000	100	30.776.002.000	100	31.131.602.000	100	30.943.462.000	100	29.891.309.000	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH		
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	-	55	60		65		70		75		80		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	-	0,44	0,47		0,5		0,53		0,56		0,59		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	99,84	100	100		100		100		100		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					4.306.894.902		4.560.896.606		4.836.140.885		5.125.561.404		5.462.522.096	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan (Nilai)	71,27	71,5	72,06	3.292.801.844	78,75	3.410.189.589	81	3.529.827.912	83	3.651.801.372	85	3.796.198.058	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kebijakan peningkatan akses keuangan daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah (%)	-	-	80	288.093.058	85	308.000.000	90	323.000.000	93	327.000.000	95	334.000.000	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pengendalian inflasi daerah (%)	-	-	85	726.000.000	87	842.707.017	90	983.312.973	93	1.146.760.032	95	1.332.324.038	4.01.5.06.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					51.246.108.420		56.020.719.262		60.244.876.803		62.052.223.107		64.169.414.566,01	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					31.444.108.420		36.002.877.462		40.010.842.311,56		41.609.778.060,3		43.516.412.335,32	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	31.444.108.420	100	36.002.877.462	100	40.010.842.311,56	100	41.609.778.060,3	100	43.516.412.335,32	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					19.802.000.000		20.017.841.800		20.234.034.491,44		20.442.445.046,7		20.653.002.230,69	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	-	100	100	4.333.975.000	100	4.381.215.327,5	100	4.428.532.453,04	100	4.474.146.337,3	100	4.520.230.044,58	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	-	80	80		80		80		80		80		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	-	100	100	15.468.025.000	100	15.636.626.472,5	100	15.805.502.038,4	100	15.968.298.709,4	100	16.132.772.186,11	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.567.278.260		7.235.733.912		8.084.843.999		8.679.778.719		9.556.249.952	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.562.278.260		4.890.733.912		5.198.343.999		5.584.778.719		5.831.249.952	
meningkatnya kesesuaian pelayanan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	4.562.278.260	100	4.890.733.912	100	5.198.343.999	100	5.584.778.719	100	5.831.249.952	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					780.000.000		950.000.000		1.214.000.000		1.320.000.000		1.605.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	780.000.000	100	950.000.000	100	1.214.000.000	100	1.320.000.000	100	1.605.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	97,66	97,66	98		98,5		99		99,5		100		5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.225.000.000		1.395.000.000		1.672.500.000		1.775.000.000		2.120.000.000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100	530.000.000	100	605.000.000	100	715.000.000	100	750.000.000	100	895.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	265.000.000	100	305.000.000	100	390.000.000	100	430.000.000	100	530.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100	100	100	430.000.000	100	485.000.000	100	567.500.000	100	595.000.000	100	695.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN
5.02 - KEUANGAN					331.233.074.800,56		343.194.610.765,06		369.773.164.059,56		383.525.584.613,81		398.168.924.457,5	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					17.310.883.257,49		17.936.016.021,77		19.325.062.512,97		20.043.790.929,69		20.762.560.880,19	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	17.310.883.257,49	100	17.936.016.021,77	100	19.325.062.512,97	100	20.043.790.929,69	100	20.762.560.880,19	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					311.873.122.743,07		323.135.529.443,29		348.160.616.346,59		361.109.233.584,12		374.948.723.277,31	
Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	311.873.122.743,07	100	323.135.529.443,29	100	348.160.616.346,59	100	361.109.233.584,12	100	374.948.723.277,31	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					749.822.100		776.900.000		837.066.500		868.198.200		899.332.000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan (%)	100	100	100	749.822.100	100	776.900.000	100	837.066.500	100	868.198.200	100	899.332.000	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.299.246.700		1.346.165.300		1.450.418.700		1.504.361.900		1.558.308.300	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase kinerja pajak daerah (%)	95,12	85	87	1.299.246.700	89	1.346.165.300	91	1.450.418.700	93	1.504.361.900	95	1.558.308.300	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN KEUANGAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.479.599.041,2		10.097.458.705,62		12.621.823.382,03		14.641.315.123,15		16.837.512.391,62	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.861.399.041,2		7.912.888.705,62		9.891.110.882,03		11.473.688.623,15		13.194.741.916,62	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.861.399.041,2	100	7.912.888.705,62	100	9.891.110.882,03	100	11.473.688.623,15	100	13.194.741.916,62	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.618.200.000		2.184.570.000		2.730.712.500		3.167.626.500		3.642.770.475	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	-	-	100	1.618.200.000	100	2.184.570.000	100	2.730.712.500	100	3.167.626.500	100	3.642.770.475	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					360.900.000		487.215.000		609.018.750		706.461.750		812.431.012,5	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					360.900.000		487.215.000		609.018.750		706.461.750		812.431.012,5	
meningkatnya layanan pengembangan sumberdaya manusia	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	56	60	65	360.900.000	70	487.215.000	75	609.018.750	80	706.461.750	85	812.431.012,5	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH
	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	56	60	65		70		75		80		85		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAERAH
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					3.725.000.000		5.115.000.000		6.118.500.000		7.370.000.000		8.580.000.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					2.215.000.000		3.185.000.000		3.910.000.000		4.795.000.000		5.580.000.000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)	100	100	100	2.215.000.000	100	3.185.000.000	100	3.910.000.000	100	4.795.000.000	100	5.580.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					1.510.000.000		1.930.000.000		2.208.500.000		2.575.000.000		3.000.000.000	
Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	-	100	100	1.510.000.000	100	1.930.000.000	100	2.208.500.000	100	2.575.000.000	100	3.000.000.000	5.01.5.05.0.00.03.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SAMBAS
5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN					3.060.046.064		3.170.550.883,18		3.416.092.779,79		3.543.142.412,14		3.678.422.665,98	
5.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.060.046.064		2.134.438.740,79		2.299.739.395,45		2.385.270.165,11		2.476.341.851,17	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	-	100	100	2.060.046.064	100	2.134.438.740,79	100	2.299.739.395,45	100	2.385.270.165,11	100	2.476.341.851,17	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
5.06.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN					1.000.000.000		1.036.112.142,39		1.116.353.384,34		1.157.872.247,03		1.202.080.814,81	
Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan (%)	-	80	82	1.000.000.000	84	1.036.112.142,39	86	1.116.353.384,34	88	1.157.872.247,03	90	1.202.080.814,81	5.06.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					7.802.160.503,5		9.362.592.604,2		11.235.111.125,04		12.920.377.793,8		14.858.434.462,87	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.802.160.503,5		7.029.592.604,2		8.479.111.125,04		9.772.329.957,15		11.268.434.462,87	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	5.802.160.503,5	100	7.029.592.604,2	100	8.479.111.125,04	100	9.772.329.957,15	100	11.268.434.462,87	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.628.000.000		1.853.000.000		2.194.000.000		2.526.047.836,65		2.864.000.000	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindakanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	85	85	90	1.628.000.000	95	1.853.000.000	96	2.194.000.000	98	2.526.047.836,65	100	2.864.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					372.000.000		480.000.000		562.000.000		622.000.000		726.000.000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal	3	3,017	3	372.000.000	3	480.000.000	3	562.000.000	3	622.000.000	4	726.000.000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Terdefinisi	Terdefinisi		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					39.140.207.392,7		42.271.383.993,94		44.616.698.960,82		46.980.323.864,5		49.823.660.300,92	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					35.603.388.573,38		38.395.536.100,16		40.525.712.779,09		42.616.324.341,64		45.154.976.324,79	
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.597.433.761,1	100	1.720.572.228,91	100	1.813.562.849,91	100	1.911.108.536,87	100	2.013.380.156,65	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.076.509.658,3	100	2.242.630.430,96	100	2.354.761.952,51	100	2.472.500.050,14	100	2.620.850.053,15	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.567.817.424,6	100	1.693.242.818,97	100	1.794.837.387,28	100	1.902.527.630,94	100	2.016.679.288,8	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.661.671.119,15	100	1.789.564.808,68	100	1.902.253.889,17	100	1.997.624.032,06	100	2.117.705.473,99	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.887.407.778,9	100	2.038.400.401,21	100	2.160.704.425,28	100	2.268.739.646,55	100	2.404.864.025,34	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.580.189.453,85	100	1.706.604.610,16	100	1.809.000.886,77	100	1.917.540.939,97	100	2.032.593.396,37	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.818.566.636	100	1.960.467.394	100	2.078.252.317	100	2.174.358.088	100	2.300.940.935	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.916.888.312,45	100	2.066.411.931,89	100	2.170.247.029,53	100	2.262.442.234,01	100	2.386.751.659,87	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.330.611.030,65	100	2.517.059.913,11	100	2.642.912.908,76	100	2.775.058.554,19	100	2.941.562.067,45	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.003.441.599,95	100	2.163.716.927,95	100	2.271.902.774,34	100	2.385.497.913,06	100	2.528.627.787,85	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.449.780.211,75	100	2.652.550.628,69	100	2.774.073.160,12	100	2.921.351.818,13	100	3.094.156.927,22	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.726.895.794,78	100	1.859.999.771,04	100	1.968.338.758,42	100	2.070.291.825,71	100	2.194.433.836,75	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.323.505.230,05	100	2.465.198.187,92	100	2.591.917.154,58	100	2.715.504.913,47	100	2.859.464.106,35	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.195.301.439	100	1.294.077.394	100	1.390.011.171	100	1.474.115.710	100	1.596.228.809	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.386.584.045,3	100	2.577.510.768,92	100	2.706.386.307,37	100	2.841.705.622,74	100	3.012.207.960,1	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.619.350.835,55	100	1.748.898.902,4	100	1.853.832.836,53	100	1.965.062.806,73	100	2.082.966.575,13	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.563.619.271,55	100	1.688.708.813,27	100	1.790.031.342,08	100	1.897.433.222,6	100	2.011.279.215,95	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.825.561.160,85	100	1.971.606.053,71	100	2.089.902.416,95	100	2.194.397.537,78	100	2.326.061.390,06	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING
Meningkatnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	2.072.253.809,6	100	2.238.314.114,37	100	2.362.783.211,49	100	2.469.063.258,69	100	2.614.222.659,76	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					506.661.028		549.588.401,56		592.697.007		637.742.207,21		686.298.262,83	
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselasaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	30.745.852,5	100	32.898.062,18	100	34.213.984,66	100	35.582.544,05	100	37.361.671,25	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	11.825.249	100	12.812.738,4	100	14.116.320	100	16.939.584	100	19.939.584	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	36.110.862	100	39.721.948,2	100	43.694.143,02	100	48.063.557,32	100	52.869.913,05	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	63.000.000	100	65.200.000	100	73.300.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	13.000.000	100	15.000.000	100	16.000.000	100	17.000.000	100	17.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	49.678.241	100	54.646.065	100	58.400.621,84	100	64.240.684,02	100	70.664.752,42	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	6.489.060	100	7.137.966	100	7.851.763	100	8.636.939	100	9.500.633	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	22.187.051	100	24.406.117	100	25.750.000	100	30.786.500	100	31.786.500	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselasaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	23.607.880	100	25.007.880	100	26.258.274	100	27.571.187,7	100	28.949.747,09	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	16.000.000	100	16.700.000	100	18.700.000	100	21.000.000	100	24.500.000	7.01.0.00.0.00.11.0000-KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	8.500.000	100	8.500.000	100	10.000.000	100	10.500.000	100	11.500.000	7.01.0.00.0.00.05.0000-KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	27.747.700	100	43.647.700	100	43.647.700	100	49.647.700	100	52.647.700	7.01.0.00.0.00.04.0000-KECAMATAN TEBAS
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	22.464.130	100	23.362.695,2	100	24.063.576,06	100	25.026.119,1	100	25.952.085,5	7.01.0.00.0.00.06.0000-KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	19.747.794	100	22.000.000	100	23.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000-KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	29.000.000	100	22.500.000	100	33.000.000	100	35.000.000	100	37.000.000	7.01.0.00.0.00.07.0000-KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	27.000.000	100	27.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	31.686.151,13	7.01.0.00.0.00.16.0000-KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	43.545.130,5	100	45.344.079,58	100	48.344.079,58	100	48.344.079,58	100	50.894.637,61	7.01.0.00.0.00.18.0000-KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	26.012.078	100	29.303.150	100	31.119.936,24	100	31.119.936,24	100	36.244.887,78	7.01.0.00.0.00.10.0000-KECAMATAN GALING
Meningkatnya pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelayanan yang Terselesaikan di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	43.000.000	100	39.600.000	100	41.536.608,6	100	42.083.376,2	100	43.500.000	7.01.0.00.0.00.13.0000-KECAMATAN SEMPARUK
7.01.03 * PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.237.063.762,95		1.292.776.803,09		1.412.093.896,44		1.515.699.722,04		1.615.492.134,23	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	93.888.795,7	100	103.808.548,37	100	106.162.574,31	100	116.330.797,92	100	120.752.440,7	7.01.0.00.0.00.15.0000-KECAMATAN SAJAD
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	69.016.431	100	75.918.074,1	100	83.509.881,51	100	91.860.869,66	100	101.046.956,63	7.01.0.00.0.00.17.0000-KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	104.000.000	100	108.000.000	100	114.000.000	100	116.500.000	100	120.000.000	7.01.0.00.0.00.19.0000-KECAMATAN SALATIGA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	39.301.444,7	100	41.665.560,28	100	46.287.493,89	100	46.641.868,59	100	51.010.380,7	7.01.0.00.0.00.14.0000-KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	66.422.405,65	100	71.071.974,05	100	78.429.120,91	100	83.532.587,04	100	89.773.832,76	7.01.0.00.0.00.03.0000-KECAMATAN JAWAI
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	68.440.137	100	75.512.167,22	100	79.925.253,85	100	84.622.742,64	100	88.853.879,77	7.01.0.00.0.00.08.0000-KECAMATAN PALOH
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	25.067.981	100	27.574.779	100	30.332.257	100	33.365.483	100	36.702.031	7.01.0.00.0.00.09.0000-KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	99.591.270	100	109.550.397	100	115.000.000	100	127.000.000	100	138.000.000	7.01.0.00.0.00.01.0000-KECAMATAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	60.521.725,55	100	62.021.725,55	100	65.122.811,83	100	73.728.435,89	100	77.414.857,69	7.01.0.00.0.00.02.0000-KECAMATAN PEMANGKAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	39.296.964,65	100	36.154.721,82	100	48.580.457,91	100	51.581.980,81	100	54.643.899,66	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	80.150.000	100	81.000.000	100	95.000.000	100	95.500.000	100	96.200.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	76.354.129	100	88.354.129	100	93.354.129	100	96.354.129	100	114.354.129	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	73.806.200	100	76.758.448	100	79.061.201,44	100	82.223.649,5	100	85.265.924,53	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	56.000.000	100	59.100.000	100	62.254.913	100	67.000.000	100	68.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	79.600.000	100	68.000.000	100	83.600.000	100	85.900.000	100	90.900.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	45.690.881,7	100	47.670.881,7	100	52.670.881,7	100	60.670.881,7	100	65.670.881,7	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	94.915.397	100	95.415.397	100	100.502.920,09	100	100.502.920,09	100	108.902.920,09	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	100	55.000.000	100	55.200.000	100	67.300.000	100	90.383.376,2	100	96.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					227.789.159,72		242.350.749,4		261.941.100,03		281.713.236,74		305.289.293,44	
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	8.305.475	100	9.136.022,5	100	10.381.843,75	100	10.500.000	100	11.500.000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	20.785.381,45	100	22.863.919,6	100	25.150.311,55	100	27.665.342,71	100	30.431.876,98	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	6.800.000	100	7.500.000	100	8.000.000	100	8.200.000	100	8.500.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	2.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.993.271	100	11.762.799,97	100	12.233.311,97	100	12.722.644,45	100	13.358.776,67	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.791.362	100	11.617.589,8	100	12.779.348,78	100	13.418.316,21	100	14.089.232,02	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	19.000.000	100	20.900.000	100	22.990.000	100	25.289.000	100	27.817.900	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	11.899.060	100	13.088.966	100	13.500.000	100	15.000.000	100	17.848.590	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	15.144.379	100	15.544.379	100	16.321.597,95	100	17.137.677,85	100	17.994.561,74	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	5.000.000	100	5.200.000	100	5.400.000	100	5.500.000	100	5.600.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	2.000.000	100	4.900.000	100	5.500.000	100	5.500.000	100	6.100.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum					11.955.664		11.955.664		11.955.664		15.955.664		18.955.664	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	4.461.437,87	100	4.034.490,13	100	4.171.823,16	100	4.277.673,12	100	4.545.773,63	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	13.000.000	100	13.500.000	100	13.500.000	100	15.000.000	100	15.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	12.100.000	100	11.300.000	100	14.000.000	100	17.000.000	100	20.000.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	11.000.000	100	12.000.000	100	16.510.280,47	100	20.000.000	100	20.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	7.546.918,4	100	7.546.918,4	100	7.546.918,4	100	8.546.918,4	100	8.546.918,4	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	10.006.211	100	11.500.000	100	12.000.000	100	12.000.000	100	12.000.000	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING
Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum (%)	100	100	100	45.000.000	100	45.000.000	100	47.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					411.058.000,6		444.006.069,77		474.524.579,88		506.592.134,88		547.079.637,14	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan	100	100	100	20.092.768	100	22.500.000	100	25.500.000	100	25.500.000	100	28.989.579,5	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	15.000.000	100	18.000.000	100	18.000.000	100	20.000.000	100	22.000.000	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN SALATIGA
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	10.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	100	11.000.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	19.551.422	100	20.920.021,54	100	21.756.822,4	100	22.627.095,3	100	23.758.450,06	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	32.402.871	100	34.332.274,1	100	36.048.887,8	100	37.851.332,19	100	39.743.898,8	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	30.195.505	100	31.715.056	100	34.886.561	100	38.375.217	100	42.212.739	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	20.846.406	100	22.931.047	100	23.500.000	100	27.500.000	100	31.269.609	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	16.182.830	100	17.817.835,4	100	18.708.727,17	100	19.644.163,53	100	20.626.371,7	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	8.500.000	100	7.000.000	100	11.000.000	100	9.400.000	100	12.500.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	15.050.000	100	15.360.000	100	16.100.000	100	16.400.000	100	16.900.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	26.288.510	100	28.917.361	100	31.809.097,1	100	34.990.006,81	100	38.489.007,49	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum					22.461.400		34.461.400		35.461.400		38.461.400		44.531.400	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	24.697.255,7	100	25.685.145,93	100	26.455.700,31	100	27.513.928,32	100	28.531.943,67	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	18.000.000	100	19.407.731	100	20.000.000	100	27.500.000	100	28.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	49.914.561,2	100	48.083.726,1	100	52.122.912,4	100	52.909.058,02	100	54.127.601,5	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	9.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	11.420.897,29	100	12.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	24.497.255,7	100	24.497.255,7	100	26.497.255,7	100	27.497.255,7	100	28.397.255,7	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	13.377.216	100	15.877.216	100	19.077.216	100	20.001.780,72	100	22.001.780,72	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (%)	100	100	100	35.000.000	100	35.500.000	100	36.600.000	100	38.000.000	100	42.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					1.154.246.868,05		1.347.125.869,96		1.349.729.598,38		1.422.252.221,99		1.514.524.648,49	
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	60.385.212	100	61.800.000	100	66.500.000	100	66.750.000	100	69.000.000	7.01.0.00.0.00.15.0000 - KECAMATAN SAJAD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan	100	100	100	87.541.013,25	100	95.948.294,31	100	98.500.000	100	106.417.551,57	100	111.272.604,66	7.01.0.00.0.00.19.0000 - KECAMATAN
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	24.000.000	100	24.700.000	100	24.800.000	100	28.500.000	100	30.500.000	7.01.0.00.0.00.14.0000 - KECAMATAN SEBAWI
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	45.682.225	100	50.573.932,51	100	49.996.889,81	100	51.996.765,4	100	54.596.603,67	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN JAWAI
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	114.996.091,25	100	122.305.302,21	100	129.164.090,05	100	135.164.219,39	100	142.063.369,11	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN PALOH
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	76.276.101	100	85.847.711	100	87.348.582	100	94.719.827	100	100.054.990	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN SAJINGAN BESAR
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	36.830.431	100	40.513.474	100	42.750.000	100	47.555.647	100	55.245.085	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN SELAKAU
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	38.132.493	100	45.484.632,2	100	47.758.863,81	100	44.797.323,53	100	48.865.977,59	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PEMANGKAT
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	64.450.000	100	68.500.000	100	68.000.000	100	69.500.000	100	78.000.000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMBAS
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	30.500.000	100	40.900.000	100	31.250.000	100	31.550.000	100	31.950.000	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN SUBAH
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	80.610.469	100	88.671.515,9	100	97.538.667,49	100	107.292.534,23	100	118.021.787,66	7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN TANGARAN
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	70.387.850,3	100	91.387.850,3	100	95.419.130,2	100	99.419.130,2	100	106.310.513,52	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TEBAS
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	117.255.533,2	100	137.306.229,38	100	152.684.527,07	100	158.181.170,04	100	170.835.663,65	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN SEJANGKUNG
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	33.677.735	100	34.500.000	100	34.800.000	100	37.000.000	100	37.000.000	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN TEKARANG
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	69.000.000	100	108.900.000	100	89.000.000	100	94.500.000	100	100.400.000	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN TELUK KERAMAT
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	29.050.210,05	100	33.934.226,85	100	31.000.000	100	31.000.000	100	35.000.000	7.01.0.00.0.00.16.0000 - KECAMATAN JAWAI SELATAN
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	63.456.677,2	100	74.456.677,2	100	76.427.625,95	100	79.116.831,63	100	84.116.831,63	7.01.0.00.0.00.18.0000 - KECAMATAN SELAKAU TIMUR
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	64.014.826,8	100	72.896.024,1	100	75.791.222	100	86.791.222	100	86.291.222	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN GALING

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik (%)	100	100	100	48.000.000	100	68.500.000	100	51.000.000	100	52.000.000	100	55.000.000	7.01.0.00.0.00.13.0000 - KECAMATAN SEMPARUK
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.221.487.760,1		9.026.859.699,88		10.832.231.639,65		12.457.066.385,95		14.325.626.343,94	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.507.256.939,1		1.884.071.173,88		2.260.885.408,65		2.600.018.219,95		2.990.020.952,94	
meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah (%)	100	100	100	1.507.256.939,1	100	1.884.071.173,88	100	2.260.885.408,65	100	2.600.018.219,95	100	2.990.020.952,94	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					825.000.000		965.000.000		1.346.346.231		1.862.048.166		2.280.000.000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	100	100	100	825.000.000	100	965.000.000	100	1.346.346.231	100	1.862.048.166	100	2.280.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					2.120.000.000		2.320.000.000		2.520.000.000		2.640.000.000		2.740.000.000	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	-	100	100	2.120.000.000	100	2.320.000.000	100	2.520.000.000	100	2.640.000.000	100	2.740.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					70.000.000		95.000.000		220.000.000		340.000.000		440.000.000	
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	-	38	39	70.000.000	40	95.000.000	41	220.000.000	42	340.000.000	43	440.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					1.429.230.821		2.392.788.526		2.765.000.000		3.125.000.000		3.685.605.391	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	-	100	100	1.429.230.821	100	2.392.788.526	100	2.765.000.000	100	3.125.000.000	100	3.685.605.391	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.270.000.000		1.370.000.000		1.720.000.000		1.890.000.000		2.190.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	-	100	100	1.270.000.000	100	1.370.000.000	100	1.720.000.000	100	1.890.000.000	100	2.190.000.000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMBAS
TOTAL KESELURUHAN					2.205.189.806.350,05		2.334.823.934.641,13		2.451.771.103.436,98		2.548.328.076.216,566		2.645.816.359.256,41	

4.2 Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Untuk menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka ditetapkanlah indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas 2025-2030. Penetapan indikator didasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikator kinerja Kabupaten Sambas dituangkan dalam capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah meliputi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja pemerintah yang meliputi IKU dan IKD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dispesifikkan menjadi tiga aspek yang terdiri atas aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Target IKU Kabupaten Sambas sampai tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Sambas
Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB	A
2.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,78	72,35	73,77	74,19	75,05	75,9
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	76,65	76,78	76,90	77,03	77,15	77,28
4.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	132,94	131,34	129,76	128,21	126,67	125,15
5.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.75-5.35	4.85-5.90	5.01-6.27	5.20-6.90	5.30-7.10	5.40-7.25
6.	Indeks Infrastruktur	Indeks	58,92	60,39	61,91	63,45	65,03	66,64
7.	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	43,70-50,47	45,50-55,60	47,60-60,72	49,74-65,01	51,73-72,47	52,88-75,76
8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,80	4,60	4,40	4,20	4	3,80
10.	Tingkat Kemiskinan	%	6.07-6.48	5.97-6.45	5.64-6.14	5.12-5.59	4.45-5.03	4.31-4.97
11.	Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI)	Predikat	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
12.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	32	30	28	26	23	20

4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Untuk mencapai indikator utama tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan perangkat daerah. Indikator kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan juga memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve* (SMART-C).

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya program prioritas perangkat daerah kabupaten Sambas yang dijelaskan dalam tabel 4.3 berikut ini:

Tabel. 4.3
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	67,56	76,65	76,78	76,9	77,03	77,15	77,28
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	134,55	132,94	131,34	129,76	128,21	126,67	125,15
3	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,66	0,67	0,68	0,68	0,69	0,69	0,7
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,2	71,78	72,35	73,77	74,19	75,05	75,9
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,74	4.75-5.35	4.85-5.90	5.01-6.27	5.20-6.90	5.30-7.10	5.40-7.25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,99	4,80	4,60	4,40	4,20	4	3,80
4	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	43,61	43.70-50.47	45.50-55.60	47.60-60.72	49.74-65.01	51.73-72.47	52.88-75.76
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,53	6.07-6.48	5.97-6.45	5.64-6.14	5.12-5.59	4.45-5.03	4.31-4.97
6	Rasio Gini	Indeks	0,248	0,243	0,237	0,232	0,226	0,220	0,215
7	Jumlah kematian ibu	Kasus	10	9	9	8	8	7	6
8	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	64	67	71	73	77	79	81
9	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,53	75	75,25	75,5	75,75	76	76,25
10	SPM Pendidikan (Raport Pendidikan)	%	62,62	67,12	69,62	72,62	75,62	78,62	81,62
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*)	(%)	-	65,95	66,11	66,27	66,43	66,59	66,75

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	74,25	75,25	76,25	77,25	78,25	79,25	80,25
13	Jumlah Pemuda yang ikut berpartisipasi pada even nasional	Orang	-	3	3	3	3	3	3
14	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	56,8	80	85	90	95	100	100
15	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	79,89	90	90	90	90	90	90
16	Kontribusi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	32.56-	30.57-32.80	30.60-32.82	30.63-32.84	30.66-32.86	30.69-32.88	30.72-32.90
17	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	36	46	56	66	70	76
18	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	56,88	57,38	57,88	58,38	58,88	59,38
19	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	-	65	66,1	67,9	69,7	71,5	73,3
20	Jumlah kematian balita	Kasus	85	84	83	82	81	80	79
21	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	(%) Indeks	0,487	0,414	0,409	0,404	0,399	0,394	0,394
22	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	48,95	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,103	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4	0,5
24	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	70,83	72,44	74,05	75,66	77,27	78,88	80,49
25	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	6,76	7,25	7,56	7,87	8,19	8,5	8,81
26	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	56,29	88,39	89,29	90,19	91,09	92,34	92,34
27	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	(%)	78	82	86	90	94	98,6	98,8
28	Jumlah Perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi	Medali emas	5	10	30	10	15	10	30
29	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	-	56,3	61,05	65,8	70,55	75,29	75,29
30	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,76	12,98	13,1	13,22	13,35	13,48	13,51
31	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	%	17,88	17.80-18.08	17.82-18.10	17.84-18.12	17.86-18.14	17.88-18.16	17.90-18.18
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	24,63	26,16	29,55	32,94	36,33	39,72	43,11
33	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	36,4	32	30	28	26	23	20
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	-	58,92	60,39	61,91	63,45	65,03	66,64
2	Pendapatan Per Kapita di Wilayah Transmigrasi	Rupiah/Kapita	15.510.367,73	16.285.888,11	17.100.180,41	17.955.189,43	18.852.948,9	19.795.596,35	20.785.376,17
3	Rasio Kewirausahaan	Persentase	-	2,65	2,8	2,98	3,05	3,25	3,41

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Indeks Perkembangan Harga	Indeks	-	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5	1.5-3.5
5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,96	1,98	2	2,02	2,04	2,05	2,06
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,78	73,02	73,27	73,52	73,76	74,01	74,25
7	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,37	62,4	62,88	63,39	64,21	65,01	65,2
8	Persentase Desa Mandiri	%	-	21,61	28,01	28,59	29,28	29,62	30
9	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	(%)	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11.57-11.57	11.60-12.40	11.65-12.45	11.70-12.50	11.75-12.55	11.80-12.60	11.85-12.70
11	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,17	0,45	0,46	0,47	0,49	0,5	0,51
12	Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	47,5	47,68	47,99	48,72	49,42	50,11	50,73
13	Nilai Ekspor Barang dan Jasa	Rp	20.625.985.973	13.725.172.553	15.097.689.808	16.607.458.789	18.268.204.668	20.095.025.135	22.104.527.648
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Tingkat Stabilitas Politik Serta Persatuan dan Kesatuan Bangsa	%	95	95,2	95,4	95,6	95,8	96	96,2
2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB	BB	A
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A
4	Persentase peningkatan	%	1,64	3,33	4	4,75	5,5	6,25	7

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	investasi di kabupaten/kota								
5	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	-	69	72	75	78	81	84
6	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	-	B	B	B	A-	A-	A
7	Indeks Penyelenggaraan Tratibumlinmas	%	-	75	76	77	78	79	80
8	Persentase pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik serta wawasan kebangsaan	%	90	91	92	93	94	95	96
9	Predikat Pemerintahan Digital (PEMDI)	Predikat	n/a	Kurang	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	Cukup
10	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam kondisi mantap	%	-	58,92	60,39	61,91	63,45	65,03	66,64
11	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	71,32	75	78	80	82	85	87
12	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	81,28	82,54	83,8	85,06	86,32	87,58	88,83
13	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	-	3	3	3	3	3	4
14	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	0,6	0,62	0,64	0,66	0,68	0,7
15	Nilai Sakip Komponen	Poin	10,31	10,75	11	11,25	11,5	11,75	12

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Pengukuran dan Pelaporan Kinerja								
16	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan	Indeks	0,6	0,63	0,67	0,7	0,73	0,77	0,81
17	Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	Desa	195	195	195	195	195	195	195
18	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,08	3,17	3,21	3,25	3,29	3,33	3,35
19	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
20	Kabupaten Peduli HAM	Predikat	Peduli	Peduli	Peduli	Peduli	Peduli	Peduli	Peduli
21	Tingkat Kerukunan Umat Beragama	%	78	80	81	82	83	84	85
22	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Indeks	90,64	95	96	97	98	99	99
23	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
24	Nilai Sakip Komponen Perencanaan Kinerja	Poin	20,18	20,81	21,63	22,13	23	23,5	24
25	Nilai SAKIP Evaluasi Kinerja Internal	Poin	14,59	14,6	14,65	14,66	14,68	14,7	14,8
26	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76	76	77	78	79	80	81
27	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Indeks	80	80	82	84	86	88	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
28	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,12	81	81	82	83	84	85
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1	Skor Kemampuan Literasi SD	%	53,34	55,84	58,34	60,84	63,34	65,84	68,34
2	Angka Partisipasi Sekolah Kesetaraan (7 - 18 Tahun)	%	15,22	18,66	22,1	25,54	28,99	32,43	35,87
3	Angka Partisipasi Sekolah SD/SMP (7 - 15 Tahun)	%	97,8	97,4	97,76	98,11	98,47	98,83	99,19
4	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	55,14	57,64	60,14	62,64	65,14	67,64	70,14
5	Skor Kemampuan Numerasi SD	%	47,74	50,64	53,54	56,44	59,34	62,24	65,14
6	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	68,53	69,89	70,64	71,39	72,14	72,89	73,54
7	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	45,13	46,94	51,18	56,83	63,9	72,38	80,86
8	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	55,6	58	60,4	62,8	65,2	67,6	70
9	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	70,29	71,29	72,29	73,29	74,29	75,29	76,29
10	Iklim Keamanan SD	Nilai	71,33	72,23	73,13	74,03	74,93	75,83	76,73
11	Skor Kemampuan Numerasi SMP	%	59,71	61,21	62,71	64,21	65,71	67,21	68,71
12	Skor Kemampuan Literasi SMP	%	66,38	67,48	68,58	69,68	70,78	71,88	72,98
13	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	15,86	19,25	20,05	20,85	21,65	22,45	23,25

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Iklim Keamanan SMP	Nilai	69,64	71,14	72,64	74,14	75,64	77,14	78,64
15	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (5-6 Tahun)	%	66,85	70,06	73,1	76,14	79,18	82,22	85,18
16	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	69,29	70,29	71,29	72,29	73,29	74,29	75,29
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1	BADUTA mendapatkan Imunisasi Rutin Lengkap	%	56,8	80	85	90	95	100	100
2	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada BADUTA	%	83,65	97,94	100	100	100	100	100
3	Pemeriksaan kehamilan (ANC) 6 kali selama masa kehamilan	%	62,69	64	65	67	68	69	71
4	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	75	77	79	81	83	85
5	Remaja putri yang diskriminasi anemia	%	84,3	85	87	89	91	93	95
6	Pemberian obat cacing pada anak BADUTA	%	75,03	82,43	75	85	90	95	100
7	Praktik Inisiasi Menyusu Dini	%	87,6	88	88,4	88,8	89,2	89,6	90
8	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	20	20	30	40	50	60	70
9	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Makanan Pendamping ASI (MPASI) beragam setelah 6 bulan	%	88	88	88	88	88	88	88
11	Tatalaksana BALITA yang bermasalah gizi	%	-	35	38	41	44	47	50
12	BADUTA yang dipantau pertumbuhan dan perkembangan	%	-	65	66,3	67,6	69	70,4	71,8
13	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	%	25	30	35	40	45	50	55
14	Penemuan kasus pneumonia balita	%	2,88	3,31	40	45	50	55	60
15	Pemberian ASI Eksklusif sampai 6 bulan, dilanjutkan sampai 2 tahun	%	-	61	64	67	70	73	76
16	BADUTA gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	-	60	61	62	63	64	65
17	Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil KEK	%	72,75	73	74	75	76	77	80
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP- IRT sesuai standar	%	83	85	87	89	91	93	95
19	Pemeriksaan kesehatan pranika	%	85,7	86	86	86	86	86	87
20	Remaja putri yang Konsumsi TTD	%	97,5	97,6	97,7	97,8	97,9	98	98
21	Insidensi HIV/AIDS	Rasio	0,09	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	0,13	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
23	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60,71	67,86	75	82,14	89,29	96,43	100
24	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	%	65	65	70	75	80	85	90
25	Bayi usia 0-5 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif	%	86,1	86,2	86,3	86,4	86,5	86,7	86,8
26	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	65	65	70	75	80	85	90
27	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	90	90	91	92	93	94	95
28	Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan	%	75	75	77	79	81	83	85
29	Persentase Posyandu Aktif	%	99,32	90	90	91	91	92	92
30	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 Penduduk	2,29	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
31	Pemberian obat cacing Pada anak BALITA	%	74,36	81,2	83	85	90	95	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
32	Balita gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	%	82,6	82,8	83	83,2	83,5	83,7	84
33	Pemberian Tablet Tambah Darah/Multiple Micronutrient Supplementation (MMS)	%	-	70	74	78	82	86	90
34	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	81	83,5	84	84,5	85	85,5	86
35	BADUTA gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	%	100	100	100	100	100	100	100
36	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	38,92	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
37	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	84,4	85	85,5	86	86,5	87	87,5
38	Pemberian oralit dan zinc sesuai standar pada anak usia 24-59 bulan	%	84,95	94,9	100	100	100	100	100
39	Akses terhadap Sanitasi Aman	%	1,62	2	2,5	3	3,5	4	4,5
40	Akses terhadap Air Minum Aman	%	76	80	84	88	93	96	97
41	Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis	%	72,45	90	90	90	90	90	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
42	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	33,34	33,34	66,67	66,67	66,67	100	100
43	Persentase SDMK yang mendapatkan pelatihan bidang kesehatan	%	15	15	20	25	30	35	40
44	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	100	100	100	100	100	100
45	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	%	17	22,6	28	33,4	38,8	44,2	49,6
46	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	11,1	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
47	Persentase Penduduk Menerapkan Perilaku Hidup Sehat	%	8	9	10	12	15	19	24
48	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	41,95	41,95	41,95	41,95	54,87	54,87	54,87
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	%	-	45,72	46,94	48,16	49,38	50,6	51,82
2	Persentase Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak	%	53,29	53,46	53,66	53,89	54,14	54,42	54,72

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	-	80,16	81,73	83,3	84,87	86,44	88,02
4	Persentase Panjang Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	%	-	46,71	47,93	49,15	50,37	51,59	52,81
5	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase	-	56,41	57,52	58,62	59,73	60,83	61,94
6	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	-	51,5	53	54,5	56	57,5	59
7	Persentase Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang berdasarkan RTRW	%	0,17	0,28	0,13	0,43	0,51	0,74	0,97
8	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	-	0,15	0,3	0,5	0,7	1,05	1,41
9	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dipelihara	Ha	-	2.319,69	2.449,36	2.593,44	2.737,52	2.881,6	3.025,68
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	-	15,49	15,71	15,93	16,15	16,73	16,59
2	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	21,82	21,67	21,52	21,37	21,22	21,07	20,92
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi	%	54,46	15	30	45	60	75	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	korban bencana kabupaten/kota								
4	Persentase Jalan Lingkungan yang dibangun pada Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan	%	12,2	12,81	13,45	14,13	14,83	15,57	16,35
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	-	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	%	-	6,3	12,6	18,91	25,21	31,51	37,81
7	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak	%	42,39	43,79	46,01	48,25	50,49	52,75	55,02
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	18,98	19,13	20,1	21,08	22,06	23,04	24,04
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Persentase	0	35	40	45	45	50	50
2	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	0	75	75	75	80	80	80
3	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	94	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Persentase	96,9	75	75	75	80	80	80
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	75	76	77	78	79	80
6	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	-	75	76	77	78	79	80
7	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	70	45	50	55	60	65	70
8	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	Persentase	-	75	76	77	78	79	80
9	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	75	76	77	78	79	80
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1,45	3,33	6,66	9,99	13,32	16,65	19,98
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	%	3	5	10	15	20	25	30
4	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	11,11	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56	66,67
8	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	Persentase	1,45	3,33	6,66	9,99	13,32	16,65	19,98

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase SDM Kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan Sosial	%	58,66	58,66	59,81	64,59	69,38	74,16	78,95
12	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke	%	40	45	50	60	75	90	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	rencana tenaga kerja								
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	10	15	20	40	60	80	100
3	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	70	72,5	75	77,5	80	82,5	85
4	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian	%	-	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75
5	Persentase Pekerja Informal	%	68,51	68,25	68	67,75	67,5	67,25	67
6	Jumlah perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Perusahaan	5	5	5	5	7	9	11
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	Indeks	-	5	10	15	20	25	25
2	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	59,91	73,03	73,28	73,53	73,78	74,03	74,28

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	56,07	58,06	61,76	65,46	69,16	72,91	72,91
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	-	62,29	68,29	74,29	80,29	86,44	86,44
8	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	-	4	5	6	7	8	9
9	Jumlah keluarga yang mendapatkan pendampingan dan pelayanan puspaga	Keluarga	-	100	110	120	130	140	150
10	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan	Persentase	-	50	55	60	65	70	75
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
1	Rata-rata konsumsi energi	Kkal/Kapita/Hari	1.947,38	1.954,65	1.961,92	1.969,19	1.976,45	1.983,72	1.990,99
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	17,93	18	18	18	18	18	18
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	1,02	1,02	1,02	1,02	0,5	0,5	0,5

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	-	62	64	66	68	70	72
5	Koefisien Harga Beras Medium di tingkat konsumen	%	-	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10	5-10
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								
1	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Laporan Hasil Penyelesaian masalah ganti Kerugian dan penanganan sengketa tanah yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	50	55	60	65	70	75	80
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,29	83,48	83,58	83,68	83,78	83,88	83,98
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	58,75	74,17	74,37	74,57	74,77	74,97	75,17

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase penanganan persampahan	%	41,47	41,1	42,8	52,5	60,5	65	71
4	Persentase RTH	Persentase	5	6	7	10	12	16	20
5	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	-	90	95	100	100	100	100
6	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	18,97	20,51	22,05	23,59	25,13	26,67	28,21
7	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	42,49	68,29	68,33	68,37	68,41	68,45	68,49
9	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	-	100	100	100	100	100	100
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	-	99	99	99	99	99	99
2	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	-	99	99	99	99	99	99

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	64,79	65	66	67	68	69	70
4	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	9,71	9,8	9,9	10	10,1	10,2	10,3
5	Persentase Informasi Kependudukan yang Di manfaatkan	Persentase	-	99	99	99	99	99	99
6	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	-	99	99	99	99	99	99
7	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	-	99	99	99	99	99	99
9	Jumlah Perjanjian Kerjasama Pelayanan Dokumen Kependudukan dengan Mitra	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	18,39	23,87	29,35	34,83	40,31	45,79	50
2	Jumlah Desa Mandiri	Desa	189	43	55	56	57	58	59

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	Persentase	15,9	20,51	25,64	30,77	35,9	41,03	46,15
6	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Fasilitas Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,3	56,6	58	59,3	60,8	62,2	63,7
2	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	-	85,2	85,8	86,4	87	87,7	87,7
3	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	81,6	82,7	83,6	84,9	86	87,1	88,2
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,44	2,44	2,33	2,22	2,11	2,00	1,89
5	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9,6	10,5	10	9,5	9	8,5	8

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	76	76	78	80	82	84	86
7	Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	%	83,9	90	90	90	90	90	90
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	11,2	11,2	11	10,8	10,6	10,4	10,2
9	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	20,3	21,4	22,6	23,9	25,2	26,6	28,1
10	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	32,3	32,3	28,68	25,05	21,43	17,80	14,18
11	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	59,2	61,8	61,9	62	62,1	62,2	62,2
12	Kelompok sasaran yang memperoleh pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK)	%	93,91	90	90	90	90	90	90
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								
1	Jumlah Fasilitas Udara yang tersedia	%	-	-	50	55	60	65	70

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Sarana, Prasarana, Informasi, Koordinasi dan Disiplin Angkutan Penyeberangan dengan kondisi baik	%	69	70,5	72	73,5	75	76,5	78
3	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persentase	76	77,5	79	80,5	82	83,5	85
4	Konektivitas darat	%	76	77,5	79	80,5	82	83,5	85
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Jumlah OPD yang Memanfaatkan Layanan Pusat Data Pemerintah	%	-	74	80	85	90	95	100
2	Persentase Jumlah OPD yang Terhubung Melalui Jaringan Intra Pemerintah	%	-	50	60	70	80	90	100
3	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	-	82	83	84	85	86	87
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	-	0,5	1	1,5	2	2,5	3
2	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	50,77	51,53	52,06	52,57	53,07	53,57	54,05

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	Persentase	54,08	0,57	0,59	0,62	0,64	0,67	0,69
4	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase	16,78	17,9	18,79	19,65	20,5	21,33	22,15
5	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	%	-	0,11	0,14	0,16	0,18	0,2	0,23
6	Persentase usaha mikro yang naik kelas	%	0,77	0,79	1,64	2,56	3,55	4,65	5,77
7	Persentase usaha mikro yang menjadi wisnrausaha	%	-	6,8	7,03	7,89	8,03	8,71	8,91
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase	-	90	91	92	93	94	95
2	Persentase Fasilitas Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	-	80	82	84	86	88	90
3	Persentase Kegiatan/ Media Promosi Penanaman Modal Per Tahun	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persentase	-	80	82	84	86	88	90

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Rp	719.004.187.881	742.947.027.337	772.664.908.431	809.366.491.581	853.881.648.618	907.249.251.657	970.756.699.273
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA								
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	-	1	2	3	4	5	6
2	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	-	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
3	Persentase Atlet yang masuk Pelatda	%	-	70	72	75	78	80	82
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
1	Persentase tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral	%	-	53,8	55	56	58	59	60
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
1	Persentase OPD yang telah menerapkan prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	%	-	20	25	35	50	70	100
AV	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	42	50	50	52	55,6	60,75	60,75
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	20	22	22	24	26	28	30
3	Jumlah Kunjungan ke Museum	Orang	6.700	7.800	7.800	8.000	8.600	9.100	9.600
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Persentase	78	80	80	80	85	85	85

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan	%	42	48	48	50	53	58	61
AW	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	75,32	76,32	77,32	78,32	79,32	80,32	81,32
2	Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	naskah	1	1	1	1	1	1	1
AX	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	49,57	50	52	54	56	58	60
2	Jumlah Arsip yang dilakukan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan akibat bencana	Arsip	0	5	5	6	7	8	9
3	Jumlah SOP Penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disusun dan ditetapkan	SOP	0	1	1	1	1	1	1
AY	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.218,92	3.400	3.620	3.975	4.285	4.500	4.830
2	Persentase Izin Usaha Peternakan yang Diterbitkan	%	0	20	20	20	20	20	20
3	Rasio kelompok penerima manfaat Prasarana peternakan	%	0	20	20	20	20	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Ton	6.819,42	6.983	7.087	7.194	7.302	7.411	7.522
5	Jumlah POKMASWAS yang dibina	Kelompok Masyarakat	3	3	4	4	4	5	5
6	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	49.894,57	43.423,29	44.639	45.209	45.774	46.078	46.188
7	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	55,56	55,67	55,78	55,89	56,01	56,12	56,23
8	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis PHMS	%	60	60	60	60	60	60	60
AZ	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	-	54,55	59,09	63,64	68,18	72,73	75
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	0,79	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	-	1	2	3	4	5	6
4	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	-	7	9	11	13	15	17
BA	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	%	10,05	2	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	397,06	325	375	415	432	445	450
3	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	%	86,67	86,84	86,93	87,1	87,27	87,44	87,61
4	Persentase Penerbitan STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan)	%	7,28	8,25	9,22	10,19	11,17	12,14	13,11
5	Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa Sawit)	%	208,81	8	8,5	9	9,5	10	10,5
6	Peningkatan Produksi Hortikultura (Jeruk)	%	2,18	2,18	2,19	2,2	2,21	2,22	2,23
BB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
2	Nilai ekspor barang non migas	Rp	20.625.985.973	13.725.172.553	15.097.689.808,3	16.607.458.789,13	18.268.204.668,04	20.095.025.134,84	22.104.527.648,33
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	29,03	30,75	32,29	33,83	35,36	36,9	38,44
4	Persentase Sarana Perdagangan yang	Persentase	-	15,25	16,95	18,64	20,34	22,03	23,73

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ditingkatkan Kualitasnya								
5	Persentase peningkatan penggunaan produk lokal Kabupaten Sambas	%	-	7	7,7	8,4	9,1	9,8	10,5
6	Persentase koefisien variasi antar waktu perkomoditas kebutuhan bahan pokok dan barang penting	%	4,79	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9	1.0-8.9
BC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
1	Persentase Pembinaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	%	13,56	13,62	14	14,29	14,61	14,8	15,23
2	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	Dokumen	-	1	1	1	1	1	1
3	Persentase Peningkatan Produk tersertifikasi halal	%	-	10	12,15	15	17,5	20	22,5
4	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	-	70	75	80	85	90	95
BD	3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI								
1	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	Persentase	21	23	16	20	20	22	24
2	Persentase Infrastruktur di Kawasan Trasmigrasi yang	%	-	-	16	20	24	20	20

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	dibangun dan dikembangkan								
3	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	-	-	20	20	20	20	20
BE	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	71,27	71,5	72,06	78,75	81	83	85
2	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	-	0,44	0,47	0,5	0,53	0,56	0,59
3	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	-	55	60	65	70	75	80
4	Efektivitas Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan akses keuangan daerah	%	-	-	80	85	90	93	95
6	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	99,84	100	100	100	100	100	100
8	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan	%	-	-	85	87	90	93	95

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	pengendalian inflasi daerah								
10	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BF	4.02 - SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
2	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	-	80	80	80	80	80	80
BG	5.01 - PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan	Persentase	97,66	97,66	98	98,5	99	99,5	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	RPJMD dengan RKPd								
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
BH	5.02 - KEUANGAN								
1	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase administrasi pengelolaan aset daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kinerja pajak daerah	%	95,12	85	87	89	91	93	95
BI	5.03 - KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	-	-	100	100	100	100	100
BJ	5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	56	60	65	70	75	80	85
2	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	Persentase	56	60	65	70	75	80	85
BK	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
BL	5.06 - PENGELOLAAN PERBATASAN								
1	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP)	Indeks	0,47	0,51	0,55	0,59	0,63	0,67	0,72
2	Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP)	Indeks	0,72	0,75	0,78	0,81	0,83	0,86	0,89
3	Persentase Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	-	80	82	84	86	88	90
BM	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH								
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	85	85	90	95	96	98	100
2	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Terdefinisi	Terdefinisi	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur
3	Kapabilitas Aparat Pengawasan	Skor	3	3,017	3	3	3	3	4

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Internal Pemerintah (APIP)								
BN	7.01 - KECAMATAN								
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase partisipasi	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	masyarakat dalam perencanaan pembangunan								
9	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
17	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
20	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
21	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
22	Persentase desa dengan tata kelola dan administrasi yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	100
24	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
25	Persentase pelayanan yang terselesaikan di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
BO	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase	-	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	-	38	39	40	41	42	43

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif dan terintegrasi. RPJMD ini memuat visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta strategi dan program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah tahap pertama dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045. Selanjutnya untuk menjabarkan RPJMD Tahun 2025-2029, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Sambas setiap tahunnya.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan stakeholders lainnya dan sangat tergantung dari kesepahaman, kesepakatan dan komitmen bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sambas serta pemangku kepentingan di Kabupaten Sambas dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sambas 5 (Lima) tahun kedepan.

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

